

ASEAN DAN AIPO DALAM KAWASAN YANG BERUBAH

MYANMAR

THAILAND

KAMBOJA

VIETNAM

PHILIPINA

Poltak Partogi Nainggolan

Humphrey Wangke

Simela Victor Muhamad

BRUNEI DARUSSALAM

MALAYSIA

SINGAPURA

INDONESIA

**PUSAT PENGAJIAN DAN PELAYANAN INFORMASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI)
JAKARTA 1997**



NP 1997

ASEAN DAN AIPO DALAM KAWASAN YANG BERUBAH



*Poltak Partogi Nainggolan
Humphrey Wangke
Simela Victor Muhamad*

**PUSAT PENGAJIAN DAN PELAYANAN INFORMASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI)
JAKARTA 1997**



ASEAN DAN AIPO DALAM KAWASAN YANG BERUBAH



Sanksi Pelanggaran Pasal 44:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
Tentang Hak Cipta.

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menguraunikan atau memperbaik suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiaran, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan denda paling banyak 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). .

ASEAN DAN AIPO DALAM KAWASAN YANG BERUBAH

Peneliti : — Poltak Partogi Nainggolan

— Humphrey Wangke

— Simela Victor Muhamad

Penerbit : Sekretariat Jenderal DPR - RI

Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I)

Bekerjasama dengan Konrad Adenauer Stiftung

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

**Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin dari Penerbit.**

Dicetak oleh :
CV. ERASARI
Jakarta



Untuk parlemen tempat kami bekerja

KATA PENGANTAR

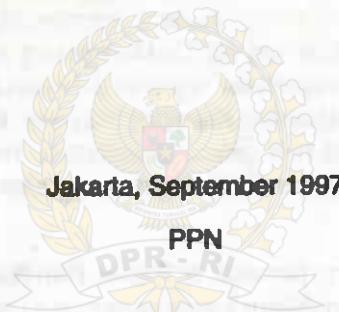
Buku berjudul **ASEAN DAN AIPO DALAM KAWASAN YANG BERUBAH** diluncurkan dalam suasana memperingati 30 tahun berdirinya ASEAN dan 20 tahun berdirinya AIPO. Momentum menjalani dasawarsa ketiga dan kedua bagi kedua organisasi regional di kawasan Asia Tenggara ini, merupakan suatu hal yang berbeda. Karena suasana kawasan di mana ASEAN dan AIPO berada, telah mengalami perubahan. Perang Dingin dinilai telah berakhir dan kini dunia memasuki era baru yang ditandai dengan globalisasi dan perdagangan bebas.

Sebagai peneliti di Pusat Pengkajian dan Pelayanan informasi (P31) DPR RI yang dalam tugas sehari-hari membantu para anggota dewan dan ber-gelut dengan kebutuhan mereka dalam analisis dan kajian masalah domestik dan kawasan, masalah ASEAN dan AIPO, serta perkembangan kawasan di sekitarnya, bukanlah hal yang asing. Sebab itu, di tengah-tengah kesibukan melakukan tugas rutin, kami tetap berusaha untuk dapat menulis dan menuangkan semua hal diatas dalam buku, untuk dapat *di-share* secara luas dan dipertanggung jawabkan, dalam keadaan sesulit apapun.

Keterlibatan kami dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan ASEAN dan AIPO, serta masalah-masalah regional dan internasional, dalam bentuk rapat-rapat, sidang-sidang, konperensi, seminar dan sebagainya, yang telah menjadi potensial dan sangat membantu dalam menulis buku ini. Di sisi lain, semua hal tersebut terlalu berharga untuk dilupakan begitu saja, tanpa disusun menjadi catatan tertulis dan dikaji dalam bentuk buku, yang suatu saat dapat saja akan dimanfaatkan bagi referensi kegiatan semacamnya, maupun untuk kajian yang luas dan mendalam.

Penulis sangat menyadari, apa yang ditulis dalam buku ini tentu tidak luput dari segala kekurangan. Namun, sambil terus belajar dan memperbaiki diri, kita perlu terus berkarya, merekam segala kejadian, menganalisis dan menulisnya. Karena, ia dapat menjadi motivasi dan titik tolak untuk memperbaikinya ataupun memulai kembali dari awal. Sementara, waktu hanya bersifat membatasinya. Obsesi untuk mempersesembahkan sesuatu kepada parlemen tempat kami bekerja selama ini, memberikan dorongan yang kuat

bagi kami untuk menerbitkan karya-karya tulis kami ini dalam bentuk buku. Kami berharap, Kami masih dapat menerbitkan karya-karya kami dalam bentuk buku lainnya. Terima kasih pada semua pihak, terutama Konrad Adenauer Stiftung (KAS), yang telah membantu penerbitan buku ini.



Jakarta, September 1997

PPN

DPR-RI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB	I	PERKEMBANGAN KAWASAN MEMASUKI ABAD Ke-21	i
	1.	Kecenderungan Politik Internasional	1
	2.	Klaim Teritorial	3
	3.	Implementasi ZOPFAN	8
	4.	Kebijakan Baru Eropa	11
	5.	Perspektif Ekonomi Kawasan	14
	6.	Regionalisme Ekonomi	25
BAB	II	KEGIATAN PARLEMEN NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN	
	1.	Studi Komite Sumberdaya Kelautan	31
	2.	Sidang umum ke-18 AIPO	32
	3.	Menyambut 20 Tahun AIPO	37
	4.	Beberapa Pertanyaan dan harapan	43
BAB	III	HUBUNGAN ANTAR ANGGOTA ASEAN/AIPO DAN MITRA DIALOG	
	1.	Laos, ASEAN dan Kepentingan Resiprokal	55
	2.	Harmonisasi Hubungan RRC-ASEAN	59
	3.	Peluang Investasi ASEAN, RRC dan Vietnam	64
	4.	Beberapa Isu dalam Hubungan ASEAN-AS	68
	5.	Kawasan Asia Pasifik dan Peran Parlemen	71
BAB	IV	PERLUASAN KEANGGOTAAN ASEAN DAN PELUANG PENINGKATAN KERJASAMA EKONOMI	
	1.	Pendahuluan	77

2.	Paradigma Baru	79
3.	Potensi Anggota Baru ASEAN	81
-	Vietnam	81
-	Myanmar	84
-	Laos	87
-	Kamboja	88
4.	Pengalaman Baru ASEAN	90
5.	Prospek AFTA	94
6.	Goncangan Mata Uang ASEAN	97
7.	Penutup	99
BAB V	PENDEKATAN BARU JEPANG TERHADAP ASEAN DAN KAWASAN	
1.	Pendahuluan	102
2.	Ketimpangan Perdagangan ASEAN-Jepang	104
3.	Masalah Alih Teknologi	108
4.	Perjanjian Keamanan AS-Jepang	113
5.	Urgensi "Doktrin Hashimoto"	115
6.	Penutup	119
BAB VI	UPAYA ASEAN MEWUJUDKAN KAWASAN BEBAS SENJATA NUKLIR DI ASIA TENGGARA	
1.	Pendahuluan	122
2.	Pembentukan NWFZ	123
3.	Pembentukan dan Realisasi SEANWFZ	126
4.	Penutup	132
BAB VII	TANTANGAN ASEAN DAN AIPO DALAM ERA GLOBALISASI	
1.	Isu Demokrasi	134

2. Isu Hak Asasi Manusia	137
3. Pluralisme dan Integrasi Nasional	141
4. <i>Good Governance dan Clean Government</i>	144
5. Isu Lingkungan Hidup	146
6. Masalah Perburuhan	150
7. Perspektif Sosial	153
8. Masalah Tenaga Kerja Asing/Imigrasi	156
9. Masalah Narkotika	160
10. Menuju Perwujudan ASEAN-10	161



BAB I

PERKEMBANGAN KAWASAN MEMASUKI ABAD KE-21

Oleh : Poltak Partogi Nainggolan

Kecenderungan Politik Internasional

Berakhimnya Perang Dingin tidak diikuti dengan terciptanya perdamaian di berbagai kawasan. Ketegangan dunia akibat rivalitas negara adidaya, memang telah surut. Namun, konflik-konflik baru bermunculan di berbagai kawasan, yang sebelumnya tidak merupakan pusat dari ketegangan dalam Perang Dingin atau pun masih termasuk arena perebutan wilayah (*sphere of influence*) yang strategis, seperti konflik internal di Bosnia, Somalia, Yaman, Rwanda, Nigeria, Burundi dan Zaire.

Di tingkat global, corak konflik ideologis berubah dari pertentangan antara dua ideologi besar dunia, yakni kapitalisme dan komunisme, ke bentuk pertentangan nilai klasik, seperti antara Barat dan Timur, demokrasi dan otoriterisme, Islam dan non-Islam, oksidentalisme dengan orientalisme, Islam dan non Islam, oksidentalisme dengan orientalisme, dan sejenisnya. Rivalitas nilai ini dapat menjadi serius dan berkembang ke arah yang *vulnerable*, sehingga dapat menyusut konflik di berbagai tempat, dengan perbedaan nilai yang mencolok. Pertentangan pendapat yang marak belakangan ini antara AS dengan Cina, AS dengan Singapura, Australia-Malaysia, Eropa dan AS dengan Asia, atau antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, merupakan refleksi dari pertentangan ideologis dalam bentuk lain. Isu-isu hak asasi manusia, demokrasi dan lingkungan hidup menjadi basis pertengahan baru.

Pola konflik tidak lagi sangat dipengaruhi faktor internasional akibat rivalitas ideologi yang bersifat meluas, tetapi lebih internal sifatnya. Masalah-masalah domestik yang berlatar belakang ikatan-ikatan kesetiaan yang sempit (Primordialisme) menjadi penyebab konflik, dengan kecemburuhan sosial, tindakan balas dendam antaretnik laten yang baru, bermunculan ketika pengaruh ikatan kesetiaan yang lebih luas (ideologi) surut peranannya. Konflik dimaksud secara umum dikenal dengan nama tribalisme, sementara masalahnya disebut sebagai persoalan etnisitas, yang ada pula diwarnai dengan pembantaian massal atas suatu kelompok etnik tertentu (*ethnic cleansing* ataupun *genocide*).

Masalah-masalah primordial menyangkut agama, kesukuan, kelompok atau golongan, belakangan meminta perhatian besar. Hal ini beralasan, sebab konflik-konflik internal yang tumbuh secara sporadis di beberapa kontinen, latarbelakangnya serupa. Faktor ekonomi atau otoriterisme rejim, hanya menjadi *trigger factor*.

Melihat perkembangan di atas, situasi keamanan kawasan (regional) dewasa ini, jelas tidak aman. Perang Dingin yang telah membuat situasi dunia dilanda ketegangan yang tinggi hingga ke berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara, yang tidak luput dari ajang perebutan wilayah pengaruh negara-negara adidaya, digantikan oleh perang-perang lokal sporadik. Harapan akan munculnya situasi keamanan yang lebih aman di tingkat regional, belum terealisasi. Intervensi negara-negara adidaya yang dapat memperburuk konflik, dalam solusi konflik masih semu. Sebab, semua itu tidak dapat dihindari dari subyektifitas, arogansi dan kepentingan.

Kondisi kawasan Asia Tenggara dalam kenyataannya masih lebih aman dan stabil dibandingkan dengan kawasan lainnya. Jika di masa Perang Dingin kawasan dimaksud sangat rawan sekali dari ajang perebutan wilayah pengaruh negara-negara adidaya, dewasa ini tidak demikian. Perang Dingin ini sekarang telah berubah menjadi tempat penanaman modal asing yang menggiurkan. Kawasan sepanjang pantai Selatan Cina dan Vietnam, telah tumbuh sebagai kawasan-kawasan ekonomi khusus yang mengadopsi sistem kapitalisme yang dulu malah ditentang dan menjad pangkal pertentangan ideologis. Para pelaku perang Dingin, antara lain Cina dan AS, itu sendiri telah mengambil peran baru sebagai pelaku-pelaku ekonomi yang berpikir pragmatis dan semata-mata mencari dan menumbuhkan peluang ekonomi baru.

Jika pada awal berdirinya, AIPO telah mampu merespon perkembangan politik internasional di jamannya, yang dipengaruhi oleh suasana Perang Dingin di kawasan Asia Tenggara, maka pada masa kini, setelah berusia 20 tahun, diharapkan dapat mengantisipasi dan merespon kecenderungan perkembangan dunia dan kawasan, memasuki liberalisasi ekonomi dalam era informasi. Sudah tentu, dibutuhkan penyesuaian kebijakan yang relevan dengan perkembangan. Dulu, ketika ketegangan Perang Dingin dikuatirkan akan mempengaruhi keamanan kawasan Asia Tenggara, yang negara-negaranya sedang sibuk membangun ekonomi domestik mereka, AIPO mengambil sikap yang tepat mendukung ASEAN dalam memperjuangkan konsep Zona Bebas, Damai dan Netral (ZOFPAN) dan Asia Tenggara sebagai Zona Bebas Senjata Nuklir (SEANWFN). Dewasa ini, upaya-upaya untuk menciptakan suasana

yang kondusif bagi implementasi kedua kebijakan tersebut, perlu terus dilakukan oleh AIPO, dengan peningkatan saling pengertian di antara anggota-anggotanya, dan kerja sama dalam menangani masalah yang timbul.

Langkah-langkah lain yang prospektif dan relevan perlu diperlihatkan secara kompak oleh negara-negara anggota AIPO. Sebagai contoh, sikap bersama yang sejalan dalam menghadapi "Doktrin Hashimoto", doktrin Jepang terhadap ASEAN menjelang abad ke-21, yang mengisyaratkan keinginan Jepang untuk mengadakan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) secara berkala dengan ASEAN, untuk meningkatkan hubungan kedua belah pihak, harus segera diambil. Sikap Malaysia dan Indonesia yang mendukung harapan Jepang secara antusias itu, perlu diikuti oleh negara-negara anggota AIPO lain, tanpa harus menomerduakan, bahkan mengenyampingkan, peran RRC, kekuatan besar lain, di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasific. Sebab, pada dasarnya, eksistensi kedua kekuatan besar itu selama ini, sangat menentukan stabilitas kawasan. Sehingga, AIPO patut memasukkan "Doktrin Hashimoto" dan implikasinya terhadap eksistensi RRC di kedua kawasan tersebut, sebagai agenda pembicaraan yang penting dalam sidangnya. Di sisi lain, ketegangan yang mungkin muncul akibat kompetisi kepentingan ekonomi yang ketat di era perdagangan/pasar bebas, menuntut pula antisipasi sejak dini, melalui penyusunan berbagai bentuk peraturan yang bersifat seimbang dan adil (*fair*), serta protektif terhadap kepentingan bersama di kawasan.

Klaim Teritorial

Potensi konflik di kawasan Asia Tenggara tetap ada, berupa klaim atas suatu wilayah, pulau atau kepulauan. Dimensi konflik tidak semata-mata sebagai upaya merebut wilayah pengaruh, sebagai batu loncatan untuk membangun kekuatan lebih besar lagi, yang pada akhirnya bertujuan membangun hegemoni atau menjalankan imperialism, sesuai dengan teori domino pada masa Perang Dingin, tetapi sebagai upaya memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi secara langsung. Jelas diketahui pulau-pulau di wilayah Laut Cina Selatan, seperti di Kepulauan Spratly dan Paracels, memiliki sumberdaya alam yang potensial, terutama minyak bumi, gas alam dan ikan. Banyak pihak tertarik, tidak hanya negara-negara yang terletak di kawasan tersebut, seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei, Vietnam, RRC dan Taiwan, namun juga negara luar seperti AS yang telah siap dengan tawaran eksplorasi melalui perusahaan-perusahaannya.

Potensi konflik yang begitu rawan di Kepulauan Spratly dapat dilihat dari beberapa kejadian beberapa tahun belakangan, seperti antara RRC dan Filipina, yang sempat menimbulkan ketegangan yang memuncak di kawasan. Manuver-munuver militer kedua negara dapat pecah menjadi konflik terbuka yang berbahaya dan mengganggu stabilitas kawasan, jika saja kedua negara tidak dapat menahan diri. Hingga saat terakhir, antara RRC dan Filipina masih saling mengkritik tentang perkembangan situasi di Kepulauan itu. Diinformasikan, upaya Filipina memperbaiki jalur pasukannya dalam rangka peninjauan ke pulauan yang terpencil dan merenovasi landasan darurat yang sudah ada pada 30 Desember 1996 (*Pelita*, 31 Desember 1996 : 11), tanpa penempatan suatu garnisun baru, mendapat ancaman RRC. Sebagai reaksi, RRC melalui Kedutaan Besarnya di Manila telah menyatakan bahwa RRC "memiliki kedaulatan yang tidak dapat dibantah lagi" atas kepulauan di Laut Cina Selatan dan mendorong Filipina untuk tidak melakukan aksi yang dapat merusak hubungan antara keduanya.

Upaya mengubah potensi konflik di Laut Cina Selatan melalui lokakarya Penganganan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan yang telah berjalan selama 7 tahun, belum berhasil mengembangkan dan melaksanakan berbagai kerja sama sebagaimana yang diharapkan sebelumnya. Selama ini ASEAN memang telah menyediakan suatu kerangka umum dan mekanisme spesifik bagi pelaksanaan diplomasi multilateral dalam semangat preventif. Dan bahkan, Forum Regional ASEAN (ARF) telah mensahkan dan menjadikan prinsip-prinsip ASEAN, *Treaty of Amity and Cooperation* sebagai suatu instrumen diplomasi yang unik bagi saling pembentukan, saling percaya regional, diplomasi preventif, serta kerja sama politik dan keamanan. Tetapi, hal tersebut belum memberikan solusi komprehensif terhadap konflik Spratly.

Langkah RRC dengan mensahkan UU nasional, yang secara unilateral menentukan garis wilayah (*baseline*) dengan kordinat-kordinat baru di wilayah Utara Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Paracels yang diklaim Vietnam dan Taiwan, telah melahirkan kekuatiran baru. Karenanya dapat dipahami, dalam sidang tahunan para Menlu ASEAN di Jakarta pertengahan 1996, Menlu Indonesia, Ali Alatas, mengungkapkan adanya *aide-memoire* yang disampaikan pemerintah Indonesia kepada Duta Besar RRC di Jakarta, berkaitan dengan keputusan RRC memberlakukan UU baru tentang wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Sebelumnya, penetapan kordinat-kordinat wilayah perbatasan laut RRC ini telah mengundang reaksi kecaman Vietnam

dan Filipina (*Kompas*, 31 Desember 1996, 3). *Aide-memoire* yang menggambarkan *baseline* secara lurus di sepanjang daratan RRC dan menggabungkan 2 titik terluar Kepulauan Cina untuk mengukur wilayah kelautan, yang menurut Indonesia tidak sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) soal penarikan garis dasar di sepanjang wilayah pesisir itu, hingga buku ini ditulis, tidak dijawab RRC.

Indonesia kuatir, cara penetapan wilayah maritim seperti yang dilakukan RRC dalam menentukan *baseline* di Kepulauan Paracels, akan berpengaruh terhadap penetapan klaim kedaulatan seluruh Laut Cina Selatan dan akan bersinggungan dengan wilayah kedaulatan Indonesia, khususnya di sebelah Utara Kepulauan Natuna. Dilihat secara menyeluruh, semakin lama tertundaanya solusi konflik atas klaim-klaim wilayah kepulauan di Laut Cina Selatan dalam wujud kerja sama yang memuaskan semua pihak, akan semakin mudah pula pecah konflik yang tidak diinginkan, sebagaimana yang telah diindikasikan selama ini. Walaupun disadari keseimbangan kekuatan dan peran negara-negara besar di kawasan Asia Pasifik dapat memberikan landasan yang sehat bagi upaya lebih jauh negara-negara anggota AIPO untuk menciptakan tata regional baru di kawasannya, tetapi AIPO tetap harus terpanggil untuk memanfaatkan sebagai forumnya membahas potensi konflik di Laut Cina Selatan tersebut secara lebih mendalam dan tuntas, dengan negara-negara mitra dialognya, terutama RRC. Gagasan PM Thailand, Chavalit Yong-Chaiyudh, yang dikemukakan di Manila pada 30 Januari 1997, untuk membentuk Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Laut Cina Selatan, dapat membantu mengubah dengan cepat Kawasan Laut Cina Selatan yang miskin kerja sama serta rawan klaim teritorial dan konflik, menjadi kawasan yang menggairahkan yang ramai dengan kerja sama ekonomi.

Dalam lingkup yang lebih kecil, klaim teritorial antara Indonesia-Malaysia atas Sipadan-Ligitan, masih berlangsung, hingga saat buku ini disusun. Sengketa kepemilikan telah dipermasalahkan sejak tahun 1969. Klaim Indonesia atas pulau itu didasarkan pada perjanjian Belanda dan Inggris di jaman penjajahan Belanda, yang dikenal sebagai konvensi 1891. Sedangkan Malaysia yang menggunakan peta peninggalan Inggeris mengaku Sipadan sebagai wilayah Sabah, karena menganggap Belanda telah menyerahkannya pada Inggris. Indonesia berpendirian kedua pulau tetap masuk wilayah perairan Indonesia, terutama bila ditarik garis batas lurus di Pulau Sebatik (Kalimantan Timur), yang telah dibagi dua antara Indonesia dan Malaysia. Tetapi Malaysia berpendapat,

garis batas tersebut hanya berlaku untuk Pulau Sebatik. Karenanya, kedua pulau itu tetap masuk wilayah Sabah, Malaysia Timur. Sehingga, dalam pertemuan kedua Menlu di Malaysia, 10 Oktober 1991, disepakati untuk mempertahankan kedua pulau dalam status quo, sambil terus membicarakannya dalam Komite Bersama Indonesia-Malaysia.

Selanjutnya, pada tahun 1994, kedua negara sepakat mengangkat *special representatives*, yakni Mensesneg Moerdiono dan Wakil PM Datuk Anwar Ibrahim untuk membicarakan masalah dimaksud. Hasilnya, keduanya sepakat mengusulkan kepada Presiden Soeharto dan PM Mahathir Muhammad untuk membawa masalah itu ke Mahkamah Internasional. Dan saat berkunjung ke Malaysia Oktober 1996, Presiden Soeharto dalam pertemuannya dengan PM Mahathir sepakat menyetujui usulan membawa sengketa Sipadan-Ligitan ke Mahkamah Internasional. Sebagai persiapan, Indonesia dan Malaysia membentuk sebuah tim tingkat pejabat tinggi (*Senior Official Meeting*) untuk memformulasikan masalah yang sebenarnya (*joint submission*) bagi kedua negara untuk dibawa ke Mahkamah Internasional. *Senior Official Meeting* telah bertemu pada 6 dan 7 Januari 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, dan sepakat menyusun perjanjian yang bakal menjadi dasar bagi Internasional *Court of Justice* dalam melakukan proses peradilan masalah kedaulatan Sipadan-Ligitan. Tanpa bermaksud menilai negatif formula penyelesaian masalah seperti itu, patut diingatkan bahwa, mekanisme penyelesaian konflik secara damai sebagaimana yang tertuang dalam *Treaty of Amity and Cooperation* yang dimiliki ASEAN, tetap relevan sebagai cara penyelesaian tuntas konflik di antara negara-negara anggotanya.

Tidak hanya soal pulau, wilayah sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia, termasuk jalur pelayaran Selat Malaka, juga rawan kondisinya, jika tidak dikontrol dengan seksama oleh aparat keamanan kedua negara. Sebab itu, General Border Committee yang telah dibentuk, melalui sidang-sidang rutinnya, perlu terus membahas permasalahan yang selalu muncul. Yang belum dicapai kesepakatannya di sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia adalah, garis batas di Sungai Sinapad dan Sungai Semantipal (perbatasan Kalbar-Serawak), yang menjadi agenda tertunda untuk diselesaikan kemudian lewat tim kedua negara. Di jalur perbatasan Indonesia-Malaysia, bisa saja terjadi insiden yang bisa mengganggu hubungan bilateral, seperti tembak-menembak antara kapal patroli AL dan Malaysia di Sungai Pancang (perbatasan Kalbar-Serawak) pada 16 September 1996, yang menewaskan 2 warga sipil dan marinir

Indonesia. Persepsi terhadap keamanan internal di sekitar perbatasan bisa saja menimbulkan salah pengertian oleh negara yang berbatasan. Langkah Malaysia untuk menutup beberapa pos perbatasan antar negara bagian Sarawak dan Kalimantan Barat, antara lain pos Tebedu (Entikong) untuk mencegah kerusuhan etnik yang telah terjadi di sana tidak meluas ke wilayah teritorial Malaysia, diharapkan tidak menimbulkan persepsi yang keliru. Sudah tentu dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus dapat dibuka kembali selekasnya dan penduduk kedua negara dapat melintas perbatasan secara bebas kembali. Masalah di sekitar wilayah perbatasan lainnya yang menonjol adalah kegiatan penebangan kayu liar yang sulit diberantas, pencurian hasil hutan, pelintas batas yang keluar masuk secara ilegal dan penyelundupan barang dan tenaga kerja.

Negara-negara anggota AIPO diketahui berbatasan wilayah darat dan laut satu dengan lainnya. Sesuai dengan jaman yang berkembang dan untuk menampung aspirasi serta kebutuhan yang meningkat, Persetujuan Lintas Batas (*Border Crossing Agreement*) tampaknya ada yang harus disesuaikan atau diperbarui. Salah satu di antaranya adalah berbagai ketentuan dalam *Border Crossing Agreement* Indonesia-Filipina, yang telah diberlakukan lebih dari 20 tahun. Persetujuan yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto dan Presiden Marcos pada tahun 1975 itu, perlu dipikirkan untuk dikaji ulang kemungkinan-kemungkinan perubahan dan penyempurnaannya. Disadari, kapanpun "pelanggaran perbatasan" dapat saja terjadi. Kasus-kasus nelayan penangkap ikan lintasperairan teritorial, seperti 165 kapal penangkap ikan Thailand yang beroperasi di perairan Pulau Maya, Kabupaten Ketapang, Kalimantan, dan 203 nelayan Filipina yang tertangkap di Bitung dan 65 orang lagi dengan 8 perahu diperairan Halmahera, Maluku Utara, merupakan pelajaran berharga . "Pelanggaran perbatasan" dapat bersifat rawan dan menunggu keamanan wilayah sekitarnya, serta merusak upaya saling pengertian antara negara-negara yang berbatasan perlu senantiasa dibangun dan dipelihara, untuk mempertemukan berbagai kepentingan yang ada melalui dialog-dialog bilateral grup nasional parlemen negara yang bersangkutan, maupun multi-lateral dalam sidang-sidang resmi AIPO. Jadi, proses mencari solusi tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintahan saja, tetapi juga parlemen.

Implementasi ZOPFAN

Pemikiran dan tekad ASEAN yang telah lama dikedepankan, namun yang sampai sekarang masih diperjuangkan realisasinya adalah ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality*) atau Asia Tenggara Sebagai Kawasan Damai, Bebas dan Netral. Karena merupakan pemikiran ASEAN, dengan sendirinya ia menjadi kepentingan AIPO untuk realisasinya. Adapun ZOPFAN merupakan hasil dari Deklarasi Pertemuan para Menlu ASEAN di Kuala Lumpur dari tanggal 26-27 Nopember 1971 dan berkembang dari gagasan netralisasi yang dicanangkan Malaysia. Deklarasi itu menyatakan bahwa Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand bertekad pada tahap pertama melancarkan usaha yang diperlukan guna memperoleh pengakuan dan penghormatan bagi Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas dan netral dari bentuk campur tangan negara-negara besar. Di sini dikemukakan, negara-negara Asia Tenggara harus mengadakan usaha bersama untuk memperluas wilayah kerja sama yang akan menyumbang kekuatan, solidaritas dan hubungan erat di antara mereka. Mereka telah setuju untuk mengadakan konsultasi satu sama lain, untuk menciptakan pendekatan terpadu dalam semua masalah dan perkembangan yang mempengaruhi kawasan Asia Tenggara. Kemudian, mereka telah setuju pula untuk membentuk satu panitia yang terdiri dari pejabat-pejabat senior mereka, yang pada tahap permulaan bertugas mempelajari dan mempertimbangkan langkah apa selanjutnya yang harus diambil untuk mencapai tujuan. (M. Sabir, *ASEAN: Harapan dan Kenyataan*, Pustaka Sinar Harapan, 1992, hal. 118)

Diketahui, banyak perbedaan pendapat yang muncul dalam merampungkan Deklarasi ini, mengingat pada masa itu negara-negara anggota ASEAN tidak terbebas sama sekali, baik dari ikatan, maupun pengaruh negara-negara besar. Pada masa sesudahnya tangan yang datang juga tidak kecil, hingga dewasa ini konsep ZOPFAN masih membutuhkan perjuangan yang tidak kecil dan mendapatkan tantangan dari negara-negara besar yang berkepentingan lain. Kita memang tidak perlu mempermasalahkan siapa yang berperan besar dalam mengedepankan dan memperjuangkan realisasi konsep tersebut pada masa itu dan kini, karena yang penting adalah kesadaran semua pihak akan manfaatnya dalam jangka panjang. Semula, patut diakui, terdapat keraguan di kalangan anggota ASEAN untuk merealisassi secepatnya ZOPFAN. Keraguan mereka pada kemampuan bersama secara mandiri untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan ini, menyulitkan mereka untuk melepaskan ikatan emosional

dan aliansi tradisional yang telah terbentuk dengan negara-negara besar. Padahal, seharusnya mereka berpikir sebaliknya, instabilitas dan gangguan keamanan justru datang jika kawasan ini menjadi ajang perebutan kepentingan negara-negara besar.

Gagasan perwujudan ZOPFAN sebenarnya merupakan langkah pertama sebagai dasar politik keamanan Orde Regional baru. Ini sejalan dengan gagasan awal pembentukan ASEAN, yaitu penciptaan Orde Regional baru dikawasan Asia Tenggara berdasarkan ketahanan nasional dan regional anggotanya. (*ibid*, hal. 122-123) Secara lebih tegas dapat dikatakan, ZOPFAN sesuai dengan Deklarasi Bangkok (1967) dan Kuala Lumpur (1971) yang menyatakan kehendak negara-negara anggota ASEAN agar negara mereka masing-masing dan kawasan Asia Tenggara bebas dari intervensi asing dalam bentuk dan manifestasi apapun, sekalipun disadari, kehadiran negara-negara besar mustahil untuk ditentangkan atau dihalau sama sekali dan bentuk intervensi dimaksud pun, haruslah intervensi langsung dan militer sifatnya. Latar belakang negara-negara anggota ASEAN yang pernah mengalami dan tetap rawan akan konflik internal yang genting, serta sejarah kawasan Asia Tenggara secara menyeluruh dimasa lalu yang tidak luput dari perebutan pengaruh dan kepentingan negara-negara besar yang berkepanjangan, dapat menjelaskan mengapa dibutuhkan proses bertahap untuk merealisasi konsep ZOPFAN, setelah melalui proses "penyegaran kembali" akan pentingnya konsep tersebut, dalam beberapa pertemuan penting ASEAN dan Deklarasi yang dibuat selama ini.

Sebagaimana diketahui, perkembangan baru pasca Perang Dingin di kawasan Asia Tenggara ditandai dengan kian surutnya rivalitas antar negara adidaya. Pangkalan-pangkalan angkatan laut negara adidaya, seperti Subic Bay dan Clark Field milik AS serta Danang dan Cham-ranh yang terakhir dikuasai oleh bekas negara Uni Soviet, kemudian berkurang aktifitasnya dan beralih fungsi. Secara perlahan, peran mereka surut dari kawasan, termasuk AS sebagai pemenang perang dingin ini juga tidak dapat melepaskan dari kondisi ekonomi domestik yang dibebani resesi berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi melambat dan angka pengangguran yang tinggi. Pemotongan anggaran belanja militer dan tekanan efisiensi anggaran membawa dampak pada penutupan pangkalan militer, pengurangan dan penghapusan secara bertahap senjata strategis berkepala nuklir.

Sekalipun situasi di atas amat kondusif dengan implementasi ZOPFAN, tetapi ini bukan berarti tantangan telah lenyap sama sekali. Di dalam negeri, mereka hendak mempertahankan kepeloporan AS sebagai adidaya dunia, khususnya kawasan Asia Tenggara, menginginkan AS tetap memainkan peran yang dominan di kawasan. Perkembangan agresifitas RRC yang menguatirikan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan kekuatan negara-negara di kawasan ini terhadap bangkitnya kembali militerisme Jepang, merupakan "undangan" bagi AS untuk kembali memainkan pengaruhnya di kawasan. Trauma perang Indocina dan ancaman traumatis lainnya yang pernah menyebabkan kondisi instabilitas kawasan yang berkepanjangan di Asia Tenggara, membuka kesempatan bagi negara adidaya AS untuk kembali memperlihatkan kehadirannya. Belakangan negara adidaya lain, di antaranya Perancis, memperlihatkan isyarat untuk dipertahankan hadir secara dominan, sejalan dengan kepentingan ekonomi pragmatisnya yang mendesak di kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu tinggi dan berkembang sangat dinamis dalam beberapa dasawarsa ini.

Dengan kecenderungan keterlibatan kembali negara-negara adidaya yang mendalam, tentu memberi konsekuensi terhadap upaya implementasi ZOPFAN selanjutnya. Tidak mengherankan jika implementasi ZOPFAN mendapat tantangan dari AS, Perancis dan negara-negara kekuatan nuklir lainnya yang mengoperasikan kapal-kapal bertenaga nuklir mereka dalam mendukung kehadiran dan kepentingan mereka dikawasan Asia Tenggara. Karenanya jelas upaya membebaskan kawasan Asia Tenggara dari kepentingan lalu lintas kapal-kapal nuklir negara besar, akan mendapat tantangan kembali, sejalan dengan naik turunnya kepentingan mereka di kawasan ini. Hal itu pula yang telah melatarbelakangi, mengapa baru sekarang (1996/1997), ratifikasi utuh, baik dari negara-negara besar maupun anggota ASEAN/AIPO, terhadap traktat bebas nuklir di kawasan Asia Tenggara, baru dapat diimplementasi. Itupun tidak menjamin pertanyaan-pertanyaan tentang ZOPFAN telah selesai. Sebab, pertanyaan berikutnya akan muncul, yakni apakah ZOPFAN masih perlu dipertahankan dalam perubahan situasi kawasan yang mendasar? Atau, apakah ZOPFAN tidak lebih hanya merupakan kebijakan yang ragu-ragu dari negara-negara anggota ASEAN/AIPO yang kuatir terhadap keamanandan stabilitas kawasannya? Lalu, bagaimana dengan nasib realisasi gagasan pembentukan Kawasan Bebas senjata Nuklir di Asia Tenggara (*South East Asia Nuclear Weapon Free Zone/SEANWFZ*), sebagai rekomendasi Gugus Tugas (*Task Force*) 1982 dan upaya memberi bentuk atas implementasi ZOPFAN, di kemudian hari?

Kebijakan Baru Eropa

Setelah berakhirnya Perang Dingin, pendekatan hubungan antarnegara tidak lagi lebih diwarnai oleh kepentingan politik dan ideologi, tetapi pragmatisme ekonomi. Resesi ekonomi yang melatarbelakangi pertumbuhan yang lambat dan membengkaknya angka pengangguran di Eropa, memotivasi Eropa untuk mencari peluang-peluang baru di kawasan yang menjanjikan. Asia Tenggara dengan angka pertumbuhan yang menakjubkan sejak dasawarsa 70, sangat menarik perhatian Eropa. Sementara Asia sendiri melihat Eropa sebagai mitra alternatif dalam meraih kemajuan bersama. Beberapa dialog multilateral telah dikembangkan, melalui forum pemerintah (ASEAN) ataupun parlemen (AIPO). Dan dalam dialog terbatas ASEAN Uni Eropa Desember 1995 di Karlsruhe, PM Singapura Goh Chok Tong telah meluncurkan ide mengadakan pertemuan para pemimpin tingkat tinggi kedua benua. gagasan yang semula sempat dipertanyakan tingkat keseriusannya tersebut, akhirnya dapat direalisasi dalam waktu yang singkat, setahun sesudahnya di Bangkok pada 2-3 Maret 1996 dengan nama *Asia-European Meeting (ASEM)*.

Hubungan Eropa-Asia selama ini memang diwarnai oleh perdebatan masalah-masalah sensitif hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, tenaga kerja, lingkungan hidup dan sebagainya. Perdebatan Eropa-Asia dinilai telah menjurus pada konflik nilai antara Barat-Timur, khususnya setelah beberapa analisis terakhir dari para futurolog dunia, antara lain Samuel P. Huntington dalam karyanya *The Clash of Civilizations* (1993), telah menyoroti prediksi perkembangannya pasca-Perang Dingin. Penyelenggaraan ASEM I, merupakan salah satu upaya mengatasi kebuntuan akibat perdebatan yang berkembang semakin buruk. Dalam realisasinya, hal itu memang dapat dicapai, walaupun sebelumnya terdapat kekuatiran forum akan kembali menjadi ajang perdebatan masalah dimaksud, termasuk isu Timor Timur yang selalu dijadikan senjata oleh Portugal untuk menyudutkan Indonesia. Negara-negara Eropa dalam ASEM I tampak memperlihatkan sikap pragmatis mengenyampingkan debat kusir atas masalah-masalah internal, subyektif, historis, filosofis dan yang mendasar sifatnya, dan mengantikannya dengan tema-tema pembicaraan yang dapat membuka berbagai kemungkinan kerja sama lebih lanjut.

Berhasil dilaksanakan ASEM I adalah salah satu bukti keberhasilan ASEAN dalam mengelola pekerjaan besar secara bersama menghadapi negara-negara lain yang berbeda latar belakang dan cara pandangannya

dalam ASEM I, komitmen kuat dan saling pengertian yang tinggi ASEAN dapat dibuktikan. Sementara, Eropa juga dapat memperbaiki citra dan posisinya di kawasan Asia Tenggara. Sebagai contoh, Presiden Prancis Jacques Chirac, melalui ASEM I berhasil memperbaiki citra buruk negaranya akibat uji coba senjata nuklir dalam satu semester sebelumnya. Secara lebih mendalam, Presiden Prancis Jacques Chirac dan Kanselir Jerman Helmut Kohl yang hadir, sungguh sangat berkepentingan dengan perjuangan Konsep Asia mereka di ASEM I.

Melalui ASEM I, sejarah baru telah dibuat. Upaya mengembangkan kerja sama ekonomi kedua benua telah dicanangkan dalam forum yang fleksibel, serta bersifat evolusioner dan terbuka bagi negara-negara di kedua benua yang ingin bergabung. Disini memang tidak ada pengaturan kelembagaan. Forum bersifat praktis dalam menggulirkan proses kerja sama pertemuan para pejabat (*Senior Official Meeting/SOM*), Menlu dan menteri-menteri ekonomi. Aspek ASEM dapat di perluas, meliputi kerja sama politik, pendidikan, kebudayaan, lingkungan dan sebagainya. Walaupun dengan area kerja sama yang luas ini dapat muncul perdebatan baru dalam isu-isu sensitif, namun dalam ASEM I, hal tersebut dapat dihindarkan, sehingga yang dominan adalah upaya menggarap peluang kerja sama ekonomi. Karenanya dapat dipahami, bila Presiden Komisi Eropa, Jacques Santer, pada mulanya memperlihatkan sikap pesimis, segera menaruh harapan pada ASEM.

Dari rencana memperkuat kerja sama promosi investasi Asia-Eropa dan forum bisnis Asia-Eropa dalam *Chairman's Statement* yang dibuat, kelebihan penekanan kepentingan ekonomi negara-negara peserta ASEM yang mendasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi pasar, sistem perdagangan multilateral, terbuka, liberalisasi, fasilitasi dan non diskriminasi. Sementara, upaya peningkatan arus investasi telah disepakati melalui perbaikan prosedur pabean, penggunaan *standard comportment* dan pengurangan hambatan masuk hal yang juga menggembirakan, dalam ASEM I semua pihak dapat menerima pernyataan bahwa "dialog antar negara harus didasarkan pada prinsip saling menghargai, kesetaraan menjunjung hak-hak fundamental dan sesuai hukum dan kewajiban internasional, dan didasarkan pula pada prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, baik langsung maupun tidak langsung." Dalam bunyi pernyataan tersebut, kedua prinsip saling dihubungkan (dikawinkan) secara terpaksa. Boleh saja dikatakan, Eropa tidak lagi menggurui dan Asia tidak pula menganggap prinsip yang paling benar. Tetapi,

perlu disadari, hal itu janganlah dinilai secara naif. Karena, absolutisme pemikiran akan muncul lagi setelah pragmatisme kepentingan ekonomi berakhir. Dengan demikian, "janji" pimpinan Eropa untuk membuka pasar lebar-lebar bagi produk Asia, belum lepas dari kendala dibalik rivalitas itu, khususnya bila mengingat sampai sekarang tudingan *dumping* masih dikenakan terhadap komoditi ekspor Indonesia.

Disisi lain perlu disadari, hubungan Eropa-Asia yang kuat dalam ASEM, dapat pula melahirkan rivalitas baru terhadap hubungan Amerika-Asia dalam APEC. PM Malaysia Mahathir telah menyadari ini, dan sebelum ASEM, AS juga telah mengantisipasi dampak bagi hubungan AS-Asia dalam APEC. Walaupun Dubes AS untuk Kordinasi Urusan APEC, Wolf, dapat menghibur diri dengan menyatakan bahwa komitmen APEC lebih jelas, kemungkinan tersebut tidak dapat diabaikan. Dan pekerjaan rumah bagi negara-negara Asia Tenggara adalah menghitung untung-rugi kedua bentuk regionalisme terbuka itu (ASEM dan APEC), mana yang lebih mudah disiasati. dalam hal ini, pernyataan yang relevan untuk diajukan sehubungan dengan eksistensi AIPO dewasa ini adalah, apa peran yang dapat dimainkan AIPO sebagai instansi dalam mendorong perkembangan ASEM ke arah yang lebih bermanfaat bagi kepentingan negara-negara anggota AIPO?

Dalam jangka panjang, patut dijaga agar hubungan antara negara-negara anggota AIPO dan Eropa tidak terganggu dan dirusak oleh masalah-masalah bilateral atau yang tidak ada hubungannya dengan kerja ASEAN-Uni Eropa. Hubungan ASEAN-Uni Eropa yang telah berkembang baik selama 2 dasawarsa ini, diharapkan dapat terus tumbuh sesuai dengan Semangat Dusseldorf yang dicetuskan dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-6 ASEAN-Uni Eropa. Berdasarkan data, Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar ke tiga ASEAN dengan transaksi mencapai 70 miliar Ecus (*European Currency Units*) atau 85 miliar dollar AS wujud barang dan jasa selama priode selama 1994-1995. Bertitik-tolak dari berbagai perdebatan kontroversial yang melatarbelakangi pelaksanaan ASEM I, pelaksanaan ASEM di Singapura 15 Februari 1997 juga tidak luput dari isu-isu hangat seperti masalah hak asasi manusia Timor-Timur dan Myanmar, walaupun, sebagaimana tercetus dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi, Uni Eropa menginginkan hubungan yang erat dengan ASEAN. ASEAN sendiri jauh-jauh hari telah sepakat untuk mencegat upaya Eropa mengangkat isu Timor-Timur dalam Konperensi Tingkat Menteri antarblok ASEAN-Uni Eropa dan antarpemerintah masing-masing ASEAN

bersama RRC, Korea Selatan dan Jepang, dengan 15 negara Eropa dalam ASEM. Keanggotaan Myanmar sebagai pendatang baru dalam ASEAN, sebelum pelaksanaan konferensi di Singapura, telah menimbulkan pertanyaan dari Eropa tentang keanggotaannya dalam ASEM. Sebagai responnya, beberapa pejabat ASEAN telah mengingatkan, peluang untuk memperluas hubungan dengan Uni Eropa dapat mengalami kemunduran jika beberapa perdebatan, di antaranya masalah Timor-Timur, menjadi sorotan utama dalam pertemuan.

Pertemuan Konferensi Tingkat Menteri ASEM di Singapura itu sendiri memfokuskan pembicaraan pada masalah-masalah global dan kerja sama ekonomi, serta pendirian *ASEAN-Europe Foundation* untuk mengembangkan pertukaran kebudayaan rakyat kedua benua. Negara-negara Asia diketahui tidak menyukai isu-isu politik dibahas dalam ASEM, yang sebenarnya difokuskan untuk membicarakan masalah-masalah ekonomi, terutama masalah akses tarif bagi yang lebih rendah bagi ASEAN ke Eropa berdasarkan sistem preferensi umum (*Generalised System of Preference*), mengingat setiap anggota ASEAN memiliki masalah berkenaan dengan hal tersebut. Selain itu masalah ekonomi yang penting dalam perspektif ASEAN untuk dikaji dalam ASEM adalah, kemajuan rancangan aksi promosi investasi dan rencana memperbarui pusat teknologi lingkungan.

Perspektif Ekonomi Kawasan

Kepentingan negara adidaya di kawasan Asia Tenggara tidak lagi bersifat ideologis-politis, tetapi lebih bersifat pragmatis-ekonomis. Karenanya, akan menjadi *concern* yang besar dan kepentingan utama negara adidaya untuk tetap mempertahankan keamanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara atau mereka akan dihadapkan pada pilihan tidak dapat memanfaatkan keuntungan dari perkembangan ekonomi kawasan yang rata-rata di atas 5% pertahun dan tersedianya pasar yang menarik, yang menawarkan banyak kesempatan baru bagi pengembangan investasi mereka.

Mengingat kepentingan semua pihak atas kawasan Asia Tenggara yang memiliki potensi sumber daya alam dan perkembangan ekonomi yang sangat dinamis dibandingkan dengan kawasan-kawasan lainnya, terpiliharnya keamanan dan stabilitas kawasan dengan baik, akan menjadi perhatian dan kepentingan bersama. Sudah tentu hal tersebut harus direalisasi dengan bentuk-bentuk kerja sama yang seimbang dan adil antara semua negara di kawasan

ini, termasuk dengan negara luar yang berkepentingan misalnya AS, Jepang, Australia, Prancis, Jerman dsb. Kerja sama yang seimbang dan adil, yang dapat dikordinasi oleh para negara ASEAN dan anggota AIPO, melalui segala kegiatan dan deklarasi yang dihasilkannya dapat menjamin tercipta keharmonisan.

Konflik-konflik primodial laten berbasiskan ras, etnis, agama dan sebagainya, yang dikawasan lain telah berkembang menjadi gangguan bagi pembangunan ekonomi, dengan demikian dapat dicegah. Dan akan lebih baik lagi jika potensi pencegahan konflik dapat dilakukan sejak dulu, melalui peningkatan kerja sama dan saling pengertian antara bangsa dan pemerintah negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didorong oleh peran asosiasi parlemennya atau AIPO. Dengan demikian persepsi atas masa depan yang baik dan komitmen pada kepentingan bersama akan terus terpelihara.

Kompetisi ekonomi yang tinggi akan menyebabkan masalah proteksionisme ekonomi negara-negara maju akan terus dihadapi oleh negara-negara anggota AIPO. Isu *dumping*, eksploitasi kayu tropis, produk yang tidak ramah lingkungan dan penggunaan tenaga kerja murah dalam proses produksi, tidak dapat dilepaskan dari penilaian telah terjadinya proteksionisme terselubung. Untuk menghadapi tembok-tembok proteksionisme blok perdagangan negara-negara maju, antara lain Uni Eropa, solidaritas dan komitmen untuk meningkatkan kerja sama, harus terus dilakukan, baik kedalam maupun keluar. Menyadari kelemahan dan kekurangan masing-masing, negara-negara anggota AIPO dalam kebijakan eksternalnya, harus memiliki pandangan yang sama dan kebijakan yang komplementer, walaupun terdapat kepentingan yang beragam. Sedangkan secara internal, perlu dipikirkan komitmen memprioritaskan upaya memajukan diri secara bersama lebih dulu, ketimbang memperhatikan kepentingan negara-negara luar yang tidak mendesak dan yang cenderung dapat merusak keutuhan negara-negara anggota AIPO. Sudah tentu, dalam hal ini dibutuhkan pengorbanan egoisme yang tinggi disatu sisi, dan peneguhan solidaritas disisi lain.

Dalam menghadapi perkembangan kawasan ekonomi khusus, blok perdagangan negara di kawasan lain dan langkah proteksionisme negara-negara maju, negara-negara anggota AIPO dapat memformulasikan kebijakan bersama yang baru, seperti saling membantu dalam pembukaan akses pasar dan peningkatan jumlah ekspor. Jelas proteksionisme yang dirancang dalam penentuan kuota dan hambatan masuk (*entry barriers*) lainnya, misalnya penerapan *ecolabelling* dan berbagai jenis ketentuan ISO seperti ISO-9000.

ISO-14000 dan seterusnya, dapat merugikan negara-negara anggota AIPO yang belum siap.

Jadi, dalam menghadapi perkembangan dunia ekonomi yang kian proteksif, negara-negara anggota AIPO perlu meningkatkan pengembangan kawasan-kawasan ekonomi khusus di lingkungannya. Langkah ini tidak dimaksud sebagai tindakan reaktif atas perkembangan serupa di kawasan lain yang dilakukan oleh negara-negara maju, yang tersedia di lingkungan terdekat lebih dulu. Dari sini, setelah potensi terdekat dapat tersedia di kawasan lain, agar bukan negara-negara lain yang jauh lebih maju dalam ilmu dan teknologi pemanfaatannya, malah lebih dulu dapat mengeksplorasi keuntungannya.

Sebagai bahan pertimbangan strategis, kerja sama dalam mengembangkan tenaga-tenaga kerja yang memiliki keahlian, sangat mendesak untuk dilakukan. Agar, potensi negara-negara anggota AIPO tidak hanya dikenal dengan sumber daya manusianya secara kuantitatif dalam wujud jumlah penduduk yang besar (*man power*), tetapi juga dalam kualitas atau keahlian. Sehingga, pengembangan tenaga-tenaga dengan keahlian tinggi di negara-negara ASEAN, sangat diperlukan, selain untuk memanfaatkan pasar tenaga kerja lokal/domestik di masing-masing negara dan kawasan Asia Tenggara, atau mengurangi ketergantungan pada negara maju akibat pemakaian tenaga-tenaga kerja asing, juga dalam rangka menghapuskan citra rendahnya kualitas dan murahnya tenaga kerja domestik di ASEAN. Ini penting untuk melenyapkan kritik negara-negara maju tentang adanya eksplorasi tenaga kerja, di balik pertumbuhan ekonomi yang tinggi negara-negara anggota AIPO. Walaupun di sadari Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) perlu memberikan kebebasan setiap negara anggotanya untuk menerapkan kebijakan sesuai dengan kemampuan kondisi nasional masing-masing dalam waktu yang sedang berjalan, namun solidaritas atas kepentingan bersama dalam kawasan, seperti yang pernah ditunjukkan oleh *Ad Hoc Committee on ASEAN Laws Related to AFTA* tahun 1995 di Singapura, harus tetap dijaga dan dijunjung tinggi. Sehingga, kerja sama lebih luas untuk mempererumkan visi dan kepentingan di antara anggota-anggota AIPO, senantiasa dibutuhkan.

Integritas negara-negara anggota AIPO memang tetap terjaga utuh, tetapi beberapa perbedaan pandangan tetap tampak, seperti halnya dalam AFTA. Beberapa waktu lalu, telah terdapat perbedaan soal jenis dan waktu liberalisasi komoditas pertanian sensitif. Tetapi, dalam sidang Dewan AFTA ke-8 di Bangkok, Desember 1995, untuk pertama kali permintaan RI untuk

memutuskan kembali 15 komoditas seperti beras, gula, bawang putih, cengkeh, terigu dll dari *Temporary Exclusion List* ke *Sensitive List*, disetujui. Sidang menghasilkan *track* baru untuk liberalisasi komoditas pertanian sensitif dari tahun 2003 sampai 2010. Lalu, pada pertengahan AFTA ke-9 di Singapura, permintaan Indonesia mengenai jadwal liberalisasi komoditi di atas, kembali dikukuhkan. Perlu diketahui, sejak awal keputusan itu ditentang Thailand, negara eksportir beras dan produk agroindustri terkemuka di dunia.

Lalu, menjelang ASEM ke-27 di Brunei Darussalam, September 1996, Sultan Brunei Hasanah Bolkiah, pernah mengusulkan agar kawasan perdagangan bebas dalam kerangka AFTA dipercepat menjadi tahun 2000. Sebagai jalan tengahnya, AEM sepakat agar setiap anggota ASEAN diimbau makin memperbanyak dan mempercepat produk yang akan diturunkan bea masuknya secara sukarela pada tahun 2000. ASEAN akhirnya sepakat memangkas tarif atas 38.000 *item* hingga 0-5% pada tahun 2000, dan sampai 0% atas 17.000 *item* pada tahun 2003. Demikian pula disepakati, persiapan akses bagi Kamboja dan Laos untuk mengikuti skema CEPT.

Isu penting yang berkembang dalam AFTA adalah, kapan memulai dan kapan mengakhiri proses pembebasan komoditi pertanian yang belum diolah. Dirjen Departemen Bisnis Ekonomi Thailand, Krirkrai Jirapaet, menyatakan, terlalu lama jika penurunan tarif komoditi pertanian baru dimulai tahun 2010 dan berakhir tahun 2020. Padahal, Indonesia dan Filipina memiliki pengertian yang berbeda dengan anggota ASEAN lainnya, khususnya tentang persetujuan ASEAN soal pembebasan tarif pada tahun 2010 untuk komoditi pertanian yang belum diproses. Komoditi itu kini belum masuk dalam kelompok yang dikecualikan dari penurunan tarif.

Isu komoditi pertanian tidak diolah adalah salah satu isu utama dalam pertemuan Dewan Menteri AFTA. Setiap negara mempunyai sikap tersendiri, sehingga Indonesia dan negara ASEAN lainnya belum sependapat tentang kapan dimulai dan berakhirnya pembebasan komoditi pertanian. Sesuai dengan tingkat perkembangan ekonominya saat ini, Indonesia menginginkan proses pembebasan komoditi pertanian dimulai tahun 2010 dan berakhir tahun 2020. Indonesia dan Filipina memang menginginkan pengunduran dan penurunan tarif komoditi pertanian yang dianggap sensitif. Kedua negara ini menolak batas waktu 2010 sebagai tahap akhir pembebasan komoditas seperti gula, beras, dll.

Atas usul Indonesia, telah ditempatkan kembali sebanyak 15 komoditi

pertanian dalam kelompok sensitif yang sempat disetujui untuk dimasukan dalam kelompok komoditi yang dibebaskan. Indonesia dan Filipina mempunyai alasan yang sangat luat yang membuat mereka dapat *mementahkan* rencana penurunan tarif hingga tingkat minimal, bagi produk sensitif seperti komoditi pertanian, karena menyangkut nasib berjuta-juta petani. Kedua negara tak menghendaki nasib petani mereka merosot akibat beras lokal mereka kalah bersaing dengan beras luar negeri di negara mereka sendiri. Kedua negara menghendaki tenggang waktu yang lebih lama untuk mempersiapkan diri meningkatkan kualitas dan efisiensi produk pertanian mereka. Yang dipersoalkan, mengapa upaya itu sampai memerlukan waktu hampir 1/4 abad, dan bukannya cukup 15 tahun untuk mempersiapkan produk pertanian olahan itu untuk bersaing bebas.

Komoditas pertanian yang masuk kategori sangat sensitif, yakni beras dan gula, diberikan ke Dewan AFTA. Hal itu disebabkan sikap Indonesia yang tidak berubah, yang tetap menginginkan pembebasan gula dan beras baru dimulai tahun 2020. Sebagai responsnya, Thailand menyatakan tidak senang dengan keadaan itu. Bagi Indonesia, keinginan Indonesia bukan suatu kemuduran, mengingat selama ini tidak ada usulan agar komoditas pertanian dimasukan sebagai komoditas yang dibebaskan. Yang terjadi adalah, 15 komoditas pertanian Indonesia yang tadinya masuk dalam TEL (*Temporary Exclusion List*), kini dikeluarkan dari TEL dan masuk dalam kategori sensitif dan highly sensitive.

Seperti diberitakan, sesuai hasil keputusan Dewan AFTA di Singapura April 1996, penurunan tarif produk pertanian yang belum diproses dalam daftar dikecualikan sementara atau TEL (*Temporary Exclusion List*), diundur dari tahun 2003 menjadi 1 Januari 2020. Keputusan itu ternyata diinterpretasikan secara berbeda oleh para anggota. Bagi Thailand misalnya, tahun 2010 adalah masa berakhirnya pengenaan tarif masuk yang tinggi. Tetapi, Indonesia menganggap tahun 2010 adalah mulainya penurunan tarif secara bertahap. Dalam perspektif Indonesia, yang menjadi masalah sehingga tidak ada kesepatan mengenai waktu liberalisasi pertanian adalah, soal cara. Karena itu, Dewan AFTA telah meminta Sekretariat ASEAN untuk memformulasikan kapan dimulainya penurunan tarif, berakhirnya serta berapa tarifnya.

Pada pertemuan di Singapura tersebut, telah disepakati bahwa pada tahun 2010 semua komoditi yang masuk TEL, tarifnya masih akan di atas 5% Sementara menurut Sekjen ASEAN, Dato Ajit Singh, produk pertanian sensitif

bukan masalah besar dan takkan mengganggu AFTA secara keseluruhan. Sebab, hanya 261 item produk pertanian yang akan dimasukan dalam skema penurunan tarif preferensi bersama (*Common Effective Preference Tariff-CEPT*). Sedangkan jumlah produk yang dimasukan ke dalam skema itu mencapai 47.000 item. Dan nilai perdagangan produk pertanian itu hanya 150 juta dolar AS atau 0,05% dari seluruh nilai perdagangan dari produk dalam CAPT.

Negara-negara ASEAN telah setuju bahwa produk pertanian yang tidak diolah (*unprocessed agricultural products*) harus menghadapi AFTA, dan 80% dari seluruh produk itu telah siap. ASEAN hanya belum mencapai kesepakatan tentang pelaksanaan penurunan tarif bagi produk pertanian itu. Keputusan tentang ending year bagi penurunan tarif produk pertanian dimaksud, harus mempertimbangkan secara matang dan tepat alasan-alasan beberapa negara yang memproduksinya. Produk-produk di negara yang bersangkutan.

Mengenai usulan Indonesia untuk mengundurkan waktu pelaksanaan penurunan tarif bagi produk pertanian sensitif, sebenarnya perlu dipertanyakan, mengingat pembangunan dan pemberian proteksi untuk sektor pertanian sudah berjalan cukup lama. Alasan di balik usulan itu, apakah untuk kepentingan pengusaha atau pemerintah? Yang harus dilakukan Indonesia sebenarnya, bukanlah berusaha memundurkan jadwal, melainkan membenahi kondisi perdagangan dalam negeri, dengan cara memperbanyak pelaku dalam perdagangan dan industri produk-produk pertanian. Sebagai contoh, jumlah importir gandum yang tak perlu ditentukan. Bahkan, jika pelaku semakin banyak, akan terjadi persaingan, dan pelaku yang efesien akan mampu bertahan dalam era perdagangan bebas ini. Industri pertanian di Indonesia jelas belum seefisiensi industri serupa di negara lain di ASEAN. Karenanya, jika pembukaan pasar domestik dilakukan terlalu cepat, akibat kelemahan, kita hanya akan menjadi penonton. Namun, hal ini bukan alasan untuk memberikan proteksi secara berkepanjangan.

Perbedaan lain dapat dilihat dari perbedaan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota AIPO yang bervariasi. Selama periode 1993-1994, rata-rata pertumbuhan ekonomi ASEAN 7,47% pertahun, antara lain karena pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dari Singapura (10,1%). Sedangkan Malaysia dan Thailand masing-masing 8,5 dan 8,4; dan Indonesia diurutan tengah dengan 6,8%. Filipina dan Brunei hanya sekitar 4,3 dan 1,8%. Laporan Sekretariat ASEAN ini memang belum melibatkan Vietnam. Memasuki tahun

1995-1996 dengan perkiraan 7,63%, urutan pertumbuhan ekonomi praktis tak banyak berubah. Singapura sedikit menurun menjadi 8,9%, Malaysia dan Thailand relatif sama 8,5 dan 8,9%. Sementara Indonesia sedikit meningkat menjadi 7,2%. Filipina dan Brunei juga mencatat peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,2% dan 2,0%. Pertumbuhan intra-ASEAN yang tinggi pada akhirnya diharapkan dapat merata. Diketahui, keadaan yang berkembang selama ini berlangsung timpang. Tentu saja, ini juga mendesak negara bersangkutan untuk memperbaiki upayanya.

Upaya untuk merebut peluang perdagangan ASEAN senilai sekitar 66 miliar dolar AS, selama ini sudah berlangsung di antara negara-negara anggota AIPO. Selama ini terlihat Singapura dan Malaysia paling banyak merenggut keuntungan itu. Indonesia berada di urutan ketiga, tapi dalam pertumbuhannya terlihat melamban dibandingkan misalnya Filipina. Jadi, Singapura merupakan anggota ASEAN yang secara ekonomi paling kuat. Walaupun dari segi luas wilayah paling kecil, Singapura praktis menguasai lebih 40% dari seluruh total perdagangan ASEAN tahun 1993-1994. Total ekspor dan impor Singapura hampir 200 miliar dolar AS. Angka ini telah diprediksi meningkat menjadi 225 miliar dolar AS pada tahun 1995-1996, dari 616 miliar dolar AS total 140 dari 616 miliar dolar AS perdagangan total ASEAN 1995-1996. Sementara Thailand menyusul dengan 125 miliar dolar AS. Indonesia hanya sekitar 80 miliar dolar AS dan Brunei 4,4 miliar dolar AS. Dari penampilan ini, tampak Singapura dan Malaysia yang paling banyak menikmati peluang perdagangan, yakni masing-masing 3,6 dan 3 miliar dolar AS.

Sedangkan ekspor produk CEPT Indonesia dalam perdagangan intra-ASEAN, telah meningkat 18% dari 4,2 dolar AS tahun 1993 menjadi 5,02 miliar tahun 1994. Angka ini menjadi 5,38 miliar dolar AS tahun 1995 atau tumbuh 7%. Untuk total produk CEPT dan non-CEPT naik 9% menjadi 6 miliar dolar AS, Filipina dan Singapura mencatat paling tinggi peningkatan ekspor CEPT intra ASEAN. Filipina mengalami peningkatan 92%, dari 585 juta dolar AS tahun 1993 menjadi 1,2 miliar dolar AS tahun 1994. Sementara, Singapura meningkat dari 14 dolar AS menjadi 27 dolar AS, Malaysia sebesar 16% menjadi 12 miliar dan Thailand sebesar 17% menjadi 3,3 miliar dolar. Pada periode 1994-1995, ekspor intra ASEAN meningkat 19%. Secara absolut, jumlah perdagangan meningkat dari 55, 65 miliar dolar AS menjadi 66,5 miliar dolar AS. Pertumbuhan itu termasuk komoditi yang masuk dalam kelompok CEPT dan non-CEPT. Adapun negara yang paling menikmati per-

tumbuhan tinggi ini adalah Filipina yang tumbuh 54%, disusul Malaysia 20%.

Khusus untuk Indonesia, ekspornya ke ASEAN hanya meningkat dari 5,38% miliar dolar AS khusus untuk komoditi CEPT atau tumbuh sekitar 7%. Sedangkan total ekspor Indonesia, baik komoditi CEPT dan non-CEPT, ke ASEAN, naik dari 5,5% menjadi 6 miliar dolar AS atau naik sekitar 9%. Peningkatan total perdagangan negara-negara ASEAN tidak sama di semua negara. Hal ini tentu saja menimbulkan benturan dan senggolan kepentingan masing-masing negara-negara ASEAN sebagai suatu kelompok. Itulah sebabnya, masih juga terlihat bagaimana Indonesia dan Filipina tetap mempersoalkan komoditas pertanian. Hal ini pula yang telah memotivasi, mengapa suatu lembaga penyelesaian sengketa, perlu diadakan antara ASEAN, dan juga kesamaan sikap menghadapi APEC dan WTO, sangat diperlukan. Untuk mampu bertarung di pasar ASEAN, setiap negara tentunya harus mengambil produk yang belum diproduksi negara anggota ASEAN lain. Karena itu, diperlukan keterbukaan di antara negara anggota ASEAN dalam *data base* produk yang akan dihasilkan, agar tidak terjadi tumpang tindih produksi.

Indonesia telah mengusulkan agar proses liberalisasi dimulai 1 Januari 2010 dan berakhir tahun 2020. Bersama Filipina, Indonesia juga menolak memasukan produk pertanian beresiko tinggi (*highly sensitive agriculture product*) seperti gula dan beras ke dalam agenda liberalisasi tarif ASEAN dalam batasan waktu tahun 2010. Posisi Indonesia berbeda dengan negara lainnya, antara lain dilatarbelakangi kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara berpenduduk besar. Sekalipun demikian, sikap Indonesia untuk tetap memasukan produk pertanian, khususnya beras dan gula, ke dalam *highly sensitive list*, tidaklah bertentangan dengan kesepakatan APEC. Bagaimanapun juga, Indonesia mempunyai kepentingan nasional yang berbeda, mengingat jumlah penduduk yang berjumlah terbesar, sekitar 200 juta.

Di dalam APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*), Malaysia mencatat sikap AS yang dinilai terlalu ingin memainkan peran yang dominan. Sehingga, *East Asian Economic Caucus* (EAEC) telah dikemukakan PM Mahathir Muhammad yang sempat dianggap kontroversial oleh Australia karena menolak hadir di Blake Island, sebagai kebijakan alternatif menoleh ke Timur (*looks east*), untuk memprioritaskan pentingnya peran Jepang dan negara-negara Asia. Kenyataan menunjukkan, negara-negara ASEAN tidak selalu bersuara sama terhadap setiap masalah regional. Sebagai contoh, Singapura memandang kehadiran AS lebih penting di kawasan Asia Tenggara dan ber-

upaya untuk mencegah penarikan dari negara tersebut. Walaupun Singapura agak kuatir akan penarikan diri AS dari kawasan Asia Tenggara, namun Singapura dan Malaysia tetap mendukung peran yang seimbang kedua negara besar itu dalam APEC. Bagi AS dan Jepang yang menilai penting APEC, hal tersebut tidak menjadi masalah, sejauh itu akhirnya dapat diharmonisasikan dengan segala ketentuan dalam WTO.

Di satu sisi, PM Mahathir Muhammad memprotes keras politik luar negeri AS yang tidak *fair* terhadap umat Islam dunia dan tidak mengakui eksistensi perbedaan visi terhadap hak asasi manusia. Di sisi lain, tokoh Singapura Lee Kuan Yew kuatir apabila segala upaya pengucilan AS akan berdampak negatif terhadap perdagangan, investasi dan komitmen-komitmen keamanan yang telah dibuat. Memang ada yang melihat, ASEAN akan dapat menanggapi kemakmuran dan mencapai tahap integrasi seperti Uni Eropa, tetapi dengan syarat perlindungan keamanan yang disediakan oleh AS dan pasar global yang didukung oleh kesepakatan-kesepakatan dalam APEC.

Di Subic Bay, Filipina, November 1996, AS termasuk negara yang paling antusias mendesak segera dibukanya pasar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tahun 2000. Diketahui, Malaysia mulai tahun depan membebaskan bea masuk impor untuk peralatan gigi/medis, kedokteran, makanan kaleng dan aneka produk kertas. Sedangkan negara-negara anggota AIPO masih menetapkan rata-rata tarif di atas 10% seperti Thailand sebesar 17%, Filipina sebesar 15% dan Indonesia sebesar 13%. Tetapi, ini sudah dapat dikatakan suatu kemajuan bagi komitmen perdagangan bebas. Tiga tahun lalu, Thailand masih mengenaikan rata-rata tarif 40%, Filipina 28% dan Indonesia 20%. Komitmen penurunan tarif tersebut diharapkan dapat menghilangkan kendala peningkatan daya saing dan keterbukaan. Sementara, jika dilihat dari 7 aspek kendala perdagangan bebas (*barrier of trade*), atas unsur pemeriksaan pabean, daftar negatif investasi, standar kualitas, insentif fiskal, insentif pajak, sektor prioritas dan kontrol devisa, di 18 anggota APEC, Indonesia, Malaysia dan Thailand masing-masing memiliki skor kendala 6; Filipina mencatat kendala skor lebih rendah, yaitu 5; dan Singapura terendah sendiri di antara negara-negara anggota AIPO lainnya, yakni hanya 3. Ini jelas menggambarkan ketidaksamaan kesiapan mereka dalam mengantisipasi perdagangan bebas.

Di dalam WTO, inilah perkembangan terakhir posisi negara-negara anggota ASEAN/AIPO. Karena menganggap *built-in* agenda Putaran Uruguay

sebagai program kerja yang sangat substansial bagi pertemuan WTO di Singapura Desember 1996, sejumlah negara ASEAN, yakni Brunei, Indonesia, Filipina dan Thailand, berpendapat, diperlukan mandat dari para menteri di Singapura untuk memulai persiapan (*prepatory work*) negosiasinya, sehingga batas waktu yang telah ditetapkan, bisa dipenuhi. Sebaliknya, Malaysia agak keberatan dengan usulan rekan-rekannya ini, sebab bisa sangat menyita waktu, dari pertemuan yang seharusnya lebih difokuskan ke upaya melakukan review implementasi kesepakatan Putaran Uruguay itu.

Sejak sidang pertama tingkat menteri WTO 8 Desember 1996, perbedaan pandangan secara khusus menghadapkan negara-negara maju, yang dipelopori oleh AS dan Uni Eropa yang menginginkan sidang membahas isu yang lebih luas ketimbang sekedar isu perdagangan, melawan negara-negara berkembang yang dicerminkan kevokalan Indonesia dan ASEAN yang bersikeras menginginkan agenda sidang tidak mendiskusikan isu-isu non-perdagangan. Pembahasan isu sensitif paling banyak mengundang pertentangan kedua kelompok negara itu. Negara-negara maju menghendaki diterapkan dalam dunia perdagangan, termasuk soal standar buruh, kebijakan persaingan dan investasi. Namun ASEAN tidak sependapat dan lebih memilih membicarakan implementasi Kesepakatan Uruguay. Standar buruh, isu yang sejak jauh sebelum sidang dimulai diserukan oleh negara-negara maju, secara bulat ditentang oleh ASEAN, terutama Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Mengenai liberalisasi tarif, Australia dan Kanada mengusulkan perundingan lanjutan tarif sektor industri bisa dimulai tahun 2000, dengan pertemuan Singapura diharapkan bisa memulai persiapan negosiasinya. Tetapi, tentu saja usulan seperti itu ditolak negara-negara berkembang, terutama ASEAN, karena *further liberalization* tidak masuk dalam built-in agenda. Demikian pula menyangkut *government procurement* yang menjadi usulan Kanada dan AS, ASEAN, kecuali Singapura, juga menolak. Alasannya, selain belum melihat adanya manfaat yang bisa diperoleh dari adanya *Government Procurement Agreement* ini, ASEAN menilai pertemuan Singapura bukan forum yang tepat untuk membahas itu. Menanggapi isu regionalisme, ASEAN lebih cenderung pertemuan Singapura menyerahkan wewenang mempelajari implikasi regionalisme terhadap sistem perdagangan multilateral ini kepada *Committee on Regional Trading Arrangement* (CRTA) pasca pertemuan Singapura.

Beberapa isu baru, antara lain mengenai kebijakan investasi, kebijakan

persaingan, standar buruh, suap dan korupsi, serta kesepakatan di bidang teknologi informasi, tidak satupun didukung secara *solid* oleh ASEAN. Argumentasi ASEAN, sebaliknya pertemuan Singapura difokuskan pada pembahasan implementasi kesepakatan Putaran Uruguay dan pelaksanaan *built-in agenda*. Untuk kebijakan investasi, ASEAN menolak tegas rancangan perjanjian multilateral bidang investasi yang telah dirundingkan di Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), dilepaskan ke dalam WTO. Kalaupun itu harus dibahas dalam WTO, ASEAN menghendaki isu tersebut dibicarakan dibawah *built-in agenda*, yaitu dalam perjanjian TRIMs (Trade-Related Investment Measures) atau dimulai di UNTACD. Tetapi, di dalam ASEAN sendiri sebenarnya juga masih ada perbedaan pandangan mengenai isu dimaksud. Indonesia dan Malaysia misalnya, secara tegas menolak isu itu dimasukkan ke dalam agenda WTO, walaupun untuk alasan *educative process*. Sementara, negara ASEAN lainnya tidak keberatan isu itu dibahas di WTO, baik untuk alasan *educative process* maupun *intellectual exercise*.

Perbedaan pendapat ini tentu saja agak menyulitkan ASEAN dalam mengambil posisi bersama untuk menghadapi negara-negara maju dibidang yang bersangkutan. Untuk kebijakan persaingan, ASEAN senada untuk menolak membahasnya di Singapura. Argumentasinya, isu tersebut terlalu luas cakupannya dan tidak memiliki arah yang jelas. Apalagi di WTO sendiri telah ada pasal-pasal yang mengaturnya, seperti pasal 9 TRIMs, pasal 8 dan 9 GATs serta pasal 8, 39 dan 40 TRIPs. Untuk standar buruh ASEAN juga cukup kompak dan senada, sebab lebih bersifat politik daripada perdagangan. Demikian pula dengan isu suap dan korupsi, yang ditolak secara bersama oleh ASEAN untuk dibicarakan di WTO. Karena, isu ini dapat dimanfaatkan negara-negara maju sebagai dalih untuk melakukan proteksi, guna menghambat masuknya ekspor negara-negara berkembang ke negara maju.

Tetapi, mengenai ITA, kritikan mencuat terhadap Indonesia dan Singapura. Kedua negara tersebut dinilai tidak menghormati kebersamaan ASEAN, karena negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia dan Filipina, tidak menandatangani *Information Technology Agreement* (ITA). Idealnya, negara-negara ASEAN memang mempunyai posisi yang sama. Sikap Indonesia yang dianggap kelewat berani, mengingat Malaysia dan Thailand yang kondisi perkembangan teknologi informasinya lebih baik dan merupakan eksportir di kawasan ASEAN, masih belum siap dengan liberalisasi teknologi informasi dan menunggu pasca tahun 2000. Kita tidak bisa berpendapat, ITA

lebih banyak menyangkut kepentingan negara-negara anggota WTO, sehingga jika Malaysia atau Thailand tidak ikut, tidak menjadi masalah. Sebab, yang dilihat di sini adalah kebersamaan ASEAN dalam memperjuangkan kepentingannya.

Mengantisipasi kebutuhan di masa depan, kerja sama lebih luas perlu dikembangkan di bidang ekonomi. Untuk menghadapi implementasi ketentuan-ketentuan WTO secara penuh, dalam tenggang waktu yang masih tersisa, negara-negara anggota AIPO dapat bekerja sama dengan mempelajari apa yang sudah dilakukan pemerintah dan pihak swasta masing-masing selama ini, melalui tukar-menukar pengalaman dan studi kasus. Beberapa pelajaran positif mungkin dapat diambil dan diterapkan. Sementara kasus-kasus spesifik menjadi masukan berharga.

Regionalisme Ekonomi

Perubahan dunia pasca Perang Dingin juga memperlihatkan kecenderungan tumbuhnya model-model kerja sama ekonomi yang tidak berbasiskan kesamaan ideologi, tetapi kedekatan letak geografis. Di Eropa telah berdiri Kawasan Perdagangan Bebas Eropa (EFTA-European Free Trade Area) dan berlakunya Pasar Tunggal Eropa (*European Single Market*). Di Amerika telah dibentuk Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA-North America Free Trade Area). Sedangkan di Asia Tenggara telah dicanangkan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA-ASEAN Free Trade Area), dengan beberapa bentuk kerja sama ekonomi regional yang melibatkan beberapa negara di kawasan yang sama, seperti Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur (BIMP-EAGA : Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina-East ASEAN Growth Area), Segitiga Pertumbuhan Singapura-Johor-Riau (Sijori), Segitiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia-Singapura (IMS-GT), Segitiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia-Thailand (IMT-GT), dan Kawasan Pertumbuhan Sungai Mekong (Mekong River Growth Area), yang melibatkan negara-negara Indocina. Kecenderungan munculnya regionalisme ekonomi, tanpa memerdebatkannya apakah sebagai regionalisme terbuka atau tertutup, dapat pula dikatakan sebagai kecenderungan pemebentukan sub-wilayah pertumbuhan atau sub-wilayah ekonomi beberapa wilayah geografis yang berdekatan, meliputi dua, tiga atau lebih negara ke arah integrasi ekonomi. Orientasinya adalah beberapa penciptaan kawasan pertumbuhan, sebagai zona investasi yang berorientasi ke luar, yang bergeser dari keunggulan komperatif menuju kepada keunggulan kompetitif sub-regional, dengan cara menciptakan

perdagangan (*trade creation*), (Lihat CPF Lululima, et. all. *Sub Wilayah Ekonomi ASEAN dan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN /AFTA/*, 1995).

Segitiga Pertumbuhan Singapura-Johor-Riau (Sijori) bercirikan perluasan (*spill-over*) pusat metropolitan, komplementer, kedekatan geografis dan orientasi ekspor. Jadi, ada perluasan infrastruktur, model dan keuangan dunia yang didukung manajemen dan tenaga ahli. Johor adalah negara bagian Malaysia yang memiliki lahan perkebunan luas, infrastruktur baik dan tenaga kerja setengah terlatih. Dan Riau merupakan propinsi Indonesia dengan tenaga kerja kurang terlatih dan lahan yang lebih murah harganya. Di sisi lain, kedekatan geografi merupakan ciri yang menonjol, yang dapat dihubungkan dengan kapal feri dan dapat ditempuh dalam tempo beberapa jam. Sementara, orientasi ekspor dari produk yang dihasilkan segitiga pertumbuhan ini didukung oleh kondisi keunggulan pelabuhan dan bandar udara di Singapura maupun Malaysia. Sebagai tambahan, kerja sama Sijori juga dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan strategis Singapura akan air tawar.

Adapun kerja sama segitiga pertumbuhan Indocina-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dalam perkembangannya, sejak 7 Maret 1996, secara resmi telah diperluas dengan Sumatera Barat di Indonesia dan Negeri Sembilan, Malaka dan pahang di Semenanjung Malaysia. Dalam wadah kerja ini, telah dibentuk 6 kelompok kerja untuk mendukung kesepakatan 3 materi dari ketiga negara yang terlibat. Indonesia diketahui mengurus kelompok kerja pertanian, sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia dan mobilitas. Sedangkan Singapura bertanggung jawab terhadap kelompok kerja pariwisata dan industri. Pada tanggal 7 Maret 1996 itu telah ditandatangani 3 usaha patungan dan *Memo-randum of Understanding*. Pada perkembangan terakhir, IMS-GT diperluas di pihak Indonesia dengan Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Kalimantan Barat.

Sementara itu, untuk mengusahakan komplementaritas segala sumber daya yang terdapat di sub sub wilayahdi Indonesia, Malaysia dan Thailand, diwujudkan kerja sama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Sub-sub wilayah yang dikembangkan antara lain adalah Sumatera Utara, dengan Medan menjadi andalan pusat pertumbuhan ekonomi. Kemudian, Langkawi dan Penang, yang merupakan kawasan industri, jasa perdagangan dan pariwisata, menjadi pusat pertumbuhan bagi Malaysia. Sedangkan Phuket dan Hat Yai, pintu gerbang pariwisata dan pusat bisnis, diandalkan oleh Thailand dalam kerja sama ini. Kedekatan geografi, sejarah

dan budaya sub-sub wilayah dimaksud, diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi lintas batas dalam skala yang lebih besar. Bagi sub-sub wilayah yang terbelakang, misalnya untuk kawasan Selatan Thailand, jelas IMT-GT diharapkan dapat memberikan implikasi pemerataan pertumbuhan. IMT-GT memberikan peluang untuk mengimplementasikan pengembangan *Southern Seaboard*, sehingga dapat memperkecil ancaman konflik agama di Thailand. Karena, kawasan Selatan negeri itu yang banyak penduduknya memeluk agama Islam, berbatasan dengan Malaysia yang mayoritas penduduknya juga beragama Islam. Jadi, kerja sama segitiga pertumbuhan IMT-GT juga dapat berperan meningkatkan saling pengertian dan hubungan yang serasi antar-masyarakat di perbatasan ketiga negara yang terlibat, yang kelak dapat menjamin stabilitas keamanan di sana.

BIMP-EAGA adalah realisasi KTT ASEAN IV yang telah meletakan dasar dan arah baru kerja sama ekonomi ASEAN. Tujuan pembentukan BIMP-EAGA untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan di daerah perbatasan keempat negara yang terlibat, melalui usaha bersama dengan saling memberikan bantuan dalam wujud sarana pelatihan, penelitian dalam bidang pendidikan, teknologi dan ilmu pengetahuan. Beberapa pertemuan kelompok kerja yang mencakup sektor-sektor penting dan potensial, yang melibatkan pihak swasta secara utuh, telah memberikan hasil yang positif, di antaranya dalam bidang pariwisata, perhubungan udara, perhubungan laut, transportasi dan jasa angkutan, pertanian, agroindustri, kehutanan konstruksi, pembentukan modal dan jasa pelayanan keuangan, pengembangan sumber daya manusia, mobilitas manusia/tenaga kerja dan seterusnya. Diharapkan, dengan usaha bersama dapat terjalin kerja sama yang lebih aktif, untuk mencapai sasaran khusus yang telah diarahkan oleh keempat negara anggota AIPO yang terlibat itu.

Adapun kawasan pertumbuhan Brunei Darussalam yang terlibat dalam BIMP-EAGA meliputi seluruh wilayah negara tersebut. Bagi Indonesia, semula hanya mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, tetapi sejak tahun 1996 diperluas dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Irian Jaya. Di Malaysia, kawasan pertumbuhan yang terlibat adalah Sarawak, Sabah, Labuhan dan Sandakan. Dan di Filipina mencakup Mindanao, sebagian Pulau Zulu dan Palwan. Diketahui, kerja sama ekonomi melalui BIMP-EAGA, juga tidak luput dari berbagai kendala yang dihadapi, yakni faktor ekonomi,

kebijakan dan masalah-masalah prosedural. Sebelumnya, soal sumber alam, faktor produksi, infrastruktur dan pelayanan telah menjadi faktor penghambat. Sementara di masa datang, hal-hal yang berkaitan, dengan kebijakan, peraturan-peraturan, perdagangan lintas batas, investasi dan produksi, diantisipasi akan menjadi kendala. Dengan demikian sebenarnya AIPO dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan kerja sama ekonomi sub-sub wilayah pertumbuhan diantara negara-negara anggotanya, dan menemukan solusi atas berbagai kendala yang ada, dengan memasukkan dan membicarakan semua itu dalam berbagai agenda kegiatannya, mengingat jenis kerja sama ekonomi ini bersifat multilateral.

Respon negara-negara anggota ASEAN/AIPO terhadap kerja sama sub-regional ASEAN begitu antusias, sehingga bentuk kerja sama ini terus dikembangkan. Dari pihak Indonesia sendiri, untuk menyesuaikan langkah dengan realisasi AFTA tahun 2003 dan menyiapkan diri dalam memasuki era globalisasi, telah dilakukan perluasan wilayah-wilayah yang tercakup dalam kerja sama, terutama di luar pulau Jawa dan Bali. Untuk IMT-GT diperluas hingga propinsi Riau, IMS-GT ditambah dengan propinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat. Sedangkan BIMP-EAGA ini mencakup propinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku dan Irian Jaya. Diinformasikan di wilayah dalam kerja sama sub-regional BIMP-EAGA, maskapai penerbangan Filipina, *Corporate Air*, telah *merencanakan* untuk memulai sejumlah penerbangan dalam kwartal pertama tahun 1997, setelah sebelumnya Filipina Airlines melayani rute dimaksud. Demikian pula, kalangan pelayaran Filipina telah membuka 6 jaringan rute dari Kepulauan Mindanao menuju pelabuhan-pelabuhan di kawasan Asia Tenggara untuk mendukung kerja sama BIMP-EAGA.

Sementara terhadap pembangunan jalan KA yang menghubungkan Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok dan Kunming (RRC) dalam rangka kerja sama pengembangan Kawasan Pertumbuhan Sungai Mekong, Indonesia mendukung sepenuhnya. Sebab, walaupun tidak mempunyai hubungan langsung dengan jalur lintas KA itu, Indonesia diperhitungkan dapat mengambil keuntungan dari pembangunan proyek tersebut, misalnya dalam hal rekayasa, pembangunan rel atau penyediaan sejumlah lokomotif. Di sisi lain, minat pihak luar dengan Penanaman Modal Asing (PMA) mereka di berbagai kawasan kerja sama sub-regional ASEAN, memperlihatkan minat yang

menggembirakan. Namun, ini bukan berarti tidak ada kritik atau keluhan terhadap perkembangan kerja sama yang ada, misalnya sejumlah pengusaha kecil di Sulawesi Utara mengeluhkan soal rumitnya pengurusan dokumen barang dagang, baik yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia. Menghadapi perkembangan kerja sama sub-regional ASEAN yang kian pesat dan sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala, AIPO diharapkan dapat mengangkat persoalan yang ada sebagai agenda pembicaraan, dalam upaya untuk membantu mencari solusi dan mendukung berbagai model kerja sama di atas, ke arah yang kian kondusif. Selain itu, alangkah baiknya bila AIPO juga dapat menanggapi secara konstruktif berbagai gagasan baru yang muncul, seperti usul PM Thailand, Chavalit Yong-chayudh, di Manila, yang pada 30 Januari 1997, mengharapkan dapat terbentuknya Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Laut Cina Selatan, meliputi pantai timur Thailand, Kampuchea, Vietnam, RRC bagian Tenggara dan sebagian Filipina yang mencakup Subic Bay, Kepulauan Palawan dan Iloilo City.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Dewi Fortuna. *Indonesia in ASEAN : Foreign Policy and Regionalism.* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Population.* Jakarta : ASEAN Secretariat, 1995.
- ASEAN dalam Lingkungan Internasional yang Berubah.* Jakarta CSIS, 1989.
- ASEAN Free Trade Area.* Jakarta CSIS, 1992
- ASEAN Regional Programme on HIV/AIDS Prevention and Control 1995-2000.* Jakarta : ASEAN Secretariat 1995.
- ASEAN Workshop Report : Trade and the Environment Issues and Opportunities* (Manila, Bangkok, Kuala Lumpur and Jakarta, 11-23 May 1995). Jakarta : ASEAN Secretariat 1995.
- Indorf, Hans H. *Impediments among ASEAN Member States.* Jakarta : ISEAS, 1984.
- Keamanan ASEAN Mencari Identitas.* Jakarta : CSIS, 1993.
- Medium-Term Programme 1990-1998 ASEAN Drug Abuse Control.* Jakarta : ASEAN Secretariat, 1995.
- Perkembangan APEC dan Dampaknya terhadap ASEAN serta Upaya-upaya Pemanfaatannya.* Jakarta : Sekretariat Nasional ASEAN Deparlu. 1995.
- Prance, Saipiroon. *ASEAN Goverment's Attitudes Towards Regional Security 1975-1979.* Singapore : Institute of Asian Studies, 1982.
- Sabir , M . *ASEAN : Harapan dan Kenyataan,* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Soesastro, Hadi. (Ed.) *ASEAN in Changed Regional and International Political Economy.* Jakarta : CSIS, 1995
- The Asia-Pacific Security Dimension.* Jakarta : CSIS, 1994

BAB II

KEGIATAN PARLEMEN NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN (AIPO)

Oleh: Poltak Partogi Nainggolan

Studi Komite Sumberdaya Kelautan

Studi Komite tentang Sumberdaya Kelautan telah diadakan di Jakarta dari 3-4 Juli 1995 untuk memenuhi amanat Resolusi No. 15 GA/94/Res-S-3 dari Sidang Umum AIPO ke-I, yang telah dilangsungkan bulan September 1994 lalu di Manila, Filipina. Peserta Komite Studi adalah Delegasi Parlemen Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Sementara, peninjau dari pemerintah Brunei Darussalam tak hadir. Komite Studi ini dihadiri pula oleh Presiden AIPO yang saat ini dijabat oleh Ketua Parlemen Singapura, Y.M. Tan Soo Khoon.

Pentingnya Komite Studi tersebut adalah untuk menentukan arah dan kebijakan dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan yang menjadi keprihatinan AIPO khususnya dalam mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang. Upaya-upaya signifikan harus dilakukan sebagai komitmen untuk melindungi Sumberdaya Kelautan yang merupakan asset besar ASEANS sesuai dengan semangat Pasal 17 Agenda 21 KTT Bumi yang menyerukan pengelolaan yang terpadu dan pembangunan yang berkelanjutan laut dan pesisirnya (Intisari Pidato Ketua DPR dan Presiden AIPO)

Sebagaimana telah ditentukan oleh Sidang umum AIPO ke-15, bulan September 1994 di Manila, Grup AIPO Indonesia mendapat tugas menyusun *Draft Deklarasi* mengenai Sumberdaya kelautan yang akan dibicarakan, disepakati dan diadopsi dalam Studi Komite yang berlangsung dari tanggal 3-4 Juli 1995 ini. *Draft Deklarasi* yang disusun oleh Grup AIPO Indonesia hasil kerjasama dengan para ahli (*experts*) di bidang terkait, terdiri dari 25 pasal. Adapun *Draft Deklarasi* telah dibahas dalam *Drafting Committee* dipimpin oleh Prof. Dr. Didin S. Sastrapradja dengan dibantu Rapporteur, Eddy Suchaedi. Penyempurnaan dilakukan dengan pembahasan paragraf demi paragraf Mukadimah dan kalimat per kalimat setiap pasal, dengan mendengar pendapat dan saran para anggota *Drafting Committee*, yang diijwai semangat dan solidaritas ASEAN.

Pembahasan dalam *Drafting Committee* telah menyempurnakan *Draft Deklarasi*, yang semula terdiri dari 25 pasal menjadi 20 pasal. Judul Draft Deklarasi juga disempurnakan dari semula bernama *Draft Deklarasi AIPO* mengenai Sumberdaya Kelautan menjadi Draft Deklarasi AIPO mengenai Sumberdaya kelautan dan Pesisir. Dokumen akhir yang telah disepakati itu merupakan bagian dari materi yang akan dibicarakan dan diadopsi sebagai pandangan dan sikap bersama organisasi parlemen ASEAN (AIPO) mengenai sumber daya kelautan dan pesisir dalam Sidang Umum AIPO ke-16 yang akan diadakan pada bulan September 1995 di Singapura.

Sidang Umum ke-18 AIPO

Pelaksanaan, Sidang Umum ke-18 Organisasi Parlemen Negara-negara Anggota ASEAN (AIPO) di Bali dari 1-7 September 1997 yang dibuka secara resmi oleh Kepala Negara RI, dilakukan untuk memenuhi keputusan Sidang Umum AIPO ke-17 di Phuket, Thailand, tahun 1996. Sidang Umum AIPO kali ini sangat istimewa karena bertepatan dengan HUT AIPO ke-20. Kita ketahui, selama 20 tahun keberadaannya, berbagai masalah telah berhasil dihadapi dan itu telah membuat AIPO semakin matang berkiprah di forum internasional. Kemajuan-kemajuan yang berarti telah dirasakan, meskipun masih banyak yang harus ditingkatkan, terutama yang terkait dengan masalah-masalah organisasional, yaitu prosedur kerja, hubungan kerja diantara anggota dan peninjau, serta mengenai partisipasi aktif dari anggota. Dengan kondisi organisasi yang telah semakin baik, AIPO diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.

Sejak memegang posisi sebagai Presiden AIPO, dalam masa jabatan Ketua DPR Wahono, berbagai kegiatan telah dilakukan, antara lain pelaksanaan Komite Studi AIPO tentang implementasi AFTA yang diadakan di Thailand bulan Agustus 1997, serta Sidang Komite Kerja dan Sidang Umum AIPO ke-15 di Bali, Disadari, pertemuan-pertemuan secara langsung antara anggota AIPO dengan parlemen-parlemen negara peninjau sangat penting artinya, karena hal itu dapat memperkecil kesalahpahaman yang ada sebelumnya. Sementara di sisi lain, berbagai dialog yang dilaksanakan selama ini, semakin mendekatkan tercapainya saling pengertian.

Perlu diinformasikan Sidang Umum AIPO ke-18 dihadiri. Oleh anggota delegasi parlemen dari Dewan Rakyat Malaysia, Batasang Pambansa dari Filipina,

Parlemen Singapura, Majelis Nasional Thailand, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Majelis Nasional Vietnam. Di samping itu, Sidang Umum dihadiri pula oleh para peninjau dari negara-negara sahabat yakni Peninjau Khusus dari Brunei Darussalam dan Peninjau dari Myanmar, anggota parlemen dari Australia, Kambodja, RRC, UniEropa, Republik Korea, Laos, Selandia Baru, Papua New Guinea, Federasi Rusia, Jepang dan Kongres AS.

Dalam kesempatan ini, selaku Presiden AIPO dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan juga Grup Nasional AIPO Indonesia, Ketua DPR RI Wahono menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih pada seluruh delegasi dan peninjau atas kesediaan dan kesiapan mereka menghadiri Sidang Umum AIPO ke-15 di Bali. Secara khusus kepada pimpinan negara Republik Indonesia, atas nama AIPO, Ketua DPR RI Wahono akan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada Presiden RI Soeharto karena Beliau berkenan hadir dan akan membuka secara resmi Sidang Umum itu. Kehadiran para pimpinan dan anggota parlemen berbagai negara di Bali, akan memberikan kontribusi yang besar bagi tujuan dan kemajuan AIPO, terutama dalam mempromosikan kerja sama antarparlemen negara-negara anggota ASEAN, memfasilitasi pencapaian kemajuan ASEAN sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Deklarasi ASEAN di Bangkok Agustus 1967, serta dalam mempelajari, mendiskusikan dan memberikan rekomendasi resolusi, terhadap berbagai masalah, demi kepentingan bersama.

Terkait dengan pelaksanaan Sidang Umum AIPO ke-18, bisa saja banyak masalah akan muncul, dan tentu semuanya akan membutuhkan solusi yang membutuhkan konsensus berdasarkan semangat ASEAN untuk kepentingan bersama, Pengalaman AIPO dalam 20 tahun terakhir telah membuktikan bahwa, rasa persaudaraan dan solidaritas yang kuat di antara partisipasi dalam Sidang Umum, telah membuat AIPO lebih mudah untuk mencari solusi terhadap setiap masalah, untuk tujuan menciptakan perdamaian, kebahagiaan dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara secara khusus, dan dunia pada umumnya. Hal ini tentu berkat kerjasama dan komitmen yang kuat dari seluruh peserta, delegasi dan peninjau.

Diketahui, apa yang akan dihasilkan dalam Sidang Komite kerja dan Sidang Umum AIPO ke-18, sangatlah penting. Dan amat disayangkan, bila hal tersebut hanya disimpan sebagai dokumentasi, tanpa ada implementasi atau tindak lanjutnya. Sehingga, patut diingatkan, bahwa misi yang sesungguhnya belum berakhiri. Karena, hasil sidang ini masih harus ditindaklanjuti di

negara masing-masing. Tetapi paling tidak, telah dapat dihasilkan sikap bersama di tingkat kawasan Asia Tenggara untuk menghadapi berbagai tantangan yang telah dan akan kita hadapi di masa yang akan datang.

Terdapat prasyarat, seluruh kegiatan Komite kerja dan Sidang AIPO ke-18 dapat berlangsung dengan lancar dan sukses, jika ada kerja sama yang dilandasi oleh semangat solidaritas dan persaudaraan ASEAN, serta komitmen yang tinggi untuk memperjuangkan kepentingan bersama ASEAN. Segala hasil yang telah dicapai, baik dalam bentuk resolusi deklarasi maupun komunikasi bersama, jelas diharapkan dapat berguna bagi kepentingan rakyat yang diwakili masing-masing secara khusus, dan rakyat di kawasan Asia Tenggara serta dunia, pada tingkat yang lebih luas, sesuai dengan amanat yang telah mereka berikan.

Yang patut pula disampaikan, negara-negara AIPO menyambut baik keinginan parlemen Laos untuk bergabung secara resmi dalam organisasi itu dan mulai hadir sebagai anggota delegasi seperti sekarang ini. Diakui, dalam rentang waktu menunggu momentum acara penerimaan yang bersejarah ini, jelas telah dipertimbangkan dengan tepat situasi akhir yang berkembang di Laos, serta kesanggupan dan kesediaan negara tersebut untuk bekerja sama. Keputusan yang telah diambil tentu patut dihargai, karena dilakukan tanpa perlu dipengaruhi oleh tekanan ataupun paksaan negara luar. Hal itu menjadi bukti dari sikap konsisten AIPO yang sejalan dengan prinsip-prinsip ASEAN dalam mengimplementasikan tekad menolak campur tangan asing (*non-intervention principle*) dalam masalah-masalah internal yang dihadapi setiap negara. Momentum penerimaan secara resmi parlemen Laos ke dalam AIPO, semakin memberi arti dan nilai tambah terhadap sidang-sidang dan segala kegiatan yang kita akan dilaksanakan.

Sehingga, patut pula diimbau dengan kerendahan hati partisipasi yang aktif dari rekan negara baru anggota AIPO, untuk dapat memberikan kontribusi substantif yang maksimal dalam berbagai sidang dan dialog, demi kemajuan bersama. Disadari memang, masalah selalu saja ada, baik di dalam negeri maupun kawasan, begitu pula yang datang akibat pengaruh dunia internasional. Namun, hal itu janganlah membuat AIPO mundur dan menyerah, melainkan menjadikannya tantangan untuk melangkah lebih baik.

Jelas, kalau Organisasi parlemen Negara-negara Anggota ASEAN dapat saling membantu dan selalu bekerja sama bahu-membahu dalam mengatasi

masalah, segalanya akan menjadi ringan dan mudah diatasi. Sehingga, patutlah pula diimbau kesediaan para anggota AIPO yang lebih dulu masuk, untuk memberikan perhatian lebih banyak membantu rekan baru kita ini dalam proses adaptasi dengan berbagai kegiatan dan kebijakan AIPO. Ucapan selamat datang dan selamat bekerja patut disampaikan kepada parlemen Laos sebagai anggota baru AIPO. Diharapkan, kehadiran Laos dapat memberikan sumbangan yang berarti, baik bagi kepentingan nasional negara tersebut maupun bagi masa depan AIPO. perluasan anggota AIPO ini tidak hanya memperlihatkan semakin pentingnya fungsi parlemen di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga menyadarkan kita bahwa, parlemen mempunyai peran penting dalam meningkatkan kerjasama dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

Dari perspektif kritis, kita melihat, Sidang Umum AIPO ke-18 berlangsung di tengah-tengah perkembangan baru pasca perang Dingin yang relevan untuk diperhatikan, mengingat Sidang Umum AIPO ke-18 tidak hanya membicarakan kerja sama di bidang politik, ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara saja, tetapi berbagai dimensi berskala internasional lainnya. Agenda pembicaraan AIPO memang menyangkut pula hubungan AIPO dengan parlemen dari negara-negara non-AIPO, yang disadari dalam era globalisasi sekarang, tuntutan untuk melaksanakan kerja sama dan hubungan yang lebih erat, menjadi kebutuhan yang mendesak. Jelas, dari pengalaman yang sudah-sudah, dalam forum Sidang Umum, negara-negara anggota AIPO mempunyai kesepakatan untuk saling bertukar pandangan, memperkuat hubungan dan memperluas kerja sama dengan parlemen-parlemen dari luar kawasan Asia Tenggara.

Sesudah 20 tahun, kita melihat agenda pembicaraan dalam kegiatan AIPO, berkembang luas. Kita mencatat beberapa peristiwa penting, seperti KTT informal ASEAN, KTT ASEAN-Jepang, ASEAN Regional Forum, berbagai program kerja sama ekonomi antar subkawasan di ASEAN, dan yang tengah menjadi obsesi kita untuk dapat direalisasikan dalam waktu dekat, yaitu ASEAN -10. Semua ini, tentu membutuhkan perhatian dan energi yang tidak sedikit. Padahal di sisi lain, tantangan dan tekanan datang semakin menguat dari luar, dan membutuhkan perhatian serius.

Memasuki usianya yang ke-30 bagi ASEAN dan ke-20 bagi AIPO, kedua organisasi regional itu berkembang menjadi organisasi yang matang dan sedang bersiap-siap memasuki babak baru dalam kerja sama ekonomi yang lebih terintegrasi pada tahun 2003, menuju kerja sama keamanan lebih

komprehensif di kawasan Asia Tenggara dan upaya mempererat kerja sama dan saling pengertian dengan mitra dialognya, untuk membangun dan memelihara perdamaian dunia. Pengalaman dalam beberapa dasawarsa ini bagi ASEAN dan AIPO, tentu dapat dijadikan modal dalam memasuki era baru pasca tahun 2000. Paling sedikit rasa percaya diri yang telah dimiliki oleh masing-masing anggota AIPO dan *confidence building measure* dari organisasi regional tersebut, dapat dijadikan modal dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan, sekaligus sebagai faktor pendorong untuk mencapai tingkat kemajuan yang lebih baik.

Perjalanan waktu selama 2 dasawarsa bagi AIPO, jelas sangat berarti bagi suatu organisasi yang berskala regional. Jika kita melihat ke belakang, berbagai masalah dan tantangan telah berhasil kita lalui dalam rentang waktu 20 tahun ini. Secara jujur dapat dikatakan amatlah sulit rasanya kita dapat mengatasi persoalan-persoalan berat itu di masa lalu mengingat negara-negara anggota AIPO terletak di kawasan yang tidak terlepas dari konflik internal dan pengaruh Perang Dingin global.

Perkembangan yang berlangsung pada masa sekarang, dalam kenyataannya memang telah memperlihatkan hasil yang konstruktif, ini berkat komitmen dan semangat kerja sama yang kuat di semua bidang dari negara-negara anggota AIPO. Sebagaimana diketahui, situasi kawasan Asia Tenggara telah banyak berubah. Politik *Pembendungan* (*Containment Policy*) telah kadaluwarsa dan pendekatan baru tengah diluncurkan, yaitu Keterikatan konstruktif (*Constructive Engagement*), walaupun politik isolasi belum tentu akan berhenti. Sementara tekanan dan pengaruh eksternal tidak pernah surut. Dan bahkan dapat dikatakan, kian menguat akhir-akhir ini.

Perkembangan baru yang muncul di kawasan Asia Tenggara dewasa ini, tampaknya tetap membutuhkan perhatian serius. Masalah Laut Cina Selatan yang memperlihatkan klaim teritorial yang tumpang tindih jelas merupakan salah satu potensi konflik yang serius. Sekalipun tidak semua negara terlibat dengan kadar konflik yang sama, kita menyadari permasalahan yang dihadapi oleh satu negara anggota AIPO, turut dirasakan keprihatinannya oleh negara anggota lain. Ini karena semata-mata dilatarbelakangi oleh semangat solidaritas yang telah tumbuh dengan baik.

Sehingga diharapkan himbauan agar semua pihak yang terlibat dalam klaim teritorial di Laut Cina Selatan menahan diri dan mencegah cara-cara

kekerasan dan opsi militer semoga dapat diindahkan, demi mempertahankan stabilitas kawasan. Sedangkan solusi konflik dengan cara-cara damai, sesuai dengan hukum internasional dan ketentuan ketentuan PBB, perlu kembali ditegaskan kita percaya, cara dan mekanisme yang sama, tentu bisa juga diterapkan terhadap jenis konflik lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Komitmen untuk mempertahankan stabilitas harus diperkuat, demi keamanan kawasan di masa depan. Sebagai konsekuensinya, Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (*Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone*), harus segera dituntaskan ratifikasinya. Demikian pula dengan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama (*Treaty of Amity and Cooperation*), yang perlu membuka diri terhadap partisipasi negara luar. Instrumen hukum sebagai modalitasnya, haruslah dapat diselesaikan secepatnya.

Kita sebagai anggota AIPO berharap berbagai kebijakan alternatif yang telah diintroduksi, tidaklah sia-sia dan dapat diupayakan, menjadi konstruktif dan memberi nilai tambahan melalui proses energi dengan berbagai harapan dan pandangan positif yang dikontribusikan negara-negara lain. Sehingga, perkembangan yang akan berlangsung di kawasan Asia Tenggara dewasa ini dan di masa depan, bukanlah merupakan hasil tekanan, dan bahkan paksaan negara-negara luar, melainkan sebagai hasil pencapaian proses musyawarah yang komprehensif dan kontinu, baik negara-negara di kawasan Asia Tenggara, maupun yang terletak di luar kawasan.

Akhirnya diharapkan, para delegasi dapat bersidang dengan baik, dan seluruh agenda Sidang Komite Kerja dan Sidang Umum AIPO ke-18 di Bali pada 1-7 Septemeber 1997, dapat diselenggarakan dengan lancar. Sudah tentu, solidaritas dan semangat persaudaraan ASEAN harus menjadi landasan bersama dalam mengambil keputusan dan mencapai kesepakatan, untuk kepentingan bersama. Sedangkan pada delegasi Indonesia sebagai tuan rumah, tentu dinanti dapat memberikan sumbangan yang terbaik di setiap diskusi dalam sidang-sidang yang berlangsung.

Menyambut 20 Tahun AIPO.

Tanpa terasa Organisasi Antarparlemen, Negara-negara Anggota ASEAN (AIPO) memasuki usianya yang ke-20 pada tanggal 2 September 1997. Padahal rasanya belum lama organisasi ini didirikan untuk memasyarakatkan ASEAN yang telah 10 tahun lebih dulu berdiri melalui jalur kerja sama

parlemen. Kehadirannya yang memang jelas dibutuhkan untuk lebih meningkatkan kerja sama negara-negara yang tergabung dalam ASEAN itulah, yang membuat kita dulu sangat mendukung realisasi pembentukan AIPO, segera setelah beberapa pertemuan persiapan dilaksanakan.

Kita sendiri baru saja merayakan peringatan 30 tahun ASEAN. Jarak waktu hari kelahiran kedua organisasi regional itu yang saling berdekatan, memperlihatkan betapa dekatnya hubungan antara ASEAN dan AIPO dalam perjuangan memenuhi harapan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Perbedaannya juga tidak banyak, hanya terkait usia dan jalur mekanisme yang digunakan.

ASEAN memang lebih dulu ada, sebagai realisasi dari kebutuhan bersama yang mendesak di antara negara-negara di Asia Tenggara untuk melakukan kerja sama ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan, sambil membangun dan memelihara stabilitas dan keamanan kawasan yang amat rawan ketika itu akibat pengaruh dari Perang Dingin. Sementara AIPO kemudian dibentuk untuk memberikan bobot yang lebih besar pada partisipasi rakyat dalam organisasi kerja sama regional ASEAN, melalui forum kerja sama parlemen. Dengan demikian pihak pemerintah dan parlemen di kawasan Asia Tenggara sekarang benar-benar dapat hadir secara nyata untuk bekerja sama di tingkat regional sebagaimana yang telah diimpikan oleh bangsa-bangsa di kawasan ini setelah Perang Dunia II usai.

Kita lihat ASEAN mengalami perkembangan yang pesat menuju realisasi ASEAN-10, sesuai dengan tekad dan keinginan negara-negara pendirinya dulu. AIPO juga demikian, selalu berupaya melangkah seirama, untuk mendukung kemajuan ASEAN. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) telah dicanangkan dan keduanya telah bekerja sama untuk saling mendukung. Begitu pula dalam menghadapi isu-isu global ASEAN dan AIPO telah menghasilkan kesepakatan yang dapat dijadikan pegangan bersama dalam menyampaikan sikap, oleh bangsa-bangsa di kawasan ini, terutama dalam isu-isu yang kritis, kontroversial dan banyak mendapat sorotan secara subyektif, dari bangsa-bangsa di kawasan lain, seperti isu Hak Asasi Manusia, demokrasi, lingkungan hidup, tenaga kerja dan sebagainya.

Disadari, masih tampak pandangan seolah-olah AIPO tertinggal jauh dan hanya sebagai pelengkap dari kegiatan ASEAN. Ini masuk akal, jika dilihat dari sisi perbedaan waktu berdirinya kedua organisasi regional

tersebut. Namun, pandangan yang sesungguhnya tidak tepat itu bukan berarti mesti dibiarkan. Sehingga, sudah seharusnya menjadi tugas kita semua untuk mendorong dan meningkatkan citra dan kinerja AIPO agar benar-benar tampak sejajar dengan ASEAN, dalam memperlihatkan peran dan eksistensinya.

Kita ketahui, sejauh apapun kemajuan yang telah dicapai, baik oleh ASEAN maupun AIPO, semuanya tidak dicapai dengan mudah. Sejarah mencatat, berbagai halangan dan rintangan telah dilalui. Bahkan hingga saat-saat terakhir penerimaan 2 anggota baru, Laos dan Myanmar, halangan dan tekanan bertubi-tubi datang dari dalam dan luar. Secara jujur, perlu dikatakan, perkembangan tersebut tentu sempat membuat ASEAN dan AIPO untuk melakukan kaji ulang dan evaluasi, yang agak menyulitkan mereka dalam mengambil keputusan. Namun, beranjak dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang telah kita lalui yang jauh lebih berat, halangan dan tekanan yang datang itu, kita anggap sebagai tantangan baru yang memang harus diatasi, sebagai konsekuensi dari perkembangan situasi. Sehingga, ASEAN dan AIPO dapat menentukan sikap secara independen dan mengambil keputusan secara sepakat dan tepat, dengan tetap menerima kedua negara tersebut sebagai anggota harus mereka.

Perang Dingin memang sudah tidak ada. Demikian pula dengan pemblokiran dan rivalitas ideologi. Sedangkan politik domino dan politik pemberdayaan (*containment policy*) sudah usang walaupun belum tentu akan ditinggalkan sama sekali. Tetapi tindakan-tindakan sepihak yang cenderung mengarah pada upaya mencari wilayah kekuasaan dan pengaruh tetap akan ada sejalan dengan kepentingan dan tingkat kompetisi yang meningkat, yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia di masa datang. Di sisi lain, kondisi domestik dan hubungan internasional yang tidak harmonis, tetap akan memancing gejolak.

Hal lain yang turut menandai kesuksesan ASEAN dan AIPO dalam beberapa dasawarsa berjalan ini adalah, keberhasilan kita dalam membangun rasa saling percaya Rasa kebersamaan dan persaudaraan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tampak tumbuh semakin kuat. Sehingga kita selalu bersatu dan solid dalam memperlihatkan sikap ke luar, terutama menghadapi berbagai kritik negara-negara luar yang gencar belakangan ini. Keberhasilan kita dalam menentukan sikap, tanpa didikte oleh pihak lain, jelas menjadi kebanggaan bagi kita, dan merupakan modal berharga untuk menghadapi masalah yang lebih sulit di masa depan.

Diharapkan, rasa persaudaraan harus menjadi dasar dari solusi konflik-konflik regional dan klaim teritorial yang tumpang tindih, di antara negara anggota ASEAN. Dalam hal ini memang dibutuhkan mekanisme penanganan konflik, sehingga dalam menghadapi masalah yang muncul tidak perlu meminta bantuan pihak luar dalam penyelesaiannya. Di samping itu, sikap solidaritas senasib sepenanggungan dari bangsa-bangsa yang sama-sama pernah merasakan kepahitan di masa lalu, harus direfleksikan dengan tekad meningkatkan kerja sama, termasuk dalam mengatasi masalah-masalah domestik klasik yang memiliki karakter penyebab yang sama, antara lain konflik primordial, kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan dan stabilitas politik. Begitu pula terhadap masalah-masalah yang bersifat kontemporer seperti meningkatnya ancaman penyebaran virus HIV dan penyakit AIDS dsb.

Menghadapi globalisasi dan era perdagangan bebas, di bidang ekonomi, persaingan sehat harus kita pupuk tanpa perlu meninggalkan semangat kerja sama yang telah terbentuk, terutama dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia dan teknologi. Negara-negara anggota ASEAN dan AIPO yang taraf teknologi sudah lebih maju, perlu dengan berbesar hati memberikan bantuan dalam pengembangan kerja sama di bidang ini. Sementara, yang telah lebih maju secara ekonomi dibutuhkan kerelaannya untuk membantu pengembangan proyek-proyek dari segi dukungan finansial. Semua ini disadari penting artinya, untuk mengurangi tingkat kesenjangan yang ada, dari sisi ekonomi dan teknologi, Sebab, kerja sama yang dilaksanakan, dalam perbedaan yang mencolok, tentu akan sulit bisa berjalan dengan baik.

Dalam kesempatan berharga ini, seraya mengucapkan selamat datang dan selamat bekerja kepada 2 rekan negara anggota baru, Laos dan Myanmar, kita mengharapkan kesiapan mereka untuk mengikuti berbagai agenda kegiatan yang ada dalam ASEAN dan AIPO. Kita menyadari, tanpa partisipasi yang aktif dari seluruh negara anggotanya, akan sulit bagi ASEAN dan AIPO untuk maju. Karena, sebuah organisasi membutuhkan kerja sama dari anggota-anggotanya untuk maju dan bukan setiap anggota mendahulukan jalan yang diambilnya sendiri-sendiri.

Setelah beberapa dasawarsa perkembangan ASEAN dan AIPO kita menyaksikan perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Bentuk-bentuk kerja sama di kawasan Asia Tenggara kian beragam dan kompleks,

baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Begitu pula dengan ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat dan menjadi landasannya. Kita mengenal model kerja sama yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN dalam AFTA, dan APEC, untuk tingkat yang lebih luas meliputi kawasan Asia Pasifik. Dan belakangan, yang sedang berkembang adalah model-model kerja sama subregional, seperti *Sijori*, *Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle* (IMS-GT), *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle* (IMT-CT), *Brunei Darussalam Malaysia Indonesia-Philippines East Asia Growth Area* (BMIP-EAGA), Kerja Sama Sungai Mekong dst. Sedangkan di pihak lain, kita kita dihadapkan pada keharusan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan internasional dalam WTO. Sebagai konsekuensinya, ASEAN dan APO tidak hanya dituntut untuk dapat bekerja sama, tetapi juga harus efisien, kalau ingin anggota-anggotanya dapat mengambil manfaat dari setiap model kerja sama yang diikutinya.

Kesadaran setiap organisasi kerja sama regional untuk tidak bersifat eksklusif dan tertutup adalah positif sekali. Ini dalam rangka menghindari kompetisi yang terlalu ketat dan berdampak destruktif terhadap kondisi dunia di bidang ekonomi, politik, militer dsb. Sehingga, kita patut terus mendukung pertemuan dan ide melakukan kerja sama antarkawasan, yaitu antara Asia-Eropa atau yang dikenal dengan ASEM. Demikian halnya terhadap kerja sama ASEAN-Uni Eropa yang telah berkembang lebih dulu. Karena, dari setiap kerja sama antarkawasan yang dilakukan, diharapkan dapat terbentuk kinergi yang kuat yang dapat memberi hasil maksimal bagi semua pihak secara seimbang.

Tadi telah diungkapkan, begitu banyak agenda permasalahan yang ada di kawasan Asia Tenggara. Di bidang sosial, masalah pengangguran, tenaga kerja antarnegara (migran), pencegahan dan pengawasan obat terlarang, ancaman penyebaran virus HIV dan penyakit AIDS yang sangat krusial untuk diatasi, serta masalah peningkatan sumber daya manusia dan peran wanita yang memerlukan perhatian, besar untuk mempersiapkan diri menghadapi abad ke-21 yang penuh tantangan. Padahal, sederet masalah-masalah di bidang politik yang krusial, antara lain perkembangan Laut Cina Selatan dan Implementasi kawasan bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) untuk realisasi ASEAN sebagai Kawasan Damai Bebas dan Netral (ZOPFAN), menuntut pula perhatian yang serius.

Walaupun ASEAN telah diakui oleh negara besar sebagai salah satu faktor stabilitas di kawasan Asia Tenggara, tampaknya kita tidak boleh terlena dan lalut mengontrol situasi yang berkembang. Perkembangan di Kambojda dan Myanmar dalam beberapa bulan terakhir menjelang pelaksanaan AMM di Kuala Lumpur dan AIPO di Bali, hendaknya menjadi peringatan bagi kita untuk terus hati-hati mengelola dan memantau stabilitas dan keamanan kawasan. Di atas prinsip nonintervensi yang harus kita pegang teguh, ASEAN ataupun AIPO tentu tidak akan menjadi polisi di kawasan Namun, itu bukan berarti kita akan membiarkan situasi berkembang tidak terkontrol dan vakums sehingga dapat mengundang kekuatan kekuatan luar untuk melakukan intervensi, yang dapat memperkeruh keadaan dan menciptakan rivalitas kekuatan seperti di masa Perang Dingin.

Menghadapi situasi demikian ASEAN dan AIPO tentu diharapkan sangat antisipatif dalam menilai perkembangan kawasan dan tetap solid dalam mengambil keputusan sebagaimana yang sudah-sudah.

Ke depan, ASEAN dan AIPO perlu menyusun suatu visi lebih jauh lagi memasuki abad ke-21 untuk mewujudkan ASEAN sebagai suatu kawasan yang bebas bagi lalu lintas orang, barang serta jasa-jasa kawasan yang tidak hanya mampu mempertahankan tingkat pertumbuhannya semata-mata untuk mencapai status negara maju, tetapi juga membantu untuk membebaskan masyarakatnya dari kemiskinan buta huruf dan pengangguran, serta berada dalam proses untuk menjadi contoh kerja sama kawasan di antara negara-negara berkembang. Jadi patut diingat, visi utama yang harus dimiliki. ASEAN di tahun 2020 adalah menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah yang bebas dari kemiskinan, yang tumbuh berkembang tidak hanya dalam keserasian yang alami tetapi juga dapat menjadi model bagi negara-negara yang setingkat. Dengan demikian, walaupun ASEAN pada tahun 2020 dituntut pula untuk dapat menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang mampu mempertahankan pertumbuhannya yang cepat ia tidak akan megorbankan masa depannya. Sebab, pemerintah dan rakyat di kawasan tersebut akan dituntut senantiasa mampu mengembangkan sumber-sumber alamnya, sekaligus melindungi lingkungannya secara maksimal, demi tercapainya ekonomi ASEAN yang ramah lingkungan.

Karena itu, dalam Sidang Komite Kerja dan Sidang Umum AIPO ke-18 di Bali dari 1-7 September 1997, tersedia forum yang representatif untuk membicarakan berbagai masalah yang dihadapi negara-negara anggota

ASEAN dewasa ini dan yang akan datang yang menyangkut visi jauh ke depan. Berbagai resolusi, deklarasi dan komunikasi bersama yang akan dihasilkan, sebaiknya memang menyentuh berbagai agenda masalah yang menjadi perhatian bersama di atas agar kegiatan AIPO yang amat penting dan bersejarah ini benar-benar dapat dirasakan relevansinya oleh seluruh rakyat di kawasan Asia Tenggara, dan bangsa-bangsa lain, rekan dialog atau pengamat.

Akhirnya, disampaikan selamat bersidang kepada para Delegasi Peserta dan Peninjau Sidang Komite Kerja dan Sidang Umum AIPO ke-18 di Bali yang telah dibuka secara resmi oleh kepala Negara RI. Biarlah segala keputusan dapat dihasilkan dengan semangat persaudaraan, sekalipun harus melalui proses dialog dan adu argumentasi, semata-mata demi menghasilkan yang terbaik. Semoga sidang dapat berjalan dengan sukses untuk kemajuan dan masa depan ASEAN dan AIPO yang lebih baik!

Beberapa Pertanyaan dan Harapan

Dalam kaitannya dengan 20 tahun usia AIPO, berbagai pertanyaan dapat digali sebagai refleksi atas perjalanan selama 2 dasawarsa ini. Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain: Sejauh mana peran dan kontribusi yang telah dimainkan AIPO dalam realisasi gagasan ZOPFAN, yang sejak semula lahir dari kegiatan ASEAN dan telah banyak dibicarakan dalam berbagai agenda ASEAN selama ini?

Apa peran AIPO dalam implementasi Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) APEC dan segala ketentuan yang dihasilkan WTO? Apakah AIPO turut memainkan peran dalam pembentukan kawasan ekonomi antar beberapa negara di kawasan Asia Tenggara atau regionalisme ekonomi yang menilai trend belakangan ini di antara negara-negara anggota ASEAN, misalnya Sijori, BIMP-EAGA, IMS-GT dan Kawasan Pertumbuhan Sungai Mekong? Bagaimanakah respon AIPO terhadap model kerjasama dalam regionalisme ekonomi tersebut?

Kemudian juga, yang lebih spesifik dan relevan dengan perkembangan situasi belakangan ini, adalah apa kontribusi AIPO terhadap upaya peningkatan SDM negara anggotanya dalam menyongsong Abad ke-21? Apa kontribusi AIPO terhadap upaya global dalam mencegah penyebaran virus HIV dan memerangi penyakit AIDS, khususnya di kawasan Asia Tenggara, yang diprediksi di masa depan akan mengalami lonjakan penyebaran? Apa

peran dan kontribusi AIPO selama ini dalam mengatasi persoalan yang muncul di sekitar TKA dan TKW di negara-negara anggotanya? Apakah AIPO melihat masalah imigrasi pekerja asing (TKA) bukan sebuah persoalan yang krusial untuk dibahas dalam forum-forumnya? Bagaimana dengan masalah Flor Contemplacion yang sempat mengganggu hubungan diplomatik Singapura-Filipina secara serius beberapa tahun lalu?

Selanjutnya, dipertanyakan, bagaimana AIPO merespon kritik-kritik terhadap pelaksanaan demokrasi dan tuntutan demokratisasi di masing-masing negara anggotanya, selama ini dan di masa yang akan datang, mengingat kritik terhadap hal itu cenderung meningkat di era pasca Perang Dingin? Apakah kesamaan pandangan dan sikap dapat dicapai dalam menghadapi kritik ini, karena kesadaran masing-masing pihak akan kekurangan yang dihadapi di dalam negeri? Bagaimana AIPO merespon kritik-kritik terhadap pelaksanaan HAM dan tuntutan penghormatan HAM di masing-masing negara anggotanya, selama ini dan di masa yang akan datang, mengingat kritik terhadap hal dimaksud cenderung meningkat di era pasca Perang Dingin? Apakah kesamaan pandangan dan sikap dapat dicapai, dalam menghadapi kritik ini ! karena kesadaran masing-masing pihak akan kekurangan yang dihadapi di dalam negeri?

Dan yang tidak kalah pentingnya pertanyaan-pertanyaan berikut ini: apakah peran AIPO dalam merespon secara positif berbagai kritik dari dalam dan luar terhadap pelaksanaan demokrasi dan HAM? Apakah hanya memperlihatkan respon reaktif dengan mencoba mengeluarkan sikap dan pandangan tandingan! sehingga seolah tampak seperti upaya defensif hendak membela atau mempertahankan pendapat sendiri, yang akibatnya tentu akan turut mendukung terciptanya konflik nilai yang permanen antara Barat dan Timur?

Adakah komitmen resmi AIPO untuk menciptakan *good governance* dan *clean government*? Apa saja yang telah dilakukan AIPO terhadap kedua gagasan tersebut? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang dapat muncul, jika ditelaah lebih dalam.

Patut diingatkan sekalipun kini dunia menghadapi globalisasi, AIPO tetap harus tetap bertitik-tolak dari tujuan-tujuan yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok 1967, yang menjadi dasar statuta AIPO. Dalam era globalisasi, berbagai tantangan dalam bidang politik! ekonomi! politik! sosial dan budaya akan dihadapi AIPO, namun kita tetap harus ingat bahwa dasar dari

berdirinya ASEAN dan AIPO dulu adalah kerja sama dalam bidang ekonomi. Sehingga, yang tetap menuntut perhatian utama dan solusinya adalah segala hal yang terkait dengan permasalahan ekonomi.

Jelas sekali, keberhasilan ekonomi di kawasan Asia Tenggara sangat tergantung pada stabilitas regional. Itu bisa dicapai dengan peningkatan kerja sama kawasan, termasuk melalui AIPO. Sementara, perhatian utama dalam masalah ekonomi adalah bagaimana mempersiapkan diri menghadapi realisasi pasar bebas AFTA dalam waktu dekat. Sebab, AFTA yang benar-benar terkait dengan kerja sama ASEAN. Dalam AIPO soal AFTA telah didukung dengan Deklarasi Singapura tahun 1992. Sikap para anggota AIPO diharapkan jangan lagi permisif dengan mengajukan lebih banyak *sensitive list* tetapi sudah waktunya lebih siap dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas menjelang tahun 2003. Memang anggota ASEAN/AIPO mempunyai tingkat kesiapan yang berbeda, tetapi untuk mengatasi itu bisa dilakukan kerja sama dengan saling membantu, termasuk lewat semacam *economic caucus* saling membantu dalam pengembangan sumber daya manusia.

Achievement yang sangat berhasil dalam AIPO sebagai kontribusi Indonesia yang besar adalah berhasil disusunnya deklarasi AIPO tentang hak asasi manusia deklarasi tentang lingkungan hidup (*Environment and Protection of Wild Life, Coastal and Marine Resources dsb*), dalam hal mana *draft* deklarasi yang telah disusun Indonesia tidak memperoleh perubahan yang berarti. AIPO dalam kenyataannya memang cukup responsif dengan permasalahan aktual yang muncul dan menyangkut kepentingan bersamaan misalnya dengan menyusun resolusi ekonomi mengenai *migrant worker* di Phuket 1996.

Pembicaraan tentang Parlemen ASEAN, ulasananya cukup hangat, sehingga sidang sempat diskors. Sehingga, kita harus siap, bila suatu waktu isu ini dibicarakan kembali. Sedangkan, isu yang krusial yang tetap akan dijumpai di masa depan dalam berbagai agenda sidang AIPO adalah gagasan pembentukan Parlemen ASEAN, yang dinilai oleh Indonesia belum relevan. Gagasan semula Filipina di tahun 1982 dan ditindaklanjuti dengan *in-depth study* telah disepakati masih merupakan bentuk antara, yang membutuhkan waktu untuk direalisasi sebagaimana halnya dengan Parlemen Eropa dan Uni Eropa, yang semula berkembang dari organisasi sederhana. Diharapkan, resolusi-resolusi yang dihasilkan AIPO dapat ditindaklanjuti dengan implementasinya, misalnya liberalisasi ekonomi di dalam negeri Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan berbagai bentuk regulasi. Hasil keputusan sidang AIPO yang

masih menghadapi tantangan dalam implementasinya adalah deklarasi tentang ZOPFAN dan SEANWFS karena masih menghadapi keberatan dari negara-negara besar yang berkepentingan, terutama AS.

Eksistensi dialog-dialog bilateral sangat bermanfaat untuk *me-lobby* kepentingan kita, misalnya penolakan kita terhadap *political crime* kepentingan kita dalam bidang pariwisata dsb. Tidak ada salahnya kita mempelajari prinsip-prinsip nilai dan pandangan dari negara lain sebagai perbandingan dan bahan dalam penyusunan kesepakatan bersama. Yang penting, yang harus menjadi pegangan, agar kepentingan nasional kita juga tidak diintervensi atau diganggu gugat, jangan menyentuh atau mengungkit masalah sensitif yang dihadapi negara lain. Kita harus berusaha membangun *common platform*, dengan melahirkan pemahaman bersama dan menemukan titik temu bidang-bidang yang bisa dijajaki untuk kerja sama. Dan perlu disadari, dialog-dialog sebaiknya diarahkan pada kepentingan kerja sama pragmatis dalam bidang ekonomi.

Untuk memudahkan mencari titik temu dan pemahaman bersama, dibutuhkan program saling kunjung yang lebih intensif, semacam *friendly talks*, dalam frekuensi yang lebih sering, walaupun membutuhkan biaya, mengingat manfaatnya sangat besar. Hubungan-hubungan informal sangat diperlukan untuk lebih kenal lagi dan saling mendekatkan diri. Sehingga, untuk mencari kesepakatan, penyusunan sikap bersama dalam resolusi dan deklarasi, dapat dilakukan dengan lancar, tidak mengalami *deadlock*, nantinya dalam Sidang Umum. Karena itu pula, ini penting bagi grup nasional masing-masing, sifat keanggotaan dalam delegasi AIPO haruslah kontinu, agar para anggota dengan delegasi negara lain saling kenal, lebih dekat, dan akan terbantu dalam mencapai kesepakatan, termasuk dalam masalah-masalah yang sulit. Mutasi atau penggantian anggota dalam delegasi, akan menyulitkan dalam memahami dan menguasai isu, serta perjuangannya di forum-forum sidang.

Adapun permasalahan dalam AIPO terkait Sekretariat Jenderal AIPO adalah perkembangannya yang masih embrional, walaupun sudah lebih maju. Organisasi Setjen harus dikembangkan, dan ini membutuhkan biaya yang besar dengan sistem komunikasi yang baik dan canggih, walaupun disadari belum dapat mencapai sebesar dan semaju Setjen ASEAN. Saran-saran untuk Indonesia dalam penyelenggaraan setiap Sidang Komite Kerja dan Sidang Umum AIPO : siapkan dan lakukan segala kegiatan dengan tepat waktu ; para anggota delegasi perlu menyiapkan *initial paper* untuk resolusi, agar delegasi Indonesia dapat memperjuangkan sebanyak mungkin kepentingan

nasional dan secara maksimal, seperti halnya yang dilakukan pada 1989 di Manila dan tahun 1990 di Jakarta ; harus ada persiapan-persiapan informal sebelum penyelenggaraan Sidang Umum AIPO, dengan mengadakan pertemuan dengan minimal 1 anggota komisi. Jika tidak mungkin, dengan Ketua-ketua Parlemen atau Sekjen masing-masing Parlemen. Sementara, saran bagi peningkatan kerja sama dalam AIPO adalah, perlunya kerja sama yang komplementer ; dengan masuknya anggota baru (Vietnam, Kampuchea, Laos dan Myanmar hingga mencakup 9 anggota dan Brunei tanpa parlemen), tentu perlu penyesuaian status ; perlu peningkatan dana bagi peningkatan berbagai aktifitas AIPO ; perlu memperkuat Sekjen AIPO dengan peran *experts*.

AIPO dapat memainkan peranan dalam mendukung realisasi berbagai gagasan dan kebijakan yang dihasilkan ASEAN, dengan pendekatan *people to people* yang dijalankan oleh wakil-wakil rakyat di parlemen, selain pendekatan *government to government* yang dilakukan oleh pemerintah dan telah lebih dulu dikenal selama ini. Sehingga, AIPO diharapkan meningkatkan perannya dalam memasyarakatkan berbagai keputusan ASEAN. AIPO juga dapat berperan dalam mendukung terciptakan situasi stabilitas yang kondisif bagi pelaksanaan pembangunan berkesinambungan di kawasan Asia Tenggara, khususnya negara-negara anggota ASEAN.

Pola kerja sama dalam ASEAN yang telah berjalan secara mapan, dapat dijadikan model bagi pengembangan kerja sama dalam AIPO. Pragmatisme ekonomi yang memotivasi berdirinya ASEAN, disadari dapat berkembang menjadi rivalitas atau kompetisi ekonomi yang ketat dalam era perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Namun, hal itu tidak akan berdampak negatif terhadap integritas ASEAN, karena daya kohesi ASEAN dinilai cukup tinggi.

Terkait dengan realisasi perdagangan bebas ASEAN (AFTA) mulai tahun 2003, AIPO diharapkan dapat berperan besar dalam menciptakan keputusan yang kontributif terhadap berbagai keputusan yang telah dihasilkan ASEAN dalam bidang dimaksud. Di sisi lain, AIPO dapat membantu peningkatan SDM melalui pertukaran kunjungan para anggota parlemen dan stafnya untuk melakukan studi banding. Bagi para anggota parlemen bisa dilakukan dengan program singkat, sedangkan para staff bisa belajar dalam jangka waktu lebih lama.

Masalah dalam negeri setiap anggota AIPO merupakan masalah internal. Dalam menghadapi kritik luar terhadap situasi domestik masing-masing negara, memang dibutuhkan waktu untuk memperbaikinya. Perlu diketahui, kerja sama ASEAN/AIPO bersifat jangka panjang, sehingga selalu ada kesempatan bagi setiap negara untuk memperbaiki kondisi domestik sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi, ini bukan berarti AIPO tidak membicarakan masalah-masalah yang sensitif, yang dihadapi oleh negara anggotanya. Kalau memang ada hal-hal yang patut ditanya, karena tidak sesuai dengan prinsip bersama atau semangat ASEAN, anggota AIPO bisa membicarakannya dan saling mengingatkan dalam forum-forum yang ada.

Beberapa pendapat menyarankan, *item* dalam agenda sidang-sidang AIPO, terutama Sidang Umum, supaya tidak terlalu luas, tetapi benar-benar terfokus pada hal-hal konkret yang dihadapi oleh anggota AIPO. Ini patut diperhatikan. Sementara, Sidang-sidang Komite Kerja tetap diperlukan untuk membantu penyelesaian *item* dalam agenda pembicaraan Sidang Umum, agar Sidang Umum dapat berlangsung dengan mulus. Sebagai konsekuensinya, dibutuhkan kerja sama antara Komite Kerja dengan Sekretariat Jenderal AIPO untuk penyiapan dan pembahasan seluruh *item* dalam agenda pembicaraan Sidang Umum AIPO. Jarak waktu antara sidang pendahuluan semacam itu dengan pelaksanaan Sidang Umum AIPO, tentu haruslah cukup, agar dapat dipersiapkan hasil-hasilnya dengan baik untuk dibahas selanjutnya dalam Sidang Komite Kerja dan Sidang Umum.

Dialog-dialog dengan negara mitra bermanfaat untuk mencari titik temu dan mengatasi perbedaan-perbedaan dan masalah yang masih ada. AIPO, juga IPU (Uni Antarparlemen Dunia), dan Hubungan Antarparlemen sangat memerlukan staf ahli yang kedudukannya merupakan tenaga fungsional, jika tidak mungkin minimal 3 orang, sesuai dengan organisasi-organisasi tersebut, seperti politik internasional, keamanan internasional, ekonomi internasional, ahli kawasan dsb. Staf ahli akan sangat membantu dalam membahas berbagai materi persidangan yang akan dihadapi para anggota DPR dalam kegiatan AIPO. IPU dan HAP.

Patut diinformasikan, hasil yang telah berhasil diperjuangkan pada masa Ketua DPR/MPR Kharis Suhud memegang posisi sebagai Presiden AIPO dan aktif mengikuti berbagai kegiatan AIPO adalah, kedudukan Sekretariat Jenderal AIPO yang permanen di Jakarta. Ini untuk memenuhi

amanat Presiden Soeharto yang sebelumnya telah pesan agar Delegasi Grup Nasional Parlemen Indonesia memperjuangkan kedudukannya Sekretariat Jenderal AIPO di Jakarta, mengingat di Jakarta telah terdapat kantor Sekretariat Jenderal ASEAN. Jadi, akan melengkapi peran Indonesia sebagai tempat kedudukan organisasi antarpemerintahan dan organisasi antar parlemen negara-negara anggota ASEAN. Sebelum ini, memang kedudukan kantor Sekretariat Jenderal ASEAN mengalami rotasi secara alphabetis. Negara anggota AIPO lainnya yang sangat berminat untuk alamat sekretariat tetap AIPO adalah Thailand. Argumentasi Thailand cukup kuat, karena infrastrukturnya sangat mendukung dan Bangkok sendiri telah menjadi kantor perwakilan badan PBB ESCAP. Di samping itu, Thailand yang merasa tidak aman karena dikelilingi oleh negara-negara Indocina yang tengah bergolak, terutama akibat meningkatnya kekuatan komunis, berkepentingan untuk menjadikan negaranya sebagai pusat perwakilan dan kepentingan masyarakat internasional, sehingga selalu mendapat perhatian dan perlindungan internasional dari ancaman ketidakstabilan perkembangan wilayah sekelilingnya.

Di Singapura, kemudian diputuskan di mana letak Sekretariat Tetap (parlemen) tersebut dan memilih seorang Sekretaris Jenderal dengan masa bakti tertentu. Untuk Sekretaris Jenderal, Indonesia menominasikan Mr. Maramis, sedangkan Thailand, Buriak. Secara konsensus, Indonesia kemudian ditetapkan sebagai kantor Sekretaris Jenderal AIPO dengan Sekretaris Jenderalnya Mr. Maramis dan Wakilnya Mr. Buriak, dengan keputusan berdasarkan konsensus. Masalah yang terpikirkan ketika itu, sehubungan dengan ditetapkannya kedudukan Sekretariat jenderal AIPO di Indonesia (Jakarta) adalah mengenai imunitas diplomatik (*diplomatic immunity*) kantor tersebut. Juga mengenai persoalan pejabat dan staff yang akan mendukung kerja kantor Sekretariat Jenderal AIPO. Di Sekretariat Jenderal ASEAN, tidak ada masalah. Tetapi digedung DPR, tentu untuk status *diplomatic immunity*-nya untuk kantor Sekretariat Jenderal AIPO, perlu didukung dengan semacam keputusan pemerintah tentang itu.

Juga dipertanyakan, apakah para pejabat dan staf kantor Sekretariat Jenderal AIPO juga memiliki kekebalan diplomatik? Bagaimana dengan gaji mereka dan berapa besarnya? Diketahui, Singapura sangat teliti dan ketat sekali dan mengontrol masalah-masalah finansial, sehingga ini pula yang mendukung Mr. Buriak Namwat untuk menggantikan posisi Mr. Maramis sebagai Sekretaris Jenderal AIPO. Mengenai pengadaan staff ahli (*experts*) untuk

mendukung kinerja AIPO dalam berbagai aktifitasnya, pada masa itu, telah terpikirkan, namun menghadapi kendala anggaran (*budget*).

Dalam berbagai aktifitas AIPO yang telah diikuti Kharis Suhud, tokoh dari Indonesia yang pernah mendapat gelar sebagai "Mr. AIPO," masalah yang menonjol diperdebatkan adalah narkotika. Ketika itu, Indonesia dinilai masih terlalu ringan dalam menangani pelanggaran dan tindak kejahatan dalam bidang ini. Kritik yang sama juga dihadapi Thailand dan Filipina. Sementara diketahui, Malaysia dan Singapura, telah menjatuhkan sanksi hukuman yang berat dan sangat ditakuti oleh para pelanggar dari dalam dan negara lain, karena ancaman hukuman matinya. AIPO berkali-kali bersidang untuk masalah membandingkan hukuman yang berlaku di masing-masing negara anggota AIPO.

Agenda AIPO tidak harus selalu mengikuti agenda ASEAN. Masalah yang mendesak, mendapat perhatian besar dan penekanan, seperti soal narkotika dan HAM, pernah menyita perhatian untuk dibicarakan dalam agenda kegiatan sidang-sidang AIPO. Dalam isu perdagangan, yang amat menonjol adalah *ecolabelling*, terutama dalam hubungannya dengan ekspor komoditi kayu Indonesia. Sebetulnya, di antara sesama negara AIPO, tidak banyak persoalan krusial yang muncul. Dalam hubungan dengan negara-negara luar mitra dialoglah, berbagai masalah dan kritik bermunculan, serta menjadi perdebatan hangat, terutama dalam dialog dengan Uni Eropa dan Parlemen Eropa. Terkait dengan ini, yang sangat menonjol dihadapi Indonesia antara lain soal Timtim. Sedangkan Malaysia dan Singapura sering menghadapi kritik terhadap penerapan hukuman mati, dan Thailand dalam hal narkotika dan AIDS. Walaupun demikian, dialog dengan mitra dari mancanegara dirasakan manfaatnya untuk meluruskan permasalahan, kesenjangan informasi, yang dihadapi bersama. Forum-forum dialog berguna dalam mengumpulkan pendapat-pendapat yang tajam atau kritik keras, yang diserahkan ke masing-masing negara anggota AIPO. Karenanya, program bagi pemahaman atas masalah yang terjadi sesungguhnya.

Di AIPO, dinamika berkembang baik dan konsensus selalu berupaya ditekankan untuk pencapaian kepentingan bersama, dengan tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara. Kondisi itulah yang turut melatarbelakangi mengapa terdapat perbedaan antara Parlemen Eropa dan AIPO, selain dalam Parlemen Eropa terdapat banyak partai dan mekanisme pemilu tersendiri. AIPO sudah saatnya mempunyai gedung sendiri, dengan

dilengkapi oleh hak-hak diplomatik (*diplomatic privileges*) sebagaimana perwakilan asing lainnya, dan perlu didukung oleh ahli yang berperan dalam membantu menyiapkan dan menawarkan gagasan-gagasan baru yang konstruktif, ke masing-masing parlemen negara anggota AIPO. Disadari, hambatan yang masih dihadapi dalam hal ini adalah masalah finansial. Kemudian pula, resolusi-resolusi yang berhasil AIPO, jelas harus diperjuangkan untuk direalisasi di masing-masing negara anggotanya. Sementara, Sekretariat Jenderal AIPO harus memiliki gagasan untuk menginventarisasi berbagai masalah yang berkembang untuk dibicarakan dalam berbagai agenda kegiatan sidang AIPO.

Perlu dikemukakan lagi, ide dasar pembentukan AIPO adalah untuk kerja sama regional antarparlemen. Misi yang diemban para anggota DPR adalah mengimplementasikan amanat presiden Soeharto untuk memasyarakatkan gagasan-gagasan kerja sama yang berkembang dalam ASEAN, agar mengakar di masyarakat. AIPO ditujukan untuk melahirkan saling pengertian yang mendalam di antara anggota ASEAN. Diketahui, banyak kemudian anggota parlemen yang menjadi anggota kabinet, seperti Ahmad Baidowi dari Malaysia, Tan Suu Kong, Ong Cheng Theong dari Singapura dsb. Sebaiknya, sesuai dengan sistem parlementer yang dianut oleh beberapa anggota AIPO, misalnya Singapura, anggota kabinet Singapura juga menjadi anggota parlemen. Sehingga, realitas ini mendekatkan hubungan pemerintah dan parlemen atau ASEAN dan AIPO.

Jadi, ide pembentukan AIPO bertitik tolak dari kebutuhan perlunya forum antarparlemen, selain forum antarpemerintah yang telah ada, melalui dibentuknya ASEAN. Dengan dibentuknya AIPO, diharapkan akar-akar ASEAN akan tumbuh menjadi kuat. Pada waktu awal berdirinya, yang menjadi fokus perhatian baru masalah ekonomi dan politik. Lingkungan hidup dan HAM belum menjadi isu pembicaraan, seperti dewasa ini.

Yang menarik dalam perkembangan AIPO, tercipta hubungan yang semakin akrab antaranggota parlemen. Mereka dapat melakukan tukar pikiran, misalnya anggota parlemen Filipina menceritakan ketidakbahagiaannya berada di bawah pemerintah Marcos. Melalui forum AIPO, beliau dapat mengenal karakter setiap bangsa dari negara anggota AIPO. Anggota parlemen Filipina misalnya, dinilai sangat demonstratif dalam gaya bicara dan penampilan. Anggota parlemen Singapura dikenal lugas, teliti dan bicara *to the point*. Malaysia lebih diplomatis dan halus. Sedangkan Thailand

sulit digali informasinya, karena masalah bahasa, dan anggota-anggota parlemennya seringkali baru, sesuai dengan kondisi dalam negeri yang sering dilanda pergantian pemerintah. Delegasi Thailand malah pernah berubah sikapnya dalam SU di Kuala Lumpur (ketika itu Delegasi RI dipimpin oleh Domo Pranoto), akibat perubahan keanggotaan parlemen yang lama, sehingga sempat terjadi perbedaan pendapat dan deadlock dalam sidang dan komunikasi Bersama (*Joint Communiqué*) baru ditandatangani di Manila (Filipina), setelah APM 1975. Yang lebih aneh, ada anggota delegasi parlemen Thailand yang bawa senjata api, sehingga disita sekuriti sidang. Kondisi dalam negeri Thailand, telah menyebabkan negara tersebut *low profile* dan hanya berusaha tampil menjadi *host* yang baik.

Dalam visi ke depan, perubahan politik di dalam negeri di masing-masing negara anggotanya, akan berpengaruh terhadap perkembangan AIPO. Jelas diketahui, sistem politik masing-masing negara anggota berbeda. Dalam kondisi sekarang AIPO cenderung berat ke eksekutif. Namun, bisa saja suatu waktu AIPO memberi warna politik, dalam arti selalu sejalan dengan posisi eksekutif. AIPO juga bisa menjadi wahana komunikasi kontinu orang-orang yang sepaham.

Mengenai keorganisasian, Sekretariat AIPO memperlihatkan kinerjanya sekedar sebagai kantor yang mengurus segala masalah administrasi AIPO. Bobot eksistensinya akan tergantung pada keberadaan dan kinerja AIPO di masa datang. Kalau integrasi ASEAN menguat, Sekretaris AIPO akan menguat. Tetapi, kalau kondisi kerja sama ASEAN bersifat longgar, Sekretariat AIPO tidak lebih seperti administratur saja.

Dalam perjalannya, AIPO mengikuti perkembangan (kecenderungan) yang berlangsung dalam ASEAN. Sehingga jangan diharapkan lain, walaupun kehadiran AIPO tetap dirasakan berguna. Maksimal, AIPO hanya akan menjadi forum komunikasi antaranggota parlemen di negara-negara anggota ASEAN, yang di luar forum-forum sidang resmi, bisa bertukar pikiran atas masalah-masalah yang tidak mungkin dibicarakan dalam sidang-sidang resmi. Juga, sebagai forum untuk saling kenal antaranggota parlemen. Bobot AIPO akan ditentukan oleh bobot kondisi parlemen yang terendah. Juga tergantung pula pada kepentingan Brunei dan Myanmar, pendatang baru, yang tanpa parlemen, karena tidak mengenal kekuasaan tanding (kontrol) di luar sistem pemerintahannya.

Dalam Anggaran dasar AIPO, AIPO disebut sebagai wahana kerja sama antarparlemen dan badan-badan yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. AIPO akan berkembang jika berbagai kepentingan (*interest*) yang ada di masyarakat juga berkembang, sehingga bisa saja AIPO menjadi bursa ide atau gagasan. Tetapi, ini tergantung dari sistem politik internal masing-masing negara anggotanya. Tetapi, selama sistem pengambilan keputusan yang berlangsung adalah konsensus, bobot perkembangan AIPO akan tergantung dari kondisi parlemen yang terlemah.

AIPO merupakan forum pelengkap dari kehadiran ASEAN dan organisasi kerja sama regional, agar ASEAN punya front (wahana) dalam menghadapi Parlemen Eropa, IPU dan organisasi kerja sama regional lainnya. Di abad ke-21, jika hubungan antar masyarakat (peran masyarakat) menguat, AIPO bisa saja berbobot lebih dari sekarang. Sayangnya, AIPO sejak semula tidak dirancang untuk memiliki fungsi kepeloporan.

Evolusi AIPO seperti pembentukan Parlemen Eropa, baru bisa terjadi dalam beberapa generasi ke depan. Mungkin bisa lebih lambat, lebih dari 30 tahun seperti halnya Parlemen Eropa. Tetapi itu tergantung pada perkembangan ASEAN sendiri. Sedangkan, pengakaran ASEAN lewat AIPO telah terjadi dan dapat berlangsung, berkat kesamaan kepentingan ekonomi.

Beginilah kecenderungan perkembangan AIPO di masa depan : AIPO akan mengikuti perkembangan pemerintah, kalau garis pemerintah yang lebih kuat. Dan sebaliknya, AIPO akan mengikuti perkembangan masyarakat, kalau garis pemerintah lemah. Sekretariat AIPO, selama ini hanya dominan dalam pelayanan administratif. Sebaiknya, jika ada perubahan Charter ASEAN, *impact*-nya akan ke AIPO. Jadi, perkembangan AIPO tidak akan mendului perubahan-perubahan atau segala perkembangan yang terjadi dalam ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Inter-parliamentary Organization Report of the 11th Working Committee and General Assembly : Singapore 10-15 September 1990.* Singapore : AIPO, 1990.
- ASEAN Selayang Pandang.* Jakarta : Seknas ASEAN Deplu RI, 1995
- Facts on ASEAN.* Malaysia : Ministry of Foreign Affairs, 1997.
- Fifth ASEAN Summit : Meeting of the ASEAN Heads of Government in Bangkok 14-15 December 1995.* Jakarta : ASEAN Secretariat, 1996.
- Indorf, Hans H. Impediments to Regionalism in Southeast Asia; Bilateral Constraints Among ASEAN Member States.* Singapore : ASEAS, 1984
- Joint Communique ASEAN Inter-parliamentary Organization Ninth Working Committee and General Assembly 24-25 January, 1988, Kuala Lumpur-Malaysia.* Jakarta : AIPO, 1988.
- Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN di Bali 23-24 Pebruari 1976.* Jakarta : ASEAN, 1976.
- Report of the ASEAN Inter-parliamentary Organization : Third General Assembly 2-6 September 1980 Jakarta-Indonesia.* Jakarta : DPR RI, 1990.
- Ten Years ASEAN Inter-parliamentary Cooperation.* Jakarta : AIPO, 1985.
- Wanandi, Jusuf. The ASEAN Political and Security Cooperation.* Jakarta : CSIS, 1993

BAB III

HUBUNGAN ANTAR ANGGOTA ASEAN/AIPO DAN MITRA DIALOG

Oleh : Poltak Partogi Nainggolan

Laos, ASEAN dan Kepentingan Resiprokal

Laos yang terletak di kawasan Indocina pernah menjadi ajang perebutan kekuatan asing seperti Prancis, Jepang dan AS. Dalam Perang Dingin, Laos tidak luput dari perbuatan pengaruh Cina, Soviet dan AS. Sehingga, negeri ini lama dilanda perang dan baru dapat mengkonsolidasikan dirinya untuk menghadapi dunia luar yang damai. Kekuatan komunis keluar sebagai pemegang dan itu pula yang menjadi penghambat negeri ini untuk dapat berintegrasi dengan dunia internasional.

Keterbukaan baru dicanangkan, sedangkan reformasi ekonomi masih samar-samar. Kebijakan reformatif pemerintah belum banyak diketahui, apabila di bidang politik. Ini yang menjadi hambatan bagi negara-negara (ASEAN) yang terletak di kawasan yang sama: Asteng. Perbedaan ideologis dan sistem politik masih merintangi upaya peningkatan kerjasama ASEAN-Laos, walaupun Laos telah terbatas dari pengaruh rivalitas Cina-Soviet versus AS. ASEAN masih ragu-ragu dan membatasi diri, kendati pengaruh Cina dan Soviet telah surut, dan kedua negara tersebut memperlihatkan sikap pragmatis dalam dunia internasional dewasa ini.

Laos tidak menaruh keprihatinan yang besar terhadap perkembangan blok-blok perdagangan yang marak belakangan ini, walaupun mungkin tidak dapat dikesampingkan terdapat implikasinya terhadap pembangunan ekonomi negara itu. Masalah pokok bagi Laos, perkembangan negara itu tidak secepat perkembangan dunia luar, sehingga pemerintah Laos tidak dapat mengantisipai, apalagi untuk terlibat secara mendalam, pertumbuhan AFTA, NAFTA, EAEC maupun APEC, yang sekarang menjadi perhatian besar negara-negara ASEAN.

Dapat dikatakan, Laos tertinggal dalam menghadapi aktivitas blok-blok perdagangan tersebut. Sedangkan Vietnam tidak dapat diabaikan oleh ASEAN dan negara-negara maju, seperti AS, Prancis dan sebagainya, karena telah dan lebih membuka diri, serta menawarkan banyak peluang ekonomi baru.

Sikap dan inisiatif ASEAN-lah yang akan banyak membantu Laos agar dapat diangkat posisinya dalam percaturan ekonomi internasional, yang tengah marak dengan aktivitas blok-blok perdagangannya.

ASEAN dan AIPO (Asosiasi Organisasi Antar Parlemen ASEAN) tidak perlu lagi memandang sebelah mata Laos, mengingat banyak *natural resources* negeri itu yang belum dieksplorasi dan dieksplorasi akibat perang dan tidak adanya modal. Faktor sumberdaya alam dapat menjadi dasar dari kerjasama ekonomi ASEAN dengan Laos, yang membutuhkan investasi asing untuk pembangunan negerinya, sebagaimana diharapkan selama ini. Laos dapat dijadikan lahan investasi baru yang memang belum banyak dijamah. Kendalanya terletak pada infrastruktur yang perlu dibangun, setelah banyak yang rusak akibat perang.

Masalah narkotika merupakan masalah utama yang dihadapi ASEAN dan Laos. Diketahui, Laos terletak di kawasan Segitiga Emas yang sejak lama menjadi basis penanaman dan penyaluran narkotika internasional. Basis ini selain didalangi oleh gerombolan orang bersenjata di bawah tokohnya Kun Sha, juga dirasakan keuntungannya oleh penduduk pribumi yang terbelakang dan membutuhkannya dalam jumlah tertentu sebagai bahan pangan dan pengobatan tradisional. Karena itu, upaya pencegahan perdagangan narkotika di wilayah-wilayah negara ASEAN (kawasan Asteng) harus dikoordinasikan bersama dengan pemerintah Laos dan sesama negara-negara anggota ASEAN itu sendiri, terutama Thailand dan Myanmar.

Upaya memberikan kesempatan lebih luas pada Laos untuk terlibat dalam berbagai bentuk kerjasama ekonomi, dapat membantu pemerintah Laos mengurangi, dan bahkan menghilangkan, ketergantungan dari mengharapkan tetesan keuntungan perdagangan narkotika dan obat bius, sebaiknya disertai dengan kebijakan lain yang realistik dan tepat guna, yang menjawab permasalahan atau dapat menjadi solusi alternatif.

Secara geografis, Laos terletak di kawasan Indocina yang sebelum masa perang memiliki kawasan hutan lebat, seperti halnya Vietnam. Perang selama beberapa dasawarsa telah berpengaruh besar terhadap kerusakan hutan disana. Tetapi ini tidak mengundang kritik negara-negara maju, karena mereka-lah yang pernah melakukan aksi militer di sana (Prancis, AS). Sebab itu lingkungan tidak menjadi isu yang menonjol bagi Laos. Sementara bagi ASEAN, cara-cara pemanfaatan hutan untuk produksi dan pemeliharaan pelestariannya

(konservasi), terutama dari Indonesia, dapat ditawarkan sebagai usulan bantuan atau kerjasama.

Sebagaimana diketahui, Laos adalah negara yang termasuk dalam kategori terbelakang. Karena itu, tidak banyak yang dapat diharapkan pemerintah negara-negara ASEAN dalam hal transfer teknologi. Tetapi sebaliknya, banyak yang dapat diharapkan Laos dari semakin terbukanya kerjasama ASEAN-Laos di masa datang. Perkembangan teknologi madya dan tinggi di beberapa negara anggota ASEAN, seperti Malaysia, Singapura dan sebagainya, sangat berguna bagi Laos untuk ditransfer ke negaranya.

Laos masih tertutup. Langkah awal pengembangan hubungan ASEAN-Laos dapat dimulai dengan kerjasama kebudayaan, yang dapat dirintis dengan pertukaran misi-misi kebudayaan, yakni pengiriman kelompok tari, seni musik dan sebagainya. Kesulitan bagi Laos dengan diplomasi kebudayaan ini adalah soal dana, tetapi buat ASEAN adalah segi *multiplier effect*-nya terhadap kepentingan nasional di bidang ekonomi dan pengembangan pariwisata (perolehan devisa), mengingat Laos negara terbelakang dan minim dengan turis mancanegara.

Dari sisi lain, yaitu upaya saling meningkatkan pengenalan dan pengertian di antara ASEAN dan Laos, kerjasama kebudayaan perlu direalisasikan. Titik temu dalam agama (Buddha) dan aspek-aspek kebudayaan lain yang buat negara-negara ASEAN secara umum bukanlah merupakan sesuatu yang asing, memungkinkan kedua belah pihak dapat saling menerima lebih cepat.

Kerjasama AIPO dalam wujud pertukaran kunjungan delegasi parlemen telah dilakukan melalui pemberian undangan kepada delegasi parlemen Laos untuk hadir dalam setiap kegiatan Komite Kerja dan Sidang Umum AIPO yang dilaksanakan setiap tahun, dengan status sebagai peninjau. Hingga saat ini Laos memang masih hadir sebagai salah satu *Observer Country*, bersama-sama dengan Vietnam, Kamboja, PNG, Cina, Brunei Darrusalam dst. Namun, bila dibandingkan dengan negara-negara peninjau lainnya, aktivitas Laos dalam kegiatan AIPO masih sangat terbatas, mengingat negara tersebut adalah yang terakhir mengajukan diri untuk diterima sebagai peninjau.

Lebih jelasnya, Laos baru beberapa kali aktif dalam kegiatan tahunan AIPO, sehingga posisinya tidak sekuat Vietnam, Cina dst dalam sidang-sidang yang berlangsung. Laos memang hendak keluar dari keterasingannya setelah selama ini merasa terisolasi akibat perang saudara yang berke-

panjangan. Desakan untuk membangun negara dari keterbelakangan, memaksa pemerintah Laos untuk membuka banyak hubungan dengan dunia luar dan turut aktif percaturan politik internasional, yang dalam lingkup terdekatnya dapat direalisasi lewat organisasi regional semacam ASEAN dan asosiasi parlemennya (AIPO).

Usulan delegasi parlemen Laos agar negaranya dapat diterima sebagai anggota ASEAN, belum dapat dipenuhi dan disepakati bersama oleh negara anggota AIPO, sebab masih harus diketahui lebih lanjut perkembangan domestik Laos dan sikap negara itu terhadap ASEAN pada khususnya, dan dunia internasional yang terus berkembang secara umum. Soal perkembangan ideologis komunis dan kejelasan sikap rejim di Laos, menjadi parameter bagi negara-negara ASEAN, untuk dapat menerima Laos sebagai anggota baru. Jelas untuk usulan Laos diperlukan waktu, agar dapat dipelajari untung-ruginya bagi ASEAN. Setahap demi setahap apabila kondisi perkembangan Laos adaptif dengan sikap dan kepentingan negara-negara ASEAN, usulan Laos akan dapat diterima, seperti halnya proses yang telah dilalui Vietnam.

Pendekatan ASEAN terhadap delegasi parlemen Laos lebih *rigid* dibandingkan terhadap Vietnam yang tampak lebih pragmatis. Sebab, Vietnam telah banyak melakukan reformasi, sementara Laos masih terlalu kaku dalam perspektif ideologisnya. ASEAN dan dunia internasional belum banyak mengetahui perubahan-perubahan yang berlangsung di Laos. Sikap ASEAN dan AIPO akan lebih luwes jika pemerintah Laos bersikap lebih terbuka dan delegasi parlemennya terus berupaya aktif, di tengah-tengah segala keterbatasan akibat terisolasi negeri itu selama ini.

Kegiatan saling kunjung keparlemenan yang bersifat bilateral dapat dikatakan minim sekali. Padahal ini juga perlu ditingkatkan, supaya ASEAN dan Laos dapat lebih mengenal secara langsung dan usulan Laos sebagai anggota ASEAN dapat segera diterima, sehingga status negara itu dapat meningkat menjadi anggota AIPO dan tidak lagi sebagai peninjau. Hambatan bagi peningkatan kunjungan deklarasi keparlemenan yang sifatnya bilateral, bagi Laos terletak pada anggaran kunjungan keparlemenan yang terbatas. Sedangkan bagi parlemen anggota AIPO adalah, kurang terbuka dan dikenalnya Laos sebagai negara yang potensial dan patut diperhitungkan. Itulah sebabnya diharapkan oleh pemerintah negara Laos, kunjungan Presiden Nouhak Phoumsavanh ke Indonesia 17 - 22 Oktober 1994, dapat menjadi *breakthrough* yang membawa hasil besar, dari stragnasi hubungan selama ini, mengingat Indonesia

merupakan salah satu pelopor yang berpengaruh besar dalam ASEAN.

Harmonisasi Hubungan RRC - ASEAN

Pasca Perang Teluk, RRC tidak banyak memperlihatkan sikap pe-nentangannya di PBB. Veto-veto RRC di DK-PBB semakin surut, termasuk atas rencana invasi militer AS ke Somalia dan Haiti. Di sisi lain, RRC menyetujui kebijakan Barat dalam penyelesaian konflik di bekas negara Yugoslavia. Serangan militer Nato atas Serbia, tidak mendapat veto RRC dalam sidang-sidang di DK-PBB. Sikap RRC telah berubah menjadi lebih lunak dalam beberapa tahun belakangan ini, setelah runtuhnya Uni Soviet dan kian lenyapnya pengaruh Perang Dingin.

Kepentingan ekonomi telah membuat RRC bersikap lebih pragmatis, Namun Barat (Eropa dan AS), tetap melihat ganjalan dalam hubungan mereka di dunia internasional, mengingat sikap RRC yang tidak mau melakukan reformasi politik dan menindas gerakan prodemokrasi. Insiden Tiananmen, dan belakang soal eksplorasi narapidana dalam proses produksi, diangkat pihak Barat sebagai isu hak asasi manusia yang harus diperbaik RRC, jika negara itu ingin terus memperoleh status MFN (*Multi-Favoured Nation*) yang memberikan kemudahan atas akses produknya ke AS.

Dalam perspektif regional, sikap RRC yang menonjol dan menjadi concern negara-negara anggota ASEAN, adalah agresifitasnya dalam menghadapi sengketa Spratley dan Paracelos. Tetapi belakangan manuver-munuver militer RRC telah berkurang, demikian pula dengan retorika-retorika pemerintahnya, sehingga ketegangan di kawasan Asteng menurun. Negara ASEAN (Filipina, Malaysia dan Brunei Darrusalam) dan pendatang baru di ASEAN, Vietnam, yang terlibat dalam sengketa kepulauan itu, dapat menahan diri dan diplomasi (perundingan) yang kontinu.

Kerjasama ekonomi menunjukkan perkembangan yang meningkat. Minat investasi negara-negara ASEAN ke RRC semakin tinggi, karena tawaran menarik yang diajukan pemerintah RRC untuk penanaman modal dinegerinya. Sebaliknya, para pengusaha RRC memperlihatkan minat yang tinggi untuk mengembangkan beberapa bidang usaha di negara-negara anggota ASEAN, terutama Indonesia. Misi-misi ekonomi pemerintah dan swasta ASEAN dan RRC, kian tinggi frekuensinya, sejalan dengan dinamisnya perkembangan hubungan ASEAN-RRC. Masing-masing pihak berusaha mencari peluang-

peluang baru untuk dikembangkan sebagai lahan investasi dan perolehan devisa baru.

RRC antusias menghadiri KTT APEC yang diadakan bulan November 1994 lalu di Indonesia, karena negara tersebut sangat berkepentingan dengan perkembangan ekonomi yang sangat dinamis di kawasan Asia Pasifik. Karena, hal itu akan berdampak positif terhadap tetap tingginya pertumbuhan ekonomi RRC, yang membutuhkan arus modal dalam jumlah tinggi. Upaya beberapa negara yang tidak menghendaki APEC menjadi blok perdagangan (regionalisme tertutup), tidak menjadi masalah dengan kepentingan RRC yang pragmatis.

Setelah hadir dalam pertemuan APEC di Seattle, pemimpin RRC hadir pula dalam pertemuan berikutnya, KTT APEC di Indonesia (Bogor) nanti. Yang sempat menjadi masalah adalah pernyataan pemimpin Taiwan untuk hadir dalam KTT APEC di Bogor, karena RRC tidak mengakui eksistensi Taiwan, dan Indonesia sendiri menganut asas Kebijakan Satu Cina (*One China Policy*) dalam politik luar negerinya. Di samping itu, sifat forum APEC yang tidak merupakan organisasi tertutup atau regionalisme terbuka, membuat negara-negara yang berbeda pandangan dan memiliki sengketa internal atau domestik di antara sesama mereka, menjadi sulit posisinya. Hongkong yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan RRC dan kontraknya akan habis pada tahun 1997 nanti, telah memanfaatkan momentum untuk hadir dalam KTT APEC di Indonesia. Dari perspektif ekonomi yang didasarkan pada kepentingan pragmatis, hal tersebut tidaklah *complicated* buat ASEAN dan RRC. Tetapi dari segi politik, tidaklah demikian. Sebab, ini menyangkut pemerintahan berdaulat yang representatif dan harus dihormati eksistensinya.

RRC setuju dan sangat mendukung inisiatif PM Malaysia, Mahathir Muhammad, terhadap pendirian Kaukus Ekonomi Asia Timur yang dijadikan alternatif atas pendirian APEC yang dinilai banyak dipengaruhi kepentingan di kawasan AS. Sikap RRC ini sangat pragmatis dan sejalan dengan kepentingan ekonominya Asia Timur. Bagi ASEAN juga demikian, tetapi peran dan pengaruh AS yang begitu dominan di dalam APEC, akan menyulitkan sikap ASEAN dan RRC yang sejalan vis a vis AS. RRC mempunyai harapan terselubung EAEC dapat dijadikan RRC sebagai jalan keluar untuk menghindari tekanan AS terhadap negeri itu, ber kaitan dengan isu hak asasi dan demokratisasi.

ASEAN dan RRC adalah negara luar dalam menghadapi NAFTA,

mengingat NAFTA merupakan sebuah blok perdagangan (regionalisme tertutup). Tetapi masing-masing pihak mendapat kemudahan dari AS, negara terkuat ekonominya dalam NAFTA, dalam penyaluran komoditi eksportnya, melalui pemberian fasilitas MFN atau GSP (*Generalized System of Preferences*). Tekanan AS secara politis terhadap RRC dapat dikurangi seperti yang tampak dengan kunjungan Memperdag AS ke Cina baru-baru ini, karena kepentingan AS untuk mencari deal ekonomi dalam jumlah besar. Sehingga, pemerintah Clinton telah mempertimbangkan kembali untuk memperpanjang status MFN RRC, walaupun terdapat beberapa keberatan dari dalam negeri.

Di pihak lain, ASEAN mesti bekerjasama lebih erat lagi untuk mendapatkan akses pasar yang lebih baik bagi komoditi eksportnya ke pasar Amerika Utara (NAFTA). Indonesia sendiri masih belum diputuskan, apakah kemudahan GSP-nya akan diperpanjang. Tetapi yang jelas, di masa mendatang isu hak asasi, demokratisasi, upah dan kondisi tenaga kerja, lingkungan, *ecolabelling* (lingkungan), akan menjadi senjata yang ampuh, seperti yang dipakai terhadap RRC oleh AS untuk memasuki pada NAFTA dan negara-negara maju lain.

ASEAN dan RRC sama menghadapi masalah polusi udara di perkotaan dan kawasan-kawasan industri yang dijadikan pusat penanaman modal asing (kawasan ekonomi khusus). Juga jumlah penduduk yang padat di kota-kota besar yang berdampak buruk terhadap ekologi (lingkungan). Pemakaian energi batubara dalam jumlah besar sejak lama, merupakan penyebab polusi terberat di RRC. Ini merupakan sebuah pelajaran berharga bagi Indonesia, yang baru mengkampanyekan pemakaian energi ini secara massal.

Di sisi lain, masalah yang berkaitan dengan isu lingkungan adalah banjir dan angin topan, yang sering melanda daerah pedesaan RRC, masalah serupa yang juga sering dihadapi negara-negara di kawasan Asteng (ASEAN). Pembuatan Dam yang besar-besaran belum dapat mengatasi sepenuhnya dampak dari bencana alam yang tidak terelakan. Upaya penanganan bencana semacam itu, dapat dijadikan topik kerjasama ASEAN-RRC.

Dalam penyalahgunaan obat bius dan narkotika, antara Indonesia dan RRC tidak terdapat masalah yang perlu mendapat perhatian serius bersama. Kasus-kasus penyelundupan dan perdagangan narkotika dan obat bius yang menggunakan jalur lalu-lintas di antara kedua negara itu, tidak terlalu berarti dibandingkan dengan jalur klasik segitiga emas melalui Hongkong. Kawasan Bulan Sabit Emas yang berbatasan pula dengan wilayah RRC, jauh letaknya

dari wilayah negara-negara ASEAN. Namun, jalur lalu-lintas narkotika dan obat bius dengan Kawasan Segitiga Emas yang terletak di wilayah negara-negara ASEAN, tidak boleh luput dari pantauan pihak-pihak yang berwenang. Kerjasama kepolisian ASEAN dan RRC dalam memantau jalur lalu-lintas internasional narkotika dan obat bius, perlu ditingkatkan di masa datang, mengingat masalah narkotika dan obat bius tengah menjadi ancaman serius di kawasan Eropa dewasa ini.

Di negara-negara ASEAN yang dalam sejarahnya ditandai dengan kedatangan banyak orang Cina (pedagang maupun biksu), akulturasi mudah terjadi. Sampai sekarang di kawasan ini banyak tinggal penduduk keturunan Cina ataupun *hoaqiau* (Cina perantau), baik karena kebijakan imigrasi baru, maupun yang telah menetap di sini sejak jaman nenek moyang mereka. Karena itu, upaya saling memahami kebudayaan antara negara-negara ASEAN dan RRC, bukan merupakan sesuatu yang baru. Sentuhan nilai-nilai kebudayaan kedua belah pihak telah terjadi sejak dulu melalui sejarah. Dan unsur-unsur kebudayaan di negara-negara ASEAN, memiliki unsur-unsur yang terdapat dalam kebudayaan dalam kebudayaan Cina.

Masalah yang menghalangi peleburan dua kultur yang ada atau pembauran di ASEAN antar etnis Cina dengan pribumi, adalah kesenjangan ekonomi. Namun, peningkatan kerjasama kebudayaan dapat dijadikan terapi, di samping upaya mengatasi kesenjangan ekonomi itu sendiri dengan kebijakan politik, ekonomi dan sosial. Karena, peningkatan kerjasama kebudayaan dapat mendekatkan ASEAN-RRC yang memiliki dua kelompok ras berbeda, melalui langkah pengenalan dan tumbuhnya saling pengertian yang intensif. Dengan demikian, masalah rasial dapat diperkecil peluangnya menjadi letusan sosial yang laten di negara-negara ASEAN, di masa depan.

Pasca normalisasi, hubungan kebudayaan ASEAN-RRC semakin semarak. Hal ini ditandai dengan banyaknya aktifitas kebudayaan yang diorganisasi bersama. Tim kesenian dari negara-negara ASEAN telah melakukan pertunjukan-pertunjukan di beberapa tempat di RRC. Demikian halnya dengan yang dilakukan tim kesenian RRC. Saling kunjung atau muhibah misi kebudayaan terus dilakukan, seperti kunjungan misi kesenian Islam Cina dan Indonesia. Terakhir kali, Indonesia menerima tim kesenian para penderita cacat RRC, yang dipimpin oleh anak Deng Xiaoping, tokoh negeri itu. Aktivitas kebudayaan lainnya adalah, pameran lukisan, hasil kerajinan keramik dsb. Kerjasama antara umat beragama Islam Cina dan Indonesia sangat erat dan

dibantu dengan kegiatan asosiasi para pengusaha Indonesia-Cina dan kadin seksi Cina.

ASEAN dalam hubungannya dengan RRC, dapat banyak mengambil pelajaran dari penggunaan teknologi untuk produksi massal dan juga teknologi yang digunakan di pusat-pusat industri yang terdapat di berbagai kawasan ekonomi khusus (*special economic zones SEZ's*). Diketahui, SEZ's adalah tempat aplikasi dan transfer teknologi canggih dari Barat (negara maju), yang perusahaan-perusahaannya banyak menanamkan modalnya di Cina. Pemerintah RRC sejak awal reformasi dulu atau menjelang tahun 1980-an, sengaja mengorientasikan kawasan-kawasan ekonomi khusus RRC tersebut sebagai ajang belajar dan transfer teknologi maju Barat. Sementara di masa lalu, sejarah RRC telah memperlihatkan bahwa negeri itu tidak asing dengan pembangunan proyek-proyek industri barat (*heavy industry*) yang sarat dengan penggunaan teknologi tinggi, dengan banyak mendapat bantuan Uni Soviet. Proses saling belajar dengan tukar-menukar trainee untuk belajar di industri-industri manufaktur, akan bermanfaat bagi pengembangan industrialisasi jenis ini, di negara-negara ASEAN. Kemudian, menarik pula untuk dipelajari, strategi RRC dalam mengembangkan proyek-proyek industri di kawasan-kawasan ekonomi khususnya, yang selama ini telah memperlihatkan kinerja yang sangat berarti dalam mengkontribusikan angka pertumbuhan yang tinggi bagi perekonomian nasional negeri itu.

Diketahui, RRC adalah negara peninjau yang aktif dalam kegiatan AIPO. Dalam diskusi dengan ASEAN, delegasi parlemen RRC banyak memperlihatkan sikap yang antusias dan simpatik. Demikian pula dengan kegiatan-kegiatan parlemen bilateral di negara-negara anggota ASEAN. Di masa datang, untuk menunjang kegiatan parlemen yang terus meningkat dan sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak, perlu dibentuk grup-grup kerjasama parlemen baru.

Mengenai hubungan antar parlemen, pemerintah RRC telah menunjukkan keinginan kuat untuk segera membentuk grup kerjasama bilateral antara Kongres Rakyat Nasional (parlemen RRC) dengan DPR RI. Hal itu merupakan tanggapan balik atas saran yang diajukan Kharis Suhud, Ketua DPR/MPR RI 1987-1992, saat berkunjung ke RRC tahun 1992. Beberapa anggota KRN telah mengadakan kunjungan ke Indonesia pada 20 - 25 Juli 1993, 2 tahun lalu, yang dipimpin langsung oleh ketua Kongresnya. Ini merupakan kunjungan yang pertama dari para anggota lembaga legislatif tertinggi RRC periode pengang-

katan Maret 1993. Langkah maju tersebut belum disertai respons lebih jauh DPR RI untuk merealisasi pembentukan grup kerjasama.

Peluang Investasi ASEAN, RRC dan Vietnam

Dalam 3 tahun belakangan, perkembangan ekonomi ASEAN begitu menggembirakan. Indonesia sebagai salah satu negara di dalamnya, bahkan dalam kategori Bank Dunia di tahun 1993, dimasukkan sebagai salah satu dari *the magnificent eight*, menambah jajaran negara-negara industri baru (NICs), menyusul Korea, Taiwan, Hongkong, Singapura, Thailand dan Malaysia.

Stabilitas politik dan ekonomi makro telah memegang peranan penting selama ini dalam mendukung perkembangan ekonomi yang pesat di ASEAN, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 6 - 7% per tahun. Keberhasilan ini didorong oleh keberhasilan dalam melakukan reorientasi industri substitusi impor (ISI) telah beralih ke industri berorientasi ekspor. Tersedianya sumber daya alam dalam jumlah besar dan upah buruh yang rendah, terutama di Indonesia, juga telah menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di ASEAN.

Berdasarkan data resmi Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi RRC 1980-1985 mencapai rata-rata 9,8%, dengan 7,7% dalam periode 1985-1990 dan 12% pada tahun 1992 ybl. Nilai eksport terus meningkat, dan pada tahun 1990 mencatat US 62,1 miliar, lalu US 85,0 miliar di tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi Vietnam juga mengesankan. Pada tahun 1980-1985 masih mencapai 5,8% per tahun, namun periode 1985-1990 mencapai rata-rata 11,2% per tahun. Dan pada tahun 1992, pertumbuhan ekonomi negeri itu dapat menjangkau 8,4%. Sedangkan perekonomian Indonesia dalam 20 tahun terakhir hanya tumbuh rata-rata 6,6% dan sebesar 5,8% pada tahun 1992 ybl. Dengan keunggulan RRC dan Vietnam dalam perbandingan angka-angka ini, patutlah kita melihat kemampuan kedua negara tersebut secara lebih jauh.

Sejak awal darsawarsa 90, RRC dan Vietnam muncul menjadi pesaing berat ASEAN dalam memperebutkan investasi modal yang berasal dari negara-negara maju, khususnya Jepang, Korea, Taiwan, AS dan MEE. Perkembangan ini ditandai dengan meningkatnya apresiasi Yen dan biaya produksi regional, yang kemudian dilikuti dengan gelombang relokasi industri berbagai perusahaan di kawasan itu.

Strategi yang dijalankan RRC untuk menarik investasi asing adalah dengan mengembangkan kawasan-kawasan ekonomi khusus di wilayah sepanjang pantai Timur dan Selatan. Penyediaan infrastruktur yang memadai yang diikuti dengan berbagai langkah deregulasi kebijakan, antara lain memberikan HGU 75-100 tahun, *tax holiday*, di samping penyediaan infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang trampil, telah meningkatkan daya tarik RRC. Kelebihan lain adalah daya serap pasar RRC yang begitu besar dengan jumlah penduduknya yang hampir mencapai 1.3 miliar.

Di pihak lain, Vietnam pasca perang, telah berhasil menarik investor asing karena keberanian negara tersebut dalam meliberalisasi UU yang mengatur modal asing. Dalam kebijakannya, para investor asing diberi kesempatan menguasai 100% saham, dengan pengenaan pajak yang terendah dibandingkan ASEAN dan RRC. HGU diberikan untuk waktu cukup lama, yakni 100 tahun dan pajak pendapatan hanya dikenakan 10% hingga 25% (malahan untuk industri ekspor cuma 5%).

Yang lebih menarik, para investor asing di Vietnam diberikan *tax holiday* antara 2 sampai 4 tahun, terhitung saat pertama kali perusahaan mencetak laba. Selain itu, Vietnam hanya memberikan upah minimum buruh hanya mencapai Rp. 75.000/bulan, jauh lebih rendah daripada Indonesia yang mencapai 114.000/bulan. Sehingga, di samping sumber daya alam yang melimpah, Vietnam juga memiliki keunggulan komparatif dalam hal upah buruh murahnya. Harga-harga berkembang stabil di Vietnam, dengan laju inflasi terkendali, sejak belakang ini. Daya beli penduduk dapat mengatasi permintaan yang ada dan nilai tukar mata uang Vietnam, dapat dipercaya para investor asing.

Jika peluang RRC untuk berkembang terletak pada kebijakan pemerintahan AS dan Eropa yang akomodatif dan kontributif, terutama dalam pemberian GSP dan status MFN, maka peluang Vietnam terletak pada diakhirinya embargo ekonomi AS sejak awal Februari tahun 1994 ini. Persamaannya, selain kedua negara sosialis itu telah menjalankan reformasi ekonomi, keduanya jelas akan diuntungkan oleh kebijakan AS dan Eropa, serta para penganutnya, yang akan memberikan kontribusi dana yang tidak sedikit jumlahnya.

Seperti kita ketahui, dalam dunia bisnis, para investor asing pada umumnya menuntut beberapa syarat utama yang harus dipenuhi, yakni tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai, iklim usaha yang baik dan menjanjikan prospek secara ekonomis, daya serap pasar beli penduduknya, serta stabilitas

politik yang kondusif dan terjamin di negara itu dalam jangka panjang.

Kelemahan Indonesia untuk menarik modal asing terletak dalam penyediaan infrastruktur dengan kapasitas energi listrik, telepon, kawasan industri, kebijakan fiskal, fasilitas perbankan yang masih terbatas. Kelemahan lain adalah mudah terjadinya *high cost economy*, praktik monopoli, oligopolii, korupsi dan berbagai kendala birokratis.

Bagi investor AS, salah satu faktor yang membuat iklim investasi di Indonesia kurang menarik bagi mereka adalah terdapatnya kendala untuk melakukan investasi 100%, terutama bagi investasi yang membawa teknologi tertentu, dan adanya keharusan tanpa persyaratan kepentingan dagang (*divestment*), yang tidak layak lagi diperbankan, jika kita memang ingin menarik modal asing. Kemudian, kondisi dua sektor industri nasional, baik yang berskala kecil maupun menengah, sangat tidak memadai.

Banyak para calon investor asing untuk industri berskala kecil dan menengah, menganggap investasi dalam kedua sektor itu di Indonesia mempunyai resiko usaha tinggi, sebab kedua industri dimaksud tidak memperlihatkan perkembangan yang berarti. Padahal industri kecil dan menengah dijadikan parameter ekonomi yang stabil oleh para investor asing.

Sementara hal yang rawan di RRC terletak pada kelangsungan sistem ekonomi reformatif yang telah dijalankan Deng Xiaoping. Sistem ekonomi reformatif itu sendiri masih disertai dengan kebijakan devisa yang tidak bebas, dengan intervensi pemerintah yang masih kuat dalam bidang moneter. Sedangkan Vietnam menghadapi persoalan masih terbatasnya infrastruktur dan berbagai fasilitasnya sebagai prasyarat industrialisasi dan upaya mendukung kegiatan ekspor-impor. Sistem perbankan pun belum berkembang, sehingga terdapat kesulitan untuk melakukan pembayaran dengan *letter of credit*.

Berkaitan dengan kelemahan Indonesia dalam industri kecil dan menengah, kita perlu mempersiapkan paket deregulasi baru dalam waktu dekat, yang sifatnya tidak setengah-setengah tetapi menyeluruh, agar benar-benar menguntungkan. Seharusnya paket deregulasi direncanakan secara matang dan dilancarkan sekaligus dalam jangka pendek, sehingga dalam jangka panjang pemerintah dapat mengembangkan industri kecil dan menengah.

Pembentahan infrastruktur dengan menstimulasi penyediaan kawasan-kawasan industri yang menarik dan dilengkapi dengan akses yang baik

(jaringan transportasi), perangkat komunikasi yang canggih, saluran telepon yang line yang banyak, serta energi listrik yang besar, harus segera dipayakan. Urusan administratif-birokratis pun perlu disederhanakan, dengan menghilangkan banyak jalur, meja dan pihak yang wajib ditemui para investor. Sejalan dengan itu, instrumen fiskal dan moneter perlu diperbaiki dengan membuat sistem ekonomi menjadi efesien dan tidak lagi berbiaya ekonomi tinggi. Kalau dapat malah ditawarkan insentif yang lebih menarik, misalnya dalam bidang perpajakan, bagi mereka yang mau menanamkan modal di bidang atau kawasan tertentu.

RRC dan Vietnam telah dan akan menjadi persaing Indonesia dalam memperebutkan investasi asing yang jumlahnya terbatas. Karena itu, Indonesia harus terus memperbaiki diri, di antaranya dengan cara meningkatkan teknologi produksi dan kualitas sumber daya manusianya, serta tidak dapat lagi mengandalkan diri pada biaya buruh yang murah. Memang dibanding Vietnam, kita sudah selangkah di depan dalam mencanangkan diri sebagai negara pengundang modal asing, namun pencabutan embargo harus menjadi picu untuk memperbaiki diri.

Dalam menghadapi perkembangan ekonomi di kawasan Asteng yang meningkat pesat belakangan ini, ASEAN hendaknya dapat menjadikan RRC dan Vietnam juga sebagai peluang, antara lain dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bisnis patungan (*joint-ventures*) dan pembangunan pusat promosi dagang bersama yang saling menguntungkan. Dasar dari pertimbangannya adalah, melimpahkan modal asing di RRC, membuat negara itu memiliki modal untuk ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu di kawasan ASEAN, yang menarik dan menjadi alternatif lain.

Sebaliknya, ASEAN seharusnya tidak hanya mengkonsentrasi diri pada kegiatan ekspor yang berbasis produksi di kawasannya, tetapi juga di kawasan luar, seperti di RRC dan Vietnam. Sudah tentu pihak mana yang dapat mengambil manfaat lebih, tergantung pada kesiapan dan keunggulan komparatif yang dimiliki negara masing-masing. Persoalannya kini adalah, siapa yang lebih dulu siap merespon peluang-peluang yang ada, dengan kemampuan yang sebagaimana yang dibutuhkan?

Beberapa Isu dalam Hubungan ASEAN-AS

ASEAN mempunyai sikap bersama agar masalah lingkungan tidak dijadikan hambatan untuk akses masuk komoditi ekspor ke AS. Kritik AS tentang hutan tropis terlalu berlebihan, sehingga beberapa waktu lalu perlu ditangkal dengan penjelasan sebenarnya mengenai kondisi hutan tropis di beberapa negara ASEAN, baik melalui forum bilateral dan multilateral antar pemerintah maupun antar parlemen (AIPQ, IPU dsb). Bahkan secara informal pun kampanye penerangan telah dilakukan, antara lain melalui media massa elektronik dan cetak. Semua itu telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Malaysia dan Indonesia merupakan dua negara yang banyak disudutkan dalam soal hutan tropis ini. Memang kritik negara-negara maju yang banyak dipelopori oleh AS mengenai masa depan hutan tropis beralasan, mengingat kerusakan lingkungan (menipisnya ozon, pemanasan global, menaiknya volume air laut dst) dirasakan pula dampaknya oleh negara itu. Namun, negara-negara ASEAN juga ingin mengemukakan, bahwa juga mempunyai hak untuk membangun, yang telah pula dikedepankan sebagai salah satu hal dasar mereka. Dan hak membangun itu diwujudkan dengan model pembangunan yang tidak merusak lingkungan. Negara-negara ASEAN mendukung pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang telah dicanangkan PBB dan mendapat sambutan dalam Konferensi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil.

Dalam batas tertentu yang rasional, negara-negara ASEAN secara terbuka dapat menerima kritik dimaksud. tetapi, bagi negara-negara ASEAN, kritik suatu pemerintah hendaknya tidak mendiskreditkan posisi mereka dalam fora internasional dan melampaui batas, sehingga menyerupai intervensi atas masalah-masalah domestik. Karena, hal ini akan menimbulkan disinformasi dan merugikan negara-negara ASEAN di bidang lain, yakni akses pasar atas komoditi ekspor mereka di kawasan lain. Sikap ASEAN sama, menolak kritik yang berlebihan semacam itu.

AS memiliki keprihatinan yang serius dalam soal narkotika dan obat bius sudah di luar kontrol dan generasi muda AS banyak menjadi korban. Di sisi lain itu berkaitan dengan meningkatnya pelaku kriminal kalangan muda disana. Sementara di negara-negara ASEAN, terutama Malaysia, Singapura dan Indonesia, walaupun kasus-kasus penyalahgunaan narkotika dan obat bius, serta korban-korbannya tidak separah di AS, pemerintah nasional masing-

masing menerapkan hukuman yang serius terhadap para pelanggarnya. Sikap Malaysia dapat dikatakan lebih tidak kompromis terhadap kasus narkotika dan obat bius (dada), sehingga sempat menimbulkan masalah dengan beberapa negara Barat. Sedangkan Singapura, kasus vandelisme seorang anak muda AS menjadi perhatian di tingkat nasional oleh pemerintah ybs.

Kondisi negara-negara ASEAN yang tidak luput dari jalur lalu-lintas perdagangan narkotika dan obat bius internasional, perlu membuat AS dan ASEAN melakukan kerjasama dalam soal ini, agar setiap pemerintah dapat mencegah pemasukan secara ilegal ke negara masing-masing. Kerjasama khususnya perlu dilakukan dengan anggota ASEAN Thailand dan juga mitra dialog lain yang berstatus peninjau dalam Komite Kerja dan Sidang Umum AIPO di Manila, misalnya Laos dan Myanmar, yang terletak di kawasan Segitiga Emas yang telah dikenal sejak lama sebagai basis penanaman narkotika dan pelemparannya ke seluruh dunia, bahkan ke Amerika.

Dalam kasus perdagangan obat bius secara ilegal yang melibatkan marinir AS beberapa bulan lalu, pihak AS kurang memperlihatkan sikap tegasnya dengan pengadilan kedua orang yang terlibat itu di Indonesia. Ini menimbulkan kritik di Indonesia dan pemerintah AS ditekan sebagai tidak konsisten dengan keinginannya untuk memberantas perdagangan narkotika dan obat bius, yang telah menjadi komitmen kuat pemerintah sejak beberapa kepemimpinan presiden belakangan ini, seperti tampak dalam dukungan pemerintah AS yang tinggi atas operasi-operasi yang dilaksanakan oleh DEA (*Drugs Enforcement Administration*).

Kerjasama kebudayaan telah berlangsung sejak lama dan dapat berkembang dengan baik. Studi kebudayaan Asia, termasuk kawasan Asteng, merupakan salah satu bidang yang banyak peminatnya di AS. Aspek-aspek kebudayaan tradisional Indonesia, belakangan menarik peminat yang tinggi, misalnya untuk perwayang, tarian Jawa, seni karawitan, gamelan dst.

Di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, banyak orang AS yang melakukan studi dan survey terlibat. Sementara, pengiriman misi-misi kebudayaan Indonesia juga telah beberapa kali dilakukan dan mendapat sambutan hangat, antara lain KIAS dan festival-festival Indonesia lainnya. Sikap dan sambutan negara-negara ASEAN terhadap kerjasama kebudayaan dengan AS, sebagai jalur lain untuk meningkatkan saling pengertian, responsif sekali. Di beberapa negara telah banyak berdiri lembaga-lembaga AS yang mempunyai hubungan dengan

pengembangan kebudayaan kedua belah pihak, seperti lembaga kursus bahasa Inggris, yang banyak pula dibantu oleh yayasan-yayasan swasta negeri itu.

Sesungguhnya soal ini yang menjadi concern dan harapan negara-negara ASEAN yang tengah membangun, melakukan industrialisasi dan meningkatkan pemasukan devisa melalui ekspor. Harapan ASEAN yang besar untuk transfer teknologi tentu tidak dapat bersifat menunggu saja dan sarat dengan himbauan, tetapi harus lebih jauh melangkah dengan melihat peluang kerjasama dan memanfaatkannya. Apa yang dilakukan Menristek Indonesia, BJ Habibie, dengan pembangunan industri pesawat di AS adalah dalam rangka alih teknologi, meringankan biaya produksi dan memudahkan akses pasarnya.

Pelaksanaan pameran teknologi di negara-negara ASEAN dengan mengikutsertakan banyak negara-negara maju juga dalam rangka ini. Namun yang sangat berarti adalah kerjasama teknologi, pendidikan dan perdagangan antara kedua belah pihak, yang perlu dikembangkan di masa depan, seperti yang sudah dilakukan dengan Jerman. Ini merupakan langkah alternatif untuk melenyapkan ketergantungan akibat kesenjangan teknologi antara negara-negara ASEAN dengan negara-negara industri Barat.

Dapat dikatakan AS merupakan negara yang seringkali mengirimkan delegasi parlemen ke kawasan Asia, khususnya Indonesia, baik dalam rangka mencari penjelasan atas suatu masalah atau dalam rangka meningkatkan kerjasama dan saling pengertian dengan pemerintah yang ada. tidak hanya itu, pengiriman staff anggota (*congressional staff*) juga sering dilakukan, yang adakalanya bersifat mempelajari suatu masalah krusial di suatu negara. Ke Indonesia misalnya, kunjungan parlemen dan staffnya, selain mendistribusikan masalah-masalah umum yang berkaitan dengan hubungan bilateral kedua negara, juga mencari fakta langsung kelapangan tentang suatu masalah yang menjadi hot subject di dunia inter nasional, seperti perkembangan keadaan di Timtim.

Sebaliknya negara-negara ASEAN, sebagaimana yang diperlihatkan Indonesia, mengirimkan delegasi parlemen ke AS. Terakhir kali kunjungan delegasi yang dipimpin Prof. Dr. JA Katili, berkaitan dengan upaya membangun kerjasama antara parlemen yang lebih baik, yakni menyiapkan supporting system yang lebih responsif terhadap kebutuhan para anggota Dewan. Kerjasama antara staf pendukung (*Congressional Research Service*) US Congress dengan Sekretariat Jenderal DPR RI, telah terjalin dengan baik sejak beberapa tahun belakangan. Sehingga, kegiatan saling kunjung untuk melakukan studi

perbandingan ke parlemen sahabat, meningkat baik dalam bentuk diskusi, ceramah umum, atau tukar-menukar pengalaman.

Pandangan negara-negara ASEAN yang positif terhadap kerjasama semacam ini, kondusif sekali dengan upaya mereka untuk menjelaskan kebijakan pemerintah nasional masing-masing, sehingga kesenjangan sikap atas masalah tertentu, dapat dijembatani. Sikap AS memang sering kritis dalam dialog-dialog antar parlemen. Sementara negara-negara ASEAN yang banyak disudutkan oleh pemerintah dan parlemen AS, senantiasa berusaha mempertahankan sikap kukuhnya atas masalah-masalah tertentu yang menjadi kepentingan nasional, dan tidak ingin diintervensi dalam soal tersebut

Kawasan Asia Pasifik dan Peran Parlemen

Kawasan Asia Pasifik sebagaimana telah diprediksikan sebelumnya, akan tetap menjadi kawasan yang dinamis di masa mendatang, karena letaknya yang strategis secara geopolitik dan geoekonomi. Kawasan ini terletak pada posisi silang dan merupakan kawasan yang tengah berkembang, dengan munculnya Jepang sebagai salah satu kekuatan (lokomotif) ekonomi dunia dan Korea Selatan, Taiwan serta Singapura sebagai *Newly Industrialized Countries* (Negara-negara Industri Baru). Sedangkan RRC Sebagai "naga yang baru bangun," diantisipasi dapat menjadi kekuatan baru ekonomi dan dunia yang amat potensial, mengingat perkembangan ekonomi dan angka pertumbuhannya yang menakjubkan (di atas 8% per tahun), di saat pertumbuhan di negara-negara maju tengah mengalami kelambanan.

Di pihak lain, Vietnam, yang masih merupakan bagian dari penyebaran kultur confusianisme, dilihat dari kebangkitan ekonominya belakangan ini setelah dijalankannya reformasi, menjadi daya tarik yang besar bagi investasi-investasi baru negara-negara maju. Karena itu, Vietnam menjadi pendatang baru yang sekaligus merupakan *new competitor* dalam memperebutkan arus kapital yang mengalir di kawasan Asia Pasifik bagi Indonesia, setelah RRC yang amat dikuatirkan sebelum ini.

Diketahui, para pembuat kebijakan ekonomi negara-negara ASEAN baru-baru ini mencapai kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama di bidang penanaman modal asing, dengan mencari pola-pola bentuk kerjasama yang tepat dan sepakat untuk tidak berkompetisi secara habis-habisan. Semua ini merupakan aliran modal di kawasan Asia Pasifik dan semakin besarnya

kemampuan RRC dan Vietnam dalam memanfaatkan peluang yang ada. Perekonomian Thailand dan Malaysia yang dalam perspektif ekonomi internasional dan lingkungan ASEAN dapat dikatakan lebih prospektif, dan tidak luput dari kekuatiran yang sama.

Sebagai konsekuensi, seperti halnya para pembuat kebijakan ekonomi (eksekutif) yang telah mengambil tindakan positif dalam melihat kecenderungan perkembangan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, sepatutnya para anggota parlemen, khususnya dari Indonesia (DPR RI), pun demikian. Akan Lebih baik lagi kalau apa yang akan dilakukan oleh para anggota parlemen kita, tidak reaktif, namun juga bisa mempersiapkan langkah-langkah antisipatif, dengan menyusun berbagai kertas kerja konseptual, tanggapan/respons, maupun masukan, hasil analisis kritis dari perkembangan ekonomi yang berlangsung di Asia Pasifik, yang dapat disampaikan dalam berbagai pertemuan antar anggota parlemen di kawasan ini.

Sebagai contoh, hal itu bisa dilakukan melalui forum reguler AIPO (antarpelajaran negara ASEAN), antarpelajaran Asia Pasifik maupun forum-forum parlementer bilateral dari negara-negara yang saling membutuhkan. Bisa pula berbagai pikiran dan pendapat para anggota parlemen kita sampaikan bukan dalam forum pertemuan legislatif, tetapi dalam forum *pertemuan eksekutif* tingkat tinggi seperti KTT ASEAN, ASEAN Ministerial Meeting dst, yang merupakan pula kesempatan untuk memanfaatkan lobby dengan baik, dengan cara dan strategi yang tepat.

Para anggota parlemen Indonesia dapat memainkan peran yang positif, tidak hanya sebagai penguat/pendukung kebijakan yang telah diambil eksekutif ekonomi (para menteri pejabat yang mengurus bidang Ekuin) ke dalam maupun ke luar, tetapi juga sebagai pengambil inisiatif dengan lebih mendorong eksekutif ekonomi kita, untuk menyusun kebijakan yang kondusif dan responsif terhadap implementasi kebijakan, para anggota parlemen berperan besar dalam mengatasi konsistensi pelaksanaan ketentuan yang telah disepakati bersama. Kalau mau lebih baik lagi, para anggota parlemen kita harus bekerja keras memperlihatkan fungsinya sebagai decision maker dengan menyusun ketentuan-ketentuan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan itu, dalam hal legislasi/peraturan perundang-undangan, yang sesungguhnya merupakan wewenang mereka yang dijamin oleh konstitusi nasional.

Dengan demikian, peran anggota parlemen tidak terbatas hanya sebagai

pengontrol implementasi kebijakan ekonomi pemerintah di kawasan ybs, namun lebih dalam lagi, turut menjadi penyusunan policy kepentingan negara, lewat bantuan berbagai *expert* atau *researcher* di parlemennya masing-masing. Beberapa contoh praktis misalnya, memberikan pressure pada eksekutif untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak berbiaya ekonomi tinggi, sehingga dapat mempertinggi daya tarik bagi investasi asing dan kompetisi di pasar kawasan; untuk menjalankan deregulasi ekonomi yang konsisten dalam bidang moneter dan sektor riil, dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional; untuk melakukan debirokratisasi ataupun menghapus sama sekali kendala-kendala birokratis dalam kegiatan ekonomi nasional; untuk menjalankan ketentuan yang ada secara konsekuensi, agar berbagai bentuk *economic crime* seperti pungli, korupsi, manipulasi, praktek-praktek penipuan dsb, yang banyak dikeluhkan dan dikuatirkan para pengusaha domestik dan asing, dapat dicegah.

Para anggota parlemen diharapkan dapat mengambil sikap yang sama dengan para eksekutifnya di kawasan ini, yang telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan investasi melalui pembentukan kebijakan yang stimulatif, serta untuk mengatasi bersama berbagai hambatan yang ada. Para anggota parlemen terpanggil dalam mengatasi masalah krusial dalam hal disparitas atau kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang keliru, yang telah diaplikasikan oleh pemerintah negaranya masing-masing. Karena, dalam jangka panjang disparitas ekonomi ini akan berdampak buruk atas stabilitas nasional negara di kawasan yang sama (Asia Pasifik).

Dalam upaya ini, para anggota parlemen dapat memotivasi pembentukan kebijakan yang mengarah pada program pengurangan kesenjangan dan mengarah pada pemerataan, serta pengentasan kemiskinan yang masih tampak di beberapa negara seperti Indonesia, Filipina, dsb. Demikian halnya dengan kesenjangan ekonomi antarnegara di Asia Pasifik. Perbedaan pendapatan nasional perkapita yang mencolok, yang berarti pula perbedaan tingkat kemakmuran negara, akan melahirkan jurang pemisah yang dalam antar negara di kawasan ini. Jelas disadari terdapat perbedaan yang besar antara tingkat kemakmuran Jepang, Taiwan, Korsel, Singapura dengan Vietnam, Indonesia, Philipina dst. Sedangkan ketidakseimbangan perdagangan, praktek-praktek perdagangan yang tidak faair seperti dumping, kebijakan proteksionisme dsb, akan semakin menebalkan egoisme kepentingan nasional.

Di sisi lain, perkembangan politik dalam negeri setiap negara di kawasan Asia Pasifik, menuntut pula perhatian yang seksama dari para anggota parlemen. Konflik-konflik lokal yang berlatar belakang primordial, yaitu agama, etnis, ras dsb, merupakan ancaman laten yang membahayakan keamanan nasional setiap negara bangsa yang pluralistik di kawasan ini. Tanpa peran serta para anggota legislatif dalam meletakan dasar penyelesaian masalah secara arif, sehingga pemerintah mampu mengatasi dengan tepat, segala konflik lokal dan primordial itu dapat menjadi ancaman serius. Dalam skala luas, implikasinya dapat mengganggu hubungan baik negara-negara di kawasan ini. Perhatian misalnya masalah ras (keturunan Cina) yang dihadapi baik oleh Indonesia, Malaysia, Singapura maupun Vietnam. Demikian pula dengan masalah sensitif perkembangan agama Islam di Indonesia, Malaysia, Thailand.

Sesudah berakhirnya Perang Dingin dan lenyapnya rivalitas Soviet-AS di Asia Pasifik, stabilitas kawasan harus diciptakan. Sementara munculnya rivalitas kekuatan baru, misalnya antara RRC dan Jepang, harus dihindarkan, sebab dapat berdampak buruk pada goyahnya stabilitas kawasan seperti di masa lalu. Kekuatan kekuasaan adidaya setelah keluarnya AS dari Subic Bay dan Clark Field di Filipina dan Soviet dari Chamn-ranh dan Danang, jangan sampai memaksakan kehendaknya di kawasan ini.

Kecurigaan akibat pembangunan kekuatan militer yang eksesif, terutama perlombaan pengembangan persenjataan laut yang sangat mengkuatirkan, sebagaimana diberitakan belakangan ini, harus dipupuskan dengan upaya meningkatkan saling kunjungan delegasi negara tingkat tinggi, baik eksekutif maupun legislatif. Hal ini penting untuk meningkatkan saling pengertian, menggalang kerjasama dan menghilangkan kecurigaan, lewat media pertemuan bilateral eksekutif dan legislatif di kawasan ini. Kunjungan PM PNG Wingti dan para anggota parlemen PNG baru-baru ini, dapat menghilangkan kecurigaan akan ancaman yang datang dari Indonesia, di samping untuk berbisnis dan meningkatkan kerjasama ekonomi; Di masa datang, kunjungan-kunjungan yang reguler dan lebih sering antarparlemen Australia-Indonesia, Vietnam-Indonesia, RRC-Indonesia, Malaysia-Indonesia dsb, dapat ditingkatkan dalam rangka itu. Karena diketahui, selama ini untuk saling kunjung antar-pihak eksekutif sudah berjalan lebih dulu dan baik. Tinggal kegiatan antarparlemennya saja, yang perlu diperbaiki.

Terakhir, masalah krusial berdimensi politik dan ekonomi yang berkaitan

dengan kedudukan geopolitik Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan amat mengganjal adalah, penyelesaian konflik Kampuchea yang tidak kunjung selesai. Padahal kalau semua negara di kawasan Asia Pasifik mempunyai kepentingan yang sama atas stabilitas kawasan bagi prospek kemajuan ekonomi, konflik tersebut harus diselesaikan secara tuntas. Terpanggilnya Jepang, RRC, ASEAN, khususnya Indonesia sebagai interlocutor, dalam perwujudan perdamaian di Kampuchea, memperlihatkan adanya komitmen kepentingan atas masa depan kawasan ini. Sebab itu, semua langkah penyelesaian harus diikuti dengan sikap konsisten masing-masing negara.

Sikap kalangan tertentu (bisnis) di Thailand yang masih memberikan peluang basis ekonomi bagi Khmer Merah untuk menjalankan aksi penentangannya terhadap Persetujuan Paris dan Resolusi PBB No. 792, harus dihentikan, jika semua pihak mengharapkan konflik selesai dan Pemilu serta masa depan Kampuchea ingin dibangun. Disinilah para anggota parlemen Indonesia dapat memainkan peranan besar untuk meyakinkan dan mendesak rekan legislatif dan pemerintah Thailand untuk bersikap serius menangani atau menyetop kalangan tertentu di sana, yang masih melakukan bisnis dengan Khmer Merah. Kesempatan untuk melakukan itu dapat dimanfaatkan pada pertemuan bilateral antar anggota parlemen, konferensi regional/internasional antarparlemen, ataupun dengan melakukan kunjungan langsung ke pihak pemerintah dan wilayah perbatasan Thailand-Kampuchea, sebagai sebuah *lobby* yang dapat berpengaruh besar dalam penyelesaian masalah.

DAFTAR PUSTAKA

ASEAN Inter-parliamentary Organization Report of the 11th Working Committee and General Assembly : Singapore 10-15 September 1990. Singapore : AIPO, 1990.

ASEAN : Twenty-Seventh ASEAN Ministerial Meeting and Post Ministerial Conferences with Dialogue Partners. Jakarta : ASEAN Secretariat, 1994

Facts on ASEAN. Malaysia : Ministry of Foreign Affairs, 1977

Fifth ASEAN Summit : Meeting of the ASEAN Heads of Government in Bangkok 14-15 December 1995. Jakarta : ASEAN Secretariat, 1996.

Joint Communique ASEAN Inter-parliamentary Organization Ninth Working Committee and General Assembly 24-30 January, 1988, Kuala Lumpur-Malaysia, Jakarta : AIPO, 1988.

Laporan Ringkas Sidang Kedua ASEAN Committee on Culture and Information in Jakarta 16-18 January 1980. Jakarta : Secretariat ASEAN, 1980.

Pidato Presiden pada Pembukaan Konperensi Kerja Sama Indonesia-ASEAN-MEE ke 2 26 Februari 1979 di Jakarta. Jakarta : Departemen Penerangan, 1979

Pidato Presiden Republik Indonesia pada Penutupan KTT ASEAN ke 2 di Kuala Lumpur 5 Agustus 1979. Jakarta : Departemen Penerangan, 1977.

Sambutan Presiden pada Pembukaan Sidang Para Menteri Ekonomi ASEAN ke-6 15 Juni 1978 di Jakarta. Jakarta : Departemen Penerangan , 1978.

ASEAN Selayang Pandang. Jakarta : Seknas ASEAN Deplu RI, 1995

Ten Years ASEAN Interparliamentary Cooperation. Jakarta : AIPO, 1985.

Wanandi, Yusuf. the ASEAN Political and Security Cooperation. Jakarta : CSIS, 1993.

BAB IV

PERLUASAN KEANGGOTAAN ASEAN DAN PELUANG PENINGKATAN KERJASAMA EKONOMI

Oleh : Humphrey Wangke^{})*

1. PENDAHULUAN

Menurut seorang pakar ekonomi politik dari Korea Selatan, memasuki abad ke-21, di dalam dunia internasional dewasa ini terdapat kecenderungan mendasar yang muncul dalam lingkup ekonomi global. Kecenderungan pertama adalah, berkembangnya globalisasi dan regionalisasi dalam hubungan perdagangan, investasi luar negeri dan kerjasama ekonomi. Kecenderungan lainnya adalah perubahan besar dalam struktur industri, teknologi, pasar modal, lingkungan, dan pasokan energi.¹⁾ Kecenderungan ini pada hakekatnya memperjelas arah ekonomi dunia saat ini yang sedang berada dalam proses globalisasi dimana baik sektor ekonomi riil maupun pasar modal telah terintegrasi sehingga bergerak terus secara dinamis ke arah ekonomi tanpa batas negara.

Pada awalnya, regionalisasi ekonomi dunia dimaksudkan untuk mempercepat proses liberalisasi perdagangan dunia (GATT). Tetapi dalam kenyataannya regionalisasi itu cenderung untuk mengarah pada zona ekonomi yang bersifat eksklusif yang bersikap diskriminatif dan protektif terhadap negara-negara yang bukan menjadi anggotanya. Sehingga dalam waktu hampir bersamaan, pembentukan zona-zona ekonomi semakin marak. Di Eropa, konsolidasi Uni Eropa terus meningkat mendekati taraf akhir persetujuan mata uang tunggal. Di Amerika, pembentukan zona ekonomi regional tidak saja bisa kita jumpai di Amerika Utara dalam bentuk Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara seperti NAFTA, tetapi juga di Amerika Tengah dan Selatan terjadi kristalisasi kerjasama ekonomi regional.

Semakin "ter tutupnya" pasar ekspor luar negeri yang selama ini menjadi mitra dagang tradisional ASEAN mendorong negara-negara di kawasan Asia

¹⁾ Hahn Koo Lee, *Global Economic Changes Toward the 21st Century and Korea's Response*, Korea and World Affairs, Vol XX, No. 1, Spring 1996, hal 53

Tenggara mengkonsolidasikan kerjasama ekonominya. Sehingga untuk itu dibentuklah kawasan perdagangan bebas ASEAN atau *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Tujuannya adalah untuk memperluas dan memperbesar pangsa pasar perdagangan internasional. Disadari bahwa Asia Tenggara yang telah muncul sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang tergolong dinamis, dan akan memainkan peranan penting di masa-masa yang akan datang²⁾, memerlukan pasaran ekspor yang tidak kecil. Dengan semakin tertutupnya pasar luar negeri, maka potensi dalam negeri harus dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya.

Bahkan menurut Leszek Buszynski perkembangan ASEAN tidak hanya mencakup kerjasama ekonomi saja. Lebih jauh ia berpendapat bahwa sejak berakhirnya perang Kamboja telah terjadi 4 kemajuan besar di kawasan Asia Tenggara sebagai wujud dari interaksi negara-negara di kawasan itu dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik.³⁾ Pertama, perluasan anggota ASEAN ke negara-negara yang terletak di Asia Tenggara daratan. Kedua, konsolidasi regionalisme ekonomi dalam bentuk AFTA sebagai hasil kesepakatan KTT ASEAN di Singapura 1992. Ketiga, peran besar ASEAN sebagai aktor penting di kawasan Asia Pasifik baik dalam kerjasama ekonomi maupun keamanan. Keempat, pergeseran dan penyesuaian yang dilakukan oleh ASEAN dalam hubungannya dengan negara-negara besar.

Sejalan dengan perkembangan diatas, maka pada sidang para Menlu ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 23-24 Juli 1997 telah menambah jumlah anggota ASEAN menjadi 9 negara menyusul diterimanya Laos dan Myanmar sebagai anggota baru. Keputusan untuk menerima anggota baru itu mempunyai arti strategis yaitu untuk meningkatkan pangsa pasar dan daya saing produk ASEAN di pasar internasional. Secara politis perluasan anggota ini juga akan meningkatkan kapasitas ASEAN sebagai kelompok kerjasama subregional yang terus berkembang dan berpengaruh di kawasan Asia Tenggara.

Tulisan berikut ini akan mengulas tantangan perluasan itu dan harapan terhadap kerjasama ekonomi dan politik ASEAN di masa mendatang menyusul kesepakatan yang diambil dalam pertemuan para Menlu ASEAN tanggal 23-24 Juli 1997 di Petaling Jaya, Malaysia, dengan menerima negara-

²⁾ Willy Kraus and Wilfried Lutkenhorst, "The Economic Development of the Pacific Basin". St. Martin Press, New York, 1986. hal. 21

³⁾ Leszek Busynki, "Trends, Development and Challenges in Southeast Asia", dalam Daljit Singh & Liak Teng Kiat, "Southeast Asian Affairs 1996". Institute of Southeast Asian Studies, 1997, hal. 3

negara sosialis seperti Laos dan Myanmar menjadi anggota baru ASEAN. Penerimaan negara-negara ini merupakan wujud dari kepedulian ASEAN terhadap cita-cita para pendiri ASEAN yang menginginkan seluruh negara yang secara geografis terletak di kawasan Asia Tenggara menjadi anggota ASEAN. Cita-cita ASEAN-10 sebenarnya sudah hampir terlaksana pada saat ASEAN merayakan ulang tahunnya yang ke-30 tahun 1997. Tetapi sayang pada saat-saat terakhir, konflik internal yang terjadi di Kamboja memaksa ASEAN untuk menunda keanggotaan mereka. Untuk melengkapi tulisan ini, penulis juga menyertakan profil Vietnam dan Kamboja, sebab Vietnam merupakan negara sosialis pertama yang diterima ASEAN sebagai anggota baru, dan Kamboja diperkirakan akan menjadi negara sosialis terakhir yang diterima menjadi anggota ASEAN.

2. PARADIGMA BARU

Babak awal dari proses perluasan keanggotaan ASEAN dimulai ketika Vietnam diterima menjadi negara anggota ASEAN ketujuh pada sidang menlu ASEAN (AMM-ASEAN *Ministerial Meeting*) ke-28 di Brunei, tanggal 29-30 Juli 1995. Berbagai pertimbangan telah diperhitungkan oleh ASEAN ketika menerima Vietnam sebagai anggota baru ASEAN. Bagi negara seperti Indonesia misalnya, keanggotaan Vietnam akan berarti memperkuat posisi ASEAN dalam menghadapi Cina. Sedangkan bagi Thailand bergabungnya Vietnam berarti akan semakin memantapkan posisi Thailand sebagai pusat ekonomi negara-negara ASEAN yang terletak di daratan Asia Tengah. Sementara itu bagi Singapura, pertimbangan ekonomi dan perdagangan menjadi alasan utama mengapa menerima Vietnam menjadi anggota baru ASEAN.

Sementara itu pada bulan Januari 1995, Kamboja telah pula menandatangani *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) dan dijamin akan memperoleh status negara peninjau begitu Parlemen Kamboja meratifikasi perjanjian tersebut. Berdasarkan skenario yang ada, Kamboja dan Laos diperkirakan akan segera diterima menjadi negara anggota ASEAN pada tanggal 30 Juli 1997. Myanmar telah menyatakan keinginannya untuk bergabung kedalam ASEAN. Keputusan Myanmar untuk menandatangani TAC disambut hangat oleh ASEAN tetapi, karena kondisi dalam negerinya, tidak disertai jaminan akan segera memperoleh status peninjau.

Ketika berlangsung pertemuan informal tingkat tinggi di Jakarta akhir tahun 1996, para kepala pemerintahan ASEAN sepakat untuk mencari waktu yang tepat dalam menerima Myanmar menjadi anggota ASEAN. Seandainya terjadi penundaan terhadap keanggotaan Myanmar, karena perkembangan situasi dalam negerinya, diperkirakan hal itu tidak akan melebihi tahun 2.000. Tekanan pihak luar untuk menunda keanggotaan Myanmar dirasakan sangat mengganggu keharmonisan ASEAN.

Perluasan keanggotaan ASEAN ternyata tidaklah semudah seperti yang diharapkan. Disatu sisi perluasan anggota ini diyakini akan memperkuat status internasional organisasi subregional ASEAN, tetapi di lain sisi juga muncul persoalan baru yang dikawatirkan akan mempengaruhi tingkat kohesifitas organisasi regional ini. Diperkirakan ASEAN akan lebih sulit mencari konsensus dalam pengambilan keputusan, bahkan kemungkinan ASEAN bisa terpecah dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah negara-negara pendiri ASEAN yang secara ekonomis relatif lebih matang, sementara kelompok lain terdiri dari negara-negara yang secara ekonomis kurang maju yang terdiri dari negara-negara Indocina dan Myanmar. Menepis keraguan semacam yaitu, Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa perluasan anggota semacam itu justru mendekatkan ASEAN pada cita-cita penciptaan satu organisasi kerja sama ekonomi dan politik regional di kawasan Asia Tenggara.⁴⁾ Terciptanya ASEAN-10 justru akan mendorong ASEAN menjadi pusat kekuatan yang independen pada saat dominasi negara besar di dunia mulai kurang.

Secara ekonomis, negara-negara ASEAN merupakan entitas perdagangan terbesar ke-empat di dunia setelah AS, UE dan Jepang. Bahkan Alan Dupont meramalkan jika ekonomi ASEAN terus tumbuh seperti saat ini, suatu ketika nanti kombinasi kekuatan ekonomi negara-negara ASEAN akan mampu menggantikan posisi Jepang.⁵⁾ Kinerja ekonomi ASEAN memang menunjukkan kemampuan yang sangat pesat. Seperti pada tahun 1994, volume perdagangan intra ASEAN telah meningkat empat puluh satu persen menjadi 111 miliar dari US 79 miliar pada tahun 1993. Peningkatan ini menjadi sangat mengesankan karena merupakan 20 persen dari total perdagangan ASEAN, lebih besar dari pada perdagangan ASEAN dengan Jepang yang

⁴⁾ *The Strait Times*, 28 Juli 1995

⁵⁾ Alan Dupont, *Southeast Asia Takes Region's Future Into Its Own Hands*, *International Herald Tribune*, 30 September 1996

19 persen, dengan AS 17 persen dan UE 15 persen. Total nilai perdagangan ASEAN dengan negara-negara diluar kawasan pada tahun 1994 adalah US 506 miliar atau meningkat 30 persen dari US 409 miliar pada tahun 1993.

Perkembangan dinamika ekonomi politik ASEAN ini tidak lepas dari efektifnya CEPT. Dari tahun ke tahun produk CEPT semakin meningkat jika dilihat dari total perdagangan ASEAN. Tahun 1994 total produk CEPT telah mencapai 84 persen dari total perdagangan intra ASEAN. Hubungan dalam bidang politik dan keamanan kian meningkat sebagaimana tercermin dari terbentuknya ARF. ARF telah tiga kali mengadakan pertemuan dan telah menghasilkan keputusan konkret menyangkut langkah untuk menciptakan rasa saling percaya dan transparansi. Serta kemungkinan dikembangkannya diplomasi preventif.

Perkembangan strategis yang dialami negara-negara Asia Tenggara ini tampaknya merupakan buah dari paradigma baru (*new world paradigm*) yang mulai muncul awal tahun 1980-an. Inti dari paradigma baru tersebut adalah bahwa hubungan satu negara dengan negara lainnya tidak lagi didasarkan atas kesamaan faktor ideologi melainkan oleh faktor kepentingan ekonomi dan politik. Jika suatu negara masih mempertahankan faktor ideologi dalam membina hubungan kerjasama dengan negara lain, maka negara itu akan terisolasi dari pergaulan masyarakat internasional.

Proses menuju satu atap bagi kesepuluh negara di Asia Tenggara memang pantas disebut sebagai suatu perkembangan yang strategis dan membanggakan bagi ASEAN. Karena upaya kearah itu memakan waktu cukup panjang, tetapi jika sudah tercapai maka akan semakin memantapkan posisi ASEAN di percaturan politik internasional, terutama dalam menghadapi negara-negara besar yang hendak menanamkan pengaruhnya di kawasan ini. Seperti yang dilakukan oleh AS terhadap Myanmar, ternyata kebijakan AS untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Myanmar tidak menyurutkan tekad ASEAN untuk menerima sebagai anggota baru.

3. POTENSI ANGGOTA BARU ASEAN

- Vietnam

Seberapa besar sebenarnya potensi ekonomi Vietnam? Vietnam diakui mempunyai banyak keunggulan untuk menjadi negara adidaya dibidang

ekonomi.⁶⁾ Pertama, Vietnam mempunyai sumber daya alam luar biasa. Mulai dari minyak mentah sampai berbagai barang tambang bernilai tinggi, lahan pertanian yang subur, potensi hutan, laut dsb. Hingga saat ini semua potensi kekayaan alam ini masih belum tergarap sehingga Vietnam mempunyai kesempatan untuk mengeksplorasinya. Kedua, sumber daya manusia Vietnam termasuk hebat. Jumlah penduduk melek huruf tercatat 97 persen penerbitan buku amat tinggi menandakan bahwa masyarakatnya suka membaca. Penduduknya tergolong tangguh dan tahan bekerja keras dalam kondisi apapun. Ketiga, Vietnam sangat strategis, bahkan lebih strategis bila dibandingkan Indonesia. Karena posisi geografinya ini Vietnam memiliki akses mencapai banyak negara yang mempunyai perkembangan ekonomi luar biasa dalam tempo amat cepat. Hendak ke beberapa negara yang hebat ekonominya seperti Jepang, Singapura, Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, Thailand dan Malaysia hitungannya hanya beberapa jam saja.

Keempat, Vietnam mempunyai beberapa kemampuan lebih, atau sejumlah keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Penduduknya merupakan pekerja keras. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita dari US 50 menjadi US 230 hanya dalam 10 tahun. Vietnam bahkan mencanangkan mencapai pendapatan per kapita US 1.000 dalam kurun waktu tujuh tahun mendatang (1996-2003). Kelima, lokasi Vietnam strategis dalam makna geopolitik. Semua negara merasa perlu dengan Vietnam karena negara ini mempunyai potensi dalam banyak aspek. Keenam, upah buruh di vietnam masih sangat murah. Murahnya upah buruh ini merupakan keunggulan komperatif bagi Vietnam.

Tetapi Vietnam juga mempunyai masalah dengan birokrasi yang tidak efisien dalam menghadapi masa transisi pembangunan ekonominya. Setelah mengakhiri masa-masa perang yang menyulitkan tahun 1975, Vietnam segera membangun ekonomi negerinya berdasarkan ajaran Marxis. Tetapi semuanya gagal, dan sejak tahun 1986 Vietnam memulai babak baru dalam pembangunan ekonominya dengan menjalankan kebijakan baru yang lebih liberal yang disebut *doi moi*. Melalui *Doi Moi* ekonomi Vietnam menjadi lebih terbuka karena investor asing diijinkan menanamkan modalnya di sana. Sumber ketidak-efisienan terletak pada sikap mendua para anggota polibiro terhadap

⁶⁾ "Vietnam, dan Arogansi Calon Naga Baru", *Kompas*, 4 November 1996, hal. 17

reformasi.⁷⁾ Sekjen PK Vietnam Do Moui dan Presiden Le Duc Anh menghendaki agar reformasi jangan terlalu cepat, sementara PM Vo Van Kiet sebaliknya menghendaki reformasi harus lebih dipercepat. Perbedaan pendapat ini menjadikan investor asing ragu untuk menanamkan modalnya di Vietnam.

Menyadari masih tingginya keraguan para elit politik Vietnam terhadap perdagangan bebas, Wakil Dirjen Urusan ASEAN Departemen Luar Negeri Vietnam Nguyen Thanh Trung mengatakan bahwa bagi Vietnam kompetisi bukanlah maksud tujuan utama Vietnam menarik investasi asing langsung (FDI) di antara negara-negara ASEAN, tetapi yang terpenting bagaimana menciptakan semangat ASEAN, melakukan koordinasi, kerja sama dan meraih manfaat bersama.⁸⁾ Ia mengungkapkan bahwa dengan menjadi bagian ASEAN, investor asing terutama di luar negara ASEAN akan lebih percaya untuk menanamkan modalnya di Vietnam.

Vietnam-pun kini mempersiapkan diri menghadapi AFTA. Vietnam telah menggunakan pemotongan tarif 857 jenis barang atau komoditi impor dari negara ASEAN mulai Januari 1996 sesuai dengan skema CEPT. Kebijakan ini merupakan langkah pertama Vietnam dalam menghadapi kesepakatan AFTA yang secara khusus ditetapkan tahun 2006.⁹⁾ Setengah dari 857 jenis produk itu berupa komoditas pertanian, mesin dan peralatan. Lainnya adalah semen, besi, kertas, dan logam bukan besi. Jenis produk keseluruhan nantinya akan berjumlah sekitar 10.000 jenis. Menteri Perdagangan Vietnam, Lee Van Iriet mengatakan, keuntungan paling besar dengan bergabungnya Vietnam kedalam AFTA adalah akses pasar yang dalam waktu dekat akan terdiri dari 10 negara.¹⁰⁾ Di samping itu Vietnam mempunyai kesempatan besar untuk bergabung ke dalam APEC dan WTO serta ikut berpartisipasi dalam sejumlah perundingan dagang dengan beberapa negara ekonomi kuat dunia dengan posisi yang lebih kuat.

Sejauh ini Vietnam merupakan anggota ASEAN dengan GDP terkecil dan harus bekerja keras membenahi perekonomian nasionalnya yang masih

⁷⁾ Richard Halloran, "Now Disenchantment With Vietnam", *International Herald Tribune*, 19 November 1996

⁸⁾ *Suara Pembaharuan*, 20 Februari 1997.

⁹⁾ Kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) tepatnya dimulai 2003. Tetapi khusus kepada Vietnam diberikan kelonggaran untuk bergabung kedalam AFTA tahun 2006 agar lebih banyak waktu bagi mereka mempersiapkan diri.

¹⁰⁾ *Bisnis Indonesia*, 30 Desember 1995.

dalam taraf transisi. Masih banyak keraguan diantara anggota ASEAN akan kemampuan Vietnam untuk melakukan pemotongan tarif 0-5% seperti yang disepakati AFTA. Kelemahan Vietnam adalah *unskill labour*, inflasi tinggi, pengangguran tinggi dan *volatile exchange rate*.

- Myanmar

Kerjasama yang semakin erat antara ASEAN dengan Myanmar telah memancing kontroversi di antara negara-negara Barat dan pihak oposisi di Myanmar. Sejak tahun 1991 ASEAN menjalankan kebijakan “*constructive engagement*” terhadap Myanmar dengan pertimbangan jika Myanmar terus menerus diisolasi tidak akan membantu memajukan reformasi ekonomi dan politik di negara itu. Tetapi negara-negara Barat mengkritik “*constructive engagement*” ASEAN justru hanya akan mempertahankan regim militer pemerintahan SLORC yang telah membatalkan kemenangan mutlak Partai Liga Demokrasi Baru Aung San Suu Kyi dalam pemilu yang berlangsung tahun 1990. Bahkan negara Barat menuduh afiliasi SLORC dengan ASEAN hanya untuk mencari legitimasi internasional untuk mengalihkan kritik negara-negara Barat terhadap praktek-praktek pelanggaran HAM dan peraturan yang otoriter di Myanmar. AS yang dikenal paling vokal dalam urusan HAM akhirnya menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Myanmar karena pelanggaran HAM.¹¹⁾ Meskipun Thailand dan Malaysia sudah menyatakan sanksi itu tidak akan mempengaruhi rencana Myanmar menjadi anggota ASEAN, tetapi sanksi terakhirnya ini dapat mempengaruhi dunia internasional untuk menekan ASEAN agar tidak menerima Myanmar.

Terlepas dari kontroversi tersebut, Sekjen ASEAN Dato Ajit Singh ketika mengadakan survai ke negara itu menilai di antara tiga calon anggota baru ASEAN, Myanmar secara teknis lebih siap untuk terlibat dalam perdagangan bebas ASEAN (AFTA) dibandingkan dua negara calon lainnya, yaitu Kamboja dan Laos.¹²⁾ Hasil studi ESCAP, sebuah lembaga keuangan dan pembangunan dibawah naungan PBB, membuktikan reformasi yang dijalankan pemerintah Myanmar sejak tahun 1980-an telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Perubahan orientasi ekonomi sosialis ke sistem pasar terbuka berhasil mendorong

¹¹⁾ Kompas, 23 April 1997

¹²⁾ Suara Karya, 2 Desember 1996

laju pertumbuhan ekonomi negara ini. Menurut ESCAP dampak dari liberalisasi itu bisa dilihat dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) antara tahun 1987-1990 rata-rata mencapai 5,5 persen. Tahun 1990-1994 mencapai 4,2 persen dengan kenaikan di sektor-sektor industri, pertanian dan jasa. Investasi ASEAN di negara tersebut cukup besar dengan Singapura sebagai investor kedua terbesar setelah Inggris pada tahun 1994 yang mencapai US\$ 548 juta, Thailand di tempat keempat dengan nilai US\$ 418 juta dan Malaysia keenam dengan nilai US\$ 227 juta.

Sedangkan menurut *Asian Development Outlook 1996-1997* sebuah hasil studi yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Asia, GDP Myanmar diperkirakan akan meningkat menjadi 7,5 persen pada tahun 1996 dibandingkan 6,8 persen tahun 1995. Selain itu, pertumbuhan nilai ekspor juga meningkat sampai 18 persen, sementara hasil total investasi mencapai US\$ 6 miliar yang direalisasikan dalam bentuk pembangunan perhotelan dan pariwisata, pertambangan, migas, industri manufaktur dan perikanan. Sukses yang diraih Myanmar ini mendorong ESCAP merekomendasikan negara tersebut sebagai tempat investasi yang menguntungkan, dan agar Myanmar mempertahankan serta melanjutkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pasar.

Guna mempertahankan proses liberalisasi dan ekonomi terbuka, ESCAP menyarankan agar Myanmar mendorong swastanisasi beberapa sektor usaha. Selain mendorong pihak swasta memainkan peranan yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi, pemerintah Myanmar juga harus mendorong pengusaha kecil dan menengah sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi yang dinamis di Asia Tenggara. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Myanmar tidak akan terlalu sulit mengejar ketinggalannya dari negara-negara ASEAN lainnya.

Dalam menghadapi AFTA, Myanmar diduga juga tidak akan mengalami kesulitan, sebab jika tarif yang dipakai sebagai indikator kesiapan menghadapi AFTA maka dengan tingkat tarif yang rata-rata 6 persen maka Myanmar jelas sangat siap. Kelemahan Myanmar menghadapi AFTA adalah besarnya unskill labour, inflasi tinggi, situasi politik yang tidak stabil dan kurangnya infrastruktur.

Dalam bidang politik, interaksi antara pemimpin militer Myanmar dengan para pemimpin ASEAN terus meningkat akhir-akhir ini. Pada bulan Maret 1995, PM Singapura Goh Chok Tong berkunjung ke Myanmar, sementara pada bulan Juni tahun yang sama PM Myanmar merangkap Ketua SLORC (*State Law and*

Order Restoration Council) Jenderal Than Swee dengan didampingi Sekjen SLORC Jenderal Khin Nyunt berkunjung ke Jakarta dan Singapura. Sebagai balasannya, Presiden Soeharto mengunjungi Myanmar pada bulan Februari 1997.

Kunjungan delegasi tersebut adalah dalam rangka mewujudkan keinginan Myanmar menjadi anggota ASEAN serta mempelajari kemungkinan digunakanya model dwifungsi ABRI di Myanmar. Dalam rangka untuk memperoleh bantuan keuangan dari organisasi keuangan internasional seperti IMF dan ADB, pemerintah Myanmar telah dua kali mengadakan pertemuan, masing-masing tanggal 20 September dan 28 Oktober 1994, dengan Aung San Suu Kyi yang ditahan sejak tahun 1989 karena peranannya dalam kerusuhan politik di Myanmar tahun 1988. Suu Kyi kemudian dibebaskan oleh regim Myanmar 11 Juli 1995 sekaligus memulihkan kedudukannya sebagai pemimpin Liga Demokrasi Nasional (NLD). Menteri Luar Negeri Thailand ketika itu Surin Pitsuwan mengatakan pembebasan Suu Kyi merupakan keberhasilan dari kebijakan “constructive engagement” yang dijalankan oleh negara-negara ASEAN.¹³⁾

Ada dua persoalan yang dihadapi ASEAN jika Myanmar diterima menjadi anggota ASEAN.¹⁴⁾ Pertama, bagi negara-negara ASEAN yang mengkhawatirkan Cina, Myanmar dianggap sebagai negara yang berada dalam pengaruh Cina. Sejak Agustus 1990 Myanmar menerima bantuan militer Cina senilai US\$ 1 miliar untuk memperkuat operasi militer Myanmar menghadapi pemberontak suku Karen. Masalahnya dukungan Cina inilah yang telah memberikan kepercayaan pada regim militer Myanmar untuk menolak setiap tekanan negara-negara Barat terhadap pelanggaran HAM di negara itu. Ketika mengunjungi Myanmar tahun 1994, PM Li Peng mengecam kritik Barat terhadap kondisi HAM Myanmar sebagai mencampuri urusan dalam negeri suatu negara. Sebaliknya, untuk bantuan itu Cina memperoleh akses dari Myanmar untuk menggunakan pantainya guna keperluan militer dan intelejen untuk memata-matai India.

Kedua, menyangkut hubungan dengan Thailand. Di perbatasan kedua negara sering terjadi konflik senjata ketika pasukan Myanmar yang sedang mengejar pemberontak Karen tanpa disadari telah memasuki wilayah Thailand. Myanmar sering menuduh Thailand memberikan bantuan dan melindungi

¹³⁾ *The Strait Times*, 12 Juli 1995

¹⁴⁾ Leszek Buszynski, *ibid*, hal. 6

para pemberontak Karen. Sebaliknya pemerintah Thailand menuduh pasukan dukungan Myanmar telah memasuki wilayah Thailand dan membakar kamp pengungsinya. Sebagai akibatnya Myanmar menutup dua pos perbatasan barat dan satu pos perbatasan di laut.

Dengan menerima Myanmar menjadi anggota baru ASEAN bisa berharap negara itu akan kembali pada budaya politik non blok sebagaimana yang selama dijalani oleh negara-negara ASEAN lainnya. Negara-negara anggota ASEAN seperti Indonesia misalnya, umumnya masih dihinggapi trauma oleh pengalaman masa lalu dalam hubungannya dengan Cina. Disisi lain konflik perbatasannya dengan Thailand akan lebih mudah dinetralisir melalui forum dialog internal ASEAN yang selama ini terbukti sangat efektif dalam meredam konflik dengan semangat dan persaudaraan ASEAN.

- Laos

Setelah perang saudara di Laos berakhir tahun 1975, pemerintah setempat berusaha keras untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya. Dengan belajar dari kemajuan ekonomi yang didapat oleh Cina dan Vietnam, maka pemerintah Laos segera mencoba melaksanakan liberalisasi ekonomi pada tahun 1991 dengan dimotori oleh Partai Rakyat Revolusioner yang sedang berkuasa. Seperti negara korban perang lainnya, maka masalah krusial yang perlu segera dibenahi di Laos adalah infrastruktur. Dengan jumlah penduduk sekitar 5 juta jiwa dan pendapatan per kapita sekitar US 400 per tahun, ditambah dengan faktor infrastruktur yang kurang memadai, maka bukan suatu hal yang mudah bagi Laos untuk bergabung dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara.

Sumber pendapatan utama Laos sesungguhnya berasal dari sektor pertanian yang menyumbang 55 persen bagi GDP, dengan beras sebagai komoditas perdagangan yang utama. Hampir 81 persen dari luas wilayah Laos merupakan ladang pertanian. Ironi bagi Laos adalah negara ini belum mampu mengekspor beras. Cara bercocok tanam yang tidak diimbangi dengan sistem irigasi yang memadai mengakibatkan produktifitas pertanian menjadi rendah. Praktis hanya sekali dalam setahun lahan pertanian mereka bisa ditanami beras. Tragisnya lagi hampir selalu panen di Laos terancam gagal karena banjir. Dari tahun 1991 sampai 1995 banjir hampir selalu merendam areal persawahan, bahkan rusak berat akibat banjir. Buruknya lagi, pemerintah Laos tidak mempunyai cadangan beras yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Ancaman kelaparan hampir

selalu datang jika Laos sedang dilanda kebanjiran.

Dengan kondisi seperti itu, Laos nampaknya menyiapkan potensi besar bagi ASEAN untuk menanamkan modalnya pada sektor infrastruktur dan perhubungan. Liberalisasi ekonomi negara itu sudah seharusnya dipacu oleh negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan rasa kebersamaan negara Laos yang selama ini banyak mengisolasi diri. Bagi Laos, dengan bergabung didalam ASEAN berarti akan memberi kesempatan kepada mereka untuk berdialog secara langsung dengan negara-negara besar yang menjadi mitra dialog ASEAN, sekaligus sebagai upaya menarik modal asing ke Laos. Sama seperti Kamboja, diperkirakan Laos memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk bisa bergabung secara penuh dalam kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA).

Menurut Toshikazu Hamada, Guru Besar Ekonomi pada Universitas Sophia Jepang, ada tiga kondisi dasar yang harus dimiliki oleh Laos, Kamboja, Myanmar dan Vietnam untuk memperlancar upaya negara-negara tersebut bergabung kedalam ekonomi pasar ASEAN (AFTA).¹⁵⁾ Ketiga kondisi dasar tersebut menurut Hamada adalah, pertama, pengembangan divisi sosial pekerjaan dari kecukupan sendiri ke transaksi barang dan jasa melalui pekerja. Kedua, memperlancar infrastruktur dan pemerataan jalan-jalan, rel kereta api, pelabuhan, kereta barang dan truk, transportasi, komunikasi, niaga, keuangan dan asuransi. Ketiga, aturan dari transaksi pasar seperti perlindungan hak milik intelektual dan menjalankan aturan kontrak.

- Kamboja

Sedikitnya ada dua masalah krusial yang muncul bersama dengan niat Kamboja menjadi anggota ASEAN, pertama adalah ketegangan politik antara PM Ranaridh dengan PM Hun Sen serta tidak adanya kemajuan dalam menggolkokan UU yang diperlukan bagi keanggotaan Kamboja didalam ASEAN.

Pertikaian yang terjadi antara PM Ranaridh dan Hun Sen mencapai puncaknya beberapa waktu belakangan ini ketika pihak oposisi yang melakukan unjuk rasa mendapat serangan granat dan perpecahan dalam tubuh partai Funcinpec yang dipimpin Pangeran Ranaridh. Hun Sen dituduh sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan granat dan perpecahan yang

¹⁵⁾ Bisnis Indoensia, 22 Februari 1997

terjadi atas partai Funcinpec. Konflik yang sepintas nampaknya hanya untuk menarik perhatian dunia itu ternyata secara tidak terduga melahirkan konstelasi politik Kamboja yang diluar dugaan para pengamat termasuk ASEAN. Puncaknya terjadi pada tanggal 5 dan 6 Juli 1997 ketika pasukan yang setia pada PM II Hun Sen melancarkan serangan besar-besaran terhadap markas pasukan PM I Ranaridh yang ketika itu sedang berada diluar negeri. Hasil dari serangan itu adalah tampilnya Hun Sen secara de facto sebagai pengusaha tunggal negeri itu. Kendati parlemen Kamboja telah menyetujui pengangkatan Menlu Ung Hoat sebagai pengganti Norodom Ranaridh sebagai PM I tetapi tidak kurang dari Raja Sihanouk menganggap bahwa Ung Hoat tidak lebih dari boneka Hun Sen. Hun Sen optimis, perkembangan situasi politik dalam negerinya tak akan berpengaruh terhadap proses penerimaan negara itu menjadi anggota ASEAN. Untuk jangka pendek optimisme Hun Sen tidak terbukti, tetapi untuk jangka panjang optimisme Hun Sen bisa menjadi kenyataan.

Perang telah menimbulkan penderitaan bagi rakyat Kamboja. Namun saat ini telah terlihat dinamika masyarakat untuk mengejar ketertinggalannya akibat perang saudara. Sampai tahun 1995, pendapatan per kapita Kamboja hanya US\$ 290 sehingga mencerminkan daya beli masyarakat masih rendah. Walau pun begitu pertumbuhan GDP Kamboja cukup mantap yaitu 7 persen per tahun. Sumbangan terbesar bagi GDP Kamboja berasal dari sektor pertanian 44 persen, sektor jasa 37 persen dan industri sebesar 19 persen.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan rakyat Kamboja yang 85 persen masih bertani, pemerintah Kamboja telah melakukan kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN di bidang teknik, khususnya teknik pertanian Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand memberikan bantuan teknik pertanian kepada Kamboja dengan dana dari Jepang. Diharapkan melalui kerja sama seperti ini standar hidup petani Kamboja akan meningkat, sekaligus meningkatkan daya beli mereka.

Investasi ASEAN di Kamboja 1996

Negara	Jumlah Proyek	Dana (US\$ juta)	Fixed Asset (US\$ juta)	Tenaga Kerja
Malaysia	23	20,81	109,23	13.611
Singapura	18	35,13	35,08	4.936
Thailand	7	8,55	47,29	1.538
Indonesia	6	1,54	3,20	4.416
Total	54	66,03	194,80	24.501

Sumber : Bisnis Indonesia, 13 Maret 1997

Bagi ASEAN, Kamboja merupakan ladang investasi baru. Sejak tahun 1996, investasi ASEAN di Kamboja mulai menampakkan hasil. Singapura merupakan negara anggota ASEAN yang paling banyak menanamkan modalnya di Kamboja. Negara pulau ini diketahui telah menginvestasikan modalnya sekitar US\$ 35 juta untuk 18 proyek. Menyusul kemudian Malaysia sebesar US\$ 20 juta untuk 23 proyek. Kendati dengan skala yang tergolong kecil, investor Indonesia telah menanamkan modalnya di Kamboja sebesar US\$ 1,6 juta untuk 6 proyek. Proyek-proyek yang ditangani Indonesia umumnya masih bersifat padat karya terbukti dari banyaknya tenaga kerja yang diserap berjumlah 4.416 tenaga kerja.

4. PENGALAMAN BARU ASEAN

Tema ulang ASEAN ke-30 tahun 1997 adalah "One ASEAN Into 21st Century," dan salah satu keputusan penting yang diambil adalah menerima Myanmar dan Laos menjadi anggota ASEAN serta menunda keanggotaan Kamboja.

Dengan keputusan seperti itu berarti gagasan ASEAN-10 yang muncul sejak KTT V ASEAN di Bangkok tahun 1995 dan KTT Informal I di Jakarta tahun

1996 tidak segera terwujud. Ternyata ada rintangan dalam upaya mewujudkan visi para pendiri ASEAN itu. Semula rencana masuknya Myanmar menjadi isu yang diributkan negara-negara Barat mitra dialog ASEAN seperti AS, Uni Eropa, dan Australia. Mereka ingin agar ASEAN menunda masuknya Myanmar sampai junta militer SLORC yang berkuasa memperbaiki situasi HAM dan demokrasi. Namun ASEAN tidak goyah dengan tekanan itu karena selama ini kriteria yang digunakan untuk menerima anggota baru bukanlah situasi dalam negeri suatu negara melainkan kesediaan calon anggota baru untuk menerima dan mematuhi berbagai perjanjian dan kesepakatan yang berlaku di ASEAN.

Ketika Myanmar akhirnya diterima, bersama Laos, pada sidang ASEAN *Ministerial Meeting* ke-30, di Malaysia, negara-negara Barat tidak lagi mengeluarkan suara menentang tetapi mereka justru menghormati keputusan ASEAN itu dan menyerahkan pada ASEAN untuk melanjutkan “*constructive engagement*” agar SLORC mau memperbaiki situasi HAM dan demokrasi di Myanmar. Karakteristik yang selama ini menjadi kekuatan ASEAN seperti kebiasaan untuk berdialog, berkonsultasi, berunding dan melembagakan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat diharapkan oleh negara-negara Barat, mampu mengubah situasi politik dan daya kepemimpinan regim yang sedang berkuasa di Myanmar. Kondisi demikian dibenarkan oleh Menlu Malaysia Ahmad Badawi dengan mengatakan “jika dulu ASEAN mendekat Myanmar dari balik pagar maka kini mereka telah sama-sama berada dalam satu halaman.”

Kamboja sendiri akhirnya ditunda keanggotaannya untuk bergabung dengan ASEAN karena ASEAN tampaknya tidak bisa menerima tindakan Hun Sen yang menolak Pangeran Norodom Ranaridh kembali ke Phnom Penh. ASEAN mempunyai policy non-intervensi terhadap persoalan dalam negeri suatu negara dan keputusan itu menyiratkan ketidaksetujuan ASEAN terhadap perkembangan yang terjadi di Kamboja. Dalam suatu pertemuan khusus di Kuala Lumpur, para menteri luar negeri ASEAN menolak cara pemimpin de facto Kamboja, Hun Sen, yang menggunakan kekerasan untuk mengusir PM I dan rival politiknya. Sikap ASEAN dalam krisis Kamboja telah ditegaskan oleh Menlu Malaysia Ahmad Badawi bahwa : “*ASEAN will continue to regard Ranaridh as co-premier of Cambodia*”.¹⁶⁾

¹⁶⁾ Michael Richardson, *ASEAN Delays Admission of Cambodia*, *International Herald Tribune*, 11 Juli 1997

Negara-negara ASEAN tetap membuka pintu untuk menjadi mediator terhadap kemungkinan dilakukannya negoisasi di antara pihak-pihak yang bersengketa di Kamboja. Selain itu ASEAN secara bijaksana tidak menyatakan pemerintahan Hun Sen tidak sah, tetapi juga tidak mendukung seruan Ranaridh untuk membekukan bantuan internasional untuk Kamboja hanya jika pemerintahan koalisi yang dibentuk atas bantuan PBB tahun 1993 dipulihkan kembali. Meskipun menegaskan kembali komitmen ASEAN untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain tetapi keputusan para menlu ASEAN untuk menunda keanggotaan Kamboja merupakan tindakan yang paling bijak untuk menegakkan kembali prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain pada saat harus menghadapi keadaan yang tidak menguntungkan yang timbul akibat penggunaan kekuatan senjata. ASEAN juga menyatakan deliberasinya mengenai Kamboja. Selain menjadi tanggung jawab ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara, adalah hak ASEAN juga untuk sepenuhnya memutuskan keanggotaan baru sesuai dengan kriteria kriteria yang dipilihnya sendiri.¹⁷⁾

Perkembangan baru di Kamboja ini telah melahirkan persoalan baru bagi ASEAN mengenai prinsip non intervensi. Adalah Hun Sen yang pertama kali mempermasalahkan prinsip non-intervensi dengan menyerang keputusan ASEAN untuk menolak keanggotaannya dalam ASEAN sebagai mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut.¹⁸⁾ Tentu saja ASEAN menolak tuduhan seperti itu. Secara jujur harus diakui bahwa keberadaan ASEAN selama 30 tahun tidak terlepas dari diterapkannya prinsip non intervensi secara konsisten. Akan tetapi dalam tatanan hubungan antar bangsa dewasa ini yang semakin globalized, akan semakin sulit nampaknya ditarik garis batas yang tegas antara isu-isu domestik dengan isu-isu internasional. Akibatnya memang sulit dipisahkan mana yang termasuk dalam kategori ikut mencampuri negara lain dengan mana yang tidak mencampuri. Situasi sulit seperti inilah yang dihadapi ASEAN saat harus memutuskan tentang keanggotaan Kamboja di dalam ASEAN. Disamping itu dalam kasus Kamboja, tidaklah tepat jika dikatakan ASEAN mencampuri urusan negara lain, sebab Kamboja belum menjadi anggota ASEAN. Prinsip non-intervensi hanya berlaku jika Kamboja telah bergabung penuh di dalam ASEAN.

¹⁷⁾ Kompas, 11 Juli 1997

¹⁸⁾ Kompas, 11 Juli 1997

Kini apakah Kamboja akan diterima oleh ASEAN sebelum Desember 1997 ataukah menunggu setelah pemilihan umum Mei 1997 tidaklah terlalu jelas. Akan tetapi bagaimanapun juga ASEAN yang menunda keanggotaan Kamboja merupakan isyarat dan bentuk tekanan terhadap para pemimpin Kamboja saat ini untuk mencari penyelesaian politik yang adil dan kontitusional. Apalagi ASEAN telah mengingatkan bahwa ASEAN lebih mengakui keberadaan negara Kamboja. Dengan kata lain ASEAN menghendaki agar Kamboja segera menyelesaikan konflik internalnya, memulihkan kembali stabilitas politiknya dan akan segera menerima negara itu sebagai anggota ASEAN.

Secara politis strategis, ASEAN sebenarnya berkepentingan untuk mengajak Kamboja berada dalam "satu halaman". Karena saat ini sudah terlihat langkah-langkah Cina ingin menancapkan pengaruhnya di negara itu, selain juga manuver Hun Sen yang ingin mendekati Beijing jika ASEAN terus mengucilkam Phnom Penh. Hun Sen nampaknya menjalankan strategi diplomasi memainkan kartu Cina yang didasarkan pada kepercayaan bahwa menjadi kepentingan ASEAN untuk menandingi pengaruh RRC dalam bentuk apapun dan harga berapapun.

Diterimanya Myanmar sebagai anggota baru ASEAN juga tidak terlepas dari kekawatiran ASEAN terhadap terus meningkatnya pengaruh Cina di negara tersebut. Untuk menghentikan pengaruh Cina itu cara yang paling aman untuk ditempuh adalah dengan menerima negara itu menjadi anggota ASEAN, apapun tekanan-tekanan politik yang dilakukan oleh regim penguasa negara itu. Diterimanya Myanmar sebagai anggota baru ASEAN merupakan konsekuensi dari kekuatiran serius ASEAN dan di sisi lain menunjukkan pemanfaatan yang efektif oleh penguasa Yangon atas ancaman Cina.

Menghadapi Kamboja, ASEAN pun menghadapi dilema yang sama. Hun Sen secara jelas dan tegas bersikap kalau ASEAN mengisolasi Kamboja, maka Cina akan menjadi pilihan yang tepat untuk ditempatkan ditengah-tengah kawasan Asia Tenggara. Kamboja yang non-ASEAN akan lebih kondusif bagi pengembangan pengaruh Cina di jantung daratan kawasan Asia Tenggara. Ini sebabnya, kenapa Vietnam, Laos dan Myanmar yang selalu berada di bawah bayang-bayang Cina, bersikeras agar Kamboja segera diterima menjadi anggota ASEAN. Vietnam khususnya, merasa perlu untuk mencegah pengaruh Cina di sisi Timurnya.

Karena itu ASEAN akan bersikap pragmatis dalam menghadapi persoalan Kamboja, sebab ASEAN berkepentingan dengan masa depan negara itu demi stabilitas kawasan. Keputusan yang diambil ASEAN haruslah bisa diterima baik oleh Hun Sen maupun oleh Ranaridh. Jika tidak , maka keputusan itu tidak akan bisa berjalan efektif. Adalah ASEAN untuk melibatkan negara-negara anggota DK-PBB dan Jepang. Dengan kondisi negara yang stabil dan mantap, Kamboja diyakini akan mampu memenuhi kewajibannya sebagai salah satu negara anggota ASEAN. Dengan kata lain, ASEAN berkepentingan untuk merangkul ketiga negara itu, Myanmar, Laos dan Kamboja, karena keterbelakangan ekonomi yang dimiliki oleh ketiga negara itu merupakan salah satu faktor destabilisasi kawasan. Selain itu, seperti yang telah saya katakan dimuka, dengan ASEAN terdiri dari 10 negara maka bobot politik ASEAN dalam percaturan politik internasional akan lebih terasa.

5. PROSPEK AFTA

Kerjasama ekonomi ASEAN mencapai puncak prestasi ketika pada tahun 1992 diselenggarakan pertemuan puncak para kepala negara ASEAN. Pertemuan itu secara mengejutkan berhasil merumuskan suatu bentuk baru kerjasama ekonomi ASEAN yang dikemas dalam bentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA). Berakhirnya perang di Kamboja telah memberi kesempatan luas kepada negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat kohesifitas kerjasama ekonomi regional di Asia Tenggara.

Terbentuknya AFTA sedikit banyak dipengaruhi faktor-faktor eksternal seperti semakin terpolarisasinya dunia kedalam bentuk regionalisme ekonomi seperti NAFTA di Amerika Utara dan Uni Eropa di Eropa. Padahal kedua kawasan itu merupakan pasaran tradisional bagi produk ekspor komoditi negara-negara ASEAN. Dengan terbentuknya AFTA diharapkan yang terjadi tidak hanya semakin meningkatkan volume perdagangan internal ASEAN tetapi juga sebagai daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di kawasan Asia Tenggara.

Di sisi lain ASEAN juga bisa memanfaatkan perdagangan bebas AFTA sebagai ajang uji coba bagi barang-barang produk ASEAN yang hendak dipasarkan di tingkat global. Sebab melalui pembentukan perdagangan bebas itu berarti produk ekspor ASEAN akan mengalami penurunan tarif sehingga akan semakin kompetitif. Disamping itu ASEAN juga akan semakin terpacu untuk

melakukan pengurangan tarif perdagangan secepatnya agar tidak tersaingi oleh kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC). Sehingga keberadaan ASEAN sebagai organisasi kerjasama ekonomi subregional tetap diperhitungkan dan tidak tergantikan.

Proses pengurangan tarif perdagangan dalam AFTA menggunakan Skema CEPT (*Common Effective Preferential Tariffs*). Melalui skema seperti itu pengurangan tarif dilakukan secara bertahap serta mata dagangan yang siap dimasukkan dalam skema CEPT bisa ditentukan secara rinci. Sebagai upaya untuk mempercepat proses liberalisasi perdagangan barang dan jasa di Asia Tenggara, ASEAN telah pula menyetujui kesepakatan kepabeanan, pembentukan Kawasan Investasi ASEAN (AIA) dan Kerja sama Baru Industri (AICO). Tantangan terbesar bagi ASEAN dalam mewujudkan kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara adalah jenis produk yang dihasilkan lebih banyak bersifat kompetitif daripada komplementer.¹⁹⁾ Akibatnya yang terjadi adalah banyaknya mata dagangan yang dimasukan dalam daftar sensitif yang dikecualikan dalam perdagangan bebas. Masuknya anggota baru seperti Vietnam, Myanmar, Laos ataupun Kamboja diperkirakan akan menambah jumlah daftar sensitif ini.

Guna mencapai suatu perdagangan bebas tahun 2003 mendatang, negara-negara ASEAN diperkirakan harus mengurangi tarif hingga maksimum lima persen atas lebih dari 800 produk hingga tahun 2003. Bagi negara seperti Singapura dan Brunei Darussalam, masalah seperti ini tidaklah apa yang harus dilakukan negara seperti Indonesia, Thailand, Filipina dan Malaysia. Baik Singapura maupun Brunei praktis tidak mempunyai daftar sensitif untuk produk perdagangannya. Sementara Thailand masih mempunyai sekitar tujuh produk untuk daftar tadi. Malaysia dan Filipina juga masih mempunyai sejumlah produk yang harus dimasukkan dalam daftar sensitif, bahkan Filipina juga sedang mempertimbangkan untuk memasukkan produk pertanian ke dalam daftar sensitif. Vietnam sebagai anggota baru ASEAN dipastikan akan mempunyai daftar sensitif yang lebih banyak lagi.

¹⁹⁾ Ketika pulang dari lawatannya di tiga negara yaitu Kamboja, Laos dan Myanmar, Presiden Soeharto mengatakan bahwa dengan masuknya ketiga negara itu menjadi anggota ASEAN berarti ASEAN akan menjadi pasar yang sangat potensial. karenanya ia sangat mengharapkan agar berbagai produk ASEAN tidak saling mematikan dan bersaing, tetapi sebaliknya harus saling mengisi, Republika, 24 Februari 1997

Indonesia yang selama ini gencar menyuarakan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik akhirnya terbentur pada masalah pertanian. Pada KTT ASEAN V di Bangkok tahun 1995 lalu, Indonesia secara mengejutkan justru menambah sebanyak 15 produk yang masuk dalam daftar sensitif yang dikecualikan dari kerangka perdagangan bebas ASEAN. Ke-15 produk tersebut meliputi beras, gula tebu, cengkeh, bunga potong, ketan hitam, kacang-kacangan, susu dan tepung gandum. Semua ini menyangkut produk-produk yang banyak dihasilkan oleh sektor pertanian, yaitu sektor yang paling banyak menyumbang pemasukan bagi 190 juta rakyat Indonesia. Dengan langkah Indonesia seperti ini berarti labih banyak lagi produk Indonesia yang masuk daftar sensitif menjelang perdagangan bebas yang tinggal beberapa tahun lagi. Diperkirakan Indonesia masih memiliki 100 produk lagi yang masuk daftar sensitif yang harus dikecualikan dalam perdagangan bebas.

Sebenarnya apa yang dilakukan Indonesia didalam AFTA juga pernah dilakukan oleh Jepang dengan didukung oleh Korsel, Taiwan, Cina dan Hongkong meminta pengecualian produk pertanian dari jadwal perdagangan bebas APEC paling lambat tahun 2020. Seperti Indonesia dalam AFTA atau Jepang didalam APEC, alasan politis dan ekonomis menjadi pertimbangan utama. Akan tetapi didalam AFTA masalah kepentingan nasional menjadi sangat peka karena jenis produk di sejumlah negara anggota ASEAN praktis sama. Akibatnya adalah akan ada yang menjadi korban karena ketidak efisienan, birokrasi dan berbagai ketidaksiapan. Dan ini secara ekonomis tidak dapat ditolerir tetapi secara politis sangat sulit dihindari. Tentu saja apa yang dijadikan alasan oleh Indonesia bisa diterima tetapi tidak bisa ditolerir untuk jangka panjang. Seorang pakar perdagangan internasional dari Universitas Boston, Dr. John Adams, menteorikan bahwa keanggotaan satu negara didalam ASEAN tak akan membawa manfaat apapun di bidang perdagangan jika komitmen negara itu di kawasan Asia Tenggara masih dibayangi persaingan keras antarsesama anggota.²⁰⁾

Disamping alasan kepentingan nasional, penundaan liberalisasi perdagangan seperti itu bisa juga disebabkan karena adanya tekanan dari masyarakat bisnis di dalam negeri.²¹⁾ Logikanya, karena mereka belum siap bersaing, atau karena sudah terlalu lama memperoleh proteksi sehingga merasa gentar ketika

²⁰⁾ *Harian Neraca*, 16 Oktober 1996

²¹⁾ *Suara Karya*, 12 Desember 1995

harus menghadapi persaingan dari banyak pihak. Atau dalam bahasa yang lain menurut pakar ekonomi Indonesia, Suhadi Mangkusoewondo, penundaan liberalisasi terjadi karena adanya tentangan politik (*political backlash*).²²⁾ *Political backlash* ini bisa muncul sewaktu-waktu jika sekelompok kepentingan merasa tidak suka atau dirugikan dengan proses liberalisasi itu sendiri. Pemicu backlash bisa berasal dari kepentingan tenaga kerja atau terpukulnya sejumlah industri tertentu di sejumlah kawasan. Yang disesalkan, tentangan ini bisa mengakibatkan kebijakan liberalisasi terbalik menjadi regulasi. Karenanya, backlash bisa terjadi karena ada pihak yang memanfaatkan ketidakpuasan itu untuk menentang proses liberalisasi. Pada gilirannya backlash seperti itu akan mempengaruhi kredibilitas pemerintah sebab disatu pihak mendorong liberalisasi tetapi dilain pihak masih mempertahankan proteksi.

Masuknya Laos dan Myanmar, mungkin juga Kamboja, kedalam ASEAN diperkirakan akan menambah bobot kerja sama ekonomi ASEAN sebab akan tercipta sebuah pasar di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah penduduk sekitar 420 juta jiwa. Akan tetapi dilain sisi berbagai pekerjaan rumah masih harus dipikirkan sebab bertambahnya jumlah anggota berarti bertambah pula permasalahan yang harus dihadapi AFTA. Masaalahnya adalah bakal anggota baru ASEAN tersebut merupakan negara pertanian seperti negara anggota ASEAN lainnya. Sehingga bisa dipastikan akan menambah persaingan diantara sesama anggota ASEAN untuk sektor pertanian. Untuk jangka pendek liberalisasi mungkin akan menyebabkan lebih banyak pihak yang menderita kerugian daripada yang memperoleh keuntungan. Karenanya hal seperti itu perlu segera diantisipasi dengan jalan bagaimana menciptakan kompensasi bagi pihak-pihak yang dalam jangka pendek merasa dirugikan.

6. GONCANGAN MATA UANG ASEAN

Meskipun disana sini masih terjadi konflik-konflik, namun secara keseluruhan dunia dewasa ini sedang menuju kearah terbentuknya tatanan baru dunia yang damai dan menjanjikan kesejahteraan yang lebih baik kepada umat manusia. Tetapi ini tidak berarti bahwa segala sesuatunya akan berjalan mulus. Masih banyak hambatan dan ganjalan yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia dalam mewujudkan

^{22:} Bisnis Indonesia, 1 Maret 1997

cita-cita tersebut. Bila dilihat dari kecenderungan yang terjadi saat ini, kita sedang berada ditengah-tengah dunia yang berubah dengan cepat, didalam dunia yang seolah-olah akan menjadi kesatuan ekonomi yang sangat besar. Tidak jarang apa yang sedang terjadi di satu negara atau kawasan, segera saja mempunyai pengaruh terhadap negara atau kawasan lainnya. Kita sedang menuju ke arah jaman baru yaitu perekonomian yang ter-buka dan perdagangan bebas.

Semuanya itu telah membawa pengaruh terhadap negara-negara di-kawasan Asia Tenggara. Ketika negara-negara ASEAN sedang bersiap-siap, merayakan ulang tahunnya ke-30, datanglah malapetaka yang secara terduga telah mengguncangkan perekonomian masing-masing negara anggota ASEAN. Kerja sama ekonomi subregional ini mendapat ujian berat dengan terjadinya serangan terhadap mata uang mereka yang dimulai dengan bath Thailand, ringgit Malaysia, peso Filipina, rupiah Indonesia dan dolar Singapura. Nilai tukar mata uang negara-negara ASEAN tersebut terguncang oleh aktifitas para spekulan di pasar modal sejak Juli 1997 lalu. Guncangan yang melanda berbagai mata uang negara-negara ASEAN akhir-akhir ini merupakan wujud nyata dari pengaruh negatif perekonomian dunia yang terbuka.

Krisis mata uang di Asia Tenggara dimulai dengan krisis yang terjadi atas mata uang bath Thailand, kemudian merembet ke mata uang lainnya termasuk rupiah. Perkembangan ini tampaknya dipengaruhi oleh dua hal. Pertama telah terjadi perubahan pandangan pasar terhadap kondisi dan prospek ekonomi negara-negara di kawasan ini. Kedua, kenyataan realistik bahwa dolar Amerika yang terus mencuat di hampir semua mata uang dunia. Suasana semakin sulit terkendali akibat tindakan spekulatif para pedagang mata uang sehingga meningkatkan kepekaan pasar.

Adalah PM Malaysia Mahathir Muhammad yang dengan berani menyebut para spekulan itu sebagai perampok dan pencuri. Ia secara terang-terangan menuduh George Soros, seorang pedagang mata uang dari AS, sebagai tokoh dibalik kacaunya nilai mata uang negara-negara anggota ASEAN sebagai hukuman karena ASEAN menerima Myanmar sebagai anggota. Mahathir menilai ada itikad jelek untuk memperlemah ekonomi kawasan dengan cara menggoyahkan mata uang mereka. Tetapi siapapun dalamnya, yang jelas kini negara-negara ASEAN sedang menghadapi ujian berat dengan adanya guncangan terhadap mata uangnya. Thailand bahkan harus meminta bantuan IMF untuk menolong nilai tukar bath yang terus merosot. Filipina juga menyusul

dengan melonggarkan perdagangan pesonya, dan bank Indonesia telah memutuskan untuk membiarkan nilai tukar rupiah mengambang sesuai dengan kekuatan pasar. Tetapi justru inilah yang ingin dituju para spekulan yaitu agar pemerintah melepas kontrol atas mata uang mereka.

Kekacauan mata uang ASEAN ini telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kawasan Asia Tenggara. Sebab kendati ASEAN selama ini membanggakan pertumbuhan ekonomi di kawasannya berlangsung secara dinamis tetapi itu tidak menjamin bahwa mereka tidak mempunyai kelemahan. Belum diketahui secara pasti apa dampaknya secara jangka panjang terhadap perekonomian ASEAN, akan tetapi bisa dipastikan pertumbuhannya akan melambat. Di sisi lain depresiasi nilai tukar mata uang negara-negara ASEAN bisa dimanfaatkan secara tepat akan mampu mendorong ekspor ASEAN sebab barang-barang yang berasal dari kawasan lain akan menjadi lebih murah.

Dengan demikian pelajaran dari krisis mata uang ini adalah agar negara-negara ASEAN harus makin memperkuat struktur perekonomian dan kalau perlu mengadakan perubahan-perubahan prioritas. Yang pasti dengan semakin mengintensifkan perdagangan internasional maka hal ini akan semakin memperkuat perekonomian ASEAN.

7. PENUTUP

Perluasan anggota ASEAN merupakan tuntutan jaman yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Semakin transparannya polarisasi kerjasama ekonomi regional di belahan bumi lainnya memaksa ASEAN untuk semakin *inward looking*. Didasari bahwa pasaran ekspor semakin terbatas dengan semakin banyaknya bermunculan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi regional yang akan mempersempit ruang lingkup ekspor negara-negara ASEAN. Oleh karena itu ketika negara-negara Indocina dan Myanmar telah terbatas dari perang saudara ataupun kemelut di dalam negeri, maka pada saat itulah ASEAN berinisiatif untuk mengajak mereka bergabung kedalam ASEAN. Perluasan anggota ASEAN ini sangatlah penting dan strategis akan meningkatkan pangsa pasar ASEAN menjadi 481,2 juta jiwa dengan GDP mencapai US\$ 632 miliar dengan total ekspor mencapai US\$ 339,2 miliar sehingga ia akan menjadi kekuatan ekonomi yang cukup besar.

Perluasan anggota baru ini dilain sisi diharapkan bisa menambah ketahanan regional ASEAN dengan meningkatkan kemampuan ekonomi negara-negara anggota ASEAN melalui kerjasama ekonomi dalam bentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA). Akan tetapi jalan panjang masih harus ditempuh oleh negara-negara Indocina dan Myanmar jika ingin segera menjadi anggota penuh AFTA. Berbagai kekurangan yang dimilikinya, jika perbandingan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, memaksa mereka untuk bekerja lebih keras agar bisa secepatnya bergabung dalam AFTA yang mulai bergulir tahun 2003.

Masalahnya semakin rumit karena kendati ASEAN selama ini telah menganggap kerjasama ekonominya telah berjalan secara dinamis tetapi krisis mata uang yang dialaminya akhir-akhir ini memperlihatkan bahwa mereka juga mempunyai kelemahan yang perlu segera ditangani secara bijaksana. Kita dapat melihat bahwa kurs mata uang apapun bisa berubah dengan cepat dan dapat merembet dengan cepat pula ke negara tetangganya. Pengalaman ini memberi pelajaran pada negara-negara ASEAN, yaitu pada saat suasana penuh ketidakpastian dan gejolak, maka kondisi fundamental ekonomi menjadi sangat penting dan menentukan.

Gejolak mata uang ini sekaligus mengingatkan negara-negara ASEAN bahwa stabilitas ekonomi ASEAN dan negara anggota saling mempengaruhi. Karenanya ketidak siapan suatu negara untuk terjun dalam perdagangan bebas ASEAN (AFTA) pada gilirannya akan berpengaruh terhadap negara anggota ASEAN lainnya. Diperlukan semangat kepeloporan dari setiap anggota ASEAN untuk secara sungguh-sungguh mempraktekkan perdagangan bebas ASEAN. Tidak hanya birokrasi pemerintah yang kurang mendukung perdagangan bebas berjalan sesuai jadwal tetapi juga karena produk industri yang dihasilkan oleh negara-negara anggota ASEAN hampir sama sehingga yang terjadi lebih bersifat kompetitif dari pada komplementer. Pengurangan bea masuk perdagangan akhirnya lebih banyak didasarkan pada pertimbangan politis dari pada ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

Buszynski, Lescek, "Trends, Developments and Challenges in Southeast Asia", dalam Daljit Singh and Liak Teng Kiat, eds, "Southeast Asian Affairs 1996". Institute of South east Asian Studies, Singpura, 1997

Dupont, Alan, "Southeast Asian Takes Region's Future Into Its Own Hands "
Internasional Herald Tribune, 30 September 1996

Halloran, Richard, "Now Disenchantment With Vietnam", International Herald Tribune, 19 November 1996

Kraus, Willy, and Wilfried Lutkenhorst, "The Economic Development of the Pacific Basin", St. Martin Press, New york, 1996

Hanh-Koor. Lee "Global Economic Changes Toward the 21st Century and
Korea Response", Korea and World Affairs, Vol. XX, No. 1, Spring 1996.

Surat kabar :

The Strait Times

Kompas

Suara Pembaharuan

Bisnis Indonesia

Republika

Harian Neraca.

BAB V

PENDEKATAN BARU JEPANG TERHADAP ASEAN DAN KAWASAN

Oleh : Humphrey Wangke

1. Pendahuluan

ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1997 telah memasuki usianya yang ke-30. Sejalan dengan perkembangan usianya, ASEAN telah berkembang menjadi sebuah organisasi kerjasama subregional yang paling berhasil bila dibandingkan dengan organisasi subregional lainnya. Pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN tanggal 23-24 Juli 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, organisasi ini telah menerima Laos dan Myanmar sebagai anggota baru. Kamboja yang diperkirakan semula akan turut menjadi anggota baru ASEAN ternyata tertunda realisasi karena kondisi dalam negeri negara tersebut yang dinilai masih belum normal. dengan demikian tertunda pula impian para "founding fathers" ASEAN untuk menjadikan ASEAN sebagai organisasi subregional satu-satunya bagi negara-negara yang secara geografisnya terletak di kawasan Asia Tenggara.

Dengan penambahan dua negara tersebut, ASEAN dipastikan akan berkembang menjadi kawasan ekonomi yang lebih luas jangkauannya dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 450 juta jiwa. Kawasan Asia Tenggara diperkirakan akan menjadi lebih kohesif karena ASEAN telah memiliki sejumlah media diplomasi internasional baik sebagai pemrakarsanya maupun sebagai anggota didalamnya seperti SOM, AMM, ARF, ASEM maupun APEC. ASEAN juga mempunyai pertemuan rutin tahunan pada tingkat menteri luar negeri dengan negara-negara mitra dialog (PMC) yang meliputi negara-negara Jepang, AS, Kanada dan negara-negara Eropa anggota UE. Semuanya ini memperlihatkan betapa ASEAN telah berkembang menjadi sebuah organisasi ekonomi dan politik yang disegani.

Perkembangan dinamika ASEAN yang demikian itu telah menarik perhatian PM Jepang Ryutaro Hashimoto untuk berkunjung ke beberapa negara anggota ASEAN, seperti Brunei, Malaysia, Indonesia, Vietnam dan Singapura dari tanggal 7 - 14 Januari 1997 lalu. Ketika berada di Singapura untuk mengakhiri lawatannya di ASEAN, PM Jepang Ryutaro Hashimoto mengungkapkan keinginannya untuk lebih mempererat hubungannya dengan ASEAN. Model

hubungan lama, yaitu antara negara donor dengan debitur, akan digantikan dengan model lainnya yang tidak semata-mata bertumpu pada ekonomi saja. PM Hashimoto menginginkan suatu model hubungan yang didasarkan pula atas dialog di bidang politik dan keamanan.

Nampaknya telah menjadi tradisi bagi seorang perdana menteri Jepang bila sedang berkunjung ke negara-negara ASEAN selalu melahirkan suatu doktrin. Ketika masih menjabat sebagai perdana menteri, Takeo Fukuda memformulasikan kebijakannya terhadap negara-negara ASEAN segera setelah kawasan Indocina dikuasai oleh komunis, AS mulai menari sebagai kekuatannya dari kawasan Asia Pasifik, dan Vietnam berkembang menjadi ancaman bagi ASEAN. Doktrin Fukuda pada intinya merupakan tawaran bantuan ekonomi secara pasif untuk mempercepat pembangunan ekonomi negara-negara anggota ASEAN.

PM Ryutaro Hashimoto pada saat berkeliling ke negara-negara ASEAN telah pula mengusulkan suatu kebijakan baru terhadap ASEAN yang kemudian dikenal sebagai "Doktrin Hashimoto". Intinya, Jepang akan memperlakukan ASEAN sebagai mitra sejarah dalam suatu forum dialog berupa KTT Jepang-ASEAN yang akan dilaksanakan secara reguler.¹⁾ "Doktrin Hashimoto" diproyeksikan untuk membicarakan berbagai masalah yang muncul di antara kedua belah pihak seperti masalah ekonomi, sosial dan budaya, maupun politik dan keamanan. Walaupun masih berbentuk gagasan tetapi diperkirakan bentuk forum ini akan menyerupai pertemuan tingkat tinggi ASEAN-UE yang lebih dahulu terlembaga dengan nama Dialog ASEM (*ASEAN-European Meeting*).

Yang menjadi usulan PM Hashimoto pada prinsipnya merupakan sebuah KTT ASEAN-Jepang, yang sebenarnya sudah pernah terjadi yaitu tahun 1977 di Kuala Lumpur dan tahun 1987 di Manila ketika PM Jepang saat itu, masing-masing Takeo Fukuda dan Noboru Takeshita, menghadiri KTT ASEAN. Tetapi kini Hashimoto menghendaki agar KTT semacam itu diselenggarakan secara rutin setiap tahun dengan topik pembicara yang tidak hanya menyangkut masalah kerjasama ekonomi saja. Sebab bantuan besar-besaran yang selama ini diberikan Jepang kepada negara-negara ASEAN dirasakan masih kurang memberikan inisiatif diplomatik²⁾ Doktrin Fukuda yang telah memberikan

¹⁾ Kompas, 8 Januari 1997

kontribusi besar pada hubungan yang lebih erat Jepang-ASEAN hanya sedikit saja membicarakan masalah keamanan. Karenanya makalah ini akan menguraikan secara deskriptif analitis kepentingan Jepang yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

2. KETIMPANGAN PERDAGANGAN ASEAN-JEPANG

Sejarah hubungan Jepang dengan negara-negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara hampir selalu melahirkan suatu komplikasi dan mencirikan adanya perubahan-perubahan. Suatu hal yang patut dicatat disini adalah, bahwa sejak Jaman Meiji Restorasi Jepang praktis tak pernah bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap negara-negara di sekitarnya terutama karena kebutuhannya akan bahan baku alam³⁾ Karenanya, sejak saat itu pula investasi langsung dan perdagangan Jepang dengan kawasan di sekitarnya meningkat pesat. Bantuan pembangunan dalam bentuk kredit, kerjasama kebudayaan dan hubungan politik secara keseluruhan terus meningkat.

Pembangunan ekonomi Jepang sangat memerlukan pasokan bahan mentah dan sumber-sumber industri dari luar negeri, khususnya negara-negara di Asia, untuk memenuhi kebutuhan industriya yang berorientasi ekspor. Ekonomi Jepang terutama didasarkan atas perdagangan luar negeri, sehingga tingkat kesinambungan pasokan sumber-sumber industri tertentu dari luar negeri akan sangat mempengaruhi mekanisme industri mereka. Karenanya setiap Perdana Menteri Jepang akan sangat memperhatikan kecukupan dari pasokan bahan-bahan mentah dan perdagangan luar negeri.

Pada tahun 1994, 36 persen dari total perdagangan Jepang dilakukan dengan negara-negara industri baru seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Hongkong, dan dengan negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Indonesia dan Filipina serta dengan RRC. Negara-negara tersebut secara tradisional merupakan pemasok kebutuhan industri Jepang, bahkan sejak tahun 1993 negara-negara tersebut telah menggantikan posisi negara-negara Amerika Utara sebagai pasar terbesar Jepang. Karenanya menjadi mudah untuk dimengerti mengapa Jepang begitu antusias terhadap program 4 modernisasi Cina dan memperluas perdagangan dengan negara-negara ASEAN.

³⁾ Heinrich Kreft, "Japan's Links with East and Southeast Asia", dalam Aussen Politik, Vol 47, No. 1, hal 71

Tabel
Perdagangan Jepang-ASEAN
(dalam US\$ miliar)

	I m p o r		E k s p o r	
	1989	1994	1989	1994
Indonesia	11,0	12,9	3,3	7,6
Thailand	3,5	8,2	6,8	14,7
Malaysia	5,1	8,2	4,1	12,4
Philipina	2,1	2,7	2,4	5,9
Singapura	3,0	4,7	9,2	19,6
	24,7	36,7	25,8	60,2

Sumber : Diolah dari Heinrich Kraft, "Japan Links with East and Southeast Asia",
Aussen Politik, Vol. 47, No. 1

Karakteristik perdagangan Jepang dengan negara-negara ASEAN pada umumnya berkisar pada pemenuhan kebutuhan sumber-sumber alam bagi kepentingan industrinya. Seperti pasokan minyak mineral dan gas alam cair dari Cina dan negara-negara ASEAN telah meningkat pesat dari tahun ke tahun. Ekspor minyak mineral negara-negara ASEAN ke Jepang berjumlah US\$ 14.472 juta (69% dari total ekspor ASEAN ke Jepang) pada tahun 1981, US\$ 13.210 juta (68%) tahun 1982 dan US\$ 11, 320 juta (65%) tahun 1983. Dalam hal ekspor gas alam cair, Indonesia memasok 32 persen dari total kebutuhan Jepang. Pada tahun 1981, Indonesia dan Malaysia menjual 17% dari total kebutuhan minyak mentah Jepang. Ketergantungan Jepang terhadap negara-negara ASEAN dalam beberapa kebutuhan sumber alam dan industri sangat tinggi, seperti karet (99,5%), gula (24,8%), bauksit (30,2%), tembaga (39,7%), timah (42,2%), minyak sayur (64,4%), pisang (82,2%) dan nickel (51%)

Sebaliknya ASEAN, untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan industri, mengimpor produk industri berat dan kimia dari Jepang dalam jumlah besar. Impor mesin dan peralatan transportasi dari Jepang meningkat dari US\$ 1.202 juta tahun 1972-1973 menjadi US\$ 5.918 juta tahun 1979-1980, sementara impor kimia meningkat dari US\$ 335 juta menjadi US\$ 1.039 juta selama periode yang sama.

Bila memperhatikan sektor perdagangan di atas, jelas bahwa ASEAN sangat vital bagi Jepang karena sangat bergantung pada ASEAN. Akan tetapi impor Jepang dari ASEAN masih terbilang kecil antara 11-15 persen selama kurun waktu 1973 sampai 1983. Tetapi sebaliknya ekspor ASEAN ke Jepang mencapai 23-30 persen dari total ekspor, sementara impornya berkisar antara 23-27 persen. Dengan kata lain, jika dilihat dari nilainya, impor dari ASEAN tidak merupakan suatu hal yang penting bagi total impor Jepang. Ekspor Jepang ke ASEAN-pun juga bukan merupakan hal penting dari total ekspor Jepang karena hanya berkisar antara 9-11 persen selama periode 1973-1983. Dengan kata lain, dari total nilai perdagangannya, perdagangan Jepang dengan ASEAN tidaklah terlalu penting bila dibandingkan dengan ASEAN terhadap Jepang.

Bagi ASEAN, perdagangan dengan Jepang sangatlah penting. Selama periode 1973-1983, ekspor ASEAN ke Jepang mencapai 23-30 persen dari total ekspor, sementara impornya mencapai 23-27 persen dari total ekspor. Bila dilihat dari posisi masing-masing negara anggota ASEAN, maka perdagangan dengan Jepang ini terutama sangat penting bagi Indonesia, diikuti dengan Thailand, Philipina dan Malaysia.⁴⁾ Beberapa kali selama periode itu, ekspor Indonesia ke Jepang mencapai 50 persen dari total ekspor Indonesia. Sedangkan untuk impor, Thailand, Philipina, Malaysia dan Indonesia mengimpor 25 persen dari total impor negara-negara tersebut. Praktis hanya Singapura yang nilai perdagangannya terdiversifikasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara relatif Jepang merupakan pasar yang sangat penting bagi ASEAN tetapi tidak sebaliknya; Jepang juga bisa dibilang menjadi pemasok penting kebutuhan produk manufaktur ASEAN tetapi tidak sebaliknya.

Bagaimana timbangnya hubungan perdagangan ASEAN-Jepang bisa dilihat dari kinerja ekspor perdagangan produk manufaktur. Selama periode 1970-1982, ekspor produk manufaktur ASEAN ke Jepang hanyalah 2-5 persen dari total impor manufaktur Jepang. Masih tetap terbilang kecil kendati telah ada peningkatan nilai dari US\$ 725 juta tahun 1977 menjadi 1,494 miliar tahun 1983, tetapi kemudian turun menjadi 1,356 miliar tahun 1982. Selama itu praktis AS dan Eropa yang menjadi pemasok utama kebutuhan barang manufaktur Jepang.

⁴⁾ Lim Hua Sing, "Japan Role in Asia Issues and Prospects", Times Academic Press, Singapura, hal. 134-138

Perubahan mulai terjadi tahun 1971 pada saat terjadi revaluasi mata uang yen yang mengakibatkan menurunnya daya saing produk ekspor mereka. Jepang mulai memikirkan untuk merelokasi sebagai industrinya ke negara-negara tetangganya yang mempunyai upah buruh murah. Sektor industri yang pertama kali mengalami relokasi adalah tekstil. Hampir 39 persen dari investasi Jepang terkonsentrasi pada sektor industri tekstil. Sampai akhir tahun 1970-an, investasi Jepang berkembang pada pemberian fasilitas untuk industri baja, produk kimia dan bahan baku industri lainnya. Sesudah tahun 1980, investasi terkonsentrasi di sektor listrik dan elektronik. Kebanyakan dari industri-industri tersebut secara mayoritas dimiliki oleh Jepang, dengan perincian untuk sektor tekstil 50 persen dan sektor elektronik 65 persen.

Didalam perkembangannya, sejak pertengahan tahun 1980-an mulai muncul kritik dari negara-negara penerima investasi bahwa Jepang sangat sedikit melibatkan mereka dalam kegiatan industri, tidak adanya transfer teknologi, tidak cukup menciptakan lapangan kerja baru, serta terbatasnya penggunaan komponen lokal. Kondisi ini sangat bertoik belakang dengan keuntungan yang diraih Jepang dari pasar regional maupun internasional. Sehingga dalam pertemuan G-5 di Paris tahun 1985 lahir Plaza Accord yang mencoba mengurangi keuntungan berlipat ganda Jepang dengan cara merevaluasi mata uang yen. Hasilnya surplus perdagangan Jepang yang pada tahun 1985 mencapai US\$ 94,1 miliar turun menjadi US\$ 33,7 miliar tahun 1990. Revaluasi ini mendorong Jepang untuk lebih intensif dalam melakukan relokasi industri.

Tetapi praktis sejak tahun 1985, perekonomian negara-negara di Asia Tenggara dan Timur menjadi bagian integral dari perekonomian Jepang. Pasokan bahan baku terjadi di antara perusahaan Jepang yang mempunyai basis industri di kawasan itu. Di dalam industri elektronik misalnya, 75 persen pasokan berasal dari Jepang tetapi 65 persen dari produksinya dibeli oleh negara-negara yang menjadi basis industri tersebut. Akibatnya dari munculnya spesialisasi industri dan pembagian keterampilan tenaga kerja, sebuah jaringan kerja internasional telah berkembang antara Jepang dengan negara-negara tetangganya. Dalam beberapa hal, kondisi ini telah memberi kesempatan berkembangnya jaringan kerja perusahaan yang sangat bercirikan Jepang, yang biasa dikenal sebagai *keiretsu*, di kawasan Asia Timur dan ASEAN.

Hasilnya adalah ekspor Jepang meningkat lebih dari 70 persen dalam tahun 1985-1990. Pangsa pasar bagi negara Asia Timur dan ASEAN meningkat dari 28 persen menjadi 39 persen. Akan tetapi impor Jepang dari negara-negara di kawasan itu meningkat tidak terlalu besar. Dari total impor Jepang, kawasan itu menyumbang sekitar 28 sampai 33 persen. Keberhasilan dalam hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara ASEAN dan sekitarnya telah membawa Jepang pada suatu sikap baru untuk secara tidak langsung menjadi pemimpin ekonomi di kawasan ASEAN dan ASEAN dan Asia Timur. Sejak tahun 1990 Jepang mulai cenderung menerapkan strategi pangsa terbang dalam hubungannya dengan negara-negara di Asia Timur dan ASEAN ketika Komite Riset Ekonomi Asia Timur pada Kementerian Keuangan Jepang mengeluarkan rekomendasi yang berbunyi : *"It is necessary that what Japan used to do should be done by the Asian NIEs, what the Asian NIEs used to do should be done by ASEAN countries".*⁵⁾ Hasilnya, pada tahun 1993 untuk pertama kalinya perdagangan luar negeri Jepang dengan Asia lebih besar dari pada dengan AS.

3. MASALAH ALIH TEKNOLOGI

Telah disinggung di atas bahwa salah satu keprihatinan negara-negara ASEAN atas kerja sama perdagangan dan investasi dengan Jepang selama ini adalah alih teknologi. Secara historis peningkatan investasi luar negeri (Foreign Direct Investment-FDI) Jepang mulai terjadi sejak tahun 1968, yaitu ketika negara itu hampir setiap tahun mengalami surplus perdagangan luar negeri yang terus meningkat. Di samping itu langkah ekspansi FDI dipercepat pula dengan adanya langkah liberalisasi investasi berikutnya terjadi secara berturut-turut tahun 1970, 1971, 1972 dan terakhir tahun 1978. Untuk memperlancar ekspansi FDI parlemen Jepang bahkan dua kali mengamandemen UU Nilai Tukar Yen masing-masing tahun 1980 dan tahun 1984. Di samping faktor-faktor di atas, ekspansi FDI Parlemen Jepang juga dipercepat karena ada-nya beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu⁶⁾ :

⁵⁾ Heinrich Kreft, op cit, hal 78-79

⁶⁾ Lim Hua Sing, ibid, hal. 156

1. to obtain better acces to natural resources, especially in the developing countries;
2. to protect the markets for the Japanese products;
3. to utilize low cost labour and overseas human resources;
4. to increase further exports to the host and third countries;
5. to avoid unfavourable conditions for expansion and obtain various institutional incentives provided by the host countries.

Sebaliknya bagi negara-negara ASEAN kehadiran FDI Jepang jelas sangat penting dan dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan teknologi padat modal, pengetahuan manajemen, dan sumber bantuan keuangan. Secara substansial, Jepang telah menginvestasikan modalnya pada sektor industri manufaktur dan jasa di negara-negara ASEAN. Khususnya setelah apresiasi yen tahun 1985, investasi langsung Jepang di ASEAN telah mencapai puncaknya dan menggantikan posisi AS di negara-negara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

Bersamaan dengan peningkatan investasi itu, negara-negara ASEAN mulai merasakan bahwa teknologi yang dialihkan Jepang ke negara-negara ASEAN hanyalah pada industri yang berteknologi rendah dan polusif. Demikian pula untuk masalah manajemen, Jepang hanya mau mengalihkan pengetahuannya di bidang manajemen hanya jika mereka terlibat secara aktif dalam kegiatan proses produksi dan komersial pada industri manufaktur. Padahal kehadiran Jepang di ASEAN secara esensial terus diperkuat dengan mendirikan industri berat dan membangun fasilitas infrastruktur melalui program bantuan luar negeri. (ODA)

Seperti di Thailand, industri manufaktur Jepang telah menguasai 90 persen pasar otomotif, mempekerjakan 7 persen tenaga kerja manufaktur lokal, dan secara tidak langsung bertanggung jawab atas ratusan ribu lapangan kerja. Di Malaysia, operasionalisasi perusahaan Matsushita telah menghabiskan 4 persen dari GDP Malaysia dan memperkerjakan 17.000 penduduk Malaysia yang setiap pagi menggunakan seragam Matsushita dan menyanyikan lagu Matsushita. Di Indonesia perusahaan keuangan Jepang telah mendominasi pasar modal.⁷⁾

Ketika Thailand, Malaysia dan Indonesia meliberalisasikan perekonomianya pada pertengahan tahun 1980-an, banyak perusahaan manufaktur Jepang yang menyerbu ketiga negara tersebut. FDI Jepang di ketiga negara tersebut membengkak hingga milyaran dollar Amerika atau antara 1/3 hingga 1/2 dari sepuluh FDI Jepang di Asia sejak tahun 1988 dan seterusnya. Investasi pada tingkat seperti itu berlangsung sepanjang tahun 1990-an dengan rata-rata US\$ 2,7 miliar per tahun, sekalipun Jepang sedang mengalami resesi.

Dengan investasi besar-besaran di Malaysia, Matsushita telah membuat negeri itu menjadi negara pengekspor air conditioners terbesar di dunia, dan Sony dan Hitachi telah menjadikan Malaysia menjadi negara pengekspor produk semikonduktor yang menonjol di dunia. Di Thailand, perusahaan Sharp telah mendirikan pabrik lemari pendingin dan oven microwave, perusahaan Mitsubishi telah mendirikan pabrik komponen televisi berwarna. Di Indonesia, industri otomotif Jepang seperti Toyota telah menguasai pasar lokal. di samping itu Niigata Engineering juga memproduksi industri otomotif, peralatan konstruksi dan mesin diesel.

Proses pergerakan industri padat modal seperti itu seharusnya melibatkan pula alih teknologi, khususnya jika investor ingin agar produksinya bisa bersaing di pasar global. Tetapi perusahaan Jepang terkesan sangat hati-hati dan tertutup jika menguasai pengetahuan apalagi bila sedang berbisnis dengan negara-negara berkembang. Perusahaan multinasional Jepang umumnya hanya mau mengalihkan teknologi untuk keperluan produksi sambil memastikan bahwa alih teknologi itu dibarengi dengan penetrasi pasar.⁸⁾ Akibatnya, perusahaan lokal terhambat untuk menguasai teknologi itu, dan sulit untuk bisa menyaingi industri Jepang yang sangat dominan dalam ekonomi nasional negara-negara ASEAN.

⁷⁾ Pembahasan secara lebih rinci tentang keengganannya Jepang untuk mengalihkan teknologi industri ke negara-negara ASEAN bisa diikuti dari tulisan Mark Z. Taylor, "Dominance Through Technology", Foreign Affairs, Vol. 74, No. 6, hal. 14-20

⁸⁾ Dalam pertemuan antara Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) yang dipimpin oleh Menko Hartarto dengan Menteri MITI Jepang Shunpei Shukahara, ASEAN mendesak Jepang untuk membuka pasarnya. Desakan dimajukan karena masuki pasar Jepang dirasakan sangat sulit. Jepang setuju terhadap usulan ASEAN agar dicari cara bagaimana agar produk-produk ASEAN memiliki akses yang lebih mudah. Kompas, 14 September 1996.

Perusahaan-perusahaan Jepang tersebut menggunakan berbagai metode untuk mengatasi aliran teknologi dan mempertahankan keputusan tentang hal itu di tangan orang-orang Jepang. Orang-orang Jepang berpendapat bahwa sebuah perusahaan dapat dikendalikan melalui posisi manajer dan penguasaan teknik. Jika yang menguasai posisi-posisi kunci perusahaan adalah orang-orang non-Jepang maka keputusan tentang alih teknologi diserahkan kepada markas besar perusahaan yang berada di Jepang, bukannya pada kepentingan lokal ataupun tujuan perusahaan. Bahkan dengan tanpa mempersiapkan karyawan setempat untuk menduduki posisi kunci, perusahaan Jepang mencegah sedapat mungkin agar mereka tidak dapat menjalankan teknologi secara independen.

Dengan cara seperti ini ekspor yang dilakukan Indonesia, Malaysia, atau pun Thailand umumnya hanyalah komoditi pertanian. Tetapi sebaliknya impor dari Jepang umumnya adalah barang-barang manufaktur. Andaikan ada ekspor manufaktur ASEAN ke Jepang maka itu biasanya dilakukan oleh perusahaan Jepang yang beroperasi di ketiga negara tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa di kawasan Asia Pasifik umumnya, khususnya ASEAN, Jepang merupakan investor utama, mitra dagang utama dan memberi bantuan terbesar. Peran dominan Jepang itu bisa terjadi karena negara-negara ASEAN menjalankan kebijakan ekonomi pasar yang menguntungkan Jepang. Tetapi bila dilihat dari perkembangan regionalisasi ekonomi dewasa ini, bagaimanapun juga, di masa depan Jepang perlu memperbaiki pola hubungan yang demikian menjadi lebih seimbang.

Artinya Jepang tidak harus hanya terlibat dalam investasi dan pemberian bantuan yang sesuai dengan kepentingan mereka, tetapi juga rela terlibat di dalam proyek yang mungkin tidak menguntungkan mereka tetapi penting bagi negara-negara ASEAN.

Alih ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk masalah teknik dan manajemen dari Jepang ke negara-negara ASEAN harus dilakukan. Tidak hanya itu, Jepang juga harus menyingkirkan berbagai hambatan perdagangan yang selama ini membatasi akses produk luar negeri ke pasar Jepang.⁹⁾

⁹⁾ Lau Teik Soon, "Japan's Role in the Asia Pacific Region", *Japan Review of Internasional Affair*. Vol. 5, hal. 59

Dengan begitu ketimpangan kondisi antara negara-negara ASEAN dengan Jepang bisa diperbaiki. Apalagi per tahun 1995, negara-negara ASEAN mengalami defisit perdagangan terhadap Jepang sebesar US\$ 36 miliar.¹⁰⁾

Tabel
Total FDI Jepang di ASEAN 1995
(dalam milyaran dolar AS)

Indonesia	17,0
Thailand	7,2
Malaysia	6,4
Philipina	2,8
Singapura	9,5
Vietnam	0,2

Sumber : Kementerian Keuangan Jepang, 1995 Dikutip dari Heinrich Kreft, Aussen Politik, Vol. 47, No. 1, 1996, hal 76

Dengan cara seperti itu Jepang akan dapat memainkan peran ekonomi yang lebih positif lagi tidak hanya di ASEAN tetapi juga di Asia Pasifik. Bahkan dengan mengindahkan kerjasama ekonomi regional, Jepang akan memainkan peran yang aktif, jika tidak dominan di APEC. Tetapi dilain pihak, negara-negara ASEAN harus secepatnya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia-nya agar mampu secepatnya beradaptasi dan mengadopsi perkembangan teknologi industri yang berkembang cepat. Peningkatan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi ini penting sebab dengan meningkatnya secara dramatis nilai tukar yen pada tahun 1995 lalu, banyak perusahaan manufaktur Jepang yang mempertimbangkan untuk

¹⁰⁾ Menurut Perdagangan dan industri Tungky Ariwibowo mengakui bahwa Indonesia sampai saat ini masih banyak impor bahan baku atau komponen dari Jepang. Untuk mengurangi ketergantungan itu, menurutnya, jalan yang harus ditempuh adalah dengan alih teknologi. Akan tetapi kesulitannya, masih banyak industri kecil dan menengah Jepang yang masih berorientasi ke dalam (inward looking) dan yang lebih parah lagi mereka biasanya tidak mau menjual produknya ke perusahaan yang terkenal. Baca, Media Indonesia 14 September 1996.

merelokasi industri fasilitasnya ke negara-negara yang mempunyai tingkat upah buruh yang rendah¹¹⁾

4. PERJANJIAN KEAMANAN AS-JEPANG

Membicarakan peran keamanan Jepang di kawasan Asia Pasifik mau tidak mau harus disinggung pula Perjanjian Keamanan Jepang-Amerika. Sebab pada kenyataannya melalui perjanjian itu negara-negara di kawasan ini merasa aman. Perjanjian itu tidak saja penting dalam mempertahankan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik, tetapi juga perlu untuk menjadi penangkal dari kemungkinan digunakannya senjata nuklir oleh Rusia, Cina ataupun Korea Utara. Dari pangkalan militernya di Okinawa¹²⁾ Armada ke VII AS dapat memberikan perlindungan keamanan bagi seluruh kawasan Asia Pasifik, seperti yang pernah dilakukannya di Selat Taiwan ketika Cina mencoba menekan Taiwan untuk membatalkan pemilu tahu 1996 lalu.

Hingga kini Jepang selalu mendukung kehadiran militer AS di negaranya dan memainkan Peranan penting dan sisem pertahanan keamanan negaranya.
¹³⁾ Sebab dengan memperoleh payung perlindungan dari AS, Jepang tidak terlalu

¹¹⁾ Tingkat kemampuan keterampilan tenaga kerja ASEAN diakui masih perlu dibenahi. Kondisi ini terjadi salah satu kesepakatan yang dapat dalam pertemuan tingkat tinggi perusahaan ASEAN I (ASEAN Business Summit) di Jakarta. Tampak pemberahan peluang ASEAN untuk menguasai persaingan produk manufaktur menjadi lebih kecil. Padahal sejak 1993 diketahui bahwa Jepang telah menjadi Net-Importir untuk Televisi berwarna dan peralatan rumah tangga yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi diluar negeri. Kecenderungan ini, yang pasti akan menguntungkan negara-negara ASEAN, tampaknya akan meningkat. Misalnya perusahaan mobil Nissan akan meningkatkan produksinya di Thailand sebesar 50% dan lebih banyak lagi perusahaan patungan akan didirikan dengan bekerja sama dengan perusahaan lokal. Perusahaan mobil Honda telah pula mengumumkan akan memperluas produksinya di Filipina dengan memanfaatkan skema komplementaris ASEAN untuk membuat suku cadang kendaraan sesuai dengan keunggulan komparativanya. Untuk lengkapnya lihat Suara Pembaharuan, 14 Februari 1997 dan tulisan Leszek Buszinski, "Trends, Development and Challenges in South east ASIA", dalam Southeast Asian Affairs 1996, hal 3-19.

¹²⁾ Parlemen Jepang (Diet) setuju untuk mengesahkan UU sewa paksa atas tanah rakyat Okinawa. Persetujuan ini merupakan kemenangan politis bagi PM Ryutaro Hashimoto yang pada bulan Mei 1997 dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden AS Bill Clinton. Kompas 12 April 1997

¹³⁾ Perjanjian aliansi Amerika Serikat- Jepang telah direvitalisasi pada bulan April 1996. Dalam Joint Declaration on Security yang ditandatangani oleh PM Ryutaro Hashimoto dan Presiden Bill Clinton, antara lain disebutkan bahwa AS akan menjamin keamanan di negara-negara Asia Timur sementara Jepang berjanji akan bekerjasama lebih erat dengan AS untuk masalah keamanan dan akan memainkan peran keamanan di luar Jepang. Baca Shinichi Ogawa, "The United States and Japan Could Calm Asian Worries", International Herald Tribune, 27 Januari 1997.

disibukkan dengan urusan keamanan dan dapat terus berkonsentrasi untuk membangun ekonominya (*free-rider*). Sebagai imbalannya Jepang akan menyediakan dukungan finansial, logistiknya dan administrasi bagi pangkalan dan fasilitas militer AS (*Burden Sharing Doctrine*).¹⁴⁾ Ketergantungan Jepang atas kemampuan militer AS sangat menguntungkan banyak negara Asia yang masih mengkhawatirkan bangkitnya kembali militerisme Jepang.¹⁵⁾ Jepang merupakan salah satu basis penting militer AS dengan ditempatkannya 47.000 tentara AS di sana. Jumlah ini separuh dari seluruh pasukan AS yang ditempatkan di kawasan Asia Pasifik.

Oleh karena itu tetap dipertahankannya perjanjian keamanan Jepang-AS secara tidak langsung menjadi kepentingan ASEAN pula. Sebab meskipun ASEAN tidak mempunyai kebijakan pertahanan bersama¹⁶⁾, tetapi hancurnya perjanjian itu dikawatirkan akan mengundang perlombaan senjata di kawasan Asia Tenggara, karena memberi kesempatan kepada setiap negara anggota ASEAN untuk memperkuat kekuatan militernya.¹⁷⁾ Yang lebih penting lagi, perjanjian itu secara tidak langsung bisa mencegah kemungkinan Jepang membangun armada militernya secara besar-besaran.¹⁸⁾ Suatu hal yang diyakini banyak pihak akan mengganggu stabilitas keamanan dan perimbangan kekuatan regional.

Disamping itu ASEAN secara implisit tetap mengharapkan AS

¹⁴⁾ Doktrin *Burden Sharing* muncul tahun 1990 ketika terjadi Perang Teluk II. Ketika itu pemerintah AS dibawah presiden Bush menghendaki agar Jepang berperan aktif dalam kancab peperangan dengan mengirimkan pasukan dan peralatan militernya. Tetapi dengan alasan terhambat oleh pasal 9 Konstitusi, PM Jepang Thosiki Kaito menolak permintaan itu. Sebagai gantinya Jepang menyediakan dana sebesar US\$ 9 Miliar untuk meringankan beban AS. Sejak itu pula Jepang menyatakan kesediaannya untuk turut membayai keperluan finansial pasukan AS yang berangkalan di negaranya. Untuk lengkapnya baca James E. Aar, *Defence Burden Sharing and The US-Japanese Alliance*, dalam *Institute for Foreign Policy Analysis Inc., Japan and the United States; Troubled Partners in a Changing World*, Macmillan Publishing Company, hal 22-43.

¹⁵⁾ Michael Yehuda, "China - Will it Strengthen or Weaken the Region", dalam T.B. Miller and J. Water, eds., "Asian-Pacific Security After the Cold War", 2nd Edition, ANU Printery, Australia, hal 32-47.

¹⁶⁾ Estrella D. Sollicitum, "Strategic Issues in the Trilateral Relations of US, Japan, and ASEAN", dalam K.S. Nathan and M. Pattmatan, "Trilateralism in Asia", Antara Book Company, Kuala Lumpur hal. 179.

¹⁷⁾ Tetapi ada puja pendapat yang mengatakan bahwa di Asia Tenggara tidak akan ada perlombaan senjata (*arms race*). Sebab pengeluaran anggaran belanja negara ASEAN untuk kepentingan persenjataan hanya berkisar antara 3-6% persen per tahun. Andalkan terjadi peningkatan pengeluaran dalam anggaran pertahanan, maka hal itu haruslah dilihat sebagai suatu konsekuensi yang wajar karena meningkatnya kemampuan ekonomi. Seandainya terjadi perlombaan senjata dikawasan Asia Tenggara, maka penyebabnya adalah karena negara-negara barat produsen senjata kelebihan persediaan akibat dari berakhirnya Perang Dingin yang secara langsung mempengaruhi industri militernya. Lebih lanjut lihat, Bilver Shing, "The Challenge of Conventional Arms Proliferation in Southeast Asia", CSIS, Jakarta, Hal 78-81.

¹⁸⁾ Lau Teik Soon, *ibid*, hal. 55

mempertahankan kehadirannya di kawasan Asia Pasifik karena dua pertimbangan penting.¹⁹⁾ Yaitu, pertama, kekuatiran akan kemungkinan bangkitnya Cina sebagai kekuatan militer penting di Asia Pasifik yang dapat mengganggu keseimbangan kekuatan dan keamanan di kawasan itu. Negara-negara ASEAN secara ideologis pernah mempunyai pengalaman yang traumatis dengan Cina. Oleh karena itu diterimanya Myanmar sebagai anggota baru ASEAN sebenarnya tidak terlepas dari pertimbangan ideologis ini. Akan tetapi dengan munculnya semangat isolasionalisme baru di dalam Kongres AS menyusul kemenangan Partai Demokrat tahun 1994 telah menimbulkan pertanyaan besar tentang kesanggupan AS untuk tetap bertahan di kawasan ini untuk mengimbangi Cina. Kedua, masalah yang dikemukakan oleh para pemimpin di kawasan Asia Pasifik tentang masa depan Aliansi AS-Jepang. Presiden Clinton pernah mengatakan bahwa sengketa dagangnya dengan Jepang bisa mempengaruhi masa depan aliansi tersebut.

Kenyataannya aliansi pertahanan Jepang-AS di masa-masa mendatang akan mendapat tantangan yang tidak kecil berupa terjadinya friksi perdagangan di antara mereka. Membengkaknya difisit perdagangan AS terhadap Jepang yang men-capai US\$ 50 miliar dikuatirkan akan mempengaruhi aliansi keamanan kedua negara meskipun telah bertahun-bertahun diupayakan untuk membedakan persoalan ekonomi dan militer.²⁰⁾ Keprihatinan AS adalah menghadapi meningkatnya hambatan perdagangan tender di bidang konstruksi.

Dengan demikian kehadiran militer AS di kawasan Asia Pasifik tetap penting hanya bagi Jepang tetapi juga ASEAN. Kehadiran militer AS minimal dapat menahan sikap ekspansionisme beberapa negara yang ada di kawasan itu.

5. URGensi “DOKTRIN HASHIMOTO”

Kebijakan luar negeri Jepang di kawasan Asia Pasifik selama ini didasarkan pada empat pilar penting, yaitu dialog politik dan keamanan, pertukaran kebudayaan, kerjasama dan bantuan ekonomi, serta upaya bersama mengelola masalah-masalah internasional. Selama bertahun-tahun hubungan

¹⁹⁾ Leszek Buszynski, *op cit*, hal 16

²⁰⁾ Jusuf Wanandy "Japan's Future Security Role: A Southeast Asian Perspective", *Japan Review of International Affairs*, Vol. 5 hal. 23

Jepang dengan negara-negara tetangganya banyak didasarkan atas kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi. Berakhirnya Perang Dingin telah memberi kesempatan kepada Jepang untuk memainkan peran politik dan keamanan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik. Sebab ancaman Rusia terhadap keamanan di Asia Pasifik sebab ancaman Rusia terhadap keamanan di Asia Pasifik telah mulai berkurang dan AS secara bertahap mulai mengurangi keterlibatannya dalam sistem keamanan di kawasan itu. Akan tetapi pada waktu yang sama, Cina berhasil memanfaatkan keberhasilan pembangunan ekonominya dengan memperbarui sistem persenjataannya. Banyak pengamat memperkirakan kekuatan ekonomi telah menjadi bagian integral dari kedaulatannya.

Dibawah PM Ryutaro Hashimoto, kebijakan politik luar negeri Jepang kali ini nampaknya hendak difokuskan pada aspek politik dan keamanan karena berbagai pertimbangan. Ketika Perang Teluk berakhir, mayoritas penduduk Jepang menyetujui pengiriman pasukan Jepang ke luar negeri untuk kepentingan PBB. Bahkan akhir-akhir ini semakin meningkat keinginan dari kedaulatan dari kalangan politisi, media massa, intelektual, dan opini publik yang mendukung revisi terhadap konstitusi Jepang, termasuk pasal 9 yang menolak perang sebagai instrumen kebijakan nasional.²¹⁾ Di samping itu munculnya berbagai insiden yang melibatkan negara-negara tetangga telah memperburuk perasaan tidak aman rakyat Jepang. Insiden-insiden itu meliputi krisis dalam negeri Korea Utara tahun 1993-1994, krisis Selat Taiwan tahun 1995-1996, krisis dengan Korea Selatan menyangkut klaim atas pulau Takeshima, sengketa dengan Cina menyangkut klaim atas pulau Senkaku-Diaoyu tahun 1996, insiden permerkosaan di pangkalan militer AS di Okinawa, dan yang paling akhir adalah kerusakan sumber perikanan Jepang di Laut Jepang akibat pencemaran minyak oleh kapal Rusia yang kandas. Dialog bilateral terus diupayakan Jepang untuk mengurangi ketegangan, dan semua krisis berlalu tanpa aksi kekerasan. Tetapi krisis itu sebenarnya tidak berakhir secara damai seperti yang diharapkan, sehingga

²¹⁾ Surat kabar Yomiuri Shimbun beberapa waktu lalu secara tegas mengusulkan perubahan atas pasal 9 paragraf ke dua Konstitusi yang melarang adanya berperang dan menolak hak berperang, diganti dengan penegasan akan keberadaan Pasukan Bela Diri Jepang yang merupakan organisasi bela diri. Lebih lanjut lihat Lam Peng Er, "Japan's Search for a Political Role, dalam Daljit Singh and Liak Teng Kiat, eds, "Southeast Asian Affairs 1996". Institute of Southeast Asian Studies, Singapura, hal. 51

Sumber utama kekuatiran Jepang adalah RRC karena akhir-akhir ini Cina terus memperlihatkan peningkatan kemampuan militernya secara agresif. Disamping itu hingga saat ini Cina masih bersikap tegas menolak menyinggung kemungkinan penggunaan kekerasan terhadap Taiwan, dan mengklaim atas beberapa teritorial dan perairan di Asia Timur serta membantu Korea Utara mengembangkan teknologi nuklir. Dengan kata lain berakhirnya Perang Dingin juga telah memberi peluang kepada Cina untuk membangun kekuatan militernya serta mencari daerah pengaruh Cina telah berhasil memanfaatkan kekuatan ekonominya untuk memperkuat persenjataan mereka. Dan Cina pula yang bereaksi keras ketika Perjanjian Keamanan AS-Jepang diperbaharui bulan April tahun 1996. Sebaliknya Jepang tidak dapat manfaatkan situasi *vacuum of power* di kawasan Asia Pasifik karena hambatan dari konstitusinya sendiri. Hal inilah yang ingin diantisipasi oleh Jepang dengan mengajak negara-negara ASEAN berdialog secara reguler pada tingkat yang paling tinggi.

Karena baik Jepang maupun ASEAN saat ini mempunyai sengketa teritorial dengan Cina. Konflik dengan ASEAN sudah pasti menyangkut klaim atas Kepulauan Spratly, sebab dengan bergabungnya Vietnam pada bulan Juli 1995 berarti untuk pertama kalinya ASEAN secara bersama-sama harus berhadapan secara langsung dengan Cina. Sejak saat itu pula ASEAN dituntut untuk mempunyai pandangan yang sama mengenai konflik di Spratly. Sementara Jepang mempunyai masalah dengan Cina atas Kepulauan Sinkaku atau Diaoyu. Sejauh ini belum ada sikap bersama Jepang-ASEAN atas konflik di Kepulauan Spratly. Padahal meskipun tidak secara langsung terlibat tetapi Jepang sebenarnya juga mempunyai kepentingan di Laut Cina Selatan sebab sebagianbesar impor Jepang diangkut melalui kawasan ini.

Gagasan tentang forum dialog itu nampaknya dimanfaatkan Jepang sebagai wahana untuk membicarakan situasi keamanan regional serta kepentingan politik Jepang yang lebih luas lagi. Tetapi bila dilihat dari sudut ASEAN, usulan serupa itu hanya akan memberikan kesulitan baru yang bersifat dilematis sebab baik Jepang maupun Cina sama pentingnya bagi ASEAN. Secara tradisional, Jepang merupakan mitra dagang utama ASEAN yang sampai tahun 1995 diperkirakan telah mencapai nilai US\$ 74 miliar, dan investasinya di negara-negara ASEAN secara kumulatif mencapai US\$ 33 miliar pada tahun 1995. Jepang juga merupakan sumber keuangan ASEAN dan 10 persen kebutuhan minyak mentah diimpor dari ASEAN. Tetapi ASEAN

juga melihat Cina sebagai negara yang memiliki potensi menjadi kekuatan ekonomi dan militer yang penting di Asia di masa mendatang.

Karenanya, bila usulan itu diterima berarti ASEAN akan memojokkan Cina. Padahal perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan ASEAN-Cina secara perlahan-lahan mulai menampakan hasil yang menggembirakan. Tetapi bila ditolak, berarti ASEAN membiarkan persaingan hegemoni kedua negara itu terus berlanjut. Bahkan ASEAN akan kehilangan momentum penting untuk bisa berdialog secara reguler dalam bidang politik dan keamanan pada tingkat yang lebih tinggi dengan Jepang.

Menghadapi situasi seperti itu, yang seharusnya dilakukan ASEAN adalah persamaan perlakuan baik terhadap Jepang dan Cina, sebagai jaminan terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Jepang memang diakui telah banyak membantu perkembangan ekonomi dan perdagangan ASEAN, tetapi Cina yang mempunyai penduduk lebih dari 1 miliar merupakan peluang pasar yang sangat menjanjikan. Di samping itu ASEAN harus pula memperhitungkan faktor AS sebagai negara besar yang juga mempunyai kepentingan strategis di kawasan Asia Pasifik, dan karenanya harus pula dilibatkan didalamnya. Atau dengan kata lain, AS, Jepang dan negara-negara ASEAN harus mampu mengintegrasikan Cina kedalam sebuah persetujuan internasional yang dapat membantu mengembangkan perekonomian Cina. pendekatan seperti ini mungkin hanya akan memperkuat militer Cina, akan tetapi pertumbuhan ekonomi pada gilirannya juga akan merangsang kemajuan demokratisasi.

Karenanya yang terbaik bagi ASEAN adalah sedapat mungkin menciptakan sinergi di antara kedua negara tersebut sehingga didapatkan hasil yang lebih menguntungkan. Kerjasama kedua negara ini boleh jadi akan menjadi motor dan mempererat pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. ASEAN yang saat ini sedang membutuhkan investasi, perdagangan dan teknologi tinggi jelas membutuhkan kondisi yang demikian itu. ASEAN seharusnya menolak sikap tegas PM Hashimoto yang mengatakan "*the time has come for Japan to spread its own values and philosophy in the world*"²²⁾, sebab hal itu hanya akan memperlemah persekutuan Jepang-

²²⁾ Michael Richardson, "Tokyo Poses ASEAN Puzzle", *International Herald Tribune*, 8 Januari 1997

AS, dan membiarkan Jepang meningkatkan kapabilitas militer yang bisa dipastikan akan mengundang respon dari Cina.

Di sisi lain ASEAN harus lebih berani meyakinkan negara-negara mitra dialognya bahwa mekanisme ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan sarana yang paling tepat untuk membicarakan situasi keamanan regional maupun internasional. Jepang merupakan negara yang paling mendukung dibentuknya ARF pada tahun 1994. Sebab Jepang beranggapan bahwa ARF merupakan pelengkap dan bukan pengganti dari Aliansi AS-Jepang yang tetap menjadi tonggak politik luar negeri Jepang pasca Perang Dingin. Di samping bermanfaat meningkatkan keamanan regional melalui dialog dan *confidence-building measures (CBM)*, ARF juga bisa memberi kesempatan yang sangat berharga kepada Jepang untuk membicarakan dan mempengaruhi politik regional dan masalah-masalah strategis. Melalui ARF, Jepang dapat memajukan CBM dan transparasi militer yang lebih besar dengan mempublikasikan buku putih pertahanan.

Untuk mengatasi keprihatinan atas potensi Cina sebagai kekuatan hegemon di masa mendatang, Jepang dan ASEAN dapat memanfaatkan ARF sebagai forum multinasional yang sangat tepat untuk mengajak dan membiasakan Cina berdialog, konsultasi dan bekerja sama. Jepang juga harus mempercayai bahwa negara-negara anggota ARF lainnya akan meyakinkan Cina untuk tidak mengabaikan sensitivitas regional dengan melakukan uji coba senjata nuklir dan menciptakan ketegangan di Laut Cina Selatan.

Bagaimanapun juga, gagasan seperti "Doktrin Hashimoto" merupakan tantangan besar bagi ASEAN untuk lebih mengefektifkan mekanisme dialog didalam ARF dan CBM sehingga bisa dihindari rasa saling curiga di antara negara-negara se-kawasan. Karena munculnya gagasan seperti itu secara sempit bisa diartikan sebagai ketidakpuasan Jepang terhadap mekanisme ARF. Confidence Building Measures yang selama ini menjadi sarana dan kekuatan diplomasi ASEAN jelas harus dipertahankan. Pertemuan para Menlu ASEAN bulan Desember 1997 nanti selayaknya membicarakan hal ini.

6. PENUTUP

Kerjasama Jepang-ASEAN untuk masa-masa yang akan datang tetap penting dan mutlak dipertahankan. Sebab bagi ASEAN kualitas hubungan

tersebut masih harus diperbaiki. Selama ini Jepang banyak mengimpor kebutuhan sumber daya alam dan sumber-sumber industrinya dari negara-negara ASEAN, sementara ASEAN banyak mengimpor produk manufaktur Jepang. Pola perdagangan seperti ini hanya mendatangkan surplus bagi Jepang, sebab pada kenyataannya Jepang masih enggan membuka pasar dalam negerinya bagi ekspor produk manufaktur negara-negara ASEAN.

Relokasi industri yang selama ini dilakukannya-pun patut dipertanyakan. Sebab bila dilihat dari perkembangannya sejak tahun 1970-an, terkesan Jepang tidak ingin masuk terlalu dalam kedalam ekonomi negara-negara ASEAN, dan tidak pula didasarkan atas logika untuk mempererat hubungan melalui kebijakan seperti itu. Apa yang dilakukan Jepang selama ini nampaknya tidaklah lebih dari upaya untuk merubah struktur industri dalam negerinya yang tidak sesuai dengan jaman dan sarat resiko. Tetapi sayangnya relokasi industri itu tidak dibarengi dengan proses alih teknologi, sehingga negara-negara ASEAN masih tetap bergantung pada teknologi Jepang.

Menghadapi gejala munculnya Cina sebagai kekuatan hegemoni di Asia Pasifik, Jepang berniat memperbaikinya pola hubungannya dengan negara-negara ASEAN. Jika selama ini hubungan tersebut banyak bertumpu pada aspek ekonomi saja, maka kini Jepang hendaknya memperluasnya dengan membicarakan pula masalah politik dan keamanan. Cara yang hendak ditempuh Jepang adalah dengan mengajak para pemimpin ASEAN untuk mengadakan KTT secara reguler membicarakan perkembangan hubungan politik dan keamanan baik yang menyangkut masalah bilateral maupun regional.

Menanggapi gagasan seperti itu, ASEAN masih bersikap hati-hati. Sebab khawatir akan muncul ketergantungan baru terhadap Jepang. Tetapi yang lebih penting lagi, ASEAN sebenarnya sudah mempunyai mekanisme dialog untuk membicarakan masalah keamanan regional dalam wujud ASEAN Regional Forum. ARF inilah yang harus dikedepankan oleh ASEAN bila hendak berbicara mengenai masalah keamanan regional. Gagasan PM Jepang Ryutaro Hashimoto sebenarnya baik tetapi bisa menimbulkan preseden bagi mitra dialog ASEAN lainnya.

Di samping itu Cina yang menjadi sumber kekuatiran Jepang, secara bertahap kini telah menjadi mitra dagang yang prospektif bagi ASEAN. Sehingga bila usulan itu diterima dikuatirkan hubungan ASEAN-Cina yang telah terjalin baik bisa terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Haitani, Kanji, "The paradox of Japan's groupism : Threat to future Competitive-ness?" *Asian Survey*, Vol XXX, No. 3, 1990
- Institute for foreign Policy Analysis, Inc., Special Report, "Japan and United States : Troubled Partners in a Changing World", *Brassey (US), Inc.*, Washington, 1991
- Kreft, Heinrich, "Jepang's Link with East and Southeast Asia", *Aussen Politik*, Vol. 47, No. 1, 1996
- Miller, T.B. and J. Walter, eds, "Asian-Pasific Security After the Cold War", *ANU Printery*, Australia, 1993
- Nathan, K.S. M. Pathmanathan, eds., "Trilateralism in Asia", *Antara Book Company*, Kuala Lumpur, 1986.
- Singh, Lim Hua, "Japan's Role in Asia : Issues and Prospects", *Times Academic Press*, Singapore, 1994
- Singh, Bilveer, "The Challenge of Conventional Arms Proliferation in Southeast Asia", *CSIS*, Jakarta, 1995
- Singh, Daljit and Liak Teng Kiat, eds., "Southeast Asia Affairs 1996", *Institute of Southeast Asian Studies*, Singapore, 1997
- Soon, Lau Teik, "Japan's Role in the Asia-Pacific Region", *Japan Review of International Affair*, Vol. 5, 1991
- Taylor, Mark Z., "Dominance throuh Technology", *Foreign Affairs*, Vol. 74, No. 6, 1995
- Wanandi, Jusuf, "Japan's Future Security Role : A Southeast Asian Perspective", *Japan Review of International Affairs*, Vol. 5, 1991
- Surat kabar:
- Kompas, Media Indonesia, International Herald Tribune, The Asiaan Wall Street Journal, Far Eastern Economic Review.

BAB VI

Upaya ASEAN Mewujudkan Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara

Oleh : Simela Victor Muhamad

1. Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui sidang paripurna pada tanggal 12 Maret 1997 yang lalu telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ratifikasi Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (SEANWFZ- South East Asian Nuclear Weapons Free Zone) untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Saat ini, dari sepuluh negara Asia Tenggara, baru enam negara yang meratifikasi dan menyerahkan piagam ratifikasinya. Keenam negara itu adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar dan Vietnam. Sedangkan Filipina, Singapura dan Thailand belum meratifikasinya.

Posisi Indonesia sebagai negara ketujuh yang setuju untuk mensahkan UU tentang Ratifikasi Traktat SEANWFZ itu penting, karena Traktat tersebut baru akan berlaku setelah tujuh negara Asia Tenggara meratifikasi dan menyerahkan piagam ratifikasinya kepada Thailand, selaku negara penyimpan piagam ratifikasi. Langkah Indonesia tersebut merupakan wujud komitmen bangsa dan negara Indonesia dalam upaya mempercepat berlakunya Traktat SEANWFZ sebagaimana telah disepakati dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN di Jakarta bulan Juni 1996. Komitmen ini merupakan tekad untuk menciptakan kehidupan bersama dalam sebuah kawasan yang damai, bebas dan netral di Asia Tenggara.

Menteri Luar Negeri Ali Alatas, dalam pidatonya di depan Sidang Paripurna DPR tersebut mengemukakan, bahwa dengan cepatnya Indonesia meratifikasi dan menyerahkan piagam ratifikasi, maka Traktat itu akan menjadi kenyataan hukum. Alatas mengharapkan ratifikasi itu akan dapat menjadi pemicu bagi negara-negara ASEAN lainnya untuk mempercepat proses ratifikasinya sesuai dengan prosedur dalam negerinya masing-masing. Jika kesemuanya ini dapat terjadi, maka cita-cita dan gagasan Indonesia untuk mewujudkan SEANWFZ yang diluncurkan lebih kurang seperempat abad

yang lalu akan menjadi kenyataan. Hal ini juga berarti ASEAN telah melangkah lebih maju lagi dalam mengisi secara konkret konsep ZOPFAN (*Kompas*, 13 Maret 1997)

Tulisan ini mencoba membahas perihal pembentukan SEANWFZ, sebagai salah satu elemen penting dari ZOPFAN. Sebelum membahas SEANWFZ, terlebih dahulu akan dikemukakan tentang pembentukan *Nuclear Weapon Free Zone* (NWFZ) sebagai cita-cita dari masyarakat internasional.

2. Pembentukan NWFZ

Pada saat NPT (*Non Proliferation Treaty*) ditandatangani tahun 1968 hanya ada lima negara nuklir. Seperempat abad kemudian negara nuklir berkembang biak. Israel, India, Pakistan, Iran, Cina dan berbagai negara lain mempunyai kemampuan potensial untuk mengembangkan senjata nuklir. Nuklir seringkali merupakan suatu pilihan yang lebih murah dibanding dengan penggelaran senjata konvensional.

Perlucutan senjata tidak menghapus ilmu pengetahuan dan teknologi persenjataan. Kemajuan pesat teknologi persenjataan telah mengubah strategi perang secara mendasar. Dengan dilibatkannya senjata-senjata nuklir yang memiliki daya pemusnah dan jarak jangkauan yang luar biasa dahsyat dan canggihnya, segala perhitungan konvensional praktis tidak berlaku lagi. Senjata nuklir merupakan senjata pemusnah massal yang sangat keji. Untuk sepuluh sampai 15 tahun mendatang masih akan terdapat lebih dari 3000-6000 moncong peledak nuklir strategis, mungkin lebih, sesuai dengan kesepakatan START II yang hingga kini belum memperoleh ratifikasi dari parlemen Rusia maupun Senat Amerika Serikat (*Anggoro*, 1996 : 70-94).

Dengan mengingat ancaman kerusakan dan kehancuran yang dapat ditimbulkan terhadap umat manusia dan lingkungan hidup, maka masyarakat internasional berusaha membatasi jumlah dan ruang geraknya, sebelum berhasil menghapuskan kehadirannya sama sekali dari permukaan bumi. Dengan demikian pembentukan *Nuclear Weapon Free Zone* (NWFZ) tidak saja hanya menjadi cita-cita dari masyarakat di suatu kawasan tertentu, tapi juga merupakan cita-cita dari masyarakat internasional. NWFZ didefinisikan sebagai "kawasan-kawasan di dunia di mana sebagian besar negara-negara di dalamnya ingin membebaskan diri dari senjata nuklir, namun tanpa menyalahi berbagai ketentuan traktat-traktat internasional, khususnya mengenai prinsip kebebasan

pelayaran, pembentukan kawasan-kawasan tersebut perlu mendapatkan dukungan negara-negara nuklir" (*Pitt dan Thompson eds.*, 1987 : 1).

NPT 1968 sebenarnya sudah mengisyaratkan perlunya pembentukan NWFZ. Dalam Pasal VIII NPT (1968) terdapat rumusan yang berbunyi, "*Nothing in the treaty affects the right of any group of states to conclude regional treaties in order to ensure the total absence of nuclear weapons in their respective territories.*" Rumusan tersebut dapat ditafsirkan sebagai suatu dorongan guna pembentukan Kawasan-kawasan Bebas Senjata Nuklir diberbagai kawasan dunia, yaitu sebagai langkah-langkah regional untuk menciptakan *further barrieys* guna pencegahan proliferasi senjata nuklir (Goldblat, 1990 : 49-59). Langkah-langkah regional sangat bermanfaat tidak saja untuk memantapkan perdamaian dan keamanan internasional, namun juga untuk mencapai tujuan-tujuan perlucutan dan pengendalian senjata pada tingkat global. Tujuan NPT (1968) sendiri adalah untuk mencegah penyebaran senjata-senjata nuklir dari negara-negara nuklir ke negara-negara non-nuklir, meningkatkan proses perlucutan senjata nuklir dan mempermudah akses untuk memperoleh teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Pada tahun 1975, Kelompok Ahli PBB membuat suatu arahan umum guna Pembentukan NWFZ (Thamrin, 1996 : 383-384). Hasil studi Kelompok Ahli PBB berjudul "*A Comprehensive Study of the Question of Nuclear Weapon Free Zone in All Its Aspects : Special Report of the Conference of the Committee of Disarmament*" itu berbunyi sebagai berikut :

- (1) Inisiatif pembentukan NWFZ harus berasal dari dalam kawasan;
- (2) Ketentuan-ketentuan spesifik dari NWFZ harus dinegosiasikan oleh negara-negara kawasan dan dituangkan dalam suatu traktat multilateral guna pembentukan NWFZ secara permanen;
- (3) Walaupun kepatuhan terhadap Traktat bersifat sukarela, NWFZ perlu mencakup negara-negara yang secara militer paling signifikan di kawasan;
- (4) Pembentukan NWFZ tidak boleh mengganggu hubungan perjanjian (treaty relationship) yang terdapat di kawasan;
- (5) Perjanjian NWFZ harus meningkatkan pengembangan ekonomi, keilmuan dan teknologi di kalangan negara-negara pihak melalui kerja sama internasional mengenai pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai;

- (6) NWFZ harus memiliki batas-batas yang jelas dan mendapat pengakuan internasional;
- (7) NWFZ perlu memiliki sistem verifikasi yang efektif;
- (8) Hukum internasional wajib dipatuhi dalam penetapan demarkasi NWFZ, termasuk prinsip-prinsip kebebasan pelayaran di laut bebas, di selat-selat untuk navigasi internasional, maupun di wilayah udara di atasnya;
- (9) NWFZ perlu mendapatkan dukungan negara-negara nuklir.

Tujuan NWFZ sesuai studi Kelompok Ahli PBB 1975 itu adalah untuk : 1) meningkatkan keamanan negara-negara di kawasan; 2) mencegah proliferasi nuklir; dan 3) meningkatkan keamanan dunia.

Tiga tahun kemudian, keinginan masyarakat internasional bagi pembentukan NWFZ ini dirumuskan dalam Pasal 33 Dokumen final SSOD I/1978 (Thamrin, 1996). Dokumen ini berbunyi sebagai berikut :

- (1) NWFZ merupakan langkah perlucutan senjata yang penting dan harus dicapai secara bebas oleh negara-negara di kawasan;
- (2) Proses pembentukan NWFZ di berbagai bagian dunia perlu didorong dengan tujuan akhir untuk mencapai dunia yang bebas sepenuhnya dari senjata nuklir dan dalam pembentukan NWFZ perlu diperhatikan berbagai karakteristik kawasan dunia yang saling berbeda ;
- (3) Negara-negara pihak pada perjanjian atau pengaturan NWFZ harus menunjukkan kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan dasar yang terkandung di dalam perjanjian dan pengaturan NWFZ tersebut, sehingga dengan demikian menjamin sepenuhnya pembebasan kawasan termasuk dari keberadaan senjata nuklir;
- (4) Negara-negara nuklir diimbau untuk menghormati status NWFZ dan menahan diri dari penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir terhadap negara-negara pihak pada perjanjian NWFZ;
- (5) Negara-negara pihak pada perjanjian NWFZ wajib mendeklarasikan bahwa mereka tidak memproduksi, memperoleh dan memiliki senjata nuklir atau mengizinkan penggelaran senjata tersebut oleh pihak ketiga di wilayah mereka dan wajib pula menempatkan seluruh aktivitas nuklir mereka di bawah pengawasan IAEA.

Memperhatikan pernyataan-pernyataan di atas, tampak bahwa pada dasarnya masyarakat internasional bercita-cita menegakkan satu kawasan bebas senjata nuklir di berbagai kawasan dunia. Sungguhpun nuansanya berbeda-beda, akan tetapi mempunyai latar belakang yang hampir serupa, yaitu kekhawatiran terhadap kemungkinan menjadi ajang konflik nuklir (baik disengaja atau tidak), maupun menerima akibat radiasi nuklir yang mematikan sebagai akibat kecelakaan atau kehilafan yang terjadi pada instalasi/platform bernuklir. Kekhawatiran semacam itu sangat mengemuka selama Perang Dingin berlangsung, dan tidak begitu saja mereda dalam era pasca Perang Dingin ini. Kebocoran dan kecelakaan pada instalasi/platform nuklir yang pernah terjadi kiranya cukup memberikan alasan terhadap kekhawatiran semacam itu. Belum lagi masih berlangsungnya percobaan-percobaan senjata nuklir hingga saat ini, yang lebih membenarkan cita-cita penegakan satu *Nuclear Weapon Free Zone* (Kawasan Bebas Senjata Nuklir).

3. Pembentukan dan Realisasi SEANWFZ

Upaya pembentukan SEANWFZ tidaklah dapat dipisahkan dari gagasan pembentukan ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality*) yang disepakati oleh para Menlu negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) di Kuala Lumpur pada bulan November 1971, yang menyatakan keinginan mereka untuk menciptakan kawasan damai, bebas dan netral di Asia Tenggara. Deklarasi ini mengulangi lagi keinginan yang dinyatakan dalam Deklarasi Bangkok untuk perdamaian dan stabilitas politik di kawasan dan kebebasan dari campur tangan dari dan keterlibatan dengan negara-negara besar luar kawasan.

Seperti juga Deklarasi Bangkok, Deklarasi ZOPFAN merupakan suatu pernyataan politik. Pentingnya Deklarasi ZOPFAN Kuala Lumpur adalah karena dikeluarkan sewaktu perang di Indochina sedang pada puncaknya. Karena itu Deklarasi ZOPFAN harus dilihat sebagai pernyataan keinginan ASEAN tidak saja untuk berkembang sebagai negara-negara merdeka, tetapi juga sebagai pernyataan keinginan mereka untuk bebas dari keterlibatan dalam kompetisi dan konflik antara negara luar kawasan di kawasan Asia Tenggara. Baru di tahun 1976, ketika diadakan Pertemuan Puncak Kepala Negara dan Pemerintah ASEAN di Bali, Konsep ZOPFAN secara resmi diangkat menjadi program politik jangka panjang ASEAN, seperti tercantum dalam *Declaration of ASEAN Concord*.

Dalam perjalanan ASEAN, ZOPFAN untuk sebagian besar telah tercapai. Namun, zona "bebas, damai dan netral di Asia Tenggara" belum sepenuhnya terjamin apabila belum terwujud *South East Asian Nuclear Weapon Free Zone/SEANWFZ* (Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara), yang merupakan perwujudan ZOPFAN di dalam satu dunia yang masih diancam kemungkinan perang nuklir (Kusuma Atmadja, 1994:156-172). Ini artinya, pembentukan SEANWFZ merupakan salah satu prioritas untuk terciptanya ZOPFAN.

Komitmen resmi ASEAN terhadap pembentukan SEANWFZ ini dicetuskan pada tahun 1987 di Manila. Pada pertemuan Puncak ASEAN di Manila itu, ASEAN mengeluarkan keputusan penting menyangkut masa depan politik kawasan, yaitu komitmen negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara di kemudian hari. Ada anggapan bahwa komitmen ASEAN di Manila untuk membentuk SEANWFZ sangat relevan dengan situasi Perang Dingin, di mana kekuatan-kekuatan dunia yang saling bersaing (Amerika Serikat dan Uni Soviet) dapat saja membuka konflik nuklir. Bagaimana relevansi SEANWFZ setelah Perang Dingin berakhir?

Setelah berakhirnya Perang Dingin, kawasan Asia Pasifik masih dilanda berbagai ketidakpastian mengenai perimbangan kekuatan (*balance of power*) maupun perimbangan kepentingan (*balance of interest*). Berakhirknya Perang Dingin yang disebabkan oleh ambruknya sistem komunis di Uni Soviet dan Eropa Timur, yang juga menyebabkan disintegrasi Uni Soviet ke dalam beberapa republik yang independen, telah mengubah sistem politik global. Struktur dunia bipolar telah berakhir. Berakhirknya sistem politik Internasional yang terbagi dua ke dalam struktur bipolar yang sangat jelas, telah memunculkan berbagai tantangan dan kekhawatiran baru. Pergantian sistem bipolar oleh sistem multipolar tanpa suatu aliansi yang jelas meningkatkan rasa ketidakpastian dalam menghadapi masalah keamanan regional. Secara singkat dapat dikatakan bahwa di samping rasalega atas berakhirknya Perang Dingin, negara-negara di kawasan Asia Pasifik, terutama dalam lingkungan ASEAN, diselimuti berbagai rasa cemas. Perasaan kurang aman ini sebagian besar disebabkan oleh suasana ketidakpastian, terutama yang menyangkut peranan negara-negara besar pada masa-masa yang akan datang. Berkurangnya peranan politik dan militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik akan memberi peluang bagi negara-negara besar lainnya

di kawasan ini untuk semakin meningkatkan peranan mereka. Hal ini di-khawatirkan dapat merugikan kepentingan negara-negara kawasan lainnya yang lebih kecil. Inilah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara di lingkungan Asia Pasifik, termasuk negara-negara ASEAN.

Hal yang juga menjadi perhatian ASEAN setelah Perang Dingin berakhir adalah berkaitan dengan keberadaan senjata nuklir. Tidak benar anggapan bahwa dengan selesainya Perang Dingin dan adanya persetujuan pengurangan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia maka ancaman penggunaan senjata nuklir telah lenyap. Kemungkinan penggunaan senjata nuklir oleh negara-negara berkekuatan sedang atau negara besar di Asia tetap ada, sehingga *South East Asian Nuclear Weapons Free Zone* tetap harus menjadi kenyataan sebagai perwujudan ZOPFAN dalam dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir (Kusuma-Atmadja, 1994)

Untuk itu, kendati Perang Dingin telah berakhir, pembentukan SEANWFZ tetap mendapat perhatian yang serius. Tekad ASEAN itu ditegaskan kembali dalam Pertemuan Puncak ASEAN di Bangkok tahun 1995, di mana sepuluh kepala negara/pemerintahan Asia Tenggara menandatangani Traktat SEANWFZ.

Traktat SEANWFZ ini pada prinsipnya akan melarang negara-negara penandatangan untuk tidak memproduksi, memiliki, mengembangkan, atau menguji coba senjata nuklir di wilayah masing-masing. Namun pengembangan energi nuklir sama sekali tidak dilarang, Traktat membolehkan setiap penandatangan mengembangkannya untuk tujuan damai, khususnya demi pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial.

Tekad ASEAN untuk membentuk SEANWFZ didasari keyakinan bahwa hanya dengan demikian keamanan Asia Tenggara dapat dijamin. Maksud dasar pembentukan Traktat SEANWFZ adalah melakukan upaya denuklirisasi kawasan, menegaskan hak negara kawasan untuk memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai, dan memperoleh jaminan keamanan (*security assurances*) dari Negara Bersenjata Nuklir. Keamanan Asia Tenggara merupakan prasyarat mutlak bagi pembangunan negara-negara ASEAN.

Efektivitas Traktat SEANWFZ sangat dipengaruhi oleh dukungan dari Negara Bersenjata Nuklir dalam bentuk jaminan keamanan bahwa tidak menggunakan ataupun mengancam untuk menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara Asia Tenggara. Tanpa adanya jaminan ini, praktis

tujuan pembentukan suatu kawasan bebas senjata nuklir sulit untuk diwujudkan. Sehubungan dengan itu, Traktat SEANWFZ disertai sebuah Protokol yaitu sebuah instrumen yang memuat Komitmen Negara Bersenjata Nuklir untuk menghormati Traktat SEANWFZ serta pemberian jaminan keamanan.

Sejauh ini, belum satu pun Negara Bersenjata Nuklir yang menandatangani Protokol Traktat SEANWFZ, karena masih memiliki beberapa keberatan terhadap rumusan yang ada pada Traktat SEANWFZ beserta Protokolnya. Amerika Serikat, Inggris dan Perancis pada dasarnya memiliki sikap yang sama, yaitu mengkhawatirkan dampak Traktat SEANWFZ terhadap kepentingan keamanan globalnya. Secara umum keberatan mereka adalah dimasukkannya ZEE (200 mil dari pantai) dan Landas Kontinen (12 mil laut dari landas kontinen) ke dalam Batasan Kawasan dan Zona Aplikasi Traktat SEANWFZ (Richardson, 1995).

Kalau ditelaah lebih jauh, sebenarnya keberatan Negara Bersenjata Nuklir tersebut kurang beralasan. Tujuan dari Traktat SEANWFZ ialah mencegah negara-negara Asia Tenggara membangun arsenal nuklir (*going nuclear*). Jadi sama sekali tidak bertujuan aktif kepada negara-negara nuklir. Kebebasan mereka lalu-lalang membawa senjata nuklir di Asia Tenggara tetap terjamin.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Artikel 3, yang merupakan ketentuan-ketentuan pokok dalam Traktat SEANWFZ, hanyalah merupakan komitmen intern negara-negara yang bukan "pihak" pada Traktat SEANWFZ. Selain itu, mereka tidak perlu khawatir kalau penerapan Traktat SEANWFZ akan mengurangi "navigational rights" yang mereka miliki berdasarkan hukum internasional. Artikel 2 paragraf 2 Traktat SEANWFZ secara eksplisit menjamin bahwa tidak ada suatu ketentuan pun dalam Traktat yang dapat mengurangi hak-hak pelayaran negara lain yang diperoleh berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982).

Memang, Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 hanya memberi hak berdaulat (bukan kedaulatan) untuk melakukan eksplorasi, eksplorasi sumber daya alam yang terkandung dalam ZEE dan Landas Kontinen. Walaupun demikian, berdasarkan Artikel 56 Paragraf 1 Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, negara pantai memiliki yurisdiksi untuk mengambil langkah-langkah guna perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, sepanjang dalam melaksanakan yurisdiksi tersebut. Kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut tersebut dipertegas kembali dalam Ar-

tikel 192 Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Untuk itu, negara pantai harus mengambil tindakan sepatutnya baik secara individual maupun kolektif sejauh yang diperlukan dalam mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh setiap sumber pencemaran. Sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, pendekatan pencegahan (*precautionary approach*) harus dilakukan dalam upaya pencemaran dalam perlindungan lingkungan laut. Upaya pencegahan dalam perlindungan lingkungan telah diterima secara luas dalam hukum kebiasaan internasional (Jailani, 1997).

Masalah pokok yang juga perlu digarisbawahi adalah menyangkut "jaminan keamanan" (*security assurances*). Bagi Negara Tak Bersenjata Nuklir, jaminan keamanan tersebut merupakan unsur penting dalam setiap upaya untuk mewujudkan "world-wide nuclear non-proliferation regime." Mereka berpendirian bahwa jaminan keamanan merupakan kondisi yang harus diberikan guna menciptakan keseimbangan kewajiban antara Negara Bersenjata Nuklir dengan Negara Tak Bersenjata Nuklir.

Bentuk paling awal dari jaminan keamanan ini adalah Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) No. 255 tahun 1968 yang menetapkan bahwa DK akan mengambil langkah-langkah khusus guna memberikan dukungan serta bantuan terhadap Negara Tak Bersenjata Nuklir yang diserang oleh senjata nuklir. Bentuk jaminan itu disebut : jaminan keamanan positif" (*positive security assurances*). Namun secara praktis jaminan keamanan seperti ini dianggap kurang memadai serta tidak efektif, karena beberapa alasan. Pertama, jaminan itu sebenarnya tidak lebih dari apa yang sudah digariskan oleh Piagam PBB bahwa setiap negara akan memberikan bantuan kepada suatu negara yang menghadapi serangan militer, terlepas dari senjata apapun yang digunakan dalam serangan itu. Kedua, Cina dan Prancis, dua kekuatan nuklir pada waktu itu, belum menandatangani NPT dan dengan demikian tidak terikat pada Resolusi 255.

Negara Tak Bersenjata Nuklir terus berusaha untuk memperoleh jaminan keamanan yang lebih memadai. Yang diperlukan oleh Negara-negara Tak Bersenjata Nuklir yang menjadi anggota NPT bukanlah sekedar "positive security assurances," tetapi juga jaminan keamanan negatif" (*negative security assurances*) yang pada dasarnya merupakan kewajiban bagi negara-negara nuklir untuk tidak menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara non-nuklir. Namun upaya tersebut menghadapi hambatan dan tantangan dari Negara Bersenjata Nuklir.

Dalam Konferensi Perlucutan Senjata 1994, negara-negara Kelompok 21, yang dimotori oleh Myanmar, Nigeria, Indonesia, serta Meksiko, berpendapat bahwa pada dasarnya keberadaan senjata nuklir secara nyata merupakan ancaman serius terhadap negara-negara non-nuklir. Oleh karena itu adalah sah jika negara-negara tersebut mendapat jaminan keamanan tanpa syarat dan mengikat secara hukum, terutama bila dikaitkan dengan kepatuhan mereka pada NPT dan perjanjian-perjanjian lain yang sejenis. Dalam Konferensi Perpanjangan NPT 1995, usul serupa diajukan kembali dan ditolak oleh kelima negara nuklir. Negara-negara non-nuklir hingga sekarang belum memperoleh jaminan keamanan positif dan masih tetap menjadi salah satu ancaman bagi kehidupan umat manusia. Jaminan kombinasi akhirnya disepakati tahun 1995, melalui Resolusi DK PBB No. 984 (Anggoro, 1996).

Kembali ke Protokol Traktat SEANWFZ, Negara Bersenjata Nuklir diikat secara hukum untuk menghormati ketentuan-ketentuan Traktat serta tidak akan menggunakan atau mengancam akan menggunakan senjata nuklir terhadap negara Pihak pada Traktat SEANWFZ (*negative security assurances*) atau terhadap siapa pun di Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (*blanket negative security assurances*).

Pada dasarnya Amerika Serikat, Perancis dan Inggris, bersedia memberikan “*negative security assurances*” sebagaimana dikehendaki dalam Protokol Traktat SEANWFZ. Namun, mereka keberatan dengan rumusan kalimat kedua dari Artikel 2 Protokol Traktat SEANWFZ, mengenai *blanket negative security assurances* (Richardson, 1995). Rumusan tersebut dapat menyebabkan implikasi bahwa pemberian jaminan keamanan tidak hanya kepada Negara Pihak pada Traktat SEANWFZ saja, melainkan juga kepada Negara siapa saja, yaitu Negara Pihak pada Protokol (Negara Bersenjata Nuklir lainnya) atau negara non-Asia Tenggara lainnya yang memiliki kepentingan di kawasan Asia Tenggara. Mereka tidak menghendaki negara yang bukan Negara Pihak pada Traktat SEANWFZ mengambil keuntungan dari jaminan keamanan negatif yang diberikan. Oleh karenanya, negara-negara tersebut hanya bersedia memberikan “*negative security assurances*” kepada negara-negara yang mereka anggap layak. Dalam hal ini, mereka hanya bersedia memberikan “*negative security assurances*” kepada Negara Pihak pada Traktat SEANWFZ saja.

Negara-negara ASEAN tampaknya sepakat meninjau kembali Pro-tokol Traktat SEANWFZ. Peninjauan kembali Protokol ini lebih didasarkan pada perimbangan politis, yaitu untuk mengikat Negara Bersenjata Nuklir untuk tidak menyerang Negara Pihak pada Traktat SEANWFZ. Keputusan tersebut mau tidak mau harus diambil. Apabila negara-negara Asia Tenggara bersikap kaku dan tidak berkenan menampung kepentingan Negara Bersenjata Nuklir, maka mereka tidak akan menandatangani Protokol Traktat SEANWFZ, yang berarti pula efektivitas SEANWFZ akan semakin jauh dari harapan.

4. Penutup

Traktat zona bebas senjata nuklir di sebuah kawasan merupakan bagian dari upaya pengurangan senjata nuklir. Selain di Asia Tenggara, saat ini diberlakukan pula zona bebas senjata nuklir di belahan selatan dunia ini, seperti Pasifik Selatan, Amerika Latin dan Afrika.

Cita-cita mengurangi senjata nuklir masih sulit dicapai. Negara-negara nuklir dunia saat ini masih menggelarkan lebih dari 10.000 hulu ledak nuklir, masih jauh dari tujuan mulia memusnahkannya sesuai aturan-aturan yang tertera di dalam Traktat NPT.

Perjanjian pengurangan senjata nuklir masih melibatkan pihak-pihak secara terbatas, seperti START (*Strategic Arms Reduction Treaty*) antara Amerika Serikat dengan Rusia dan INF (*Intermediate Nuclear Force*) antara blok Barat dan Timur di Eropa. Sejak senjata nuklir digelar setelah Perang Dunia Kedua, berarti telah lebih dari 50 tahun, belum ada perjanjian multilateral yang secara efektif berhasil menyepakati pengurangannya.

Di tengah kemacetan inilah ASEAN memberikan sumbangsih penting dengan mencoba menerapkan *Nuclear Weapon Free Zone* (Zona Bebas Senjata Nuklir). Bagi ASEAN, Traktat ini telah menjelma menjadi salah satu komponen dari Deklarasi ZOPFAN 1971 dan Program Aksi ZOPFAN tahun 1993 sebagai cetak biru (*blue print*) politik keamanan di kawasan Asia Tenggara. Diharapkan Traktat SEANWFZ ini diratifikasi sepuluh parlemen negara-negara Asia Tenggara paling lambat akhir 1997.

DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, Kusnanto. "Senjata Nuklir, Doktrin Penangkalan dan Kerja sama Keamanan Pasca Perang Dingin," dalam buku *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Jakarta : Pustaka Jaya, 1996.

Josef, Goldblat. "NPT and Nuclear Weapon Free Zone," dalam *Arms Control : The Journal of Arm Control and Disarmament II*, No. 1, May 1990, h. 49-59.

Jailani, Abdulkadir. "Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara", "Kompas, 13 Maret 1997, hal IV.

Kusuma-Armadja, Mochtar. "Politik Luar Negeri Indonesia : Suatu Evaluasi, Analisis CSIS, Tahun XXIII, No. 2. Jakarta : CSIS, Maret-April 1994.

Pitt, Davit dan Gordon Thompson (eds.) *Nuclear Free Zone*, London : Croom Helm, 1987.

Richardson, Michael. "US Drops Its Objection to Asia Nuclear Free Zone," *International Herald Tribune*, August 1, 1995.

Thamrin, Yuri O. "Upaya Indonesia Menciptakan Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara, "Analisis CSIS, Tahun XXV, No. 5. Jakarta : CSIS, September - Oktober 1996.

BAB VII

TANTANGAN ASEAN DAN AIPO DALAM ERA GLOBALISASI

Oleh : Poltak Partogi Nainggolan

Isu Demokratisasi

Isu Demokratisasi berkembang demikian populer dalam era pasca-Perang Dingin, di banyak bagian dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Sehingga, hampir semua aspek politik seperti keterbukaan, pemberdayaan masyarakat dan hak asasi manusia, selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Peralihan generasi kepemimpinan atau yang dikenal dalam terminologi politik dengan suksesi, telah menjadi semakin penting maknanya, mengingat di kedua kawasan tersebut telah berlangsung berbagai kemajuan ekonomi yang telah diperhitungkan dunia. Sebagaimana terlihat di Jepang, Korea Selatan, Singapura, Thailand dan Filipina, kemampuan pemimpin menjadi cikal bakal lahirnya peralihan. Penyerahan tumpuk kepemimpinan tidak lagi cukup sekedar karena pemimpin itu berasal dari dinasti politik atau sahabat penguasa sebelumnya, tetapi prestasi dan kemampuan yang akan lebih menentukan di masa depan. Sesuai dengan kecenderungan perkembangan dunia dewasa ini, maka peralihan generasi sekarang dan masa mendatang akan banyak ditentukan oleh kemampuan para pemimpin dalam menangani isu-isu ekonomi, keadilan sosial, lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

Para pemimpin Asia akan menghadapi suatu masa dimana kompetisi antar negara tidak lagi ditentukan oleh kekuatan senjata, namun teknologi, modal dan manajemen. Para pemimpin yang dapat menguasai karakter jaman (*Zeitgeist*) seperti itulah, yang akan berhasil membawa negaranya me-lintasi milenium baru yang sarat dengan berbagai tantangan dan sekaligus peluang yang terbentang di depan. Karena itu, masalahnya adalah, dapatkah seluruh negara anggota AIPO dan AIPO sendiri sebagai suatu instansi perhimpunan antarparlemen ASEAN, menangkap semangat atau karakter jaman dimaksud, agar dapat mempersiapkan munculnya pemimpin-pemimpin generasi baru di masa yang akan datang? Sehingga, negara-negara anggota AIPO tidak mempunyai kesenjangan kesiapan yang lebar dalam

menghadapi tantangan dan mengkap peluang yang tersedia dalam era liberalisasi ekonomi, demi terciptanya keselarasan dan situasi yang harmonis dalam hubungan di antara mereka, untuk menjamin terciptanya stabilitas dalam jangka panjang di kawasan Asia Tenggara.

Memasuki milenium baru, banyak harapan digantungkan pada kawasan Asia Tenggara, sebagai bagian dari kawasan Asia Pasifik yang dinamis, dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Mukjizat ekonomi yang dihasilkan oleh negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan sebagainya di kawasan Asia Tenggara yang merupakan anggota AIPO, telah memunculkan pertanyaan, apakah merupakan hasil dari penerapan sistem politik yang demokratis, semidemokratis atau otokratis? Pertanyaan itu merujuk pada apa yang telah berlangsung di Jepang, Korea Selatan dan Taiwan untuk terminologi berikutnya; serta RRC untuk yang disebut terakhir. Tidak mudah memang untuk mencari jawaban yang tepat, terutama dengan munculnya terminologi tambahan, yakni otoriterisme lunak. Penilaian tandingan pun muncul dan mempertanyakan, apakah parameter yang dipakai untuk mengkategorikan sistem politik yang diterapkan negara-negara tersebut, sudah tepat ?

Dalam perspektif kategori diatas, Thailand dan Filipina pasca-Marcos mendapat penilaian yang positif. Tetapi sebelum pemerintah yang demokratis diterapkan, dikedua negara tersebut pernah berlangsung apa yang dinilai sebagai pemerintahan yang represif, walaupun Filipina telah berpengalaman dengan warisan demokrasi AS. Selebihnya, negara-negara di kawasan Asia Tenggara dinilai telah menjalankan sistem politik otoriterisme lunak. Sedangkan Myanmar, Laos dan Vietnam termasuk dalam kategori yang lebih berat (keras), namun untuk dua negara yang disebut belakangan, keadaannya relatif lebih baik, dengan mulai mengintroduksi sedikit reformasi politik.

Sekalipun demikian, ada yang menarik dari sistem politik dan perilaku kekuasaan yang dijalankan Malaysia dan Singapura. Pemerintah kedua negara tersebut dinilai transparan dalam melaksanakan sistem politik dan dalam perilaku kekuasaan mereka. Salah satu unsur penyebabnya, diperkirakan karena aproses regenesi kepemimpinan (suksesi) yang begitu terbuka, yang telah membuat reaksi masyarakat pada umumnya puas dan lega. Pendapat yang membela penilaian ini mengatakan bahwa, proses regenerasi yang terbuka itu membuktikan sistem politik yang berlangsung, telah berjalan dengan baik, sehingga telah memberikan hasil yang baik pula. Dan masyarakat dalam negara-negara yang menganut sistem

politik dan perilaku kekuasaan semacam itu, diasumsikan tidak merasa perlu bertanya tentang siapa pemimpin masa depan mereka. Disadari, bagi masyarakat negara berkembang, pada umumnya masalah suksesi kepemimpinan, transparansi, atau keterbukaan politik adalah masalah krusial, karena memang belum jelas dalam implementasinya, sehingga lebih banyak gosip yang berkembang.

Dalam hubungannya dengan isu demokratisasi, kondisi kebebasan berbicara, berkumpul atau berorganisasi di negara-negara anggota AIPO, sering kali disorot dan dijadikan kriteria dalam penilaian kondisi hak asasi manusia. Pengawasan pemerintah, penerapan Internal Security Act, UU Subversif dan semacamnya, serta berbagai ketentuan perijinan spesifik yang berhubungan dengan hal dimaksud, dijadikan parameter dari kondisi yang ada. Kritik-kritik pihak luar terutama diarahkan pada sulitnya mendirikan organisasi politik, memperoleh ijin kegiatan politik, perlakukan terhadap partai/kelompok oposisi dan seringkali peringatan diberikan terhadap pers, walaupun itu belum tentu terdapat di suatu negara secara menyeluruh. Sementara, hubungan yang tidak selalu serasi antara pemerintah dengan NGO dalam kegiatan-kegiatan mereka, sebagaimana yang tampak di Malaysia, Indonesia dan Filipina, turut mewarnai konstelasi politik. Perlakukan terhadap NGO, yang ada di antaranya secara apriori telah dinilai sebagai lembaga yang berkolaborasi dengan pihak asing, berpaham kekiri-kirian, radikal, tidak nasionalis dan sebagainya, kian memperkeras kritik pihak luar atas kondisi demokrasi di negara-negara anggota AIPO.

Di tengah berbagai kritik yang diarahkan terhadap pelaksanaan demokrasi di negara-negara anggota AIPO, bukan berarti tidak adanya perbaikan sama sekali di sana-sini. Sebagai contoh, di Manila, Filipina, pada 27 Januari 1997 telah dilakukan simposium mengenai pemilu dengan tema Simposium Pemilu Asia Abad 21; Demokrasi di Asia Abad 21, yang dihadiri oleh para utusan DPR dari 20 negara Asia, pejabat senior pelaksana pemilu, pemimpin negara dan akademisi dari negara-negara Asia. Proses pemilu sebagai salah satu elemen penting demokrasi, dan secara khusus, membangun keterampilan administrasi pemilu serta jaringan (*network*) di tingkat wilayah sebagai cara terbaik membangun demokrasi, menjadi pembahasan penting. Simposium yang bertujuan membentuk forum untuk saling bertukar informasi tentang berbagai aspek penyelenggaraan pemilu, mulai dari soal registrasi, perhitungan suara hingga, dana kampanye, penyampaian pendapat publik berdasarkan hasil riset, teknologi modern terbaru

untuk administrasi pemilu hingga peran partai politik, sangat berarti bagi upaya pembaruan di negara-negara Asia. Sehingga, penyelenggaraan simposium di Filipina yang disponsori oleh *International Foundation for Election System* dan *Commission on Election (Comelec)*-nya Filipina itu, dengan perhatian yang baik dari Presiden Ramos, telah memberi angin segar terhadap harapan perbaikan kualitas demokrasi di negara-negara di anggota AIPO. langkah pertukaran pikiran, informasi dan gagasan mengenai pelaksanaan pemilu dan hal-hal lain yang berhubungan pemilu serta membangun jaringan komunikasi regional para regional para pejabat pemilu di sisi lain, didasari dapat menjadi sebuah cara yang terbaik untuk memperkuuh demokrasi.

Isu Hak Asasi Manusia.

Kawasan yang tidak luput dari dampak pasca-Perang Dingin adalah Asia Tenggara, atau Asia Pasifik dalam wilayah yang lebih luas, mengingat dalam era Perang Dingin kawasan itu jugalah yang menjadi kawasan perebutan pengaruh dan perseteruan. Suasana pasca-Perang Dingin semakin terasa di Asia Pasifik pada tahun 1996 lalu. Hal ini ditandai dengan bergesernya tema-tema lama seperti kolonialisme, neo-kolonialisme, imperialisme, komunisme, ideologi, persaingan militer, perlombaan senjata, rivalitas kekuatan nuklir dan sebagainya, ke tema-tema baru hubungan internasional, yang salah satunya adalah hak-hak asasi manusia. Isu hak asasi manusia menjadi menonjol dalam menentukan parameter hubungan antarnegara, apakah layak atau tidak suatu negara ditetapkan sebagai mitra dekat untuk menjalin kerja sama politik dan ekonomi. bahkan ia diangkat sebagai syarat yang perlu dipenuhi sebelum suatu negara dapat memperoleh bantuan ekonomi secara mutus. Penilaian standart yang bisa saja bersisi ganda atau subjektif bagi negara-negara di kawasan ini, baik sebagai anggota AIPO maupun mitra dialognya.

Hampir semua negara anggota AIPO pernah menghadapi kritikatas pelaksanaan hak asasi manusia di negaranya masing-masing. Indonesia, misalnya, menjadi sorotan dalam banyak hal, terkait dengan kebebasan pers, kebebasan berpolitik dan perlakuan terhadap tersangka suatu kasus kejahatan pidana atau politik. Yang banyak diperhatikan oleh dunia internasional dalam beberapa tahun terakhir adalah masalah Timor-Timur. Dalam menghadapi isu ini, sikap pemerintah negara-negara anggota AIPO cukup kompak, karena telah sepakat melihatnya sebagai masalah internal Indonesia yang selesai, sebagaimana pemerintah

Indonesia menilainya. Namun, itu bukan berarti tidak ada riak-riaknya dalam masyarakat di negara-negara tersebut, mengingat beberapa kelompok masyarakat non-pemerintah (*Non Goverment Organization atau NGO*) di situ, masih menilai masalah Timor-Timur perlu dibicarakan dalam suatu forum internasional seperti seminar dan konferensi yang melibatkan masyarakat antarnegara.

Upaya penyelenggaraan konferensi internasional Timor-Timur di Filipina dan Malaysia, walaupun berhasil digagalkan oleh pihak pemerintah masing-masing, telah merefleksikan sikap yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat di negara-negara anggota AIPO, mengenai masalah Timor-Timur. Walaupun eksistensinya tidak terlalu kentara, namun hal ini patut mendapat perhatian. Hasil keputusan pengadilan di Malaysia yang menjatuhkan hukuman denda, yang sebenarnya diancam hukuman penjara demonstrasi untuk menghentikan Konferensi Asia Pasifik II mengenai Timor-Timur (anti-APCET II) tahun 1996 di satu pihak, dan dibebaskannya para penyelenggara dan peserta konferensi APCET II di Pihak lain, menggambarkan ambivalensi sikap ini. Mencari pemecahan masalah dengan mencurigai NGO sebagai radikal dan tidak mendukung kebijakan pemerintah nasional masing-masing dalam masalah Timor-Timur, dan kemudian melarang eksistensi organisasi kegiatan mereka, tidaklah bijak. Sebagai masyarakat modern dan berpikir rasional, bagaimanapun kita harus percaya, perbedaan pendapat dapat diatasi melalui pembicaraan bersama atau dialog kontinu antara berbagai pihak yang berkepentingan.

Malaysia dan Singapura, yang secara ekonomis lebih maju dari Indonesia dan menjadi pelopor negara-negara industri baru di Asia Tenggara, juga tidak luput dari sasaran kritik hak asasi manusia. Figur pemimpin seperti Mahathir Muhammad dan Lee Kuan Yew dengan integritas yang tinggi, pernah terlihat dalam perdebatan serius dengan para pemimpin negara-negara maju tentang pelaksanaan hak asasi manusia di negara mereka masing-masing. Keteguhan sikap Mahathir dan pandangan Lee tentang aspek positif dan keunggulan kelebihan nilai-nilai Asia, yang telah berhasil membawa kedua negara tersebut pada kemakmuran dalam perdebatan serius, karena mereka dinilai mengabaikan faktor kebebasan individu atau warga negara sebagaimana yang diterapkan di Barat. Dengan mitra dialog AS dan Australia, Mahathir pernah terlibat perdebatan hangat yang berpengaruh terhadap kebijakan negara mereka.

Kritik Barat terhadap negara itu menjadi seimbang dengan kritik Mahathir terhadap Barat, yang pada mulanya dinilai tidak perduli dengan pelanggaran hak asasi manusia secara besar-besaran di Bosnia-Herzegovina.

Di samping itu, penolakan Mahathir dan Lee terhadap nilai-nilai kebebasan Barat yang ditandai dengan kemerosotan moral dan hancurnya institusi keluarga, cukup beralasan, dengan realitas yang terjadi di sana. Belakangan, menjelang dilaksanakannya pemilu Singapura pada 2 Januari 1997, perdebatan hangat antara Singapura dan AS berlangsung. Komentar pemerintah AS yang menilai pernyataan PM Goh Chok Tong dalam kampanye pemilu cenderung menyudutkan posisi partai oposisi, telah menimbulkan reaksi keras pemerintah Singapura. Sebaliknya, pemerintah AS merasa terkejut atas reaksi keras pemerintah Singapura, yang menuduh penilaian pemerintah AS sebagai sesuatu yang absurd dan merupakan bentuk intervensi, sehingga sejumlah pejabat Singapura telah meminta pemerintah AS untuk mencabut kritiknya. (*Republika*, 28 September 1997 : 14 dan *Kompas*, 28 Desember 1996 : 6 dan 2 Januari 1997 : 6)

Kalau diperhatikan, dalam kritik-kritik terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, AS juga tampak berupaya mempengaruhi sikap pemerintah negara-negara anggota AIPO, termasuk dalam hal penerimaan Myanmar sebagai anggota baru ASEAN, yang dianggap terlalu cepat, tanpa mensyaratkan masyarakat lebih dulu penyelesaian masalah politik dalam negerinya. Pemerintah Myanmar dianggap tidak menghargai eksistensi kaum oposisi yang dipimpin Aung San Suu Ki dan tuntutan mereka yang mendambakan penghormatan terhadap hak-hak politik dan transformasi politik di Myanmar. Beberapa kalangan yang berpandangan kritis, mereka yang dikategorikan sebagai kekuatan oposisi, di Malaysia, Thailand dan Filipina, ada yang mempertanyakan kesepakatan para pemimpin ASEAN untuk menerima masuknya Myanmar. Ini menjadi tantangan khusus bagi pemerintah ASEAN dan para pemimpin AIPO, dan perlu memperoleh perhatian pula, sekalipun bukan merupakan masalah krusial dalam organisasi dan di antara para negara anggota. Yang penting, sikap yang diambil dapat disepakati bersama secara definitif dan sudah menjadi keputusan yang tetap.

Transformasi atau reformasi politik di Myanmar dan negara-negara Kampuchea, Laos dan Vietnam, memang disadari sebagai masalah domestik mereka yang tidak bisa dicampuri karena telah menjadi sikap dasar ASEAN. Tetapi yang menggembirakan, lewat kemauan baik pemerintah negara-negara tersebut, perbaikan kondisi politik domestik tentu dapat dilakukan, sesuai dengan tuntutan aspirasi masyarakatnya. Paling tidak, contoh kecil yang masih terkait dengan masalah hak asasi manusia, yakni bantuan pemerintah Laos dan Vietnam dalam

program *Missing in Action* pemerintah AS, juga dapat menjadi contoh salah satu penghormatan dan perwujudan hak asasi manusia.

Perbedaan perspektif telah berkembang menjadi politik konflik nilai antara Barat dan Timur atau Eropa dan AS melawan Asia, yang jelas sangat subjektif sifatnya, sehingga tidak universalisme tidak lagi dipercaya. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik menilai kritik internasional (negara-negara maju) sebagai berlebihan, tanpa mau menoleh pada faktor sejarah dan budaya setiap negara, yang bisa sebenarnya dapat menjadi otokritik bagi mereka dan pengakuan atas adanya relativisme budaya. Bagi negara-negara yang selalu menjadi sasaran atau yang diidentifikasi sebagai Timur, kritik hak asasi manusia dari negara-negara maju dilihat sebagai upaya mengangkat isu lokal yang tidak relevan dan cenderung merupakan intervensi, dalam konteks kebutuhan negara-negara maju untuk mengangkatnya sebagai materi kebijakan luar negeri dan konsumsi kepentingan dan dukungan suara dalam pemilu domestik.

Di pihak lain, negara-negara maju yang dikategorikan sebagai Barat (Eropa dan AS) menilai, pengingkaran atas penghormatan hak asasi manusia di Asia adalah pengingkaran atas hak-hak individu yang universal oleh negara atau pemerintah, yang seharusnya diberikan kepada setiap warga negara. Sehingga, muncul kemudian catatan dan evaluasi pelanggaran hak asasi manusia atau tuduhan atas diterapkannya otoriterisme atau praktik-praktek antidemokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara, negara-negara yang terkena kritik secara reaktif berpendapat bahwa negara-negara maju menutup mata terhadap kebijakan kolonialisme dan imperialism mereka di masa lalu, yang sesungguhnya sangat penuh dengan pelanggaran atau tindakan tidak menghormati hak asasi manusia. Selain itu, mereka juga dianggap melupakan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di dalam negerinya sendiri, terhadap kaum minoritas, pendatang (imigran) dan kelompok marginal lainnya.

Perbedaan nilai tidak dapat dibiarkan terus-menerus, tanpa berusaha mencari titik temu atau solusinya. Karena jika demikian, konflik nilai akan menajam, tidak cukup hanya mencari sasaran di bidang lain dalam bentuk berbagai hambatan ke akses aktifitas internasional, ancaman boikot komoditas ekspor, embargo perdagangan dan sejenisnya, tetapi mungkin saja menjadi perseteruan terbuka berskala luas seperti perang akibat latar belakang agama dan perbedaan primordial lain di masa lalu, yang dampak-

nya belum tentu lebih kecil. Sebab, pada dasarnya konflik atas perbedaan pandangan dalam hal hak-hak asasi manusia, berlatarbelakang nilai-nilai primordialisme, baik agama, budaya, kesukuan maupun ras dan sebagainya. Dan pihak-pihak yang berkonflik pun telah mencakup antar-agama, antarkebudayaan dan antarkontinen, seperti yang diprediksikan oleh para futurolog dengan Barat versus Timur, Barat versus Islam dan Konfucianisme, Barat versus Asia atau semacamnya.

Di sinilah AIPO harus berperan mencari titik temu atau jalan keluar dari kecenderungan konflik nilai yang terus berkembang dan meningkat, melalui dialog-dialog multilateral dengan mitra dialog lintas kawasan, seperti AIPO-Uni Eropa, AIPO-AS, AIPO-Australia dan sebagainya. Menghasilkan visi bersama yang disepakati untuk *area of concern* dan wilayah keberlakuan (juridiksi) yang lebih luas, jelas lebih baik, daripada visi regional, yang seakan-akan tampak sebagai upaya kelompok dalam membela diri bersama menghadapi kritik kelompok luar. Deklarasi hak asasi manusia yang telah dihasilkan AIPO dalam *Study Committee on Human Rights* di Jakarta tahun 1993 yang kemudian disahkan dalam Bidang Umum AIPO pada konstruktif lagi, adalah konstruktif sifatnya. Tetapi, akan lebih konstruktif lagi, jika dapat dirasakan kontribusinya bagi masyarakat dalam lingkup yang lebih luas, di belahan lain. Diharapkan, Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dimiliki AIPO menjadi perwujudan dari cara pandangan berbagai pihak dan bukan merupakan refleksi dari keinginan untuk mempersempit pandangan dan mengisolasi diri, akibat merasa terancam oleh pandangan luar (asing) atau munculnya sikap xenophobia.

Pluralisme dan Integrasi Nasional

Jika di masa lalu, dalam masa pembebasan nasional atau upaya memerdekaan diri, tugas pertama yang penting dari negara-negara anggota AIPO adalah memantapkan persatuan nasional. Sebab, sebagaimana negara-negara pascakolonialisme yang baru merdeka dan tumbuh di kawasan lainnya, negara-negara yang baru tumbuh di kawasan Asia Tenggara adalah negara bangsa yang menjadi melting pot dari keberadaan ras, etnik, agama, bahasa, kebudayaan, nilai-nilai, pandangan hidup, kelompok-kelompok politik, golongan dan seterusnya. Negara-negara anggota AIPO, terutama Indonesia, Malaysia, dan Singapura, adalah negara-negara yang susunan masyarakatnya majemuk dan dilatarbelakangi berbagai bentuk

primordialisme. Integrasi nasional bagi mereka menjadi agenda penting yang harus dibenahi dan diwujudkan sebelum melangkah pada pembangunan ekonomi secara progresif. Tugas ini memakan waktu yang cukup panjang hingga akselerasi pembangunan bisa dilakukan.

Setelah pembangunan integrasi nasional secara relatif, dalam tempo 2 sampai 3 dasawarsa mulai dapat diwujudkan, pembangunan ekonomi dapat dipacu. Dan kini setelah pertumbuhan ekonomi yang sudah selesai dan dengan sendirinya dapat mengkonsentrasi diri pada pembangunan ekonomi semata. Karena, struktur masyarakat yang majemuk dan berbagai kepentingan yang eksis di sana menuntut pembagian hasil pembangunan yang adil dan merata. Sementara, paradigma pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi secara alami mengakibatkan ketertinggalan kelompok-kelompok masyarakat yang tidak siap, kalah bersaing dan yang tidak memiliki kapabilitas memadai. Sehingga, dalam era ekselerasi pembangunan ekonomi di negara-negara anggota AIPO itu sendiri, integrasi nasional merupakan masalah rawan yang tetap menuntut perhatian besar, jika pemerintah di negara-negara tersebut tidak ingin kehilangan momentum yang telah dibangun sebelumnya.

Kemajemukan dalam masyarakat di negara-negara anggota AIPO, termasuk sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasionalnya. sekaligus merupakan potensi konflik yang bisa berdampak disintegratif, jika dikelola dengan baik. Di negara-negara semaju manapun, baik AS dan Prancis yang sudah maju sejak lama, maupun Singapura atau Malaysia yang baru dikategorikan sebagai negara-negara industri baru, diversitas yang merefleksikan kekayaan nasionalnya, juga rawan terhadap konflik di era kemajuan dan industrialisasi. Kesenjangan ekonomi dan politik, yang terakhir disebut ini menyangkut alokasi sumber-sumber daya ekonomi dan kekuasaan yang timpang atau dominasi tokoh dan partai tertentu yang begitu lama, yang cenderung mengakarkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja. mendapat tantangan dari kelompok-kelompok lain yang tidak puas. Tidak heran, gejolak politik masih terjadi di negara-negara anggota AIPO, walaupun kondisi gejolaknya dan kemampuan sistem politik dalam menanganinya berbeda satu dengan lainnya.

Letusan politik di berbagai daerah di Indonesia yang lebih banyak diwarnai oleh kesenjangan ekonomi, latarbelakang ras, agama, dan etnik, lalu isu rasialisme dalam pembangunan ekonomi Malaysia dan yang berkembang

sengit dalam pemilu Singapura awal tahun 1997, merupakan contoh kasus yang aktual. Di sisi lain, dalam konteks yang lebih luas, pernah dihubung-hubungkan dengan isu separatisme, masalah Aceh Merdeka, GPK Irian Jaya, Timor-Timur di Indonesia, Moro di Filipina, minoritas muslim di Thailand, kelompok minoritas etnik Karen di Myanmar, kelompok minoritas di perbatasan Kampuchea dan Vietnam, kadang-kadang tidak hanya merepotkan negara bersangkutan, tetapi juga negara-negara tetangganya sesama anggota AIPO. Sebagai konsekuensinya, senantiasa dibutuhkan saling pemahaman bersama dalam menghadapi masalah-masalah domestik berskala internasional itu, walaupun pada dasarnya merupakan masalah domestik negara yang bersangkutan, serta cara penyelesaiannya tetap mengacu pada wewenang dan kepentingan nasional mereka masing-masing.

Keberhasilan mengikutsertakan partisipasi Indonesia dalam penyelesaian masalah Moro dan dalam penyelesaian antara faksi-faksi yang bertikai di Kampuchea, telah memberi kontribusi yang sangat signifikan bagi negara yang berkepentingan dan menjadi pengalaman dan cenderung menonjolkan peran negara tertentu, hasilnya secara positif telah dirasakan oleh negara-negara anggota AIPO. Di masa depan, dalam menghadapi masalah serupa, model penyelesaian melalui kerja sama semacam ini, dapat dilanjutkan. Dalam hal ini, AIPO tentu dapat berperan dalam memasukkan hasil yang telah dicapai tersebut sebagai catatan historis berharga yang dapat digunakan sebagai konsideran berbagai keputusan terkait, khususnya untuk mendorong terciptanya kawasan yang damai dan harmonis, yang nantinya akan memberikan impliksi yang besar bagi terpeliharanya stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Karena bagaimanapun, patut diperhatikan, konflik-konflik lokal di suatu negara dapat berpengaruh terhadap negara sekitarnya, secara langsung maupun tidak, dalam skala besar maupun kecil, sehingga dapat mengganggu hubungan antara negara sekawasan.

Perkembangan yang memprihatinkan memang masih terjadi di beberapa negara anggota AIPO. Ancaman bentrokan kembali antar faksi di Kampuchea, terutama yang diprovokasi oleh kelompok Khmer Merah, jelas merupakan hal yang kontraproduktif terhadap solusi damai yang telah dicapai sebelumnya dan merupakan faktor yang menyebabkan disintegrasi. Demikian pula, pertempuran di Filipina Selatan antara pasukan pemerintah Filipina dengan pejuang muslim MILF, faksi pembelot dari MNLF yang telah berdamai dengan pemerintah Ramos pada Oktober 1996, di ke-

pulauan Mindanao Selatan pada minggu ketiga Januari 1997 (pelita, 23 Januari 1997), tentu sangat tidak diharapkan bagi bangsa dan negara yang menginginkan perdamaian, Keamanan, stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Sehingga, syukurlah persetujuan gencatan senjata dapat dicapai, setelah pertempuran hebat yang menelan korban di kedua belah pihak. Dalam jangka panjang dan secara permanen diharapkan, MILF mau mengikuti jejak MNLF untuk mencapai kesepakatan dengan pemerintah Filipina dan bersama-sama berperan dalam pembangunan negeri terciptanya berbagai kemungkinan ke arah dimaksud.

"Good Governance" dan "Clean Government"

Negara-negara anggota AIPO yang terletak di kawasan Asia Tenggara, baik sebagai negara yang telah muncul sebagai negara-negara industri baru maupun masih dikategorikan sebagai negara berkembang, selalu mendapat sorotan negara-negara luar dalam soal kinerja birokrasi, efisiensi kerja, produktifitas dan pelaksanaan pemerintah yang bersih. Ini logis saja, sejalan dengan semakin meningkatnya minat investasi dan relokasi industri kekawasan tersebut. Namun secara apriori, sorotan tajam pihak luar, apakah itu lembaga pungutan yang dilakukan birokrasi, dicurigai sebagai sebuah upaya rutin menyudut posisi negara-negara anggota AIPO dalam suatu rating atau ranting penelitian subjektif, sehingga mereka mendapat kategori (label) negatif di dunia internasional. Padahal, kalau berbagai kritik yang terkait dengan tuntutan *good governance* dan *clean government* diperhatikan, dan kemudian dilakukan tindak lanjut memperbaikinya, hasilnya akan dirasakan sendiri. Bagi AIPO, masalah di atas sebenarnya juga merupakan tantangan besar di era perdagangan bebas yang menuntut efisiensi dan daya saing tinggi ini. Oleh karena itu, sebaiknya kritik-kritik terhadap korupsi dan tuntutan pemerintah bersih, tidak dibiarkan berkembang menjadi konflik nilai antara pandangan *good governance* dan *clean government* versi Barat dan versi Asia dalam hal mana tetap terdapat perbedaan pandangan tentang berbagai pungutan dan sumbangan dalam pengelolaan (manajemen) sebuah negara.

Negara anggota AIPO yang sering dijadikan model (contoh) untuk *good governance* dan *clean government*, dengan birokrasi yang memiliki citra baik sebagai pelayanan masyarakat dengan adalah kinerja tinggi adalah Singapura. Seandainya model ini bisa ditiru di negara-negara anggota

AIPO lainnya, jelas akan melenyapkan citra bahwa negara-negara yang sedang giat membangun dan bangkit kemampuan ekonominya, identik dengan praktek-praktek korupsi dan manipulasi yang subur. Memang diketahui, ini semua bukan berarti selama ini di negara-negara maju dengan industri yang telah lama mapan, praktek-praktek korupsi dan manipulasi tidak ada dan banyak. Hanya bedanya, di sana tindakan seperti itu benar-benar dapat dibuktikan sebagai bertentangan dengan hukum dan dapat diproses pengadilan secara tuntas, dengan sanksi hukum yang tegas. Oleh karena itu, perwujudan good governance dan clean government amat membutuhkan disiplin aparat negara yang tinggi, penegakan hukum dan nilai-nilai moral kondusif dalam masyarakat. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan aparat birokrasi yang berkinerja tinggi dalam melayani masyarakat, bukan lagi menjadi tuntutan negara-negara laur atau dunia internasional, tetapi seharusnya sudah dirasakan menjadi kebutuhan yang tidak terelakan bagi negara-negara anggota AIPO.

Berita dari Thailand (*Media Indonesia, 30 Desember 1996 : 17*) yang menyatakan bahwa korupsi di kalangan politisi dan pemerintahan, pada saat negeri itu melakukan pembaruan politik, merupakan kabar baik yang memberikan rasa optimis terhadap tekad memberantas korupsi, walaupun tidak ada yang dapat menjamin bahwa praktek pembeliansuara kemudian akan berhenti. Upaya mengajukan UUD baru di Thailand untuk mengatasi korupsi di kalangan elit politik dan penguasa, adalah sebuah langkah selektif untuk menghasilkan pimpinan yang bersih dan berbobot. Terhadap asusasi di Indonesia, yang pernah disorot kondisi korupsinya oleh majalah *Transparancy International* dan *Der Spiegel* Jerman, sangat diharapkan penegakan hukumnya secara tegas. Di Filipina, reformasi politik dan penegakan hukum yang kontinu pasca-Marcos telah memperbaiki kinerja ekonomi negeri itu yang sebelumnya banyak diwarnai penyelewengan. Sementara, di Vietnam, peringatan rejim duet Do Muoi dan Vo Van Kiet terhadap bahaya korupsi yang menggerogoti negara tersebut, dilukut dengan sanksi yang kian tegas terhadap penyogokan dan upaya mempererat pengaturan keuangan, antara lain dengan dilakukan di negara-negara yang kontrol politiknya lebih lemah.

Pengalaman empiris membuktikan, terdapat hubungan erat antara tingkat efisiensi dan disiplin kerja birokrasi pemerintah dengan yang tinggi di satu sisi dengan tingkat korupsi yang amat tinggi dan tidak tercemar dari perbuatan korupsi, para pemimpin politik dan birokrasi pemerintah dapat

menyebarluaskan disiplin sosial yang tinggi di masyarakat. Dengan demikian diharapkan, birokrasi pemerintah mampu menjadi wahana perubahan sosial (*agent of social change*), seperti mendorong peningkatan pelaksanaan program Keluarga Berencana, di samping melakukan tugas-tugas tradisional menjaga ketertiban umum, menangani pekerja publik, menarik pajak dan lain-lain. Keberhasilan memerangi korupsi dan menegakan disiplin tinggi, terletak pada komitmen politik yang tinggi dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Tetapi, tindakan ini seringkali tidak disukai banyak pihak yang telah diuntungkan. Sekalipun tidak mudah dan memakan waktu, secara logis sebenarnya negara-negara anggota AIPO dapat melakukan hal tersebut. Jelas, dalam era perdagangan bebas dan kompetisi ketat, *good governance* dan *clean government* harus diwujudkan. Dalam hal ini, yang dapat dilakukan AIPO sebagai organisasi antarparlemen negara-negara anggota ASEAN adalah menggalang kerja sama antara para anggotanya dalam menangani kejahatan dan pelaku korupsi dan manipulasi lintas negara atau yang melarikan diri ke negara lain yang sama-sama anggota. Kesepakatan yang dihasilkan AIPO, dapat menjadi mekanisme yang mengatur kerja sama dimaksud.

Isu Lingkungan Hidup

Seperti diketahui, kritik yang dihadapi negara-negara anggota AIPO sering kali berhubungan dengan masalah perlindungan lingkungan hidup. Masalah penebangan hutan tropis hujan (*tropical rain forest*) dan keanekaragaman hayati khususnya, telah diangkat sebagai isu global dan menjadi hambatan negara-negara kawasan Asia Tenggara di forum internasional dan akses pasar bagi komoditi eksportnya. Indonesia dan Malaysia, dua negara eksportir hasil hutan yang besar, sempat mengalami kampanye penentangan Eropa yang menilai telah berlangsungnya eksplorasi habis-habisan hutan tropis hujan di negara mereka masing-masing. Begitu gencarnya kampanye yang dilancarkan, sehingga delegasi-delegasi Indonesia, baik misi swasta maupun kenegaraan, termasuk delegasi keparlemenan, ke berbagai forum internasional, mendapat kritik tajam dari negara-negara Eropa. Bahkan kampanye sempat mengarah pada seruan boikot ekspor komoditas kayu kedua negara itu di pasar dunia.

Isu lingkungan hidup berkembang meluas ke berbagai dimensi ekonomi. Akibatnya, bukan hanya kelestarian dan lingkungan (konservasi) sumber komoditi ekspor dimaksud, diproduksi, tanpa membawa dampak

negatif terhadap lingkungan. Hal tersebut kemudian dijadikan persyaratan mutlak agar komoditi yang bersangkutan boleh masuk ke pasar dan diperjualbelikan kepada konsumen. Persyaratan ini dikenal secara populer sebagai ecolabelling, yang dalam setiap komoditas ekspor yang dikirim ke suatu negara dan diperjualbelikan di pasar, ditempelkan, seperti layaknya etiket yang kita kenal selama ini. Jadi, tanpa label "produk ini bersahabat dengan lingkungan," tidak ada akses dan sulit bagi suatu produk ekspor untuk bersaing dengan produk ekspor negara lain.

Bagi kebanyakan produsen, persyaratan *ecolabelling* tersebut memberi beban ongkos tambahan, yang berpengaruh terhadap harga jual akhir komoditi ekspor bersangkutan dan daya saingnya. Sehingga, keharusan untuk menyesuaikan diri dengan persyaratan lingkungan yang telah ditentukan negara-negara maju, telah dinilai oleh para produsen dan eksportir di negara asal, dapat mengurangi daya saing dan hilangnya pasar ekspor komoditi mereka. Padahal, dengan perhitungan seksama, dalam jangka panjang, biaya ekstra yang harus dikeluarkan produsen dan eksportir, tetap lebih murah ketimbang biaya kerusakan lingkungan yang akumulatif sifatnya, yang dihasilkan sejak proses pengambilan bahan dari sumbernya hingga proses pembuatan produk berjalan. Oleh karenanya, para investor yang berpikir jangka pendek, yang hanya memikirkan keuntungan mereka secara sepahak saja, sesungguhnya tidak dapat mengelak dari kepedulian mereka untuk bersama-sama mengelola lingkungan secara bertanggung jawab.

Dewasa ini dan di masa depan, perusahaan pengekspor tidak bisa lagi menghindari tuntutan *ecolabelling*, akibat tekanan luar negeri yang kuat dalam masalah lingkungan. Perusahaan tidak dapat mengelak dari masalah lingkungan seperti persyaratan *ecolabelling*, karena asebagaimana besar hasil produksinya di ekspor ke negara yang mempunyai kesadaran lingkungan tinggi. Kalau tidak mengikuti persyaratan, para pengusaha di negara-negara di kawasan Asia Tenggara dapat kehilangan pasar usahanya menjadi hancur. Sebaliknya, sorotan yang tajam terhadap masalah lingkungan hidup, justru berdampak positif. Limbah seperti potongan kayu dapat didaur ulang (*reuse*) untuk membuat *particle board* dan menghasilkan uang. Sebagai konsekuensinya, perusahaan-perusahaan tidak cukup lagi sekedar mendapat sertifikat ISO 9000, tetapi juga harus berusaha memperoleh sertifikat ISO 14000 yang terkait dengan manajemen lingkungan.

Bagi Indonesia, penghindaran terhadap persyaratan *ecolabelling* berarti ancaman terhadap sedikitnya 51% dari produk ekspor nonmigas andalan di pasar internasional. Dengan demikian, pengaruh produk-produk yang *ecosensitive*, yaitu kayu, garmen, tekstil, sepatu, pulp dan kertas, terhadap pasar komoditi ekspor Indonesia, jelas cukup besar. Sekitar 25% dari nilai dimaksud, kegiatan perdagangan dilakukan di pasar Eropa dan AS yang menghendaki *ecolabelling*. Diketahui, kelompok produk yang termasuk dalam program *ecolabelling* di Uni Eropa mencapai sedikitnya 24 jenis. Sehingga, di masa datang, pengaruh produk-produk ekosensitif terhadap ekspor Indonesia akan semakin besar. Jadi wajar saja, bila tidak responsif, produk-produk yang terkait dengan kebijakan lingkungan akan menghadapi ancaman penurunan ekspor. Sebagai konsekuensinya, akan sulit bagi Indonesia untuk menggenjot ekspor di tahun-tahun yang akan datang, tanpa penyesuaian dengan persyaratan yang diminta, jika ingin masih mengandalkan produk tersebut.

Ancaman secara khusus terhadap Indonesia sebagai salah satu negara anggota AIPO, memang tidak main-main. Berdasarkan data yang diperoleh, baru-baru ini terdapat sebuah perusahaan kayu Indonesia yang ditolak produknya di pasaran Eropa. Akibatnya, perusahaan itu menanggung kerugian lebih dari 1,2 juta dolar AS. Indonesia hingga saat ini memang belum masuk kelompok negara yang telah memiliki program *ecolabelling* yang standar. Padahal, dunia luar telah menuntut agar setiap produk peka lingkungan, dilabelisasi. Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang diharapkan akan berperan sebagai lembaga labelisasi independen, sampai saat ini belum terbentuk. Sementara, kelompok kerja di bidang *ecolabelling* yang belum menjadi lembaga, harus dapat membuktikan dulu bahwa dalam proses persiapan pembentukan LEI, tidak dilanggar prinsip-prinsip sertifikasi *ecolabelling* yang menekankan kemandirian (independen), keterbukaan dan kredibilitas, agar pelaksanaan sertifikasi memperoleh kepercayaan atau pengakuan konsumen di tingkat nasional dan internasional.

“Penyertifikatan” produk-produk dengan pemenuhan terhadap ketentuan yang ramah lingkungan, memang membutuhkan adanya pengawas atau standar internasional. Dengan demikian, *ecolabelling* tidak dapat disalahgunakan untuk kepentingan suatu atau kelompok negara, dan menjadi proteksi terselubung serta bertentangan dengan aturan perdagangan internasional. Dengan adanya badan pusat yang mengawasi pelaksanaan

ketentuan internasional itu, dijamin "isu hijau" dalam perdagangan tidak akan berkembang menjadi tindakan agresif sepikah (*agressive unilateralisme*). Malah, bisnis "hijau" membuka peluang baru menuju pasar yang ramah lingkungan, dengan biaya yang lebih rendah. Sehingga, merupakan suatu yang berguna bagi AIPO, bila dalam berbagai aktifitasnya dapat memberikan kontribusi pada masalah ini, terutama mengenai eksistensi badan pengawas pusat yang diperlukan dalam pengenaan standar internasional lingkungan dan mencegah *agressive unilateralism*.

Kawasan darat, laut dan udara negara-negara anggota AIPO tidak akan lepas dari ancaman pencemaran lingkungan atau polusi yang dampaknya bersifat lintasnegera. Isu soal pembuangan limbah tahunan di Pantai Bangka dan Pulau Batam, tentu perlu diselediki bersama, untuk menghilangkan kecurigaan. Kebakaran hutan di Kalimantan pernah menimbulkan keluhan dari Singapura yang terganggu jalur penerbangan dan pariwisatanya. Begitu pula kasus pencemaran minyak yang berasal dari kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka, yang sering terjadi dan agak menguatirkan. Di masa depan, konservasi lingkungan di kawasan Asia Tenggara menuntut perhatian dan tanggung jawab yang tinggi dari masing-masing negara anggota AIPO. Khusus terhadap Selat Malaka, jalur pelayaran internasional yang sangat sibuk, banyak dilalui kapal-kapal dagang dan perang asing, serta sering pula terjadi kecelakaan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, memerlukan pengaturan bersama yang harus diketahui pihak asing yang berkepentingan.

Adalah suatu hal yang menggembirakan, kesamaan pandangan atau sikap ASEAN telah berhasil dirumuskan, dengan telah disepakatinya Deklarasi AIPO di bidang Lingkungan dan Perlindungan Satwa Liar dalam pertemuan Komite Kerja dan Sidang Umum AIPO di Manila September 1994 dan Deklarasi tentang Sumber Daya Kelautan. Yang patut dicatat, *draft deklarasinya* disusun melalui *Study Committee on Environment and Protection of Wildlife* beberapa bulan sebelumnya dan juga *Study Committee on Marine Resources* pada tahun 1995 di Jakarta, ibukota negara dengan hutan tropis hujan yang luas dan merupakan aset dunia, serta keanekaragaman hayati terlengkap ketiga di dunia. Dengan demikian, selain lingkungan dan keanekaragaman hayati negara-negara anggota AIPO dapat terlindungi oleh sebuah deklarasi yang telah disepakati bersama, posisi tawar-menawar (*bargaining position*) negara-negara ASEAN dalam menghadapi negara-negara maju di fora internasional dan dalam

upaya memperoleh akses pasar, juga dapat menjadi lebih baik. Namun, pranata hukum lingkungan terus harus dibenahi dan ditingkatkan kompetensi dan efektifitasnya. Sebab, berbagai masalah serius lingkungan, seperti deforestasi, efek rumah kaca, emisi karbondioksida, penipisan lapisan ozon, pemanasan global, perubahan iklim global dan sebagainya, terkait dengan keterbelakangan, kepadatan penduduk, kesenjangan ekonomi, sumber daya alam dan lain-lain, menunggu pemecahan bersama.

Masalah Perburuhan

Masalah sensitif lain yang dihadapi oleh negara-negara anggota AIPO dan mendapat perhatian khusus dari negara-negara Barat pada pasca Perang Dingin adalah kondisi perburuhan. Kritik di sekitar ini diarahkan pada upah buruh murah, nasib pekerja wanita, cuti hamil, jumlah jam kerja, penggunaan tenaga kerja anak, standar keselamatan, fasilitas kerja, pemberian tunjangan kesejahteraan sosial seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, bonus dan sebagainya. Pada pokoknya, kondisi perburuhan secara umum mendapat perhatian serius negara-negara Barat yang kebanyakan merupakan negara-negara maju, dengan kondisi atau standar kehidupan kaum buruhnya, yang jauh sudah lebih maju.

Kritik-kritik tersebut dihubung-hubungkan pula dengan bagaimana kaum buruh di negara-negara anggota AIPO dapat menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka, melalui kebebasan dalam mendirikan serikat buruh yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan hak mogok. Karenanya, isu perburuhan ini identik dengan masalah hak asasi manusia yang banyak dipersoalkan Barat. Wilayah perdebatannya dapat meluas hingga ke fora perdagangan internasional atau dikenal sebagai klausma sosial, yang menjadi aturan sosial dari aktifitas perdagangan yang berlangsung (*social rules of the games*). Dalam pasar bilateral dan multilateral, dalam lingkup regional maupun global, klausma sosial tersebut sering diangkat dan menjadi penghambat akses pasar.

Dari beberapa negara anggota AIPO, Indonesia adalah yang paling sering dan banyak menghadapai kesulitan akses pasar akibat kritis atas penggunaan buruh murah dan di bawah usia kerja. Sedangkan Thailand sering disorot akibat eksloitasi anak-anak dalam dunia prostitusi atau sebagai pekerja dalam industri seks yang terdapat di negeri mereka. Di Filipina, dalam era pasca Marcos, keadaannya diketahui telah kian diperbaiki, terutama dengan

kebijakan pemerintah yang tidak permisif dengan paham kebebasan seksual. Tetapi, eksploitasi dan nasib tenaga kerja wanita yang berasal dari Indoensia dan Filipina yang bekerja di manca negara, turut menjadi keprihatinan negara-negara Barat.

Secara sepihak oleh negara-negara maju, terutama AS, praktik penggunaan buruh di bawah usia kerja (pekerja anak) di negara-negara berkembang, dewasa ini telah dikaitkan dengan akses ekspor komiditi yang dihasilkannya atau yang dikenal dengan istilah *Child Labour Labelling*. Komite Hak Asasi Anak-Anak PBB telah mengkategorikan upaya mempekerjakan anak-anak di bawah umur sebagai salah satu bentuk pelecehan hak anak, di samping penyiksaan, jual beli anak, terutama ke tempat-tempat prostitusi untuk dieksploitasi sebagai pekerja industri pelacuran, serta pemaksaan anak-anak untuk bekerja dengan bayaran rendah atau tanpa dibayar sedikitpun di berbagai proyek infranstruktur. Sementara, badan PBB untuk urusan pekerja (*International Labour Organization/ILO*), khususnya IPEC (*International Programme on the Elimination of Child Labour*), walaupun tidak menitikberatkan soal sanksi dagang atau hukum untuk mengatasi jumlah pekerja anak, dalam laporannya mencatat jumlah pekerja anak yang kian membengkak di negara berkembang, termasuk Indonesia dan Myanmar.

Dengan pendapatan per kapita yang dicapai saat ini sekitar 1.150 dolar AS, upah terendah Indonesia masih di bawah negara-negara tetangga ASEAN, Bahkan Filipina dengan pendapatan kapita hanya 1.035 dolar AS, memberikan upah terendah sebesar 6,6 dolar AS per hari atau sekitar Rp. 15.550. Sementara, upah menengah regional di ibukota Indonesia, Jakarta, saja baru mencapai Rp. 5.200 per hari. Untuk gambaran lebih rinci, di kawasan Asia Tenggara, tingkat upah kerja rata-rata per jam tercatat 0,91 dolar AS per jam. Di Malaysia, tingkat upah kerja rata-rata sebesar 1,30 dolar AS per jam, Thailand sebesar 1,10 dolar AS, Filipina sebesar 0,80 dolar AS dan Indonesia sebesar 0,22 dolar AS per jam. Pertanyaan yang muncul di balik angka-angka yang rendah itu adalah, apakah ini sebagai konsekuensi dari upaya menekan biaya produksi yang meningkat agar produk memiliki daya saing yang tinggi, ataukah sebagai implikasi atau kompensasi untuk menutup berbagai biaya pungutan liar yang tinggi, yang telah menyebabkan terjadinya distorsi dalam perhitungan dan manajemen.

Dalam menghadapai kritik negara-negara maju, sikap negara-negara

angota AIPO cukup kompak. Ini wajar saja, sebab isu perburuhan sebagaimana tercermin dalam setiap klausula sosial yang diintroduksi Barat dalam berbagai forum ekonomi internasional, dapat berdampak negatif secara langsung terhadap akses pasar, kinerja ekspor dan pemasukan devisa negara-negara yang terkena. Indonesia yang pernah menghadapi ancaman akses pasar di Eropa, bersama-sama Malaysia dan Singapura, secara terang-terangan menentang isu perburuhan dan perdagangan dikaitkan, dalam pembicaraan forum WTO (*World Trade Organization*) di Singapura, Desember 1996, untuk dirumuskan dalam deklarasi. Menurut Wakil Malaysia dalam forum itu, Rafidah Aziz, keunggulan komparatif dan kompetitif negara-negara dengan upah buruh ini, seharusnya tidak diletakkan pada porsinya. Dan upah buruh ini, seharusnya tidak dinilai dengan ukuran negara maju. Indonesia sendiri tidak menyetujui pengaitkan antara core labour standard dengan perdagangan. Bagi Indonesia, ILO (*International Labour Organization*) merupakan satu-satunya wadah yang tepat untuk membahas masalah perburuhan.

Core labour standard merupakan tema yang krusial, menyangkut hak asasi dan perlakuan buruk terhadap pekerja. Indonesia disorot, karena menurut telah ILO, Indonesia menempati peringkat tiga sebagai negara yang mempekerjakan anak di bawah umur. Seperti halnya Indonesia, negara-negara anggota AIPO yang menghadapi ancaman sama dalam masalah perburuhan, tentu harus siap dengan langkah responsif, mengingat isu perburuhan telah diajukan internasional. Walaupun proposal *labour standard* yang diajukan negara-negara maju dapat diterima, namun itu juga memerlukan persyaratan yang sesuai dengan kondisi realistik yang tercermin dalam kemampuan nasional negara dimaksud. Oleh sebab itu, dalam masalah perburuhan, menghadapai era perdagangan bebas yang sudah semakin dekat, pekerjaan rumah yang harus dilakukan negara-negara anggota AIPO cukup berat. Dan AIPO, sebagai asosiasi para wakil rakyat se-ASEAN, tentu perlu memperlihatkan komitmennya dengan para buruh/pekerja yang diwakilinya di kawasan Asia Tenggara ini, yang semakin mendapat sorotan Internasional belakangan, dengan membahas isu-isu perburuhan yang terus berkembang, di berbagai forumnya, termasuk forum dialog bilateral dengan negara mitranya, terutama dari Eropa dan AS, yang sering melancarkan kritik dalam masalah tersebut.

Perspektif Sosial

Keprihatinan masyarakat dunia yang cinta damai atas masalah kemanusiaan di tempat-tempat yang dilanda konflik primordial semakin besar. Sekjen PBB telah menyadari kelambatan PBB dalam mengambil tindakan, sehingga peran sepihak lebih dulu diambil oleh negara tertentu yang berkepentingan melalui misi-misi kemanusiaannya. Misi-misi kemanusiaan ini membawa dampak negatif pula dan tidak memberikan jaminan atas penyelesaian masalah secara tuntas. Sehingga, kita semua dihadapkan pada pertanyaan, mengapa berdiam diri saja, walaupun telah mengetahui peristiwa yang berlangsung secara jelas. Tampaknya, formulasi baru penyelesaian konflik pasca-Perang Dingin dibutuhkan untuk memperhatikan, termasuk yang berkaitan dengan kemiskinan dan keterbelakangan di negara-negara asal. Imigrasi dari negara-negara maju, bukan persoalan terbatas negara tertentu, tetapi masalah dunia. Karena, arus imigrasi kian menggejala dan global sifatnya. Sehingga, tanpa solusi bersama masyarakat dunia yang komprehensif, masalah imigrasi, yang pada dasarnya juga merupakan masalah kemanusian, sulit dibendung. Hal ini terkait dengan persoalan ekonomi yang akut di negara-negara asal.

Penyebaran virus HIV dan penyakit AIDS yang begitu cepat hingga ke kawasan Asia Tenggara, dan belum tertemukan terapi penyembuhannya, adalah masalah krusial yang harus memperoleh perhatian besar. Nilai-nilai ketimuran Asia yang agung mengenai keluarga dan perkawinan yang diketahui tidak luput dari kemerosotan, akibat sangat besar dan gencarnya pengaruh luar, sulit membendung penyebaran virus HIV dan penyakit AIDS. Sebagai konsekuensinya, pembatasan penyebaran virus HIV dan penyakit AIDS, tidak dapat lagi dilakukan dengan penyerahan diri sepenuhnya pada mitos keagungan nilai-nilai Timur namun perlu dilengkapi dengan penyadaran secara luas tentang eksistensi dan bahaya penyakit tersebut. Penerangan secara luas perlu dilakukan, tanpa bermaksud menyamakannya dengan melancarkan propaganda seks yang aman dan legal. Kesadaran perlunya kembali pada nilai-nilai ketimuran dan agama yang luhur dan benar, merupakan solusi preventif yang tepat sampai saat ini. Untuk ASEAN, kerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan penularan virus HIV dan penyakit AIDS, perlu diimplementasikan dengan kerja sama dalam bidang kesehatan masyarakat. Jadi, kerjasama dibidang kesehatan masyarakat tidak melulu mencakup keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, *infant mortality*,

meningkatkan gizi Balita dan seterusnya, seperti yang telah mendapat perhatian dengan baik selama ini.

Kerjasama pendidikan dan kebudayaan antara negara-negara anggota AIPO, harus dibuat lebih maju sejalan dengan kerjasama bidang-bidang lainnya. Hal ini akan sangat menguntungkan semua pihak, berkaitan dengan persoalan penyediaan tenaga kerja terampil dan berkeahlian, untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam pasar dunia. Karenanya, pemberian beasiswa melalui program pertukaran, lebih baik diorientasikan pada pengembangan bidang-bidang kejuruan, yang dapat menyiapkan tenaga-tenaga yang dibutuhkan, dalam tempo cepat. Pertukaran dan alih teknologi dapat dirintis dengan memulainya pada negara tetangga yang lebih maju dikawasan yang sama. Kebijakan semacam ini akan lebih mudah dijalankan, untuk meningkatkan kepercayaan antaranggota AIPO telah dipupuk selama ini, sejalan dengan usia AIPO yang terus bertambah. Oleh sebab itu, kerjasama kebudayaan yang telah berlangsung secara intensif yang berhasil meningkatkan saling pengeritan diantara negara-negara anggota AIPO selama ini, perlu diperluas dimensi-dimensi yang mendukung pendidikan yang responsif terhadap upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan ekonomi dan pencapaian kemakmuran bersama.

Isu sosial penting yang terkait dengan persiapan menghadapi masa depan yang penuh dengan kompetisi dalam era perdagangan bebas adalah penyiapan sumber daya manusia. Sebagaimana diberitakan oleh Laporan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari UNDP tahun 1995, *Human Development Index (HDI)* ASEAN tidak merata. Singapura menempati urutan ke-35 dunia dengan angka HDI sebesar 0,878, Brunei Darussalam pada urutan ke-41 dunia dengan angka HDI sebesar 0,868, Thailand pada urutan ke-59 dengan angka HDI sebesar 0,822, Filipina pada urutan ke-100 dengan angka HDI sebesar 0,677 dan Indonesia pada urutan ke-104 dengan angka HDI sebesar 0,637. Masalah yang mendesak dalam peningkatan Sumber Daya Manusia jelas dihadapai oleh Indonesia dan Filipina, yang tertinggal dari negara-negara anggota AIPO lainnya. Dalam kasus Indonesia, meskipun derajat kesehatan masyarakatnya meningkat tajam, namun mutu Sumber Daya Manusianya, tercatat paling rendah. Jadi inilah pekerjaan rumah penting, yang perlu dipikirkan oleh AIPO dalam program-program kerja samanya menjelang era perdagangan bebas. Jika diabaikan, tenaga kerja asing yang akan lebih dapat memanfaatkan berbagai

peluang yang tersedia, tanpa tersaingi. Tidak heran, bila kabinet baru Singapura di bawah PM Goh Chok Tong, telah mencangangkan prioritas utama di bidang pendidikan, sebagai respons atas semakin meningkatkan kompetisi tenaga kerja dan investasi di kawasan Asia Tenggara.

Sebagaimana diingat, dalam agenda liberalisasi perdagangan teknologi informasi yang ramai dibicarakan dalam pertemuan WTO di Singapura tahun 1996, faktor hambatan utama yang dihadapi adalah penyediaan tenaga kerja terampil. Padahal, untuk dapat mencapai 60 miliar dollar AS, negara-negara anggota ASEAN yang juga sebagai anggota AIPO, harus memiliki banyak tenaga trampil untuk menggantikan *unskilled labour*. Teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk keperluan latihan dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk merespon kebutuhan era informasi dan globalisasi, jika kehilangan peluang bisnis yang baik, kekurangan tenaga kerja trampil tersebut harus segera diisi. Jika Malaysia dan Singapura saja telah menyatakan siap menuju era informasi, bagaimana dengan anggota AIPO lainnya?

Secara realistik harus diakui, beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia, sejak dulu telah memikirkan pengembangan sumber daya manusia mereka, sehingga mereka tampak lebih siap. Sementara, beberapa negara lain, apalagi yang terbilang sebagai pendatang baru dalam AIPO, tengah sibuk baru sibuk-sibuknya memikirkan ini. Kurikulum pendidikan, besarnya perhatian dan anggaran nasional yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, amat menentukan keberhasilan kebijakan pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan belum mengarah pada kualitas untuk mengejar ketinggalan ilmu dan teknologi. Secara umum dijumpai, tenaga pendidik setingkat sekolah mencegah umum dan perguruan tinggi di Indonesia, masih ketinggalan dibandingkan dengan Malaysia dan Filipina. Filipina sendiri dalam kurikulum pendidikan nasionalnya telah memasukan muatan global, sedangkan Indonesia masih berbuat dengan muatan lokal.

Kesenjangan sistem pendidikan nasional dengan perkembangan global dan ineffisiensi dunia pendidikan adalah hal yang patut diperhatikan di negara-negara anggota AIPO. Kampuchea, Vietnam, Laos dan Myanmar yang baru mengintegrasikan diri dengan dunia internasional dan berusaha keluar dari isolasi global, menghadapi tantangan yang berat pula. Kebijakan sosial negara besar bekas penjajahnya yang masih memiliki ikatan historis dan

emosional, dapat membantu mereka mengadaptasi diri dengan sistem ekonomi baru dalam dunia bebas yang penuh persaingan. Namun harus diwaspadai di sisi lain, dalam hal mana mereka tidak mampu bersaing, sehingga hanya menjadi kawasan pinggiran dan bukan pusat pertumbuhan ekonomi dan orientasi dunia, seperti yang telah diprediksi menjelang abad ke-21. Kerjasama menyangkut pendidikan di berbagai bidang, diantara sesama negara AIPO, melalui keputusan-keputusan dalam komite study, komite kerja dan sidang umum, apakah itu dalam wujud riset maupun transfer dan pengembangan teknologi, sebagai konsekuensinya, perlu ditingkatkan. Sidang *Ad Hoc Committee on Tourism and Human Resources Development*, pada tahun 1996 di Bangkok dapat memberi kontribusi yang berarti bagi kebijakan sosial di negara-negara AIPO.

Secara lebih luas terkait dengan pengembangan sumber daya manusia tenaga kerja wanita, AIPO perlu mendukung upaya ASEAN bersama dengan ILO, UNDP dan CIDA dalam proyek jaringan ASEAN untuk melatih para wanita. Proyek untuk peningkatan kemampuan wanita di bidang nontradisional di jalankan dengan memberikan pelatihan yang bisa meningkatkan kemampuan wanita sehingga lebih mudah mengakses posisi dalam manajemen menengah sasaran stategisnya memang pem berdayaan wanita secara berkelanjutan, mengingat sampai saat ini masih banyak wanita diberbagai pelosok negara-negara anggota ASEAN/AIPO yang menghadapi kendala tradisional dan struktural, sehingga partisipasi mereka terbatas dalam aktifitas ekonomi yang bersifat nontradisional se mentara kontradiktif, peningkatan ekonomi yang menakjubkan selama 30 tahun terakhir dikawasan Asia Tenggara, ternyata belum banyak mengubah posisi kaum wanitanya. Karena itu, dukungan AIPO yang agenda-agenda kegiatannya, secara konseptual dan dalam wujud operasional yang tertuang dalam program aksi, dibutuhkan.

Masalah Tenaga Kerja Asing/Imigrasi

Hal yang pernah dan cenderung meningkat perkembangannya dewasa ini dinegara-negara anggota AIPO dalam hal-hal yang berhubungan dengan Imigrasi dan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berasal dari sesama negara anggota. Sebagaimana diberitakan (*Pelita*, 26 Desember 1996 : 1), dalam

perkembangan ketika buku ini ditulis sejumlah orang Indonesia telah melompat pagar beberapa kedutaan besar asing di Kuala Lumpur, Malaysia, dalam rangka meminta suaka politik. Jelasnya, sekitar 40 orang imigran gelap asal Indonesia mencoba meminta suaka politik di 8 Kedutaan Besar, yakni Amerika Serikat, Belanda, Swiss, Inggris, Italia, dan Prancis. Delapan (8) orang diantaranya mengaku berasal dari Maluku dan sempat melompati pagar Kedutaan Besar Prancis dan minta bertemu dengan Duta Besarnya. Kelompok sisanya, yang kebanyakan berasala dari Aceh terpencar di 5 Kedutaan Besar lain dan belum sempat melompati pagar yang umumnya terkunci, karena semua perwakilan negara-negara tersebut sedang libur Natal. Sementara, polisi Malaysia telah menahan 16 orang yang terlibat kejadian dimaksud, yang semuanya ternyata tidak memiliki dokumen imigrasi.

Isu deportasi terhadap sejumlah warga Aceh yang berada di Malaysia, diduga sebagai penyebab kejadian itu. Tetapi yang pasti, permasalahan yang sebenarnya harus diselidiki lebih mendalam adalah, apakah ada kaitan soal yang dimaksud dengan permasalahan di negara asal, yang berdimensi sosial dan politik, dan tidak sekedar bermotif ekonomi untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Sebelumnya, pada 25 Desember 1996, Wakil Menteri Dalam Negeri Malaysia, Megat Junit Megat Ayob, telah mengancam akan memulangkan 300 warga Aceh menerima suaka politik yang ditempatkan di kamp penampungan di Langkap, negara bagian Perak, jika mereka melakukan kegiatan politik.

Ancaman ini dikeluarkan sehubungan dengan kerusuhan yang pernah timbul di tempat penampungan yang sama pada tanggal 24 Desember 1996, yang ditimbulkan oleh 53 imigran gelap asal Aceh yang menolak di deportasi ketempat asalnya. Jika pemerintah Malaysia memperoleh kesimpulan bahwa para perusuh telah menggunakan Malaysia sebagai tempat melakukan kegiatan politik, pemerintah negara itu akan mengkaji kembali status para perusuh dan meminta PBB mencabut status mereka sebagai pengungsi. Diketahui, sejak 1989, ratusan warga Aceh melarikan diri ke Malaysia melalui Selat Malaka yang memisahkan Pulau Sumatra dan Malaysia, dan minta perlindungan politik dengan alasan untuk menghindari pertempuran dengan militer Indonesia dan Aceh Merdeka (*Media Indonesia* 26 Desember 1996 : 20 dan *Pelita*, 26 Desember 1996 : 11). PBB tidak mengakui sebagaian besar orang yang melarikan diri itu sebagai pengungsi dan Malaysia menyatakan akan membujuk mereka untuk pulang ketempat asal mereka.

Langkah pemulangan imigran gelap asal Aceh memang telah diprotes partai oposisi Malaysia. Dan Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokratik, Lim Kit Sang, telah memerintah pemerintah Malaysia agar mengangkat kasus imigran gelap ini pada Komisi Tinggi Pengungsi PBB (UNHCR) untuk menentukan status para imigran itu. Seperti dinyatakan Lim, sekalipun pemerintah Malaysia tidak ingin merusak hubungan Bilateralnya yang sangat baik dengan pemerintah Indonesia, tetapi mereka seharusnya tidak membutakan diri terhadap kekuatan kaum Aceh itu mengenai keamanan dan hidup mereka, bila mereka dipaksa pulang. (*Republika*, 27 Desember 1996 : 20).

Menanggapi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menyatakan keheranan dan menyayangkan tindakan warga negara Indonesia tersebut, mengingat mereka tidak sedang dikejar-kejar baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Namun, Indonesia menghargai AIPO perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap masalah imigran dan TKA, melalui pembahasan dalam sidang-sidang, komite studi dan berbagai dialog ataupun kunjungan. Sebab, sekitar 10.000 Pendatang Tanpa Ijin (PTI) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah ini berada di Malaysia, dan seperti sebelumnya, bisa saja dimasa depan kasus-kasus serupa, dan bahkan yang lebih serius lagi, dapat menjadi kerikil-kerikil kecil yang mengganggu hubungan Indonesia-Malaysia. Di antara mereka ada yang tercatat sebagai mantan orang hukuman, orang yang sakit, bekerja yang berusia lebih dari 40 tahun, dibawah 18 tahun, serta pekerja yang ditolak majikannya.

Seperti diinformasikan, sebanyak 1.400 warga negara Indonesia yang sudah selesai menjalani hukuman dipenjara-penjara Malaysia Barat akibat pelanggaran hukuman, pada 2 Januari 1997 dipulangkan ke Indonesia. Mereka sudah pasti tidak boleh masuk ke Malaysia, walaupun memiliki keterampilan dan dokumen untuk bekerja disana. (*Suara Pembaruan*, 26 Desember 1996 : 21). Sedangkan para pekerja pendatang (TKI) gelap yang ditangkap oleh petugas Malaysia, walaupun telah dikembalikan ke Indonesia, bila mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan di Malaysia dan mempunyai dokumen lengkap, masih dapat bekerja di Malaysia. Jumlah TKI gelap yang berada di penampungan imigrasi, pada Agustus 1996, mencapai 12. 000 orang. Jumlah itu berkangur setelah pemerintah Malaysia menyerukan perusahaan-perusahaan di Malaysia agar mengambil TKI secara resmi dari Indonesia dan menyeleksinya hanya untuk lowongan berketerampilan tinggi yang betul-betul dibutuhkan di Malaysia. Upaya ini jelas tidak bisa bersifat sepihak. Sehingga, semua pihak di Indonesia, termasuk

grup parlemen nasional Indonesia, harus turut berperan memberikan perhatian.

Menurut Duta Besar Indonesia di Malaysia, Jakob Dasto, sekarang ini sekitar 1.2 juta TKI bekerja secara resmi di Malaysia. Sedangkan yang gelap diestimasikan 400.000 orang. Namun, jumlah total warga negara Indonesia yang bermukim di Malaysia secara legal maupun tidak, antara 1,5-2 juta orang. Kasus pemulangan 2 mayat TKI asal Lombok lewat paket dari Malaysia yang sempat menghebohkan (*Kompas*, 25 Januari 1997 : 1 dan *Neraca* 24 Januari : 24) dan ditemukan seorang TKI yang dianiaya (*Republika*, 24 Januari 1997) mudah-mudahan menjadi peristiwa buruk terakhir yang mewarnai permasalahan tenaga kerja imigran kedua negara, yang diharapkan tidak akan berkembang serius menjadi hal yang dapat mengganggu hubungan antara tetangga terdekat dan bangsa serumpun. Sejalan dengan kian terbukanya akses dan mobilitas mereka yang bekerja antara-negara, permasalahan-permasalahan seperti diatas terbuka kemungkinannya tetap terjadi. Namun yang penting, pihak-pihak yang berkepentingan di kedua negara menyadari ini dan selalu mengantisipasi setiap permasalahan yang timbul dan menemukan pemecahan masalahnya. Inisiatif Keduatan Besar RI di Singapura melakukan tindakan kedalam dengan menertibkan sistem rekrutmen TKI, sangat baik, walaupun sebelumnya sempat pro dan kontra dari para agen TKI di Indonesia. Upaya-upaya yang berguna semacam ini perlu dicontoh oleh berbagai pihak yang berkepentingan di kedua negara.

Melihat segala permasalahan terkait dengan imigrasi dan TKA, memang seharusnya AIPO memberi perhatian. Sebab, masalah imigrasi dan TKA gelap akan terus terjadi dan tidak dapat dikatakan bersifat sepele, tetapi telah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan sosial di masa depan. Secara spesifik, ia dapat membawa masalah yang juga bersifat krusial bagi hubungan antarnegara anggota AIPO. Di masa lalu, masalah kematian Flor Contemplation, TKA asal Filipina yang bekerja di Singapura, sempat menegangkan bilateral hubungan Singapura-Filipina, hingga mencapai titik terendah dengan pemanggilan Duta Besar masing-masing dan situasi panas dalam masyarakat mereka, sekalipun masalah itu kemudian dapat diatasi melalui investigasi yang seksama dari berbagai pihak dan kedewasaan berpikir para pemimpin mereka.

Diketahui, TKA asal Filipina banyak yang bekerja di Singapura, Malaysia, Indonesia dan anggota AIPO lainnya, termasuk di sektor modern untuk mana-

jemen tingkat madya. Demikian pula dengan TKA asal Malaysia, Singapura dan Thailand, untuk tingkat madya keatas yang bekerja di negara-negara anggota AIPO. Dapat disimpulkan, TKA yang berasal dari anggota AIPO yang lebih rendah tingkat kemajuannya, pada umumnya bekerja di sektor-sektor publik dengan kecakapan lebih rendah dan mengandalkan tenaga manusia. Sementara TKA dari anggota AIPO dengan tingkat kemajuan yang lebih tinggi, banyak yang bekerja di tingkat manajemen madya ke atas, dalam sektor yang mengandalkan teknologi tinggi. Pengaturan dan kerja sama yang baik dalam bidang ini akan dapat saling memenuhi kebutuhan, mencegah dampak negatif yang muncul dan memberi nilai tambah bagi kedua belah pihak, dari perspektif ekonomi maupun teknologi.

Masalah Narkotika

Suatu hal yang perlu terus dikembangkan dalam kerja sama antara negara-negara anggota AIPO adalah penangan masalah perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang. Bahaya narkotika dan obat-obat terlarang perlu turut dibicarakan bersama-sama dengan masalah politik, keamanan dunia, ekonomi, perlindungan lingkungan dan pencegahan penyebaran virus HIV dan penyakit AIDS. Hal ini dapat dipahami, sebab negara-negara anggota AIPO menyadari besarnya dampak buruk perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang bagi mereka. Karenanya, kerja sama antarpemerintah dan parlemen di ASEAN dalam mencegah peredaran narkotika dan obat-obat terlarang yang melintasi kawasan Asia Tenggara, harus terus dilakukan dengan seksamaa, jika generasi muda mereka tidak ingin jadi sasaran.

Kebijakan pemerintah masing-masing yang konsekuensi dalam menangkap para penyalur maupun konsumen narkotika dan obat-obat terlarang, patut diikuti dengan kebijakan regional yang sejalan, melalui berbagai keputusan yang dapat dihasilkan dalam AIPO, agar lebih berhasil (efektif). Sebab diketahui, kawasan Asia Tenggara yang strategis sangat baik untuk dijadikan jalur lalu lintas internasional perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang. Kawasan Asia Tenggara, terutama Segitiga Emas, sejak lama telah menjadi lahan yang subur bagi pengembangan perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang. Dan, baik produksi maupun konsumsinya, cukup besar. Sehingga, kerja sama dalam masalah ini menuntut perhatian yang kontinu dan konsisten. Model kerja sama seperti yang mulai dikembangkan RRC, mitra dialog AIPO, dan Myanmar dengan membuka

ladang-ladang tebu di perbatasan kedua negara untuk menghentikan penanaman opium, merupakan kebijakan awal yang baik. Negara-negara yang terdekat seperti Thailand, Laos dan Vietnam, tentu dapat meniru kebijakan yang serupa.

Apa yang telah diperlihatkan oleh AIPO melalui *Study Committee on Narcotics, Drug Abuse and Rehabilitation*, tahun 1992 di Kuala Lumpur, yang telah menghasilkan *draft deklarasi* yang mengatur hal dimaksud, dan kemudian disahkan menjadi deklarasi yang bersifat tetap dan telah memiliki kepastian, dalam Sidang Umum AIPO pada tahun itu juga, adalah hal yang sangat positif. Namun, itu tidak berarti implementasi hukumnya kalah serius dengan niat awal telah memotivasi penyusunan deklarasi tersebut. Sehingga, kalau suatu saat dimasa depan tanpa adanya celah-celah (*loopholes*) yang masih memungkinkan terjadinya perdagangan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, termasuk upaya penanggulangannya, tentu terbuka kemungkinan untuk kembali meninjau deklarasi yang telah dihasilkan AIPO. Apalagi, jika bentuk-bentuk pelanggaran dan penyalahgunaannya semakin canggih, misalnya produksi narkotika dan obat-obat terlarang dalam kemasan baru, tentu dibutuhkan kebijakan yang responsif. Sehingga, pembuatan kebijakan hukum hanya akan bersifat pasif jika tidak diikuti dengan peningkatan kerja sama operasional, seperti bantuan interpol untuk menangkap penjahat narkotika dan obat-obat terlarang.

Menuju Perwujudan ASEAN-10

Penyusunan sebuah ketentuan hukum yang dapat berlaku secara umum di negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tidak akan sulit dilakukan, apakah itu dalam wujud kesepakatan umum, deklarasi atau peraturan hukum lainnya. Dampak positif dan keuntungannya bagi semua pihak, akan dirasakan, seperti halnya dalam lingkup yang lebih kecil yang pernah dicapai, antara lain dalam kasus pelarangan Darul Arqam, penentuan hisap, seminar Tim-tim di Manila, kritik hak asasi manusia, hutan tropis dan demokrasi. Langkah kasus mutakhir Darul Arqam telah dinilai oleh pihak luar sebagai wujud dari solidaritas yang telah tergoyahkan diantara sesama negara anggota ASEAN.

Kerja sama Antar Parlemen ASEAN (AIPO) harus terus ditingkatkan.

disamping kerja sama antara pihak pemerintahnya melalui ASEAN. Dengan melakukan klias balik perjalanan AIPO sejak didirikan 2 dasawarsa lalu, dapat dikatakan, banyak kemajuan yang telah dicapai sampai saat ini. Deklarasi demi deklarasi telah dan akan disusun, serta disahkan. Ini sebagai perwujudan kerjasama dan komitmen lebih luas pemerintah nasional masing-masing. Deklarasi tentang pandangan hak-hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan dan satwa liar, telah ada sejak beberapa tahun lalu. Memang dengan deklarasi-deklarasi semacam itu, kita dapat menghimpun sikap bersama yang lebih solid berlandaskan suatu peraturan hukum yang sah, untuk menghadapi kritik, kecaman dan retorika negara lain yang dapat menyudutkan kepentingan bersama negara-negara ASEAN dalam forum internasional, khususnya kepentingan realistik dibidang ekonomi, yang sangat vital bagi negara-negara ASEAN yang sedang membangun. tetapi, itu bukan berarti kritik-kritik terhadap masalah hak asasi manusia, lingkungan hidup, apalagi demokrasi yang sangat sensitif, semakin berkurang atau lenyap sama sekali.

Karena itu, di masa depan, AIPO harus tetap membuka diri bagi penyusunnya deklarasi-deklarasi lain yang mendeskripsikan sikap atas isu-isu tertentu yang rawan dan dinilai perlu, misalnya mengenai peranan wanita, perdagangan obat bius, dsb. Sekalipun penyusunan deklarasi tidak menjamin akan berkurangnya kritik dari negara-negara maju, namun diinformasikan dan kesalah pahaman minimal dapat di-counter, lewat sikap bersama yang telah terhimpun secara aspiratif kukuh dan legal, dalam rangka melindungi dan mempertahankan kepentingan bersama negara-negara anggota ASEAN dan AIPO. Sebagai tindak lanjutnya, kerjasama antar parlemen negara-negara anggota ASEAN (AIPO). perlu ditingkatkan untuk pembentukan sikap bersama lebih luas dan menyusun deklarasi lainnya. Semua itu diperlukan untuk menghadapi tantangan, gangguan dan hambatan, sekaligus harapan, yang datang dari luar maupun dalam, yang berpotensi merusak eksistensi ASEAN dan kepentingannya.

Memasuki usia ASEAN ke-30 dan AIPO ke-20, berbagai harapan dikedepankan bagi masa depan kawasan yang lebih baik. ASEAN yang pada awal berdirinya di tahun 1967 hanya beranggotakan 5 negara pada tahun 1997 ini, direncanakan akan beranggotakan 10 negara. Cita-cita "Asia Tenggara Bersatu" dan "ASEAN-10" akan berupaya direalisasi dengan diterimanya secara berturut-turut Brunei Darussalam pada tahun

1984, Vietnam sebagai anggota penuh pada tahun 1996 serta Kampuchea, Laos dan Myanmar pada tahun 1997 ini. AIPO tentu diharapkan dapat melangkah seiring dengan ASEAN dalam mewujudkan cita-cita *A United Southeast Asia* dan *The ASEAN Ten* sebagai sasaran jangka panjang yang terefleksi dalam Deklarasi ASEAN di Bangkok pada 8 Agustus 1967. Peran yang aktif dan kontribusi yang berarti ditunggu untuk menghadapi perkembangan kawasan yang kian dinamis dengan prospek yang menjanjikan bagi banyak pihak, termasuk negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Dewi Fortuna. *Indonesia In ASEAN : Foreign Policy and Regionalism.* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan 1994.
- ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Population.* Jakarta : ASEAN Secretariat, 1995.
- ASEAN Free Trade Area.* Jakarta : CSIS, 1992.
- ASEAN Inter-parliamentary Organization Report of the 11th Working Committee and General Assembly, Singapore 10-15 September 1990.* Singapore : AIPO, 1990.
- ASEAN Regional Programme on HIV/AIDS Prevention and Control 1995-2000.* Jakarta : ASEAN Secretariat, 1995.
- ASEAN Seminar on Integration of Women in Development.* Jakarta : 1975.
- ASEAN : Selayang pandang.* Jakarta : Sekretariat, Nasional ASEAN, 1995.
- ASEAN Workshop Report : Trade and the Environment Issues and Opportunities (Manila, Bangkok, Kuala Lumpur, and Jakarta 11-23 May 1995).* Jakarta : ASEAN Secretariat, 1995.
- Facts on ASEAN.* Malaysia Ministry of Foreign Affairs, 1997.
- Fifth ASEAN Summit : Meeting of the ASEAN Heads of Government, Bangkok 14-15 December 1995.* Jakarta : ASEAN Secretariat, 1996.
- Indorf, Hans H. *Impediments to Regionalism in Southeast Asia : Bilateral Constraints among ASEAN Member States.* Singapore : ISEAS, 1984.
- Keamanan ASEAN Mencari Identitas.* Jakarta : CSIS, 1993.
- Laporan Ringkas Sidang Kedua ASEAN Committee on Culture and Information.* Jakarta : Sekretariat Nasional ASEAN, 1980.
- Medium-term Programme for ASEAN Science and Technology Development 1996-2000.* ASEAN Secretariat, 1995.
- Perkembangan APEC dan Dampaknya terhadap ASEAN serta Upaya-upaya*

pemanfaatannya. Jakarta : Secretariat Nasional ASEAN, Deparlu, 1995.

Pidato Presiden pada pembukaan Konfrensi Kerja sama ASEAN-MEE II pada tanggal 26 Februari 1979 di Jakarta. Jakarta : Departemen Penerangan, 1979.

Sabir, M. *ASEAN : Harapan dan kenyataan.* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992.

The Asia-Pacific Security Dimension. Jakarta : CSIS, 1994.

Wanandi, Yusuf. *The ASEAN Political and Security Cooperation* Jakarta : CSIS, 1993.



Riwayat Hidup Singkat Penulis :

POLTAK PARTOGI NAINGGOLAN, dilahirkan di Jakarta, 26 Juni 1963, dan belum menikah; Menyelesaikan SLA di SMA Negeri 3 Jakarta pada tahun 1981 dan lulus Universitas Indonesia pada tahun 1986, dari Program Studi Perbandingan Politik, Jurusan Ilmu Politik (sekarang Ilmu Hubungan Internasional), Fakultas Ilmu-ilmu Sosial atau FIS (sekarang FISIP); Berminat mengamati perkembangan masalah-masalah ekonomi-politik dan hubungan internasional. Hingga sekarang bekerja sebagai peneliti di Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (P31-DPR RI).

Mengikuti berbagai kursus bahasa asing seperti Inggris, Prancis dan Jerman di dalam dan luar negeri; Mengorganisasi dan mengikuti berbagai seminar dan kegiatan keparlemenan di dalam negeri (DPR RI), serta magang, seminar dan konferensi internasional di Jerman, Swiss, Filipina, Selandia Baru dsb; Pernah melakukan penelitian sosial, ekonomi dan politik di Jawa Tengah, Jakarta dan Jerman (Tidak diterbitkan); Menulis makalah-makalah seminar lokal, analisa dan permintaan informasi untuk keperluan para anggota parlemen (DPR); Menulis artikel dan resensi buku di beberapa surat kabar dan majalah. Menulis buku Reformasi Struktur Ekonomi RRC pasca-Deng Xiaoping : *Kapitalisme dihidupkan kembali* (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1995) dan AIPO 20 years : ASEAN Inter-Parliamentary Organization (Jakarta, Setjen DPR RI, 1997).

HUMPRHEY WANGKE, lahir di Jember, 12 Mei 1961, Menyelesaikan Sarjana Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember 1987, Sejak tahun 1990 bekerja di Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR-RI. Saat ini penulis sedang menyelesaikan tesis pascasarjana-nya pada Fakultas Pascasarjana Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia.

SIMELA VICTOR MUHAMAD, lahir di Bandung (Jawa Barat), 26 Februari 1962. Menyelesaikan Sarjana Hubungan Internasional di FISIP Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tahun 1986. Sejak tahun 1990 bekerja di Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR-RI, sebagai peneliti bidang Hubungan Internasional. saat ini kuliah di Program Pasca-sarjana Universitas Indonesia, Program Studi Kajian Wilayah Amerika, dan sedang mengerjakan tesis.